



BUPATI KLATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2021**



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/ Sisa Kurang Perhitungan Anggaran, koreksi, dan Saldo Anggaran Lebih akhir.
3. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan Laporan Operasional, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 2.570.037.777.373,00
b. Belanja	Rp 1.820.638.422.785,00
c. Transfer	<u>Rp 672.768.458.757,00</u>
Surplus	Rp 76.630.895.831,00
d. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp 440.589.680.010,28
- Pengeluaran	<u>Rp 23.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 417.089.680.010,28
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp 493.720.575.841,28

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp37.553.143.988,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.532.484.633.385,00
 2. Realisasi Rp 2.570.037.777.373,00
 - Selisih (lebih) Rp 37.553.143.988,00
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp453.442.739.225,28 (empat ratus lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima koma dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 2.274.081.162.010,28
 2. Realisasi Rp 1.820.638.422.785,00
 - Selisih (kurang) Rp 453.442.739.225,28
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp2.794.056.943,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--|----|---------------------------|
| 1. Anggaran transfer setelah perubahan | Rp | 675.562.515.700,00 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>672.768.458.757,00</u> |
| Selisih (kurang) | Rp | 2.794.056.943,00 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp493.789.940.156,28 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus lima puluh enam koma dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|
| 1. Anggaran surplus/defisit | | |
| Setelah perubahan | Rp | (417.159.044.325,28) |
| 2. Realisasi | Rp | <u>76.630.895.831,00</u> |
| Selisih (lebih) | Rp | (493.789.940.156,28) |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp69.364.315,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------------|----|---------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan | | |
| Setelah perubahan | Rp | 440.659.044.325,28 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>440.589.680.010,28</u> |
| Selisih (lebih) | Rp | 69.364.315,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp00,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------------|----|--------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan | | |
| Setelah perubahan | Rp | 23.500.000.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>23.500.000.000,00</u> |
| Selisih | Rp | 00,00 |
- g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp69.364.315,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------|----|---------------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan Netto | | |
| Setelah perubahan | Rp | 417.159.044.325,28 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>417.089.680.010,28</u> |
| Selisih (lebih) | Rp | 69.364.315,00 |

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto	Rp	440.659.044.325,28
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	440.589.680.010,28
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	493.720.575.841,28
d. Koreksi Kesalahan Tahun sebelumnya	Rp	(69.364.315,00)
e. Saldo Anggaran Lebih	Rp	493.720.575.841,28

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	3.515.210.592.463,72
b. Jumlah Kewajiban	Rp	8.335.992.845,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp	3.506.874.599.618,72

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Laporan Operasional	Rp	2.326.297.103.222,70
b. Beban	Rp	2.246.773.802.142,32
c. Surplus /Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp	79.523.301.080,38
d. Kegiatan Non Operasional	Rp	7.306.291.836,00
e. Pos Luar Biasa	Rp	15.047.117.681,91
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp	57.169.891.562,47

Pasal 8

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2021	Rp	440.688.819.325,28
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	265.674.705.767,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(212.543.809.936,00)

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(52.014.315,00)
f. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp	493.767.700.841,28

Pasal 9

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	3.545.901.778.749,34
b. Jumlah Kewajiban	Rp	57.169.891.562,47
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(96.197.070.693,09)
d. Ekuitas Akhir	Rp	3.506.874.599.618,72

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : LRA terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklarifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : LPSAL;
 - c. Lampiran III : LO;
 - d. Lampiran IV : LPE;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : LAK;
 - g. Lampiran VII : CaLK;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 12

Penjabaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian dari

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

cap ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 25 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

cap ttd

JAJANG PRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 05
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5-123/2022)





PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Klaten, 10 Mei 2022



BUPATI KLATEN

SRI MULYANI

LAMPIRAN	URAIAN	HALAMAN	
		DARI	SAMPAI
1	2	3	
	PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2021		
	PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BUPATI		
	PETUNJUK HALAMAN		
A.	FORMAT LAMPIRAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN		
	APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN		
	PELAKSANAAN APBD		
Lampiran I	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TERDIRI ATAS;		
Lampiran I.1	RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021	1	19
Lampiran I.2	RINGKASAN APBD YANG DIKLARIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021	20	21
Lampiran I.3	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021	22	94
Lampiran I.4	REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021	94	153
Lampiran II	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	154	154
Lampiran III	LAPORAN OPERASIONAL	155	155
Lampiran IV	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	156	156
Lampiran V	NERACA	157	158
Lampiran VI	LAPORAN ARUS KAS	159	160
Lampiran VII	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	161	344
Lampiran VIII	DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH TA 2021	345	345
Lampiran IX	DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH TA 2021	346	346
Lampiran X	DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR TA 2021	347	347
Lampiran XI	DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH TA 2021	348	348
Lampiran XII	DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH	349	351
Lampiran XIII	DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP TA 2021	352	352
Lampiran XIV	DAFTAR REKAPITULASI KONTRUKSI DALAM Pengerjaan PER 31 DESEMBER 2021	353	353
Lampiran XV	DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2021	354	355
Lampiran XVI	DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH PER 31 DESEMBER 2021	356	356
Lampiran XVII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK PER 31 DESEMBER 2021	357	357
Lampiran XVIII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG PER 31 DESEMBER 2021	358	358



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.532.484.633.385,00	2.570.037.777.373,00	37.553.143.988,00	101,48
4 . 1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	128.119.523.733,00	138.486.026.027,00	10.366.502.294,00	108,09
4 . 1.01	Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 1.02	Kesehatan	125.305.249.733,00	135.085.791.273,00	9.780.541.540,00	107,81
4 . 1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	125.305.249.733,00	135.085.791.273,00	9.780.541.540,00	107,81
4 . 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	551.548.000,00	1.179.752.950,00	628.204.950,00	213,90
4 . 1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	551.548.000,00	1.179.752.950,00	628.204.950,00	213,90
4 . 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.250.000.000,00	2.219.869.804,00	(30.130.196,00)	98,66
4 . 1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.250.000.000,00	2.219.869.804,00	(30.130.196,00)	98,66
4 . 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	12.726.000,00	612.000,00	(12.114.000,00)	4,81
4 . 1.05 . 1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.726.000,00	612.000,00	(12.114.000,00)	4,81
4 . 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.760.176.000,00	9.136.272.053,00	1.376.096.053,00	117,73
4 . 2.11	Lingkungan Hidup	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00
4 . 2.11 . 2.11.02	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00
4 . 2.15	Perhubungan	1.958.176.000,00	1.809.147.810,00	(149.028.190,00)	92,39
4 . 2.15 . 2.15.01	DINAS PERHUBUNGAN	1.958.176.000,00	1.809.147.810,00	(149.028.190,00)	92,39
4 . 2.16	Komunikasi dan Informatika	900.000.000,00	1.079.634.000,00	179.634.000,00	119,96
4 . 2.16 . 2.16.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	900.000.000,00	1.079.634.000,00	179.634.000,00	119,96
4 . 2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.892.000.000,00	6.240.490.243,00	1.348.490.243,00	127,57
4 . 2.17 . 2.17.03	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	4.892.000.000,00	6.240.490.243,00	1.348.490.243,00	127,57
4 . 3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.139.696.000,00	1.435.516.559,00	295.820.559,00	125,96
4 . 3.26	Pariwisata	615.600.000,00	837.599.759,00	221.999.759,00	136,06
4 . 3.26 . 3.26.04	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	615.600.000,00	837.599.759,00	221.999.759,00	136,06
4 . 3.27	Pertanian	174.096.000,00	211.781.000,00	37.685.000,00	121,65

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4 . 3.27 . 3.27.01	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	174.096.000,00	211.781.000,00	37.685.000,00	121,65
4 . 3.31	Perindustrian	350.000.000,00	386.135.800,00	36.135.800,00	110,32
4 . 3.31 . 3.31.05	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	350.000.000,00	386.135.800,00	36.135.800,00	110,32
4 . 4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	6.282.559.182,00	6.116.497.864,00	(166.061.318,00)	97,36
4 . 4.01	Sekreatriat Daerah	6.282.559.182,00	6.116.497.864,00	(166.061.318,00)	97,36
4 . 4.01 . 4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	6.282.559.182,00	6.116.497.864,00	(166.061.318,00)	97,36
4 . 5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.389.182.678.470,00	2.414.863.464.870,00	25.680.786.400,00	101,07
4 . 5.02	Keuangan	2.389.182.678.470,00	2.414.863.464.870,00	25.680.786.400,00	101,07
4 . 5.02 . 5.02.04	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.389.182.678.470,00	2.414.863.464.870,00	25.680.786.400,00	101,07

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5	BELANJA DAERAH	2.949.643.677.710,28	2.493.406.881.542,00	(456.236.796.168,28)	84,53
5 . 1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.743.645.836.359,28	1.419.621.540.858,00	(324.024.295.501,28)	81,42
5 . 1.01	Pendidikan	946.970.029.997,00	792.977.728.171,00	(153.992.301.826,00)	83,74
5 . 1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	946.970.029.997,00	792.977.728.171,00	(153.992.301.826,00)	83,74
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1	BELANJA OPERASI	907.655.686.439,00	756.098.993.942,00	(151.556.692.497,00)	83,30
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	740.088.841.676,00	603.106.644.124,00	(136.982.197.552,00)	81,49
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.278.244.763,00	133.203.449.818,00	(11.074.794.945,00)	92,32
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	23.288.600.000,00	19.788.900.000,00	(3.499.700.000,00)	84,97
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2	BELANJA MODAL	39.314.343.558,00	36.878.734.229,00	(2.435.609.329,00)	93,80
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.499.317.574,00	26.692.738.029,00	(1.806.579.545,00)	93,66
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.594.529.700,00	5.404.146.900,00	(190.382.800,00)	96,60
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.220.496.284,00	4.781.849.300,00	(438.646.984,00)	91,60
5 . 1.02	Kesehatan	533.137.357.647,28	404.892.908.996,00	(128.244.448.651,28)	75,95
5 . 1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	533.137.357.647,28	404.892.908.996,00	(128.244.448.651,28)	75,95
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1	BELANJA OPERASI	483.355.727.038,28	375.485.876.014,00	(107.869.851.024,28)	77,68
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.357.530.746,00	10.058.849.107,00	(2.298.681.639,00)	81,40
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.772.086.754,00	91.822.507.346,00	(30.949.579.408,00)	74,79
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	500.000.000,00	479.976.000,00	(20.024.000,00)	96,00
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	145.561.898.447,00	134.966.489.907,00	(10.595.408.540,00)	92,72
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.317.152.196,00	27.427.998.365,00	(22.889.153.831,00)	54,51
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.748.715.526,00	11.199.209.410,00	(1.549.506.116,00)	87,85
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.098.343.369,28	99.530.845.879,00	(39.567.497.490,28)	71,55
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2	BELANJA MODAL	49.781.630.609,00	29.407.032.982,00	(20.374.597.627,00)	59,07
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.630.574.741,00	4.891.425.937,00	(2.739.148.804,00)	64,10
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.155.587.000,00	2.974.321.250,00	(4.181.265.750,00)	41,57
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.361.843.703,00	8.669.518.352,00	(6.692.325.351,00)	56,44
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	984.950.000,00	706.682.500,00	(278.267.500,00)	71,75
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.000.480,00	9.950.000,00	(55.050.480,00)	15,31
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	223.800.000,00	217.258.000,00	(6.542.000,00)	97,08
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.729.124.685,00	11.696.916.143,00	(6.032.208.542,00)	65,98
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.250.000,00	0,00	(173.250.000,00)	0,00
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	457.500.000,00	240.960.800,00	(216.539.200,00)	52,67
5 . 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	224.199.053.072,00	187.328.462.011,00	(36.870.591.061,00)	83,55
5 . 1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	165.064.380.518,00	132.226.925.703,00	(32.837.454.815,00)	80,11

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1	BELANJA OPERASI	89.385.672.068,00	79.051.801.542,00	(10.333.870.526,00)	88,44
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	26.801.597.000,00	24.289.618.312,00	(2.511.978.688,00)	90,63
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.584.075.068,00	54.762.183.230,00	(7.821.891.838,00)	87,50
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2	BELANJA MODAL	75.678.708.450,00	53.175.124.161,00	(22.503.584.289,00)	70,26
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.246.356.450,00	2.801.443.461,00	(444.912.989,00)	86,30
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.099.100.000,00	5.696.135.500,00	(402.964.500,00)	93,39
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.328.252.000,00	44.677.545.200,00	(21.650.706.800,00)	67,36
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
5 . 1.03 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	59.134.672.554,00	55.101.536.308,00	(4.033.136.246,00)	93,18
5 . 1.03 . 1.04.01 . 1	BELANJA OPERASI	16.375.568.554,00	14.207.446.308,00	(2.168.122.246,00)	86,76
5 . 1.03 . 1.04.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.375.568.554,00	14.207.446.308,00	(2.168.122.246,00)	86,76
5 . 1.03 . 1.04.01 . 2	BELANJA MODAL	42.759.104.000,00	40.894.090.000,00	(1.865.014.000,00)	95,64
5 . 1.03 . 1.04.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.03 . 1.04.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.989.104.000,00	40.216.870.000,00	(1.772.234.000,00)	95,78
5 . 1.03 . 1.04.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	770.000.000,00	677.220.000,00	(92.780.000,00)	87,95
5 . 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	14.181.857.000,00	11.411.008.052,00	(2.770.848.948,00)	80,46
5 . 1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.181.857.000,00	11.411.008.052,00	(2.770.848.948,00)	80,46
5 . 1.04 . 1.04.01 . 1	BELANJA OPERASI	13.164.488.500,00	10.443.737.725,00	(2.720.750.775,00)	79,33
5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.761.518.937,00	4.267.417.279,00	(494.101.658,00)	89,62
5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.402.969.563,00	6.176.320.446,00	(2.226.649.117,00)	73,50
5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2	BELANJA MODAL	1.017.368.500,00	967.270.327,00	(50.098.173,00)	95,08
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.014.548.500,00	964.934.402,00	(49.614.098,00)	95,11
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.820.000,00	2.335.925,00	(484.075,00)	82,83
5 . 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	14.539.511.085,00	13.284.886.378,00	(1.254.624.707,00)	91,37
5 . 1.05 . 1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.803.876.685,00	9.844.054.155,00	(959.822.530,00)	91,12
5 . 1.05 . 1.05.01 . 1	BELANJA OPERASI	10.418.777.685,00	9.475.174.155,00	(943.603.530,00)	90,94
5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.006.183.685,00	5.199.587.200,00	(806.596.485,00)	86,57
5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.412.594.000,00	4.275.586.955,00	(137.007.045,00)	96,90
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2	BELANJA MODAL	385.099.000,00	368.880.000,00	(16.219.000,00)	95,79
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	385.099.000,00	368.880.000,00	(16.219.000,00)	95,79
5 . 1.05 . 4.01.04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.735.634.400,00	3.440.832.223,00	(294.802.177,00)	92,11
5 . 1.05 . 4.01.04 . 1	BELANJA OPERASI	3.723.584.400,00	3.429.127.223,00	(294.457.177,00)	92,09
5 . 1.05 . 4.01.04 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.573.584.400,00	3.279.127.223,00	(294.457.177,00)	91,76

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 1.05 . 4.01.04 . 1 . 5	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
5 . 1.05 . 4.01.04 . 2	BELANJA MODAL	12.050.000,00	11.705.000,00	(345.000,00)	97,14
5 . 1.05 . 4.01.04 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.050.000,00	11.705.000,00	(345.000,00)	97,14
5 . 1.05 . 4.01.04 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.06	Sosial	10.618.027.558,00	9.726.547.250,00	(891.480.308,00)	91,60
5 . 1.06 . 1.06.06	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	10.618.027.558,00	9.726.547.250,00	(891.480.308,00)	91,60
5 . 1.06 . 1.06.06 . 1	BELANJA OPERASI	10.177.536.800,00	9.369.432.250,00	(808.104.550,00)	92,06
5 . 1.06 . 1.06.06 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.474.792.064,00	4.996.990.735,00	(477.801.329,00)	91,27
5 . 1.06 . 1.06.06 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.322.744.736,00	2.191.376.515,00	(131.368.221,00)	94,34
5 . 1.06 . 1.06.06 . 1 . 5	Belanja Hibah	665.000.000,00	665.000.000,00	0,00	100,00
5 . 1.06 . 1.06.06 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	1.715.000.000,00	1.516.065.000,00	(198.935.000,00)	88,40
5 . 1.06 . 1.06.06 . 2	BELANJA MODAL	440.490.758,00	357.115.000,00	(83.375.758,00)	81,07
5 . 1.06 . 1.06.06 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	440.490.758,00	357.115.000,00	(83.375.758,00)	81,07
5 . 2	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	114.405.502.059,00	96.770.263.346,00	(17.635.238.713,00)	84,59
5 . 2.07	Perindustrian	1.756.953.200,00	1.301.029.100,00	(455.924.100,00)	74,05
5 . 2.07 . 3.31.05	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.756.953.200,00	1.301.029.100,00	(455.924.100,00)	74,05
5 . 2.07 . 3.31.05 . 1	BELANJA OPERASI	1.756.953.200,00	1.301.029.100,00	(455.924.100,00)	74,05
5 . 2.07 . 3.31.05 . 1 . 1	Belanja Pegawai	37.930.000,00	35.910.000,00	(2.020.000,00)	94,67
5 . 2.07 . 3.31.05 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.624.023.200,00	1.170.119.100,00	(453.904.100,00)	72,05
5 . 2.07 . 3.31.05 . 1 . 5	Belanja Hibah	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.08	Sosial	681.903.000,00	328.433.438,00	(353.469.562,00)	48,16
5 . 2.08 . 1.06.06	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	681.903.000,00	328.433.438,00	(353.469.562,00)	48,16
5 . 2.08 . 1.06.06 . 1	BELANJA OPERASI	681.903.000,00	328.433.438,00	(353.469.562,00)	48,16
5 . 2.08 . 1.06.06 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00
5 . 2.08 . 1.06.06 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	588.873.000,00	235.403.438,00	(353.469.562,00)	39,98
5 . 2.08 . 1.06.06 . 1 . 5	Belanja Hibah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.09	Pertanian	1.494.951.136,00	1.213.010.150,00	(281.940.986,00)	81,14
5 . 2.09 . 3.27.01	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1.494.951.136,00	1.213.010.150,00	(281.940.986,00)	81,14
5 . 2.09 . 3.27.01 . 1	BELANJA OPERASI	1.483.102.136,00	1.201.161.150,00	(281.940.986,00)	80,99
5 . 2.09 . 3.27.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.375.102.136,00	1.201.161.150,00	(173.940.986,00)	87,35
5 . 2.09 . 3.27.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	108.000.000,00	0,00	(108.000.000,00)	0,00
5 . 2.09 . 3.27.01 . 2	BELANJA MODAL	11.849.000,00	11.849.000,00	0,00	100,00
5 . 2.09 . 3.27.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.849.000,00	11.849.000,00	0,00	100,00
5 . 2.11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.328.247.234,00	19.259.241.474,00	(2.069.005.760,00)	90,30

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.11 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.765.000.000,00	7.760.834.803,00	(1.004.165.197,00)	88,54
5 . 2.11 . 1.03.01 . 1	BELANJA OPERASI	3.778.717.712,00	3.121.010.703,00	(657.707.009,00)	82,59
5 . 2.11 . 1.03.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.760.000,00	0,00	(4.760.000,00)	0,00
5 . 2.11 . 1.03.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.773.957.712,00	3.121.010.703,00	(652.947.009,00)	82,70
5 . 2.11 . 1.03.01 . 2	BELANJA MODAL	4.986.282.288,00	4.639.824.100,00	(346.458.188,00)	93,05
5 . 2.11 . 1.03.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.622.072.488,00	1.416.848.000,00	(205.224.488,00)	87,35
5 . 2.11 . 1.03.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.364.209.800,00	3.222.976.100,00	(141.233.700,00)	95,80
5 . 2.11 . 1.03.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.11 . 2.11.02	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	12.563.247.234,00	11.498.406.671,00	(1.064.840.563,00)	91,52
5 . 2.11 . 2.11.02 . 1	BELANJA OPERASI	9.887.349.934,00	8.961.362.421,00	(925.987.513,00)	90,63
5 . 2.11 . 2.11.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.995.495.234,00	2.597.908.797,00	(397.586.437,00)	86,73
5 . 2.11 . 2.11.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.641.854.700,00	6.113.453.624,00	(528.401.076,00)	92,04
5 . 2.11 . 2.11.02 . 1 . 5	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.11 . 2.11.02 . 2	BELANJA MODAL	2.675.897.300,00	2.537.044.250,00	(138.853.050,00)	94,81
5 . 2.11 . 2.11.02 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	674.847.300,00	593.823.000,00	(81.024.300,00)	87,99
5 . 2.11 . 2.11.02 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.630.900.000,00	1.587.195.000,00	(43.705.000,00)	97,32
5 . 2.11 . 2.11.02 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	204.750.000,00	199.100.000,00	(5.650.000,00)	97,24
5 . 2.11 . 2.11.02 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	165.400.000,00	156.926.250,00	(8.473.750,00)	94,88
5 . 2.12	Administrasi Kependudukan dan Capil	9.758.508.601,00	8.132.174.010,00	(1.626.334.591,00)	83,33
5 . 2.12 . 2.12.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.758.508.601,00	8.132.174.010,00	(1.626.334.591,00)	83,33
5 . 2.12 . 2.12.01 . 1	BELANJA OPERASI	8.776.437.201,00	7.247.785.010,00	(1.528.652.191,00)	82,58
5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.469.048.951,00	3.406.707.858,00	(1.062.341.093,00)	76,23
5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.307.388.250,00	3.841.077.152,00	(466.311.098,00)	89,17
5 . 2.12 . 2.12.01 . 2	BELANJA MODAL	982.071.400,00	884.389.000,00	(97.682.400,00)	90,05
5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	982.071.400,00	884.389.000,00	(97.682.400,00)	90,05
5 . 2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.884.558.755,00	7.813.707.249,00	(1.070.851.506,00)	87,95
5 . 2.13 . 2.13.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.884.558.755,00	7.813.707.249,00	(1.070.851.506,00)	87,95
5 . 2.13 . 2.13.01 . 1	BELANJA OPERASI	8.884.558.755,00	7.813.707.249,00	(1.070.851.506,00)	87,95
5 . 2.13 . 2.13.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.996.838.448,00	3.470.909.898,00	(525.928.550,00)	86,84
5 . 2.13 . 2.13.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.887.720.307,00	4.342.797.351,00	(544.922.956,00)	88,85
5 . 2.14	Sosial	9.605.840.506,00	4.636.665.307,00	(4.969.175.199,00)	48,27
5 . 2.14 . 1.06.06	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	9.605.840.506,00	4.636.665.307,00	(4.969.175.199,00)	48,27
5 . 2.14 . 1.06.06 . 1	BELANJA OPERASI	8.542.369.506,00	3.604.317.743,00	(4.938.051.763,00)	42,19
5 . 2.14 . 1.06.06 . 1 . 1	Belanja Pegawai	30.920.000,00	7.050.000,00	(23.870.000,00)	22,80

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.14 . 1.06.06 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.511.449.506,00	3.597.267.743,00	(4.914.181.763,00)	42,26
5 . 2.14 . 1.06.06 . 2	BELANJA MODAL	1.063.471.000,00	1.032.347.564,00	(31.123.436,00)	97,07
5 . 2.14 . 1.06.06 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	293.187.418,00	289.540.000,00	(3.647.418,00)	98,76
5 . 2.14 . 1.06.06 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	770.283.582,00	742.807.564,00	(27.476.018,00)	96,43
5 . 2.15	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.180.384.037,00	12.891.916.071,00	(1.288.467.966,00)	90,91
5 . 2.15 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.920.000.000,00	4.493.353.682,00	(426.646.318,00)	91,33
5 . 2.15 . 1.03.01 . 1	BELANJA OPERASI	1.451.275.000,00	1.118.949.882,00	(332.325.118,00)	77,10
5 . 2.15 . 1.03.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.720.000,00	0,00	(2.720.000,00)	0,00
5 . 2.15 . 1.03.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.448.555.000,00	1.118.949.882,00	(329.605.118,00)	77,25
5 . 2.15 . 1.03.01 . 2	BELANJA MODAL	3.468.725.000,00	3.374.403.800,00	(94.321.200,00)	97,28
5 . 2.15 . 1.03.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.15 . 1.03.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.998.725.000,00	2.904.403.800,00	(94.321.200,00)	96,85
5 . 2.15 . 2.15.01	DINAS PERHUBUNGAN	9.260.384.037,00	8.398.562.389,00	(861.821.648,00)	90,69
5 . 2.15 . 2.15.01 . 1	BELANJA OPERASI	8.941.795.037,00	8.088.936.389,00	(852.858.648,00)	90,46
5 . 2.15 . 2.15.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.372.714.037,00	4.750.020.856,00	(622.693.181,00)	88,41
5 . 2.15 . 2.15.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.569.081.000,00	3.338.915.533,00	(230.165.467,00)	93,55
5 . 2.15 . 2.15.01 . 2	BELANJA MODAL	318.589.000,00	309.626.000,00	(8.963.000,00)	97,19
5 . 2.15 . 2.15.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.589.000,00	117.935.000,00	(7.654.000,00)	93,91
5 . 2.15 . 2.15.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	193.000.000,00	191.691.000,00	(1.309.000,00)	99,32
5 . 2.16	Komunikasi dan Informatika	13.318.519.053,00	12.429.574.801,00	(888.944.252,00)	93,33
5 . 2.16 . 2.16.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.318.519.053,00	12.429.574.801,00	(888.944.252,00)	93,33
5 . 2.16 . 2.16.01 . 1	BELANJA OPERASI	11.926.029.353,00	11.106.595.028,00	(819.434.325,00)	93,13
5 . 2.16 . 2.16.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.276.618.053,00	2.949.774.608,00	(326.843.445,00)	90,02
5 . 2.16 . 2.16.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.399.411.300,00	7.906.820.420,00	(492.590.880,00)	94,14
5 . 2.16 . 2.16.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.16 . 2.16.01 . 2	BELANJA MODAL	1.392.489.700,00	1.322.979.773,00	(69.509.927,00)	95,01
5 . 2.16 . 2.16.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.392.489.700,00	1.322.979.773,00	(69.509.927,00)	95,01
5 . 2.16 . 2.16.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.727.983.575,00	18.449.076.094,00	(3.278.907.481,00)	84,91
5 . 2.17 . 2.17.03	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	21.727.983.575,00	18.449.076.094,00	(3.278.907.481,00)	84,91
5 . 2.17 . 2.17.03 . 1	BELANJA OPERASI	19.987.533.575,00	16.715.137.594,00	(3.272.395.981,00)	83,63
5 . 2.17 . 2.17.03 . 1 . 1	Belanja Pegawai	14.646.822.575,00	12.083.224.341,00	(2.563.598.234,00)	82,50
5 . 2.17 . 2.17.03 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.975.711.000,00	4.531.913.253,00	(443.797.747,00)	91,08
5 . 2.17 . 2.17.03 . 1 . 5	Belanja Hibah	365.000.000,00	100.000.000,00	(265.000.000,00)	27,40

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.17 . 2.17.03 . 2	BELANJA MODAL	1.740.450.000,00	1.733.938.500,00	(6.511.500,00)	99,63
5 . 2.17 . 2.17.03 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.17 . 2.17.03 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.740.450.000,00	1.733.938.500,00	(6.511.500,00)	99,63
5 . 2.17 . 2.17.03 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.18	Penanaman Modal	4.572.420.962,00	3.758.707.682,00	(813.713.280,00)	82,20
5 . 2.18 . 2.18.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.572.420.962,00	3.758.707.682,00	(813.713.280,00)	82,20
5 . 2.18 . 2.18.01 . 1	BELANJA OPERASI	4.572.420.962,00	3.758.707.682,00	(813.713.280,00)	82,20
5 . 2.18 . 2.18.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.941.396.962,00	2.444.094.107,00	(497.302.855,00)	83,09
5 . 2.18 . 2.18.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.631.024.000,00	1.314.613.575,00	(316.410.425,00)	80,60
5 . 2.19	Pariwisata	1.599.678.000,00	1.580.983.304,00	(18.694.696,00)	98,83
5 . 2.19 . 3.26.04	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.599.678.000,00	1.580.983.304,00	(18.694.696,00)	98,83
5 . 2.19 . 3.26.04 . 1	BELANJA OPERASI	1.599.678.000,00	1.580.983.304,00	(18.694.696,00)	98,83
5 . 2.19 . 3.26.04 . 1 . 1	Belanja Pegawai	23.970.000,00	22.170.000,00	(1.800.000,00)	92,49
5 . 2.19 . 3.26.04 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	375.708.000,00	358.813.304,00	(16.894.696,00)	95,50
5 . 2.19 . 3.26.04 . 1 . 5	Belanja Hibah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.20	Komunikasi dan Informatika	57.996.000,00	50.266.000,00	(7.730.000,00)	86,67
5 . 2.20 . 2.16.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	57.996.000,00	50.266.000,00	(7.730.000,00)	86,67
5 . 2.20 . 2.16.01 . 1	BELANJA OPERASI	57.996.000,00	50.266.000,00	(7.730.000,00)	86,67
5 . 2.20 . 2.16.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.996.000,00	50.266.000,00	(7.730.000,00)	86,67
5 . 2.21	Komunikasi dan Informatika	88.040.000,00	86.395.650,00	(1.644.350,00)	98,13
5 . 2.21 . 2.16.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	88.040.000,00	86.395.650,00	(1.644.350,00)	98,13
5 . 2.21 . 2.16.01 . 1	BELANJA OPERASI	88.040.000,00	86.395.650,00	(1.644.350,00)	98,13
5 . 2.21 . 2.16.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.040.000,00	86.395.650,00	(1.644.350,00)	98,13
5 . 2.22	Pariwisata	1.025.898.000,00	1.010.154.589,00	(15.743.411,00)	98,47
5 . 2.22 . 3.26.04	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.025.898.000,00	1.010.154.589,00	(15.743.411,00)	98,47
5 . 2.22 . 3.26.04 . 1	BELANJA OPERASI	1.007.478.848,00	991.735.589,00	(15.743.259,00)	98,44
5 . 2.22 . 3.26.04 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	100,00
5 . 2.22 . 3.26.04 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	498.998.848,00	483.255.589,00	(15.743.259,00)	96,85
5 . 2.22 . 3.26.04 . 1 . 5	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.22 . 3.26.04 . 2	BELANJA MODAL	18.419.152,00	18.419.000,00	(152,00)	100,00
5 . 2.22 . 3.26.04 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.419.152,00	17.419.000,00	(152,00)	100,00
5 . 2.22 . 3.26.04 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.23	Perpustakaan	3.750.385.500,00	3.283.261.101,00	(467.124.399,00)	87,54

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.23 . 2.23.02	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	3.750.385.500,00	3.283.261.101,00	(467.124.399,00)	87,54
5 . 2.23 . 2.23.02 . 1	BELANJA OPERASI	3.739.885.500,00	3.274.416.001,00	(465.469.499,00)	87,55
5 . 2.23 . 2.23.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.590.115.740,00	3.130.044.048,00	(460.071.692,00)	87,19
5 . 2.23 . 2.23.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.769.760,00	144.371.953,00	(5.397.807,00)	96,40
5 . 2.23 . 2.23.02 . 2	BELANJA MODAL	10.500.000,00	8.845.100,00	(1.654.900,00)	84,24
5 . 2.23 . 2.23.02 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.500.000,00	8.845.100,00	(1.654.900,00)	84,24
5 . 2.24	Perpustakaan	573.234.500,00	545.667.326,00	(27.567.174,00)	95,19
5 . 2.24 . 2.23.02	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	573.234.500,00	545.667.326,00	(27.567.174,00)	95,19
5 . 2.24 . 2.23.02 . 1	BELANJA OPERASI	573.234.500,00	545.667.326,00	(27.567.174,00)	95,19
5 . 2.24 . 2.23.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00
5 . 2.24 . 2.23.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	570.204.500,00	542.637.326,00	(27.567.174,00)	95,17
5 . 3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	67.622.905.319,00	57.619.575.712,00	(10.003.329.607,00)	85,21
5 . 3.25	Pertanian	1.611.530.000,00	1.487.477.734,00	(124.052.266,00)	92,30
5 . 3.25 . 3.27.01	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1.611.530.000,00	1.487.477.734,00	(124.052.266,00)	92,30
5 . 3.25 . 3.27.01 . 1	BELANJA OPERASI	1.610.173.000,00	1.486.152.734,00	(124.020.266,00)	92,30
5 . 3.25 . 3.27.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	362.771.000,00	310.952.100,00	(51.818.900,00)	85,72
5 . 3.25 . 3.27.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	1.247.402.000,00	1.175.200.634,00	(72.201.366,00)	94,21
5 . 3.25 . 3.27.01 . 2	BELANJA MODAL	1.357.000,00	1.325.000,00	(32.000,00)	97,64
5 . 3.25 . 3.27.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.357.000,00	1.325.000,00	(32.000,00)	97,64
5 . 3.25 . 3.27.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.26	Pariwisata	9.773.845.782,00	8.985.818.979,00	(788.026.803,00)	91,94
5 . 3.26 . 3.26.04	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	9.773.845.782,00	8.985.818.979,00	(788.026.803,00)	91,94
5 . 3.26 . 3.26.04 . 1	BELANJA OPERASI	7.881.371.782,00	7.144.881.979,00	(736.489.803,00)	90,66
5 . 3.26 . 3.26.04 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.886.341.782,00	4.335.627.205,00	(550.714.577,00)	88,73
5 . 3.26 . 3.26.04 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.995.030.000,00	2.809.254.774,00	(185.775.226,00)	93,80
5 . 3.26 . 3.26.04 . 2	BELANJA MODAL	1.892.474.000,00	1.840.937.000,00	(51.537.000,00)	97,28
5 . 3.26 . 3.26.04 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.673.000,00	86.198.000,00	(475.000,00)	99,45
5 . 3.26 . 3.26.04 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.805.801.000,00	1.754.739.000,00	(51.062.000,00)	97,17
5 . 3.26 . 3.26.04 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.26 . 3.26.04 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.27	Pertanian	46.162.379.327,00	38.624.207.536,00	(7.538.171.791,00)	83,67
5 . 3.27 . 3.27.01	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	46.162.379.327,00	38.624.207.536,00	(7.538.171.791,00)	83,67
5 . 3.27 . 3.27.01 . 1	BELANJA OPERASI	44.775.555.327,00	37.333.030.026,00	(7.442.525.301,00)	83,38

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 3.27 . 3.27.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	33.114.289.301,00	26.656.559.034,00	(6.457.730.267,00)	80,50
5 . 3.27 . 3.27.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.431.266.026,00	10.446.470.992,00	(984.795.034,00)	91,39
5 . 3.27 . 3.27.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	100,00
5 . 3.27 . 3.27.01 . 2	BELANJA MODAL	1.386.824.000,00	1.291.177.510,00	(95.646.490,00)	93,10
5 . 3.27 . 3.27.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.196.824.000,00	1.105.202.510,00	(91.621.490,00)	92,34
5 . 3.27 . 3.27.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.000.000,00	185.975.000,00	(4.025.000,00)	97,88
5 . 3.27 . 3.27.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.30	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.031.461.000,00	2.753.859.900,00	(277.601.100,00)	90,84
5 . 3.30 . 2.17.03	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	3.031.461.000,00	2.753.859.900,00	(277.601.100,00)	90,84
5 . 3.30 . 2.17.03 . 1	BELANJA OPERASI	1.536.757.000,00	1.424.554.900,00	(112.202.100,00)	92,70
5 . 3.30 . 2.17.03 . 1 . 1	Belanja Pegawai	24.060.000,00	20.860.000,00	(3.200.000,00)	86,70
5 . 3.30 . 2.17.03 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.512.697.000,00	1.403.694.900,00	(109.002.100,00)	92,79
5 . 3.30 . 2.17.03 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.30 . 2.17.03 . 2	BELANJA MODAL	1.494.704.000,00	1.329.305.000,00	(165.399.000,00)	88,93
5 . 3.30 . 2.17.03 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.30 . 2.17.03 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.494.704.000,00	1.329.305.000,00	(165.399.000,00)	88,93
5 . 3.31	Perindustrian	6.938.689.210,00	5.746.879.463,00	(1.191.809.747,00)	82,82
5 . 3.31 . 3.31.05	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	6.938.689.210,00	5.746.879.463,00	(1.191.809.747,00)	82,82
5 . 3.31 . 3.31.05 . 1	BELANJA OPERASI	6.177.811.210,00	5.112.139.463,00	(1.065.671.747,00)	82,75
5 . 3.31 . 3.31.05 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.247.536.210,00	3.618.482.241,00	(629.053.969,00)	85,19
5 . 3.31 . 3.31.05 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.930.275.000,00	1.493.657.222,00	(436.617.778,00)	77,38
5 . 3.31 . 3.31.05 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.31 . 3.31.05 . 2	BELANJA MODAL	760.878.000,00	634.740.000,00	(126.138.000,00)	83,42
5 . 3.31 . 3.31.05 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	760.878.000,00	634.740.000,00	(126.138.000,00)	83,42
5 . 3.32	Perindustrian	105.000.000,00	21.332.100,00	(83.667.900,00)	20,32
5 . 3.32 . 3.31.05	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	105.000.000,00	21.332.100,00	(83.667.900,00)	20,32
5 . 3.32 . 3.31.05 . 1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	21.332.100,00	(83.667.900,00)	20,32
5 . 3.32 . 3.31.05 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.670.000,00	0,00	(7.670.000,00)	0,00
5 . 3.32 . 3.31.05 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.330.000,00	21.332.100,00	(75.997.900,00)	21,92
5 . 4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	114.782.988.993,00	94.460.750.924,00	(20.322.238.069,00)	82,30
5 . 4.01	Sekreatriat Daerah	57.271.728.993,00	46.817.627.698,00	(10.454.101.295,00)	81,75
5 . 4.01 . 4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	53.393.767.099,00	43.353.984.129,00	(10.039.782.970,00)	81,20
5 . 4.01 . 4.01.01 . 1	BELANJA OPERASI	51.958.138.759,00	41.986.116.119,00	(9.972.022.640,00)	80,81
5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	20.106.005.566,00	17.410.127.936,00	(2.695.877.630,00)	86,59

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.379.482.345,00	17.375.634.116,00	(4.003.848.229,00)	81,27
5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 . 4	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	1.940.554.067,00	(1.059.445.933,00)	64,69
5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	1.235.000.000,00	1.235.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	6.237.650.848,00	4.024.800.000,00	(2.212.850.848,00)	64,52
5 . 4.01 . 4.01.01 . 2	BELANJA MODAL	1.435.628.340,00	1.367.868.010,00	(67.760.330,00)	95,28
5 . 4.01 . 4.01.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.402.428.340,00	1.335.968.010,00	(66.460.330,00)	95,26
5 . 4.01 . 4.01.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.200.000,00	31.900.000,00	(1.300.000,00)	96,08
5 . 4.01 . 4.01.04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.877.961.894,00	3.463.643.569,00	(414.318.325,00)	89,32
5 . 4.01 . 4.01.04 . 1	BELANJA OPERASI	3.877.961.894,00	3.463.643.569,00	(414.318.325,00)	89,32
5 . 4.01 . 4.01.04 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.863.051.894,00	3.461.126.115,00	(401.925.779,00)	89,60
5 . 4.01 . 4.01.04 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.910.000,00	2.517.454,00	(12.392.546,00)	16,88
5 . 4.02	Sekretariat DPRD	57.511.260.000,00	47.643.123.226,00	(9.868.136.774,00)	82,84
5 . 4.02 . 4.02.01	SEKRETARIAT DPRD	57.511.260.000,00	47.643.123.226,00	(9.868.136.774,00)	82,84
5 . 4.02 . 4.02.01 . 1	BELANJA OPERASI	57.019.654.000,00	47.181.769.116,00	(9.837.884.884,00)	82,75
5 . 4.02 . 4.02.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	34.262.788.000,00	32.073.700.078,00	(2.189.087.922,00)	93,61
5 . 4.02 . 4.02.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.756.866.000,00	15.108.069.038,00	(7.648.796.962,00)	66,39
5 . 4.02 . 4.02.01 . 2	BELANJA MODAL	491.606.000,00	461.354.110,00	(30.251.890,00)	93,85
5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	472.056.000,00	461.354.110,00	(10.701.890,00)	97,73
5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.550.000,00	0,00	(19.550.000,00)	0,00
5 . 5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	797.584.985.547,00	733.580.108.461,00	(64.004.877.086,00)	91,98
5 . 5.01	Perencanaan	8.143.441.766,00	7.026.959.019,00	(1.116.482.747,00)	86,29
5 . 5.01 . 5.01.02	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.143.441.766,00	7.026.959.019,00	(1.116.482.747,00)	86,29
5 . 5.01 . 5.01.02 . 1	BELANJA OPERASI	7.842.261.516,00	6.803.809.019,00	(1.038.452.497,00)	86,76
5 . 5.01 . 5.01.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.714.977.772,00	4.148.029.340,00	(566.948.432,00)	87,98
5 . 5.01 . 5.01.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.127.283.744,00	2.655.779.679,00	(471.504.065,00)	84,92
5 . 5.01 . 5.01.02 . 2	BELANJA MODAL	301.180.250,00	223.150.000,00	(78.030.250,00)	74,09
5 . 5.01 . 5.01.02 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	251.180.250,00	223.150.000,00	(28.030.250,00)	88,84
5 . 5.01 . 5.01.02 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 5.01 . 5.01.02 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
5 . 5.02	Perencanaan	780.485.002.281,00	718.445.982.522,00	(62.039.019.759,00)	92,05
5 . 5.02 . 5.01.02	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	212.436.000,00	133.536.300,00	(78.899.700,00)	62,86
5 . 5.02 . 5.01.02 . 1	BELANJA OPERASI	212.436.000,00	133.536.300,00	(78.899.700,00)	62,86
5 . 5.02 . 5.01.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.436.000,00	133.536.300,00	(78.899.700,00)	62,86
5 . 5.02 . 5.02.04	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	780.272.566.281,00	718.312.446.222,00	(61.960.120.059,00)	92,06

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 5.02 . 5.02.04 . 1	BELANJA OPERASI	31.238.332.108,00	26.075.152.662,00	(5.163.179.446,00)	83,47
5 . 5.02 . 5.02.04 . 1 . 1	Belanja Pegawai	18.391.647.462,00	16.554.333.156,00	(1.837.314.306,00)	90,01
5 . 5.02 . 5.02.04 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.906.184.646,00	8.815.506.881,00	(3.090.677.765,00)	74,04
5 . 5.02 . 5.02.04 . 1 . 5	Belanja Hibah	940.500.000,00	705.312.625,00	(235.187.375,00)	74,99
5 . 5.02 . 5.02.04 . 2	BELANJA MODAL	914.103.200,00	850.173.800,00	(63.929.400,00)	93,01
5 . 5.02 . 5.02.04 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	614.103.200,00	566.783.800,00	(47.319.400,00)	92,29
5 . 5.02 . 5.02.04 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	186.500.000,00	(13.500.000,00)	93,25
5 . 5.02 . 5.02.04 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	96.890.000,00	(3.110.000,00)	96,89
5 . 5.02 . 5.02.04 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	(53.938.954.270,00)	25,66
5 . 5.02 . 5.02.04 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	(53.938.954.270,00)	25,66
5 . 5.02 . 5.02.04 . 4	BELANJA TRANSFER	675.562.515.700,00	672.768.458.757,00	(2.794.056.943,00)	99,59
5 . 5.02 . 5.02.04 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	19.055.869.600,00	16.428.812.657,00	(2.627.056.943,00)	86,21
5 . 5.02 . 5.02.04 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	656.506.646.100,00	656.339.646.100,00	(167.000.000,00)	99,97
5 . 5.03	Kepegawaian	7.196.291.010,00	6.391.454.211,00	(804.836.799,00)	88,82
5 . 5.03 . 5.03.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	7.196.291.010,00	6.391.454.211,00	(804.836.799,00)	88,82
5 . 5.03 . 5.03.01 . 1	BELANJA OPERASI	7.196.291.010,00	6.391.454.211,00	(804.836.799,00)	88,82
5 . 5.03 . 5.03.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.908.893.500,00	4.507.377.899,00	(401.515.601,00)	91,82
5 . 5.03 . 5.03.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.287.397.510,00	1.884.076.312,00	(403.321.198,00)	82,37
5 . 5.03 . 5.03.01 . 2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 5.03 . 5.03.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 5.04	Kepegawaian	1.301.900.490,00	1.293.303.045,00	(8.597.445,00)	99,34
5 . 5.04 . 5.03.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	1.301.900.490,00	1.293.303.045,00	(8.597.445,00)	99,34
5 . 5.04 . 5.03.01 . 1	BELANJA OPERASI	1.301.900.490,00	1.293.303.045,00	(8.597.445,00)	99,34
5 . 5.04 . 5.03.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00
5 . 5.04 . 5.03.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.278.980.490,00	1.270.383.045,00	(8.597.445,00)	99,33
5 . 5.05	Perencanaan	458.350.000,00	422.409.664,00	(35.940.336,00)	92,16
5 . 5.05 . 5.01.02	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	458.350.000,00	422.409.664,00	(35.940.336,00)	92,16
5 . 5.05 . 5.01.02 . 1	BELANJA OPERASI	458.350.000,00	422.409.664,00	(35.940.336,00)	92,16
5 . 5.05 . 5.01.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.240.000,00	(400.000,00)	92,91
5 . 5.05 . 5.01.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	452.710.000,00	417.169.664,00	(35.540.336,00)	92,15
5 . 6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	14.317.410.845,00	11.124.204.142,00	(3.193.206.703,00)	77,70
5 . 6.01	Inspektorat	14.317.410.845,00	11.124.204.142,00	(3.193.206.703,00)	77,70
5 . 6.01 . 6.01.01	INSPEKTORAT KABUPATEN	14.317.410.845,00	11.124.204.142,00	(3.193.206.703,00)	77,70

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 6.01 . 6.01.01 . 1	BELANJA OPERASI	13.591.384.950,00	10.441.134.142,00	(3.150.250.808,00)	76,82
5 . 6.01 . 6.01.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.063.874.256,00	7.053.801.992,00	(1.010.072.264,00)	87,47
5 . 6.01 . 6.01.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.527.510.694,00	3.387.332.150,00	(2.140.178.544,00)	61,28
5 . 6.01 . 6.01.01 . 2	BELANJA MODAL	726.025.895,00	683.070.000,00	(42.955.895,00)	94,08
5 . 6.01 . 6.01.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	726.025.895,00	683.070.000,00	(42.955.895,00)	94,08
5 . 7	UNSUR KEWILAYAHAN	92.486.465.107,00	76.467.716.315,00	(16.018.748.792,00)	82,68
5 . 7.01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	92.486.465.107,00	76.467.716.315,00	(16.018.748.792,00)	82,68
5 . 7.01 . 7.01.01	KECAMATAN PRAMBANAN	3.353.284.860,00	2.850.831.334,00	(502.453.526,00)	85,02
5 . 7.01 . 7.01.01 . 1	BELANJA OPERASI	3.212.184.860,00	2.714.206.334,00	(497.978.526,00)	84,50
5 . 7.01 . 7.01.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.381.841.860,00	2.071.330.891,00	(310.510.969,00)	86,96
5 . 7.01 . 7.01.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	830.343.000,00	642.875.443,00	(187.467.557,00)	77,42
5 . 7.01 . 7.01.01 . 2	BELANJA MODAL	141.100.000,00	136.625.000,00	(4.475.000,00)	96,83
5 . 7.01 . 7.01.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.100.000,00	136.625.000,00	(4.475.000,00)	96,83
5 . 7.01 . 7.01.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 7.01 . 7.01.02	KECAMATAN GANTIWARNANO	2.801.717.765,00	2.369.888.737,00	(431.829.028,00)	84,59
5 . 7.01 . 7.01.02 . 1	BELANJA OPERASI	2.752.967.765,00	2.321.188.737,00	(431.779.028,00)	84,32
5 . 7.01 . 7.01.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.902.429.761,00	1.553.005.901,00	(349.423.860,00)	81,63
5 . 7.01 . 7.01.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	850.538.004,00	768.182.836,00	(82.355.168,00)	90,32
5 . 7.01 . 7.01.02 . 2	BELANJA MODAL	48.750.000,00	48.700.000,00	(50.000,00)	99,90
5 . 7.01 . 7.01.02 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.750.000,00	48.700.000,00	(50.000,00)	99,90
5 . 7.01 . 7.01.03	KECAMATAN WEDI	3.491.367.357,00	2.959.196.795,00	(532.170.562,00)	84,76
5 . 7.01 . 7.01.03 . 1	BELANJA OPERASI	3.373.367.357,00	2.841.227.495,00	(532.139.862,00)	84,23
5 . 7.01 . 7.01.03 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.546.373.357,00	2.065.496.870,00	(480.876.487,00)	81,12
5 . 7.01 . 7.01.03 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	826.994.000,00	775.730.625,00	(51.263.375,00)	93,80
5 . 7.01 . 7.01.03 . 2	BELANJA MODAL	118.000.000,00	117.969.300,00	(30.700,00)	99,97
5 . 7.01 . 7.01.03 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.000.000,00	117.969.300,00	(30.700,00)	99,97
5 . 7.01 . 7.01.04	KECAMATAN BAYAT	2.955.453.959,00	2.081.012.466,00	(874.441.493,00)	70,41
5 . 7.01 . 7.01.04 . 1	BELANJA OPERASI	2.941.453.459,00	2.078.212.466,00	(863.240.993,00)	70,65
5 . 7.01 . 7.01.04 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.017.150.959,00	1.555.050.166,00	(462.100.793,00)	77,09
5 . 7.01 . 7.01.04 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	924.302.500,00	523.162.300,00	(401.140.200,00)	56,60
5 . 7.01 . 7.01.04 . 2	BELANJA MODAL	14.000.500,00	2.800.000,00	(11.200.500,00)	20,00
5 . 7.01 . 7.01.04 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.500,00	2.800.000,00	(11.200.500,00)	20,00
5 . 7.01 . 7.01.05	KECAMATAN CAWAS	3.468.880.725,00	2.840.640.027,00	(628.240.698,00)	81,89

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 7.01 . 7.01.05 . 1	BELANJA OPERASI	3.319.961.325,00	2.707.844.327,00	(612.116.998,00)	81,56
5 . 7.01 . 7.01.05 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.393.624.725,00	1.995.380.964,00	(398.243.761,00)	83,36
5 . 7.01 . 7.01.05 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	926.336.600,00	712.463.363,00	(213.873.237,00)	76,91
5 . 7.01 . 7.01.05 . 2	BELANJA MODAL	148.919.400,00	132.795.700,00	(16.123.700,00)	89,17
5 . 7.01 . 7.01.05 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.919.400,00	132.795.700,00	(16.123.700,00)	89,17
5 . 7.01 . 7.01.06	KECAMATAN TRUCUK	2.805.552.761,00	2.343.829.145,00	(461.723.616,00)	83,54
5 . 7.01 . 7.01.06 . 1	BELANJA OPERASI	2.743.152.117,00	2.294.934.145,00	(448.217.972,00)	83,66
5 . 7.01 . 7.01.06 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.877.291.761,00	1.545.821.842,00	(331.469.919,00)	82,34
5 . 7.01 . 7.01.06 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	865.860.356,00	749.112.303,00	(116.748.053,00)	86,52
5 . 7.01 . 7.01.06 . 2	BELANJA MODAL	62.400.644,00	48.895.000,00	(13.505.644,00)	78,36
5 . 7.01 . 7.01.06 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.400.644,00	48.895.000,00	(13.505.644,00)	78,36
5 . 7.01 . 7.01.07	KECAMATAN KEBONARUM	2.615.837.646,00	2.185.329.187,00	(430.508.459,00)	83,54
5 . 7.01 . 7.01.07 . 1	BELANJA OPERASI	2.545.257.646,00	2.115.134.187,00	(430.123.459,00)	83,10
5 . 7.01 . 7.01.07 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.889.188.646,00	1.595.534.536,00	(293.654.110,00)	84,46
5 . 7.01 . 7.01.07 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	656.069.000,00	519.599.651,00	(136.469.349,00)	79,20
5 . 7.01 . 7.01.07 . 2	BELANJA MODAL	70.580.000,00	70.195.000,00	(385.000,00)	99,45
5 . 7.01 . 7.01.07 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.580.000,00	70.195.000,00	(385.000,00)	99,45
5 . 7.01 . 7.01.08	KECAMATAN JOGONALAN	2.737.468.232,00	2.419.322.097,00	(318.146.135,00)	88,38
5 . 7.01 . 7.01.08 . 1	BELANJA OPERASI	2.563.718.232,00	2.248.672.097,00	(315.046.135,00)	87,71
5 . 7.01 . 7.01.08 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.796.153.298,00	1.572.458.211,00	(223.695.087,00)	87,55
5 . 7.01 . 7.01.08 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	767.564.934,00	676.213.886,00	(91.351.048,00)	88,10
5 . 7.01 . 7.01.08 . 2	BELANJA MODAL	173.750.000,00	170.650.000,00	(3.100.000,00)	98,22
5 . 7.01 . 7.01.08 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.750.000,00	170.650.000,00	(3.100.000,00)	98,22
5 . 7.01 . 7.01.09	KECAMATAN MANISRENGGO	3.262.600.152,00	2.780.108.250,00	(482.491.902,00)	85,21
5 . 7.01 . 7.01.09 . 1	BELANJA OPERASI	3.056.540.152,00	2.593.033.450,00	(463.506.702,00)	84,84
5 . 7.01 . 7.01.09 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.348.076.152,00	1.951.029.820,00	(397.046.332,00)	83,09
5 . 7.01 . 7.01.09 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	708.464.000,00	642.003.630,00	(66.460.370,00)	90,62
5 . 7.01 . 7.01.09 . 2	BELANJA MODAL	206.060.000,00	187.074.800,00	(18.985.200,00)	90,79
5 . 7.01 . 7.01.09 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	206.060.000,00	187.074.800,00	(18.985.200,00)	90,79
5 . 7.01 . 7.01.10	KECAMATAN KARANGNONGKO	3.322.608.250,00	2.738.136.123,00	(584.472.127,00)	82,41
5 . 7.01 . 7.01.10 . 1	BELANJA OPERASI	3.275.608.250,00	2.691.306.123,00	(584.302.127,00)	82,16
5 . 7.01 . 7.01.10 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.445.545.250,00	1.984.328.139,00	(461.217.111,00)	81,14
5 . 7.01 . 7.01.10 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	830.063.000,00	706.977.984,00	(123.085.016,00)	85,17

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 7.01 . 7.01.10 . 2	BELANJA MODAL	47.000.000,00	46.830.000,00	(170.000,00)	99,64
5 . 7.01 . 7.01.10 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.000.000,00	46.830.000,00	(170.000,00)	99,64
5 . 7.01 . 7.01.11	KECAMATAN CEPER	3.188.500.629,00	2.720.647.348,00	(467.853.281,00)	85,33
5 . 7.01 . 7.01.11 . 1	BELANJA OPERASI	3.103.507.204,00	2.647.127.348,00	(456.379.856,00)	85,29
5 . 7.01 . 7.01.11 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.248.298.629,00	1.915.735.501,00	(332.563.128,00)	85,21
5 . 7.01 . 7.01.11 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	855.208.575,00	731.391.847,00	(123.816.728,00)	85,52
5 . 7.01 . 7.01.11 . 2	BELANJA MODAL	84.993.425,00	73.520.000,00	(11.473.425,00)	86,50
5 . 7.01 . 7.01.11 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.993.425,00	73.520.000,00	(11.473.425,00)	86,50
5 . 7.01 . 7.01.12	KECAMATAN PEDAN	2.790.494.095,00	2.385.979.551,00	(404.514.544,00)	85,50
5 . 7.01 . 7.01.12 . 1	BELANJA OPERASI	2.748.844.095,00	2.344.880.551,00	(403.963.544,00)	85,30
5 . 7.01 . 7.01.12 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.916.988.095,00	1.561.245.399,00	(355.742.696,00)	81,44
5 . 7.01 . 7.01.12 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	831.856.000,00	783.635.152,00	(48.220.848,00)	94,20
5 . 7.01 . 7.01.12 . 2	BELANJA MODAL	41.650.000,00	41.099.000,00	(551.000,00)	98,68
5 . 7.01 . 7.01.12 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.650.000,00	41.099.000,00	(551.000,00)	98,68
5 . 7.01 . 7.01.13	KECAMATAN KARANGDOWO	3.337.767.988,00	2.919.157.122,00	(418.610.866,00)	87,46
5 . 7.01 . 7.01.13 . 1	BELANJA OPERASI	3.198.299.988,00	2.790.407.122,00	(407.892.866,00)	87,25
5 . 7.01 . 7.01.13 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.398.460.988,00	2.075.474.948,00	(322.986.040,00)	86,53
5 . 7.01 . 7.01.13 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	799.839.000,00	714.932.174,00	(84.906.826,00)	89,38
5 . 7.01 . 7.01.13 . 2	BELANJA MODAL	139.468.000,00	128.750.000,00	(10.718.000,00)	92,32
5 . 7.01 . 7.01.13 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.468.000,00	128.750.000,00	(10.718.000,00)	92,32
5 . 7.01 . 7.01.14	KECAMATAN JUWIRING	3.213.113.356,00	2.571.572.640,00	(641.540.716,00)	80,03
5 . 7.01 . 7.01.14 . 1	BELANJA OPERASI	3.186.163.356,00	2.550.452.640,00	(635.710.716,00)	80,05
5 . 7.01 . 7.01.14 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.286.762.727,00	2.010.329.272,00	(276.433.455,00)	87,91
5 . 7.01 . 7.01.14 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	899.400.629,00	540.123.368,00	(359.277.261,00)	60,05
5 . 7.01 . 7.01.14 . 2	BELANJA MODAL	26.950.000,00	21.120.000,00	(5.830.000,00)	78,37
5 . 7.01 . 7.01.14 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.950.000,00	21.120.000,00	(5.830.000,00)	78,37
5 . 7.01 . 7.01.15	KECAMATAN WONOSARI	3.565.963.869,00	2.825.234.123,00	(740.729.746,00)	79,23
5 . 7.01 . 7.01.15 . 1	BELANJA OPERASI	3.525.963.869,00	2.785.884.123,00	(740.079.746,00)	79,01
5 . 7.01 . 7.01.15 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.615.762.869,00	2.156.919.150,00	(458.843.719,00)	82,46
5 . 7.01 . 7.01.15 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	910.201.000,00	628.964.973,00	(281.236.027,00)	69,10
5 . 7.01 . 7.01.15 . 2	BELANJA MODAL	40.000.000,00	39.350.000,00	(650.000,00)	98,38
5 . 7.01 . 7.01.15 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.350.000,00	(650.000,00)	98,38
5 . 7.01 . 7.01.16	KECAMATAN DELANGGU	2.872.262.900,00	2.220.819.860,00	(651.443.040,00)	77,32

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 7.01 . 7.01.16 . 1	BELANJA OPERASI	2.740.429.500,00	2.089.814.860,00	(650.614.640,00)	76,26
5 . 7.01 . 7.01.16 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.034.452.000,00	1.488.070.116,00	(546.381.884,00)	73,14
5 . 7.01 . 7.01.16 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	705.977.500,00	601.744.744,00	(104.232.756,00)	85,24
5 . 7.01 . 7.01.16 . 2	BELANJA MODAL	131.833.400,00	131.005.000,00	(828.400,00)	99,37
5 . 7.01 . 7.01.16 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.833.400,00	131.005.000,00	(828.400,00)	99,37
5 . 7.01 . 7.01.17	KECAMATAN POLANHARJO	2.983.601.410,00	2.575.563.708,00	(408.037.702,00)	86,32
5 . 7.01 . 7.01.17 . 1	BELANJA OPERASI	2.934.601.410,00	2.526.653.708,00	(407.947.702,00)	86,10
5 . 7.01 . 7.01.17 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.064.526.410,00	1.718.518.007,00	(346.008.403,00)	83,24
5 . 7.01 . 7.01.17 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	870.075.000,00	808.135.701,00	(61.939.299,00)	92,88
5 . 7.01 . 7.01.17 . 2	BELANJA MODAL	49.000.000,00	48.910.000,00	(90.000,00)	99,82
5 . 7.01 . 7.01.17 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.000.000,00	48.910.000,00	(90.000,00)	99,82
5 . 7.01 . 7.01.18	KECAMATAN KARANGANOM	3.014.068.320,00	2.235.778.498,00	(778.289.822,00)	74,18
5 . 7.01 . 7.01.18 . 1	BELANJA OPERASI	2.997.568.320,00	2.220.303.498,00	(777.264.822,00)	74,07
5 . 7.01 . 7.01.18 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.023.168.095,00	1.605.699.276,00	(417.468.819,00)	79,37
5 . 7.01 . 7.01.18 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	974.400.225,00	614.604.222,00	(359.796.003,00)	63,08
5 . 7.01 . 7.01.18 . 2	BELANJA MODAL	16.500.000,00	15.475.000,00	(1.025.000,00)	93,79
5 . 7.01 . 7.01.18 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.500.000,00	15.475.000,00	(1.025.000,00)	93,79
5 . 7.01 . 7.01.19	KECAMATAN TULUNG	3.114.067.179,00	2.391.663.904,00	(722.403.275,00)	76,80
5 . 7.01 . 7.01.19 . 1	BELANJA OPERASI	3.090.147.179,00	2.373.843.904,00	(716.303.275,00)	76,82
5 . 7.01 . 7.01.19 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.179.986.179,00	1.864.463.220,00	(315.522.959,00)	85,53
5 . 7.01 . 7.01.19 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	910.161.000,00	509.380.684,00	(400.780.316,00)	55,97
5 . 7.01 . 7.01.19 . 2	BELANJA MODAL	23.920.000,00	17.820.000,00	(6.100.000,00)	74,50
5 . 7.01 . 7.01.19 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.920.000,00	17.820.000,00	(6.100.000,00)	74,50
5 . 7.01 . 7.01.20	KECAMATAN JATINOM	4.094.408.972,00	3.383.627.563,00	(710.781.409,00)	82,64
5 . 7.01 . 7.01.20 . 1	BELANJA OPERASI	4.006.886.142,00	3.299.477.563,00	(707.408.579,00)	82,35
5 . 7.01 . 7.01.20 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.455.452.872,00	1.878.722.851,00	(576.730.021,00)	76,51
5 . 7.01 . 7.01.20 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.551.433.270,00	1.420.754.712,00	(130.678.558,00)	91,58
5 . 7.01 . 7.01.20 . 2	BELANJA MODAL	87.522.830,00	84.150.000,00	(3.372.830,00)	96,15
5 . 7.01 . 7.01.20 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.522.830,00	70.150.000,00	(2.372.830,00)	96,73
5 . 7.01 . 7.01.20 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	14.000.000,00	(1.000.000,00)	93,33
5 . 7.01 . 7.01.21	KECAMATAN KEMALANG	3.123.607.860,00	2.326.022.499,00	(797.585.361,00)	74,47
5 . 7.01 . 7.01.21 . 1	BELANJA OPERASI	3.063.564.860,00	2.276.272.499,00	(787.292.361,00)	74,30
5 . 7.01 . 7.01.21 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.260.079.660,00	1.808.022.716,00	(452.056.944,00)	80,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 7.01 . 7.01.21 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	803.485.200,00	468.249.783,00	(335.235.417,00)	58,28
5 . 7.01 . 7.01.21 . 2	BELANJA MODAL	60.043.000,00	49.750.000,00	(10.293.000,00)	82,86
5 . 7.01 . 7.01.21 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.400.000,00	49.750.000,00	(2.650.000,00)	94,94
5 . 7.01 . 7.01.21 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.643.000,00	0,00	(7.643.000,00)	0,00
5 . 7.01 . 7.01.22	KECAMATAN NGAWEN	2.828.312.918,00	2.420.979.128,00	(407.333.790,00)	85,60
5 . 7.01 . 7.01.22 . 1	BELANJA OPERASI	2.828.312.918,00	2.420.979.128,00	(407.333.790,00)	85,60
5 . 7.01 . 7.01.22 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.964.489.663,00	1.649.115.247,00	(315.374.416,00)	83,95
5 . 7.01 . 7.01.22 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	863.823.255,00	771.863.881,00	(91.959.374,00)	89,35
5 . 7.01 . 7.01.23	KECAMATAN KALIKOTES	3.444.036.059,00	2.486.409.317,00	(957.626.742,00)	72,19
5 . 7.01 . 7.01.23 . 1	BELANJA OPERASI	3.343.631.059,00	2.387.619.317,00	(956.011.742,00)	71,41
5 . 7.01 . 7.01.23 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.653.398.059,00	1.823.824.095,00	(829.573.964,00)	68,74
5 . 7.01 . 7.01.23 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	690.233.000,00	563.795.222,00	(126.437.778,00)	81,68
5 . 7.01 . 7.01.23 . 2	BELANJA MODAL	100.405.000,00	98.790.000,00	(1.615.000,00)	98,39
5 . 7.01 . 7.01.23 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.465.000,00	56.850.000,00	(1.615.000,00)	97,24
5 . 7.01 . 7.01.23 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.940.000,00	41.940.000,00	0,00	100,00
5 . 7.01 . 7.01.24	KECAMATAN KLATEN UTARA	5.906.924.885,00	5.257.602.836,00	(649.322.049,00)	89,01
5 . 7.01 . 7.01.24 . 1	BELANJA OPERASI	5.532.027.218,00	4.887.325.836,00	(644.701.382,00)	88,35
5 . 7.01 . 7.01.24 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.702.020.226,00	3.183.613.581,00	(518.406.645,00)	86,00
5 . 7.01 . 7.01.24 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.830.006.992,00	1.703.712.255,00	(126.294.737,00)	93,10
5 . 7.01 . 7.01.24 . 2	BELANJA MODAL	374.897.667,00	370.277.000,00	(4.620.667,00)	98,77
5 . 7.01 . 7.01.24 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.897.667,00	124.207.000,00	(690.667,00)	99,45
5 . 7.01 . 7.01.24 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	63.331.000,00	(1.669.000,00)	97,43
5 . 7.01 . 7.01.24 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	185.000.000,00	182.739.000,00	(2.261.000,00)	98,78
5 . 7.01 . 7.01.25	KECAMATAN KLATEN TENGAH	10.275.761.105,00	8.729.604.997,00	(1.546.156.108,00)	84,95
5 . 7.01 . 7.01.25 . 1	BELANJA OPERASI	9.326.963.721,00	7.876.348.077,00	(1.450.615.644,00)	84,45
5 . 7.01 . 7.01.25 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.263.186.570,00	4.981.844.207,00	(1.281.342.363,00)	79,54
5 . 7.01 . 7.01.25 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.063.777.151,00	2.894.503.870,00	(169.273.281,00)	94,48
5 . 7.01 . 7.01.25 . 2	BELANJA MODAL	948.797.384,00	853.256.920,00	(95.540.464,00)	89,93
5 . 7.01 . 7.01.25 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	474.816.441,00	389.676.920,00	(85.139.521,00)	82,07
5 . 7.01 . 7.01.25 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.950.345,00	145.411.000,00	(2.539.345,00)	98,28
5 . 7.01 . 7.01.25 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	326.030.598,00	318.169.000,00	(7.861.598,00)	97,59
5 . 7.01 . 7.01.25 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 7.01 . 7.01.26	KECAMATAN KLATEN SELATAN	3.918.801.855,00	3.448.759.060,00	(470.042.795,00)	88,01
5 . 7.01 . 7.01.26 . 1	BELANJA OPERASI	3.863.354.855,00	3.394.512.060,00	(468.842.795,00)	87,86

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 7.01 . 7.01.26 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.394.160.264,00	2.003.300.620,00	(390.859.644,00)	83,67
5 . 7.01 . 7.01.26 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.469.194.591,00	1.391.211.440,00	(77.983.151,00)	94,69
5 . 7.01 . 7.01.26 . 2	BELANJA MODAL	55.447.000,00	54.247.000,00	(1.200.000,00)	97,84
5 . 7.01 . 7.01.26 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.447.000,00	54.247.000,00	(1.200.000,00)	97,84
5 . 8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4.797.583.481,00	3.762.721.784,00	(1.034.861.697,00)	78,43
5 . 8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	4.797.583.481,00	3.762.721.784,00	(1.034.861.697,00)	78,43
5 . 8.01 . 8.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.797.583.481,00	3.762.721.784,00	(1.034.861.697,00)	78,43
5 . 8.01 . 8.01.01 . 1	BELANJA OPERASI	4.797.583.481,00	3.762.721.784,00	(1.034.861.697,00)	78,43
5 . 8.01 . 8.01.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.606.978.553,00	1.799.182.242,00	(807.796.311,00)	69,01
5 . 8.01 . 8.01.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	694.085.428,00	467.159.042,00	(226.926.386,00)	67,31
5 . 8.01 . 8.01.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	1.496.519.500,00	1.496.380.500,00	(139.000,00)	99,99

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 . 1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
6 . 1.01	Pendidikan				
6 . 1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN				
6 . 1.01 . 1.01.01 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	(69.364.315,00)	(69.364.315,00)	0,00
6 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	(69.364.315,00)	(69.364.315,00)	0,00
6 . 1.02	Kesehatan				
6 . 1.02 . 1.02.01	PUSKESMAS				
6 . 1.02 . 1.02.01 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	47.538.710.726,28	47.538.710.726,28	0,00	100,00
6 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.830.070.479,00	10.830.070.479,00	0,00	100,00
6 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.708.640.247,28	36.708.640.247,28	0,00	100,00
6 . 5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
6 . 5.02	Keuangan				
6 . 5.02 . 5.02.04	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
6 . 5.02 . 5.02.04 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	393.120.333.599,00	393.120.333.599,00	0,00	100,00
6 . 5.02 . 5.02.04 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	393.120.333.599,00	393.120.333.599,00	0,00	100,00
6 . 5.02 . 5.02.04 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	0,00	100,00
6 . 5.02 . 5.02.04 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100,00
6 . 5.02 . 5.02.04 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	100,00

BUPATI KLATEN

cap ttd

SRI MULYANI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	2.532.484.633.385,00	2.570.037.777.373,00	101,48	2.578.135.836.354,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	277.915.340.915,00	315.304.009.782,00	113,45	329.963.261.898,00
4.1.1	Pajak Daerah	115.200.000.000,00	126.672.231.091,00	109,96	116.132.536.269,00
4.1.2	Retribusi Daerah	12.352.582.000,00	14.405.348.660,00	116,62	14.760.621.483,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.974.459.182,00	16.409.075.267,00	126,47	17.577.664.499,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	137.388.299.733,00	157.817.354.764,00	114,87	181.492.439.647,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.130.432.992.470,00	2.131.117.520.091,00	100,03	1.752.155.233.956,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.919.548.317.470,00	1.923.414.170.983,00	100,20	1.573.561.257.076,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.527.971.822.470,00	1.531.837.675.983,00	100,25	1.516.494.102.076,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	10.729.894.000,00	10.729.894.000,00	100,00	57.067.155.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	380.846.601.000,00	380.846.601.000,00	100,00	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	210.884.675.000,00	207.703.349.108,00	98,49	178.593.976.880,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	193.321.675.000,00	206.950.349.108,00	107,05	163.789.663.880,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	17.563.000.000,00	753.000.000,00	4,29	14.804.313.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	124.136.300.000,00	123.616.247.500,00	99,58	496.017.340.500,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	14.540.000.000,00	15.627.000.000,00	107,48	115.170.740.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	109.596.300.000,00	107.989.247.500,00	98,53	380.846.600.500,00
5	BELANJA DAERAH	2.949.643.677.710,28	2.493.406.881.542,00	84,53	2.545.164.494.577,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.962.849.239.087,28	1.612.412.988.846,00	82,15	1.572.625.425.629,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.197.490.511.452,00	1.006.278.863.371,00	84,03	978.551.975.787,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	721.795.055.287,28	570.241.936.649,00	79,00	491.025.607.185,00
5.1.4	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	1.940.554.067,00	64,69	1.988.515.348,00
5.1.5	Belanja Hibah	32.611.021.500,00	28.410.769.759,00	87,12	97.547.602.309,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.952.650.848,00	5.540.865.000,00	69,67	3.511.725.000,00
5.2	BELANJA MODAL	238.674.307.650,00	189.606.772.936,00	79,44	157.126.719.574,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.843.880.861,00	68.901.715.247,00	78,44	70.270.376.590,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.655.759.427,00	66.197.965.314,00	89,87	49.518.428.837,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.877.758.078,00	48.969.127.000,00	69,09	30.032.863.863,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.296.909.284,00	5.537.965.375,00	87,95	7.305.050.284,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	25,66	90.590.754.081,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	25,66	90.590.754.081,00
5.4	BELANJA TRANSFER	675.562.515.700,00	672.768.458.757,00	99,59	724.821.595.293,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	19.055.869.600,00	16.428.812.657,00	86,21	13.255.263.593,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	656.506.646.100,00	656.339.646.100,00	99,97	711.566.331.700,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(417.159.044.325,28)	76.630.895.831,00	(18,37)	32.971.341.777,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	440.659.044.325,28	440.589.680.010,28	99,98	408.687.702.548,28
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	440.659.044.325,28	440.589.680.010,28	99,98	382.687.702.548,28
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	26.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	417.159.044.325,28	417.089.680.010,28	99,98	407.687.702.548,28
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	493.720.575.841,28	0,00	440.659.044.325,28

BUPATI KLATEN

cap ttd

SRI MULYANI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.00.00.00.4	PENDAPATAN	2.532.484.633.385,00	2.570.037.777.373,00	37.553.143.988,00	101,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.00.04.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	277.915.340.915,00	315.304.009.782,00	37.388.668.867,00	113,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.00.04.1.1	Pajak Daerah	115.200.000.000,00	126.672.231.091,00	11.472.231.091,00	109,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.00.04.1.2	Retribusi Daerah	12.352.582.000,00	14.405.348.660,00	2.052.766.660,00	116,62	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.00.04.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.974.459.182,00	16.409.075.267,00	3.434.616.085,00	126,47	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.00.04.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	137.388.299.733,00	157.817.354.764,00	20.429.055.031,00	114,87	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.00.04.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.130.432.992.470,00	2.131.117.520.091,00	684.527.621,00	100,03	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.00.04.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.919.548.317.470,00	1.923.414.170.983,00	3.865.853.513,00	100,20	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.00.04.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	210.884.675.000,00	207.703.349.108,00	(3.181.325.892,00)	98,49	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.00.04.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	124.136.300.000,00	123.616.247.500,00	(520.052.500,00)	99,58	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.00.04.3.1	Pendapatan Hibah	14.540.000.000,00	15.627.000.000,00	1.087.000.000,00	107,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.00.04.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	109.596.300.000,00	107.989.247.500,00	(1.607.052.500,00)	98,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.01.5	BELANJA DAERAH	2.949.643.677.710,28	2.493.406.881.542,00	(456.236.796.168,28)	84,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.962.849.239.087,28	1.612.412.988.846,00	(350.436.250.241,28)	82,15	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.447.094.488.647,28	1.204.275.159.941,00	(242.819.328.706,28)	83,22	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1.026.406.830,00	683.668.808,00	(342.738.022,00)	66,61	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	445.846.500,00	347.643.173,00	(98.203.327,00)	77,97	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	430.696.500,00	332.493.173,00	(98.203.327,00)	77,20	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.428.000,00	15.431.735,00	(1.996.265,00)	88,55	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	17.428.000,00	15.431.735,00	(1.996.265,00)	88,55	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	94.522.330,00	51.541.600,00	(42.980.730,00)	54,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	94.522.330,00	51.541.600,00	(42.980.730,00)	54,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	468.610.000,00	269.052.300,00	(199.557.700,00)	57,41	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.07.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	468.610.000,00	269.052.300,00	(199.557.700,00)	57,41	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.165.004.878.034,00	968.983.683.683,00	(196.021.194.351,00)	83,17	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.162.868.392.147,00	967.870.728.237,00	(194.997.663.910,00)	83,23	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.129.345.577.395,00	943.842.678.976,00	(185.502.898.419,00)	83,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	33.522.814.752,00	24.028.049.261,00	(9.494.765.491,00)	71,68	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.497.716.141,00	620.444.270,00	(877.271.871,00)	41,43	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	32.270.000,00	31.260.000,00	(1.010.000,00)	96,87	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.465.446.141,00	589.184.270,00	(876.261.871,00)	40,21	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	204.760.000,00	174.388.876,00	(30.371.124,00)	85,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.04.5.1.1	- Belanja Pegawai	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	112.960.000,00	82.588.876,00	(30.371.124,00)	73,11	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000,00	23.564.900,00	(6.435.100,00)	78,55	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	23.564.900,00	(6.435.100,00)	78,55	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	384.009.746,00	278.030.000,00	(105.979.746,00)	72,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.07.5.1.1	- Belanja Pegawai	171.480.000,00	167.880.000,00	(3.600.000,00)	97,90	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.07.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	212.529.746,00	110.150.000,00	(102.379.746,00)	51,83	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,00	16.527.400,00	(3.472.600,00)	82,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.08.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	16.527.400,00	(3.472.600,00)	82,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	893.200.600,00	435.879.971,00	(457.320.629,00)	48,80	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	893.200.600,00	435.879.971,00	(457.320.629,00)	48,80	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.03.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	215.400.000,00	0,00	(215.400.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.03.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	677.800.600,00	435.879.971,00	(241.920.629,00)	64,31	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	4.481.329.000,00	3.729.747.468,00	(751.581.532,00)	83,23	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	16.745.000,00	13.833.000,00	(2.912.000,00)	82,61	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	16.745.000,00	13.833.000,00	(2.912.000,00)	82,61	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	320.268.000,00	296.339.900,00	(23.928.100,00)	92,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	316.638.000,00	296.339.900,00	(20.298.100,00)	93,59	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000,00	14.710.000,00	(290.000,00)	98,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.710.000,00	(290.000,00)	98,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.000.000,00	1.572.800,00	(8.427.200,00)	15,73	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	1.572.800,00	(8.427.200,00)	15,73	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.778.616.000,00	3.254.012.268,00	(524.603.732,00)	86,12	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05.10.5.1.1	- Belanja Pegawai	20.120.000,00	16.300.000,00	(3.820.000,00)	81,01	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05.10.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	3.758.496.000,00	3.237.712.268,00	(520.783.732,00)	86,14	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	340.700.000,00	149.279.500,00	(191.420.500,00)	43,82	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05.11.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	340.700.000,00	149.279.500,00	(191.420.500,00)	43,82	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12.911.166.086,00	10.693.091.385,00	(2.218.074.701,00)	82,82	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	578.237.320,00	501.836.169,00	(76.401.151,00)	86,79	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	578.237.320,00	501.836.169,00	(76.401.151,00)	86,79	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.852.390.077,00	3.603.029.023,00	(249.361.054,00)	93,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	3.849.360.077,00	3.599.999.023,00	(249.361.054,00)	93,52	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	140.644.075,00	121.648.750,00	(18.995.325,00)	86,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.03.5.1.1	- Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	139.964.075,00	121.648.750,00	(18.315.325,00)	86,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.200.000,00	36.918.924,00	(9.281.076,00)	79,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	36.918.924,00	(9.281.076,00)	79,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.731.054.769,00	1.636.133.530,00	(94.921.239,00)	94,52	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.05.5.1.1	- Belanja Pegawai	23.580.000,00	23.580.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.707.474.769,00	1.612.553.530,00	(94.921.239,00)	94,44	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	325.408.250,00	249.623.650,00	(75.784.600,00)	76,71	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	325.408.250,00	249.623.650,00	(75.784.600,00)	76,71	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.198.776.459,00	2.700.426.484,00	(498.349.975,00)	84,42	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.08.5.1.1	- Belanja Pegawai	21.560.000,00	21.560.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.08.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	3.177.216.459,00	2.678.866.484,00	(498.349.975,00)	84,31	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.038.455.136,00	1.843.474.855,00	(1.194.980.281,00)	60,67	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.09.5.1.1	- Belanja Pegawai	2.820.000,00	2.420.000,00	(400.000,00)	85,82	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.09.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	3.035.635.136,00	1.841.054.855,00	(1.194.580.281,00)	60,65	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1.346.795.670,00	1.053.793.945,00	(293.001.725,00)	78,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	950.287.000,00	713.827.625,00	(236.459.375,00)	75,12	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	9.787.000,00	8.515.000,00	(1.272.000,00)	87,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.02.5.1.5	- Belanja Hibah	940.500.000,00	705.312.625,00	(235.187.375,00)	74,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	32.769.500,00	30.567.600,00	(2.201.900,00)	93,28	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.05.5.1.1	- Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	32.089.500,00	30.567.600,00	(1.521.900,00)	95,26	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.947.950,00	35.376.140,00	(1.571.810,00)	95,75	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.10.5.1.1	- Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.10.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	31.307.950,00	29.736.140,00	(1.571.810,00)	94,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	326.791.220,00	274.022.580,00	(52.768.640,00)	83,85	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.11.5.1.1	- Belanja Pegawai	40.090.000,00	19.950.000,00	(20.140.000,00)	49,76	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.11.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	286.701.220,00	254.072.580,00	(32.628.640,00)	88,62	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	47.374.101.572,00	41.979.033.826,50	(5.395.067.745,50)	88,61	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	426.937.306,00	311.198.076,00	(115.739.230,00)	72,89	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	426.937.306,00	311.198.076,00	(115.739.230,00)	72,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.117.173.317,00	26.420.219.108,00	(3.696.954.209,00)	87,72	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.100.000,00	(420.000,00)	97,11	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	30.102.653.317,00	26.406.119.108,00	(3.696.534.209,00)	87,72	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	654.967.500,00	620.584.472,00	(34.383.028,00)	94,75	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	654.967.500,00	620.584.472,00	(34.383.028,00)	94,75	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.175.023.449,00	14.627.032.170,50	(1.547.991.278,50)	90,43	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.04.5.1.1	- Belanja Pegawai	331.550.000,00	326.460.000,00	(5.090.000,00)	98,46	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	15.843.473.449,00	14.300.572.170,50	(1.542.901.278,50)	90,26	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	20.444.588.813,00	17.171.232.323,00	(3.273.356.490,00)	83,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.380.960.436,00	1.096.214.463,00	(284.745.973,00)	79,38	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.380.960.436,00	1.096.214.463,00	(284.745.973,00)	79,38	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.039.893.790,00	5.239.223.629,00	(1.800.670.161,00)	74,42	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	13.130.000,00	13.130.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	7.026.763.790,00	5.226.093.629,00	(1.800.670.161,00)	74,37	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	76.511.000,00	65.799.750,00	(10.711.250,00)	86,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	76.511.000,00	65.799.750,00	(10.711.250,00)	86,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.757.500,00	59.768.000,00	(989.500,00)	98,37	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	60.757.500,00	59.768.000,00	(989.500,00)	98,37	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.703.048.922,00	5.047.340.105,00	(655.708.817,00)	88,50	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.09.5.1.1	- Belanja Pegawai	28.110.000,00	21.060.000,00	(7.050.000,00)	74,92	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.09.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	5.674.938.922,00	5.026.280.105,00	(648.658.817,00)	88,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	405.058.040,00	389.034.364,00	(16.023.676,00)	96,04	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.10.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	405.058.040,00	389.034.364,00	(16.023.676,00)	96,04	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.778.359.125,00	5.273.852.012,00	(504.507.113,00)	91,27	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.11.5.1.1	- Belanja Pegawai	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.11.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	5.768.289.125,00	5.263.782.012,00	(504.507.113,00)	91,25	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	155.349.332.956,28	124.649.451.061,00	(30.699.881.895,28)	80,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	155.349.332.956,28	124.649.451.061,00	(30.699.881.895,28)	80,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.10.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	34.219.434.007,00	30.897.044.153,00	(3.322.389.854,00)	90,29	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.10.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	121.129.898.949,28	93.752.406.908,00	(27.377.492.041,28)	77,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.11	<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	1.588.576.000,00	1.185.606.228,00	(402.969.772,00)	74,63	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	268.576.000,00	156.657.233,00	(111.918.767,00)	58,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.11.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	268.576.000,00	156.657.233,00	(111.918.767,00)	58,33	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.11.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	99.905.295,00	(94.705,00)	99,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.11.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.905.295,00	(94.705,00)	99,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.120.000.000,00	829.043.700,00	(290.956.300,00)	74,02	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.11.04.5.1.1	- Belanja Pegawai	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.11.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	520.000.000,00	229.043.700,00	(290.956.300,00)	44,05	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.12	<i>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	2.443.050.000,00	2.332.108.149,00	(110.941.851,00)	95,46	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.510.000.000,00	1.480.932.996,00	(29.067.004,00)	98,08	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.12.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.510.000.000,00	1.480.932.996,00	(29.067.004,00)	98,08	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	740.000.000,00	703.025.153,00	(36.974.847,00)	95,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.12.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	740.000.000,00	703.025.153,00	(36.974.847,00)	95,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	193.050.000,00	148.150.000,00	(44.900.000,00)	76,74	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.12.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	193.050.000,00	148.150.000,00	(44.900.000,00)	76,74	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.13	<i>Penataan Organisasi</i>	321.459.750,00	265.961.511,00	(55.498.239,00)	82,74	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	105.662.700,00	84.324.533,00	(21.338.167,00)	79,81	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.13.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	105.662.700,00	84.324.533,00	(21.338.167,00)	79,81	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	99.788.750,00	81.335.939,00	(18.452.811,00)	81,51	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.13.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	99.788.750,00	81.335.939,00	(18.452.811,00)	81,51	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	116.008.300,00	100.301.039,00	(15.707.261,00)	86,46	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.13.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	116.008.300,00	100.301.039,00	(15.707.261,00)	86,46	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.14	<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	1.871.591.336,00	1.773.513.192,50	(98.078.143,50)	94,76	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	316.091.000,00	301.763.401,00	(14.327.599,00)	95,47	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.14.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	316.091.000,00	301.763.401,00	(14.327.599,00)	95,47	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	954.758.336,00	889.970.627,50	(64.787.708,50)	93,21	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.14.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	954.758.336,00	889.970.627,50	(64.787.708,50)	93,21	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	600.742.000,00	581.779.164,00	(18.962.836,00)	96,84	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.14.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	600.742.000,00	581.779.164,00	(18.962.836,00)	96,84	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.15	<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	30.257.910.000,00	28.411.486.810,00	(1.846.423.190,00)	93,90	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	29.911.879.000,00	28.160.460.110,00	(1.751.418.890,00)	94,14	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.15.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	29.911.879.000,00	28.160.460.110,00	(1.751.418.890,00)	94,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	291.855.000,00	228.820.000,00	(63.035.000,00)	78,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.15.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	291.855.000,00	228.820.000,00	(63.035.000,00)	78,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	54.176.000,00	22.206.700,00	(31.969.300,00)	40,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.15.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	54.176.000,00	22.206.700,00	(31.969.300,00)	40,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.780.102.000,00	926.901.580,00	(853.200.420,00)	52,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	365.984.000,00	312.379.250,00	(53.604.750,00)	85,35	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.16.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	365.984.000,00	312.379.250,00	(53.604.750,00)	85,35	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	944.310.000,00	367.928.024,00	(576.381.976,00)	38,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.16.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	944.310.000,00	367.928.024,00	(576.381.976,00)	38,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	469.808.000,00	246.594.306,00	(223.213.694,00)	52,49	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.16.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	469.808.000,00	246.594.306,00	(223.213.694,00)	52,49	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	17.360.512.000,00	11.769.303.223,00	(5.591.208.777,00)	67,79	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>	4.565.616.000,00	1.154.341.200,00	(3.411.274.800,00)	25,28	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	510.664.000,00	84.775.000,00	(425.889.000,00)	16,60	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	510.664.000,00	84.775.000,00	(425.889.000,00)	16,60	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	4.054.952.000,00	1.069.566.200,00	(2.985.385.800,00)	26,38	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	4.054.952.000,00	1.069.566.200,00	(2.985.385.800,00)	26,38	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04	<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	10.493.957.000,00	8.821.115.523,00	(1.672.841.477,00)	84,06	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.999.150.000,00	1.604.775.255,00	(1.394.374.745,00)	53,51	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	2.999.150.000,00	1.604.775.255,00	(1.394.374.745,00)	53,51	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	260.819.000,00	200.775.548,00	(60.043.452,00)	76,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	260.819.000,00	200.775.548,00	(60.043.452,00)	76,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	7.233.988.000,00	7.015.564.720,00	(218.423.280,00)	96,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.07.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	7.233.988.000,00	7.015.564.720,00	(218.423.280,00)	96,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.05	<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	2.300.939.000,00	1.793.846.500,00	(507.092.500,00)	77,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	2.300.939.000,00	1.793.846.500,00	(507.092.500,00)	77,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.05.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	2.300.939.000,00	1.793.846.500,00	(507.092.500,00)	77,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Kepegawaian Daerah	1.803.207.510,00	1.441.765.942,00	(361.441.568,00)	79,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>	896.907.510,00	820.392.144,00	(76.515.366,00)	91,47	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	627.919.510,00	568.911.500,00	(59.008.010,00)	90,60	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03.5.1.1	- Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	608.599.510,00	549.591.500,00	(59.008.010,00)	90,30	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	30.388.000,00	25.751.500,00	(4.636.500,00)	84,74	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	30.388.000,00	25.751.500,00	(4.636.500,00)	84,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.08.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	38.850.000,00	36.417.750,00	(2.432.250,00)	93,74	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.10.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	38.850.000,00	36.417.750,00	(2.432.250,00)	93,74	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	199.750.000,00	189.311.394,00	(10.438.606,00)	94,77	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.11.5.1.1	- Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.11.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	185.230.000,00	174.791.394,00	(10.438.606,00)	94,36	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Mutasi dan Promosi ASN</i>	369.500.000,00	244.296.943,00	(125.203.057,00)	66,12	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	268.200.000,00	164.826.043,00	(103.373.957,00)	61,46	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	251.280.000,00	147.906.043,00	(103.373.957,00)	58,86	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	101.300.000,00	79.470.900,00	(21.829.100,00)	78,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	101.300.000,00	79.470.900,00	(21.829.100,00)	78,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03	<i>Pengembangan Kompetensi ASN</i>	404.800.000,00	256.449.300,00	(148.350.700,00)	63,35	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	361.000.000,00	221.192.500,00	(139.807.500,00)	61,27	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	7.050.000,00	0,00	(7.050.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	353.950.000,00	221.192.500,00	(132.757.500,00)	62,49	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	20.000.000,00	16.597.000,00	(3.403.000,00)	82,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	16.597.000,00	(3.403.000,00)	82,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	23.800.000,00	18.659.800,00	(5.140.200,00)	78,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.14.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.14.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	18.659.800,00	(5.140.200,00)	78,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04	<i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	132.000.000,00	120.627.555,00	(11.372.445,00)	91,38	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24.844.000,00	20.308.500,00	(4.535.500,00)	81,74	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	24.844.000,00	20.308.500,00	(4.535.500,00)	81,74	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	16.400.000,00	15.799.000,00	(601.000,00)	96,34	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	15.799.000,00	(601.000,00)	96,34	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	56.200.000,00	51.135.555,00	(5.064.445,00)	90,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.08.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	56.200.000,00	51.135.555,00	(5.064.445,00)	90,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	34.556.000,00	33.384.500,00	(1.171.500,00)	96,61	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.10.5.1.1	- Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.10.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	20.036.000,00	18.864.500,00	(1.171.500,00)	94,15	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pemberdayaan Sosial	1.181.373.608,00	1.142.832.862,00	(38.540.746,00)	96,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</i>	39.280.608,00	37.936.010,00	(1.344.598,00)	96,58	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	39.280.608,00	37.936.010,00	(1.344.598,00)	96,58	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	39.280.608,00	37.936.010,00	(1.344.598,00)	96,58	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.142.093.000,00	1.104.896.852,00	(37.196.148,00)	96,74	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	664.726.000,00	662.531.252,00	(2.194.748,00)	99,67	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	664.726.000,00	662.531.252,00	(2.194.748,00)	99,67	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	477.367.000,00	442.365.600,00	(35.001.400,00)	92,67	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	155.457.000,00	120.455.600,00	(35.001.400,00)	77,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04.5.1.5	- Belanja Hibah	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pembinaan Perpustakaan	150.659.680,00	145.304.353,00	(5.355.327,00)	96,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	20.135.000,00	19.579.500,00	(555.500,00)	97,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	17.475.000,00	17.029.000,00	(446.000,00)	97,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.05.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	16.465.000,00	16.019.000,00	(446.000,00)	97,29	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.160.000,00	1.148.500,00	(11.500,00)	99,01	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	1.148.500,00	(11.500,00)	99,01	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1.500.000,00	1.402.000,00	(98.000,00)	93,47	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.09.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.09.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	490.000,00	392.000,00	(98.000,00)	80,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	130.524.680,00	125.724.853,00	(4.799.827,00)	96,32	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	130.524.680,00	125.724.853,00	(4.799.827,00)	96,32	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	130.524.680,00	125.724.853,00	(4.799.827,00)	96,32	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	131.108.441.319,00	83.890.650.643,00	(47.217.790.676,00)	63,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	25.296.049.560,00	17.186.314.797,00	(8.109.734.763,00)	67,94	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	21.440.000,00	17.092.800,00	(4.347.200,00)	79,72	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	8.252.800,00	(4.347.200,00)	65,50	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.400.000.000,00	1.380.449.500,00	(19.550.500,00)	98,60	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.10.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.400.000.000,00	1.380.449.500,00	(19.550.500,00)	98,60	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.693.452.700,00	8.022.540.263,00	(2.670.912.437,00)	75,02	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.12.5.1.1	- Belanja Pegawai	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.12.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	10.687.612.700,00	8.016.700.263,00	(2.670.912.437,00)	75,01	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	96.942.050,00	35.556.000,00	(61.386.050,00)	36,68	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.13.5.1.1	- Belanja Pegawai	3.220.000,00	0,00	(3.220.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.13.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	93.722.050,00	35.556.000,00	(58.166.050,00)	37,94	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.170.410,00	4.648.520,00	(3.521.890,00)	56,89	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.14.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	8.170.410,00	4.648.520,00	(3.521.890,00)	56,89	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	102.050.000,00	81.751.000,00	(20.299.000,00)	80,11	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.15.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	102.050.000,00	81.751.000,00	(20.299.000,00)	80,11	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	3.109.302.220,00	2.742.465.420,00	(366.836.800,00)	88,20	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.16.5.1.1	- Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.16.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	3.106.882.220,00	2.740.045.420,00	(366.836.800,00)	88,19	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	8.714.692.180,00	3.868.165.294,00	(4.846.526.886,00)	44,39	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.17.5.1.1	- Belanja Pegawai	30.560.000,00	12.880.000,00	(17.680.000,00)	42,15	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.17.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	8.684.132.180,00	3.855.285.294,00	(4.828.846.886,00)	44,39	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000,00	885.246.000,00	(114.754.000,00)	88,52	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.18.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	885.246.000,00	(114.754.000,00)	88,52	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150.000.000,00	148.400.000,00	(1.600.000,00)	98,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.19.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	148.400.000,00	(1.600.000,00)	98,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.20.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	105.720.951.059,00	66.652.564.346,00	(39.068.386.713,00)	63,05	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.636.038.600,00	1.067.929.004,00	(568.109.596,00)	65,28	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.636.038.600,00	1.067.929.004,00	(568.109.596,00)	65,28	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.739.590.500,00	2.370.088.790,00	(369.501.710,00)	86,51	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	2.739.590.500,00	2.370.088.790,00	(369.501.710,00)	86,51	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	107.176.000,00	41.450.000,00	(65.726.000,00)	38,67	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	107.176.000,00	41.450.000,00	(65.726.000,00)	38,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.686.376.152,00	1.080.336.975,00	(606.039.177,00)	64,06	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.686.376.152,00	1.080.336.975,00	(606.039.177,00)	64,06	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	636.790.800,00	80.296.875,00	(556.493.925,00)	12,61	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	636.790.800,00	80.296.875,00	(556.493.925,00)	12,61	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	169.524.112,00	101.740.600,00	(67.783.512,00)	60,02	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	169.524.112,00	101.740.600,00	(67.783.512,00)	60,02	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	258.390.000,00	128.128.400,00	(130.261.600,00)	49,59	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.07.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	258.390.000,00	128.128.400,00	(130.261.600,00)	49,59	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	59.593.000,00	28.575.512,00	(31.017.488,00)	47,95	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.08.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	59.593.000,00	28.575.512,00	(31.017.488,00)	47,95	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	25.155.000,00	8.271.072,00	(16.883.928,00)	32,88	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.09.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	25.155.000,00	8.271.072,00	(16.883.928,00)	32,88	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	154.525.000,00	88.400.000,00	(66.125.000,00)	57,21	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.10.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	154.525.000,00	88.400.000,00	(66.125.000,00)	57,21	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	131.401.100,00	73.399.800,00	(58.001.300,00)	55,86	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.11.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	131.401.100,00	73.399.800,00	(58.001.300,00)	55,86	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	499.804.891,00	436.179.340,00	(63.625.551,00)	87,27	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.12.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	199.804.891,00	136.179.340,00	(63.625.551,00)	68,16	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.12.5.1.5	- Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	9.317.849.466,00	1.970.934.669,00	(7.346.914.797,00)	21,15	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.13.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	9.317.849.466,00	1.970.934.669,00	(7.346.914.797,00)	21,15	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	39.308.493.936,00	18.681.564.714,00	(20.626.929.222,00)	47,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.14.5.1.1	- Belanja Pegawai	35.040.000,00	29.200.000,00	(5.840.000,00)	83,33	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.14.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	39.273.453.936,00	18.652.364.714,00	(20.621.089.222,00)	47,49	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.613.582.381,00	987.773.704,00	(625.808.677,00)	61,22	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.15.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.613.582.381,00	987.773.704,00	(625.808.677,00)	61,22	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	406.913.500,00	130.114.490,00	(276.799.010,00)	31,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.16.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.16.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	406.913.500,00	130.114.490,00	(276.799.010,00)	31,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.952.131.500,00	940.495.012,00	(1.011.636.488,00)	48,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.17.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.952.131.500,00	940.495.012,00	(1.011.636.488,00)	48,18	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.654.316.803,00	1.425.314.176,00	(1.229.002.627,00)	53,70	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.18.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	2.654.316.803,00	1.425.314.176,00	(1.229.002.627,00)	53,70	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	98.897.000,00	58.437.500,00	(40.459.500,00)	59,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.19.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	98.897.000,00	58.437.500,00	(40.459.500,00)	59,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	406.391.200,00	168.925.409,00	(237.465.791,00)	41,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.20.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	406.391.200,00	168.925.409,00	(237.465.791,00)	41,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	46.706.556,00	3.462.002,00	(43.244.554,00)	7,41	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.22.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	46.706.556,00	3.462.002,00	(43.244.554,00)	7,41	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	463.695.000,00	396.072.300,00	(67.622.700,00)	85,42	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.23.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	263.695.000,00	216.096.300,00	(47.598.700,00)	81,95	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.23.5.1.5	- Belanja Hibah	200.000.000,00	179.976.000,00	(20.024.000,00)	89,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.379.217.520,00	1.080.337.071,00	(1.298.880.449,00)	45,41	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.25.5.1.1	- Belanja Pegawai	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.25.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	2.372.577.520,00	1.073.697.071,00	(1.298.880.449,00)	45,25	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.411.654.400,00	33.930.657.400,00	(480.997.000,00)	98,60	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.26.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	34.411.654.400,00	33.930.657.400,00	(480.997.000,00)	98,60	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	92.790.000,00	66.120.000,00	(26.670.000,00)	71,26	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.28.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	92.790.000,00	66.120.000,00	(26.670.000,00)	71,26	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	520.903.917,00	195.052.950,00	(325.850.967,00)	37,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.33.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	520.903.917,00	195.052.950,00	(325.850.967,00)	37,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	592.495.725,00	563.113.009,00	(29.382.716,00)	95,04	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.34.5.1.1	- Belanja Pegawai	79.263.050,00	79.262.899,00	(151,00)	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.34.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	513.232.675,00	483.850.110,00	(29.382.565,00)	94,28	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	2.525.515.000,00	205.896.600,00	(2.319.618.400,00)	8,15	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.35.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	2.525.515.000,00	205.896.600,00	(2.319.618.400,00)	8,15	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	41.400.000,00	810.000,00	(40.590.000,00)	1,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.36.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	810.000,00	(40.590.000,00)	1,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	379.632.000,00	23.269.700,00	(356.362.300,00)	6,13	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.37.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	379.632.000,00	23.269.700,00	(356.362.300,00)	6,13	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	404.000.000,00	319.417.272,00	(84.582.728,00)	79,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.38.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	404.000.000,00	319.417.272,00	(84.582.728,00)	79,06	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	73.240.700,00	51.771.500,00	(21.469.200,00)	70,69	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	32.500.000,00	26.915.400,00	(5.584.600,00)	82,82	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	26.915.400,00	(5.584.600,00)	82,82	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20.000.000,00	9.777.900,00	(10.222.100,00)	48,89	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	9.777.900,00	(10.222.100,00)	48,89	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	20.740.700,00	15.078.200,00	(5.662.500,00)	72,70	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.03.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	18.850.700,00	13.188.200,00	(5.662.500,00)	69,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	18.200.000,00	0,00	(18.200.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	18.200.000,00	0,00	(18.200.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	0,00	(18.200.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	3.997.601.348,00	3.512.297.873,00	(485.303.475,00)	87,86	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	165.207.436,00	151.321.820,00	(13.885.616,00)	91,60	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	9.705.000,00	8.947.200,00	(757.800,00)	92,19	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	9.705.000,00	8.947.200,00	(757.800,00)	92,19	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	59.531.436,00	51.697.120,00	(7.834.316,00)	86,84	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	59.531.436,00	51.697.120,00	(7.834.316,00)	86,84	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	95.971.000,00	90.677.500,00	(5.293.500,00)	94,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	95.971.000,00	90.677.500,00	(5.293.500,00)	94,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	2.960.926.412,00	2.707.077.613,00	(253.848.799,00)	91,43	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.690.216.412,00	1.450.374.613,00	(239.841.799,00)	85,81	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.690.216.412,00	1.450.374.613,00	(239.841.799,00)	85,81	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.239.210.000,00	1.238.103.000,00	(1.107.000,00)	99,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	4.210.000,00	3.103.000,00	(1.107.000,00)	73,71	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.02.5.1.5	- Belanja Hibah	1.235.000.000,00	1.235.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	31.500.000,00	18.600.000,00	(12.900.000,00)	59,05	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	18.600.000,00	(12.900.000,00)	59,05	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	812.245.500,00	599.980.040,00	(212.265.460,00)	73,87	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	196.431.000,00	143.802.540,00	(52.628.460,00)	73,21	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	196.431.000,00	143.802.540,00	(52.628.460,00)	73,21	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	473.334.000,00	353.025.000,00	(120.309.000,00)	74,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	473.334.000,00	353.025.000,00	(120.309.000,00)	74,58	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	142.480.500,00	103.152.500,00	(39.328.000,00)	72,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.03.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	142.480.500,00	103.152.500,00	(39.328.000,00)	72,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04	<i>Fasilitas Kerjasama Daerah</i>	59.222.000,00	53.918.400,00	(5.303.600,00)	91,04	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	59.222.000,00	53.918.400,00	(5.303.600,00)	91,04	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	59.222.000,00	53.918.400,00	(5.303.600,00)	91,04	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pendaftaran Penduduk	605.708.000,00	586.385.920,00	(19.322.080,00)	96,81	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	605.708.000,00	586.385.920,00	(19.322.080,00)	96,81	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	587.708.000,00	569.675.220,00	(18.032.780,00)	96,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	587.708.000,00	569.675.220,00	(18.032.780,00)	96,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	18.000.000,00	16.710.700,00	(1.289.300,00)	92,84	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	16.710.700,00	(1.289.300,00)	92,84	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	458.350.000,00	422.409.664,00	(35.940.336,00)	92,16	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	61.750.000,00	53.917.060,00	(7.832.940,00)	87,32	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	40.000.000,00	34.028.060,00	(5.971.940,00)	85,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	34.028.060,00	(5.971.940,00)	85,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	21.750.000,00	19.889.000,00	(1.861.000,00)	91,44	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.12.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	19.889.000,00	(1.861.000,00)	91,44	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	117.198.000,00	112.506.542,00	(4.691.458,00)	96,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	117.198.000,00	112.506.542,00	(4.691.458,00)	96,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	117.198.000,00	112.506.542,00	(4.691.458,00)	96,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	178.802.000,00	159.514.906,00	(19.287.094,00)	89,21	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	178.802.000,00	159.514.906,00	(19.287.094,00)	89,21	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04.5.1.1	- Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.240.000,00	(400.000,00)	92,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	173.162.000,00	154.274.906,00	(18.887.094,00)	89,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04	<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	100.600.000,00	96.471.156,00	(4.128.844,00)	95,90	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100.600.000,00	96.471.156,00	(4.128.844,00)	95,90	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	100.600.000,00	96.471.156,00	(4.128.844,00)	95,90	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	25.000.000,00	24.814.666,00	(185.334,00)	99,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	25.000.000,00	24.814.666,00	(185.334,00)	99,26	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	25.000.000,00	24.814.666,00	(185.334,00)	99,26	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	23.990.000,00	23.804.666,00	(185.334,00)	99,23	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 03 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02	Program Pengelolaan Arsip	8.801.000,00	8.738.500,00	(62.500,00)	99,29	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03	<i>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</i>	8.801.000,00	8.738.500,00	(62.500,00)	99,29	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	8.801.000,00	8.738.500,00	(62.500,00)	99,29	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	7.791.000,00	7.728.500,00	(62.500,00)	99,20	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.069.787.000,00	959.560.615,00	(110.226.385,00)	89,70	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.069.787.000,00	959.560.615,00	(110.226.385,00)	89,70	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5.000.000,00	4.035.600,00	(964.400,00)	80,71	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.035.600,00	(964.400,00)	80,71	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	70.720.000,00	11.510.000,00	(59.210.000,00)	16,28	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	70.720.000,00	11.510.000,00	(59.210.000,00)	16,28	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	383.780.000,00	370.315.050,00	(13.464.950,00)	96,49	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	383.780.000,00	370.315.050,00	(13.464.950,00)	96,49	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	298.134.000,00	297.231.920,00	(902.080,00)	99,70	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	48.134.000,00	47.231.920,00	(902.080,00)	98,13	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 08 . 5 . 1 . 5	- Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	23.500.000,00	15.960.000,00	(7.540.000,00)	67,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.10.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	15.960.000,00	(7.540.000,00)	67,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	205.827.000,00	182.256.500,00	(23.570.500,00)	88,55	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.12.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	205.827.000,00	182.256.500,00	(23.570.500,00)	88,55	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	82.826.000,00	78.251.545,00	(4.574.455,00)	94,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.13.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	82.826.000,00	78.251.545,00	(4.574.455,00)	94,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.820.329.231,00	2.721.660.050,00	(1.098.669.181,00)	71,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	1.778.587.081,00	1.332.760.680,00	(445.826.401,00)	74,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	102.041.000,00	60.581.750,00	(41.459.250,00)	59,37	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	102.041.000,00	60.581.750,00	(41.459.250,00)	59,37	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	110.395.000,00	72.954.550,00	(37.440.450,00)	66,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	110.395.000,00	72.954.550,00	(37.440.450,00)	66,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	17.000.000,00	15.426.100,00	(1.573.900,00)	90,74	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	15.426.100,00	(1.573.900,00)	90,74	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	24.200.000,00	10.054.000,00	(14.146.000,00)	41,55	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	10.054.000,00	(14.146.000,00)	41,55	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	3.278.000,00	1.860.650,00	(1.417.350,00)	56,76	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	3.278.000,00	1.860.650,00	(1.417.350,00)	56,76	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	660.503.081,00	535.484.050,00	(125.019.031,00)	81,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.07.5.1.1	- Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.07.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	641.183.081,00	516.164.050,00	(125.019.031,00)	80,50	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	859.570.000,00	636.399.580,00	(223.170.420,00)	74,04	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.08.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	859.570.000,00	636.399.580,00	(223.170.420,00)	74,04	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	779.786.000,00	370.278.495,00	(409.507.505,00)	47,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	74.151.000,00	24.318.700,00	(49.832.300,00)	32,80	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	74.151.000,00	24.318.700,00	(49.832.300,00)	32,80	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	17.275.000,00	14.439.500,00	(2.835.500,00)	83,59	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	17.275.000,00	14.439.500,00	(2.835.500,00)	83,59	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	124.449.000,00	76.683.600,00	(47.765.400,00)	61,62	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.05.5.1.1	- Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	105.129.000,00	57.363.600,00	(47.765.400,00)	54,56	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	81.875.000,00	40.467.900,00	(41.407.100,00)	49,43	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.07.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	81.875.000,00	40.467.900,00	(41.407.100,00)	49,43	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	41.851.000,00	15.842.350,00	(26.008.650,00)	37,85	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.08.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	41.851.000,00	15.842.350,00	(26.008.650,00)	37,85	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	160.902.000,00	98.598.255,00	(62.303.745,00)	61,28	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.09.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	160.902.000,00	98.598.255,00	(62.303.745,00)	61,28	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	82.565.000,00	59.764.000,00	(22.801.000,00)	72,38	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.10.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	82.565.000,00	59.764.000,00	(22.801.000,00)	72,38	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	196.718.000,00	40.164.190,00	(156.553.810,00)	20,42	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.11.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	196.718.000,00	40.164.190,00	(156.553.810,00)	20,42	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	1.142.115.650,00	975.584.775,00	(166.530.875,00)	85,42	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	81.250.000,00	72.640.725,00	(8.609.275,00)	89,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	81.250.000,00	72.640.725,00	(8.609.275,00)	89,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	104.125.000,00	60.190.100,00	(43.934.900,00)	57,81	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	104.125.000,00	60.190.100,00	(43.934.900,00)	57,81	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	54.100.000,00	35.524.500,00	(18.575.500,00)	65,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.08.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	54.100.000,00	35.524.500,00	(18.575.500,00)	65,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	727.722.650,00	636.424.700,00	(91.297.950,00)	87,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.10.5.1.1	- Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.10.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	704.802.650,00	613.504.700,00	(91.297.950,00)	87,05	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	174.918.000,00	170.804.750,00	(4.113.250,00)	97,65	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.11.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	174.918.000,00	170.804.750,00	(4.113.250,00)	97,65	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04	<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	119.840.500,00	43.036.100,00	(76.804.400,00)	35,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	119.840.500,00	43.036.100,00	(76.804.400,00)	35,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.08.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	119.840.500,00	43.036.100,00	(76.804.400,00)	35,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pengelolaan Pendidikan	129.455.660.763,00	117.216.975.581,00	(12.238.685.182,00)	90,55	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	60.811.888.210,00	57.430.937.923,00	(3.380.950.287,00)	94,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	58.098.000,00	57.040.500,00	(1.057.500,00)	98,18	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	58.098.000,00	57.040.500,00	(1.057.500,00)	98,18	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	60.624.050,00	59.026.000,00	(1.598.050,00)	97,36	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	60.624.050,00	59.026.000,00	(1.598.050,00)	97,36	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	21.030.000,00	20.531.500,00	(498.500,00)	97,63	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	21.030.000,00	20.531.500,00	(498.500,00)	97,63	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.400.000.000,00	975.233.325,00	(424.766.675,00)	69,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.08.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.400.000.000,00	975.233.325,00	(424.766.675,00)	69,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.08.5.1.5	- Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	750.000.000,00	725.296.900,00	(24.703.100,00)	96,71	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.17.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	725.296.900,00	(24.703.100,00)	96,71	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	40.000.000,00	28.426.200,00	(11.573.800,00)	71,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.21.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	28.426.200,00	(11.573.800,00)	71,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	151.086.000,00	36.810.000,00	(114.276.000,00)	24,36	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.22.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	151.086.000,00	36.810.000,00	(114.276.000,00)	24,36	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	90.000.000,00	72.252.250,00	(17.747.750,00)	80,28	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.23.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	72.252.250,00	(17.747.750,00)	80,28	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	200.000.000,00	125.285.500,00	(74.714.500,00)	62,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.24.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	125.285.500,00	(74.714.500,00)	62,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	550.000.000,00	414.975.200,00	(135.024.800,00)	75,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.25.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	414.975.200,00	(135.024.800,00)	75,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	207.000.000,00	147.927.050,00	(59.072.950,00)	71,46	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.27.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	207.000.000,00	147.927.050,00	(59.072.950,00)	71,46	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	867.200.000,00	763.456.800,00	(103.743.200,00)	88,04	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.28.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	172.200.000,00	118.456.800,00	(53.743.200,00)	68,79	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.28.5.1.5	- Belanja Hibah	695.000.000,00	645.000.000,00	(50.000.000,00)	92,81	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	55.516.850.160,00	53.214.803.998,00	(2.302.046.162,00)	95,85	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.29.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	55.516.850.160,00	53.214.803.998,00	(2.302.046.162,00)	95,85	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	900.000.000,00	789.872.700,00	(110.127.300,00)	87,76	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.30.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	789.872.700,00	(110.127.300,00)	87,76	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	45.525.074.373,00	40.432.518.762,00	(5.092.555.611,00)	88,81	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	115.000.000,00	108.234.000,00	(6.766.000,00)	94,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	108.234.000,00	(6.766.000,00)	94,12	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	32.000.000,00	24.854.350,00	(7.145.650,00)	77,67	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.12.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	24.854.350,00	(7.145.650,00)	77,67	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	265.000.000,00	254.297.325,00	(10.702.675,00)	95,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.14.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	265.000.000,00	254.297.325,00	(10.702.675,00)	95,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	295.000.000,00	282.621.325,00	(12.378.675,00)	95,80	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.17.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	295.000.000,00	282.621.325,00	(12.378.675,00)	95,80	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	455.000.000,00	432.641.950,00	(22.358.050,00)	95,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.18.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	455.000.000,00	432.641.950,00	(22.358.050,00)	95,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	260.000.000,00	247.515.650,00	(12.484.350,00)	95,20	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.24.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	247.515.650,00	(12.484.350,00)	95,20	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.500.000.000,00	939.970.670,00	(560.029.330,00)	62,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.28.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	939.970.670,00	(560.029.330,00)	62,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	55.000.000,00	28.641.600,00	(26.358.400,00)	52,08	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.32.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	28.641.600,00	(26.358.400,00)	52,08	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	11.744.400,00	6.942.675,00	(4.801.725,00)	59,11	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.35.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	11.744.400,00	6.942.675,00	(4.801.725,00)	59,11	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.000.000,00	62.920.000,00	(37.080.000,00)	62,92	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.36.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	62.920.000,00	(37.080.000,00)	62,92	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	125.000.000,00	90.275.800,00	(34.724.200,00)	72,22	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.37.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	90.275.800,00	(34.724.200,00)	72,22	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000,00	210.511.900,00	(89.488.100,00)	70,17	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.38.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	210.511.900,00	(89.488.100,00)	70,17	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	153.800.000,00	75.478.480,00	(78.321.520,00)	49,08	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.40.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	153.800.000,00	75.478.480,00	(78.321.520,00)	49,08	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.021.600.000,00	1.632.928.750,00	(388.671.250,00)	80,77	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.41.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	852.600.000,00	561.678.750,00	(290.921.250,00)	65,88	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.41.5.1.5	- Belanja Hibah	1.169.000.000,00	1.071.250.000,00	(97.750.000,00)	91,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	39.665.929.973,00	35.888.096.287,00	(3.777.833.686,00)	90,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.42.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	39.665.929.973,00	35.888.096.287,00	(3.777.833.686,00)	90,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	170.000.000,00	146.588.000,00	(23.412.000,00)	86,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.43.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	146.588.000,00	(23.412.000,00)	86,23	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03	<i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>	21.236.400.000,00	17.655.799.386,00	(3.580.600.614,00)	83,14	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	243.200.000,00	174.569.700,00	(68.630.300,00)	71,78	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.13.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	243.200.000,00	174.569.700,00	(68.630.300,00)	71,78	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	45.000.000,00	15.416.200,00	(29.583.800,00)	34,26	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.14.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	15.416.200,00	(29.583.800,00)	34,26	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	178.800.000,00	116.246.850,00	(62.553.150,00)	65,02	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.16.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	178.800.000,00	116.246.850,00	(62.553.150,00)	65,02	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	775.000.000,00	402.808.750,00	(372.191.250,00)	51,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.17.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	130.058.750,00	(129.941.250,00)	50,02	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.17.5.1.5	- Belanja Hibah	515.000.000,00	272.750.000,00	(242.250.000,00)	52,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	19.994.400.000,00	16.946.757.886,00	(3.047.642.114,00)	84,76	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.18.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	58.357.886,00	(1.642.114,00)	97,26	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.18.5.1.5	- Belanja Hibah	19.934.400.000,00	16.888.400.000,00	(3.046.000.000,00)	84,72	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04	<i>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	1.882.298.180,00	1.697.719.510,00	(184.578.670,00)	90,19	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.09.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	137.423.180,00	117.774.150,00	(19.649.030,00)	85,70	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.12.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	137.423.180,00	117.774.150,00	(19.649.030,00)	85,70	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	52.400.000,00	42.366.900,00	(10.033.100,00)	80,85	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.13.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	52.400.000,00	42.366.900,00	(10.033.100,00)	80,85	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	270.000.000,00	247.706.520,00	(22.293.480,00)	91,74	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.16.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	247.706.520,00	(22.293.480,00)	91,74	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.282.020.000,00	1.155.386.490,00	(126.633.510,00)	90,12	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.17.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	306.820.000,00	243.886.490,00	(62.933.510,00)	79,49	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.17.5.1.5	- Belanja Hibah	975.200.000,00	911.500.000,00	(63.700.000,00)	93,47	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	140.455.000,00	134.485.450,00	(5.969.550,00)	95,75	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.20.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	140.455.000,00	134.485.450,00	(5.969.550,00)	95,75	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.949.600.000,00	1.997.257.617,00	(952.342.383,00)	67,71	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	179.500.000,00	131.552.000,00	(47.948.000,00)	73,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	119.500.000,00	103.337.750,00	(16.162.250,00)	86,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.53.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	119.500.000,00	103.337.750,00	(16.162.250,00)	86,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	28.214.250,00	(31.785.750,00)	47,02	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.61.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	28.214.250,00	(31.785.750,00)	47,02	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.770.100.000,00	1.865.705.617,00	(904.394.383,00)	67,35	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	272.500.000,00	90.738.000,00	(181.762.000,00)	33,30	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	272.500.000,00	90.738.000,00	(181.762.000,00)	33,30	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.497.600.000,00	1.774.967.617,00	(722.632.383,00)	71,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.21.5.1.1	- Belanja Pegawai	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.21.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	2.490.800.000,00	1.774.967.617,00	(715.832.383,00)	71,26	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	655.601.000,00	516.362.900,00	(139.238.100,00)	78,76	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	655.601.000,00	516.362.900,00	(139.238.100,00)	78,76	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	305.601.000,00	167.944.900,00	(137.656.100,00)	54,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	197.601.000,00	167.944.900,00	(29.656.100,00)	84,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.1.5	- Belanja Hibah	108.000.000,00	0,00	(108.000.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.1.5	- Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	300.000.000,00	298.468.000,00	(1.532.000,00)	99,49	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	298.468.000,00	(1.532.000,00)	99,49	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03.5.1.5	- Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	308.151.000,00	296.588.152,00	(11.562.848,00)	96,25	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>	308.151.000,00	296.588.152,00	(11.562.848,00)	96,25	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	117.223.500,00	111.956.652,00	(5.266.848,00)	95,51	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03.5.1.1	- Belanja Pegawai	12.690.000,00	10.890.000,00	(1.800.000,00)	85,82	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	104.533.500,00	101.066.652,00	(3.466.848,00)	96,68	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	190.927.500,00	184.631.500,00	(6.296.000,00)	96,70	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	190.927.500,00	184.631.500,00	(6.296.000,00)	96,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pengembangan Kebudayaan	702.718.000,00	698.376.165,00	(4.341.835,00)	99,38	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	661.832.000,00	658.355.163,00	(3.476.837,00)	99,47	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	148.900.000,00	145.424.263,00	(3.475.737,00)	97,67	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	148.900.000,00	145.424.263,00	(3.475.737,00)	97,67	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	512.932.000,00	512.930.900,00	(1.100,00)	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	11.522.000,00	11.520.900,00	(1.100,00)	99,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.1.5	- Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	40.886.000,00	40.021.002,00	(864.998,00)	97,88	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	40.886.000,00	40.021.002,00	(864.998,00)	97,88	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	38.866.000,00	38.001.002,00	(864.998,00)	97,77	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pengembangan Perumahan	2.098.250.000,00	1.094.808.246,00	(1.003.441.754,00)	52,18	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	900.000.000,00	710.366.500,00	(189.633.500,00)	78,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	900.000.000,00	710.366.500,00	(189.633.500,00)	78,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	710.366.500,00	(189.633.500,00)	78,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	942.900.000,00	147.685.921,00	(795.214.079,00)	15,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	942.900.000,00	147.685.921,00	(795.214.079,00)	15,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	942.900.000,00	147.685.921,00	(795.214.079,00)	15,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.05	<i>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>	255.350.000,00	236.755.825,00	(18.594.175,00)	92,72	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	255.350.000,00	236.755.825,00	(18.594.175,00)	92,72	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.05.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	255.350.000,00	236.755.825,00	(18.594.175,00)	92,72	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.297.900.490,00	1.293.183.045,00	(4.717.445,00)	99,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Pengembangan Kompetensi Teknis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	1.297.900.490,00	1.293.183.045,00	(4.717.445,00)	99,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.297.900.490,00	1.293.183.045,00	(4.717.445,00)	99,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.07.5.1.1	- Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.07.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.274.980.490,00	1.270.263.045,00	(4.717.445,00)	99,63	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pengendalian Penduduk	342.190.000,00	328.633.275,00	(13.556.725,00)	96,04	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	342.190.000,00	328.633.275,00	(13.556.725,00)	96,04	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	17.390.000,00	17.390.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	17.390.000,00	17.390.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	324.800.000,00	311.243.275,00	(13.556.725,00)	95,83	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.11.5.1.1	- Belanja Pegawai	14.100.000,00	7.050.000,00	(7.050.000,00)	50,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.11.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	310.700.000,00	304.193.275,00	(6.506.725,00)	97,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	41.260.000,00	35.181.000,00	(6.079.000,00)	85,27	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	41.260.000,00	35.181.000,00	(6.079.000,00)	85,27	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	41.260.000,00	35.181.000,00	(6.079.000,00)	85,27	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	41.260.000,00	35.181.000,00	(6.079.000,00)	85,27	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.429.213.984,00	1.316.218.478,00	(112.995.506,00)	92,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>	220.200.000,00	175.916.750,00	(44.283.250,00)	79,89	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	220.200.000,00	175.916.750,00	(44.283.250,00)	79,89	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	212.940.000,00	168.656.750,00	(44.283.250,00)	79,20	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03	<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	1.209.013.984,00	1.140.301.728,00	(68.712.256,00)	94,32	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	369.675.984,00	345.066.000,00	(24.609.984,00)	93,34	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	369.675.984,00	345.066.000,00	(24.609.984,00)	93,34	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	839.338.000,00	795.235.728,00	(44.102.272,00)	94,75	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04.5.1.1	- Belanja Pegawai	17.190.000,00	17.190.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	822.148.000,00	778.045.728,00	(44.102.272,00)	94,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.529.817.000,00	2.464.720.102,00	(65.096.898,00)	97,43	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.829.463.000,00	1.801.267.602,00	(28.195.398,00)	98,46	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	1.604.365.000,00	1.577.508.052,00	(26.856.948,00)	98,33	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.604.365.000,00	1.577.508.052,00	(26.856.948,00)	98,33	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	20.000.000,00	19.400.700,00	(599.300,00)	97,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.400.700,00	(599.300,00)	97,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5.500.000,00	5.470.000,00	(30.000,00)	99,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.470.000,00	(30.000,00)	99,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	181.965.000,00	181.764.650,00	(200.350,00)	99,89	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	181.965.000,00	181.764.650,00	(200.350,00)	99,89	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	4.000.000,00	3.909.800,00	(90.200,00)	97,75	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.909.800,00	(90.200,00)	97,75	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	13.633.000,00	13.214.400,00	(418.600,00)	96,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.08.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	13.633.000,00	13.214.400,00	(418.600,00)	96,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	700.354.000,00	663.452.500,00	(36.901.500,00)	94,73	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.295.000,00	4.295.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	4.295.000,00	4.295.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	335.765.000,00	329.662.800,00	(6.102.200,00)	98,18	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	335.765.000,00	329.662.800,00	(6.102.200,00)	98,18	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	360.294.000,00	329.494.700,00	(30.799.300,00)	91,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	360.294.000,00	329.494.700,00	(30.799.300,00)	91,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.368.335.135,00	1.158.137.700,00	(210.197.435,00)	84,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	936.819.135,00	776.850.450,00	(159.968.685,00)	82,92	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	881.769.335,00	723.600.750,00	(158.168.585,00)	82,06	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	881.769.335,00	723.600.750,00	(158.168.585,00)	82,06	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	55.049.800,00	53.249.700,00	(1.800.100,00)	96,73	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	55.049.800,00	53.249.700,00	(1.800.100,00)	96,73	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	431.516.000,00	381.287.250,00	(50.228.750,00)	88,36	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	300.136.000,00	264.385.000,00	(35.751.000,00)	88,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	300.136.000,00	264.385.000,00	(35.751.000,00)	88,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	131.380.000,00	116.902.250,00	(14.477.750,00)	88,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	131.380.000,00	116.902.250,00	(14.477.750,00)	88,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.969.176.000,00	3.541.032.195,00	(428.143.805,00)	89,21	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	1.641.275.000,00	1.307.412.257,00	(333.862.743,00)	79,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.275.000,00	0,00	(1.275.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	0,00	(1.275.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1.450.000.000,00	1.118.949.882,00	(331.050.118,00)	77,17	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03.5.1.1	- Belanja Pegawai	2.720.000,00	0,00	(2.720.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.447.280.000,00	1.118.949.882,00	(328.330.118,00)	77,31	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	190.000.000,00	188.462.375,00	(1.537.625,00)	99,19	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.04.5.1.1	- Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	175.480.000,00	173.942.375,00	(1.537.625,00)	99,12	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03	<i>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04	<i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	497.000.000,00	455.907.200,00	(41.092.800,00)	91,73	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	497.000.000,00	455.907.200,00	(41.092.800,00)	91,73	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	19.320.000,00	18.720.000,00	(600.000,00)	96,89	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	477.680.000,00	437.187.200,00	(40.492.800,00)	91,52	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.05	<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	580.461.000,00	567.268.050,00	(13.192.950,00)	97,73	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	208.461.000,00	198.162.550,00	(10.298.450,00)	95,06	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.05.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	208.461.000,00	198.162.550,00	(10.298.450,00)	95,06	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	272.000.000,00	270.799.500,00	(1.200.500,00)	99,56	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.05.04.5.1.1	- Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.05.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	252.680.000,00	251.479.500,00	(1.200.500,00)	99,52	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	98.306.000,00	(1.694.000,00)	98,31	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.05.07.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.306.000,00	(1.694.000,00)	98,31	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.06	<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	1.074.440.000,00	1.036.884.688,00	(37.555.312,00)	96,50	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.06.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	861.640.000,00	834.931.188,00	(26.708.812,00)	96,90	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.06.03.5.1.1	- Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.06.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	838.720.000,00	812.011.188,00	(26.708.812,00)	96,82	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	178.800.000,00	177.354.500,00	(1.445.500,00)	99,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.06.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	178.800.000,00	177.354.500,00	(1.445.500,00)	99,19	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	34.000.000,00	24.599.000,00	(9.401.000,00)	72,35	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.06.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	24.599.000,00	(9.401.000,00)	72,35	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.08	<i>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	176.000.000,00	173.560.000,00	(2.440.000,00)	98,61	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	176.000.000,00	173.560.000,00	(2.440.000,00)	98,61	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.08.04.5.1.1	- Belanja Pegawai	14.520.000,00	12.120.000,00	(2.400.000,00)	83,47	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.08.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	161.480.000,00	161.440.000,00	(40.000,00)	99,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.08.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.09	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.09.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.09.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	181.187.200,00	95.186.100,00	(86.001.100,00)	52,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	171.987.200,00	85.986.100,00	(86.001.100,00)	50,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	171.987.200,00	85.986.100,00	(86.001.100,00)	50,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	171.987.200,00	85.986.100,00	(86.001.100,00)	50,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	772.840.000,00	324.527.475,00	(448.312.525,00)	41,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	306.068.000,00	124.391.075,00	(181.676.925,00)	40,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	55.000.000,00	7.200.475,00	(47.799.525,00)	13,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	7.200.475,00	(47.799.525,00)	13,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	13.857.000,00	3.852.000,00	(10.005.000,00)	27,80	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	13.857.000,00	3.852.000,00	(10.005.000,00)	27,80	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	13.450.000,00	4.515.000,00	(8.935.000,00)	33,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	13.450.000,00	4.515.000,00	(8.935.000,00)	33,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.05	Pengawasan Desa	185.665.000,00	99.602.800,00	(86.062.200,00)	53,65	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.05.5.1.1	- Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	162.745.000,00	76.682.800,00	(86.062.200,00)	47,12	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	38.096.000,00	9.220.800,00	(28.875.200,00)	24,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 07 . 5 . 1 . 2	Pemeriksaan APIP - Belanja Barang dan Jasa	38.096.000,00	9.220.800,00	(28.875.200,00)	24,20	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	466.772.000,00	200.136.400,00	(266.635.600,00)	42,88	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	62.400.000,00	1.315.000,00	(61.085.000,00)	2,11	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	62.400.000,00	1.315.000,00	(61.085.000,00)	2,11	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	404.372.000,00	198.821.400,00	(205.550.600,00)	49,17	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	387.452.000,00	181.901.400,00	(205.550.600,00)	46,95	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	88.040.000,00	86.395.650,00	(1.644.350,00)	98,13	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	88.040.000,00	86.395.650,00	(1.644.350,00)	98,13	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	23.540.000,00	22.984.400,00	(555.600,00)	97,64	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	23.540.000,00	22.984.400,00	(555.600,00)	97,64	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64.500.000,00	63.411.250,00	(1.088.750,00)	98,31	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	63.411.250,00	(1.088.750,00)	98,31	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	57.996.000,00	50.266.000,00	(7.730.000,00)	86,67	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	57.996.000,00	50.266.000,00	(7.730.000,00)	86,67	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	57.996.000,00	50.266.000,00	(7.730.000,00)	86,67	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	57.996.000,00	50.266.000,00	(7.730.000,00)	86,67	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.380.650.000,00	1.023.824.600,00	(356.825.400,00)	74,16	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01	<i>Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	1.380.650.000,00	1.023.824.600,00	(356.825.400,00)	74,16	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	469.200.000,00	170.115.200,00	(299.084.800,00)	36,26	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 03 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	463.560.000,00	164.475.200,00	(299.084.800,00)	35,48	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	808.650.000,00	766.486.000,00	(42.164.000,00)	94,79	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 04 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	802.920.000,00	760.756.000,00	(42.164.000,00)	94,75	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	102.800.000,00	87.223.400,00	(15.576.600,00)	84,85	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	102.800.000,00	87.223.400,00	(15.576.600,00)	84,85	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 05 . 5 . 1 . 6	- Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	135.000.000,00	108.394.300,00	(26.605.700,00)	80,29	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</i>	135.000.000,00	108.394.300,00	(26.605.700,00)	80,29	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	135.000.000,00	108.394.300,00	(26.605.700,00)	80,29	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	131.370.000,00	104.764.300,00	(26.605.700,00)	79,75	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.529.043.000,00	1.363.819.012,00	(165.223.988,00)	89,19	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	1.279.043.000,00	1.118.980.250,00	(160.062.750,00)	87,49	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	74.150.000,00	59.970.000,00	(14.180.000,00)	80,88	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	74.150.000,00	59.970.000,00	(14.180.000,00)	80,88	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	255.649.000,00	247.127.750,00	(8.521.250,00)	96,67	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	255.649.000,00	247.127.750,00	(8.521.250,00)	96,67	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	949.244.000,00	811.882.500,00	(137.361.500,00)	85,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.07.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	949.244.000,00	811.882.500,00	(137.361.500,00)	85,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	50.000.000,00	48.342.000,00	(1.658.000,00)	96,68	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	50.000.000,00	48.342.000,00	(1.658.000,00)	96,68	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.342.000,00	(1.658.000,00)	96,68	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	200.000.000,00	196.496.762,00	(3.503.238,00)	98,25	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	75.000.000,00	74.591.256,00	(408.744,00)	99,46	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.591.256,00	(408.744,00)	99,46	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	125.000.000,00	121.905.506,00	(3.094.494,00)	97,52	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.03.5.1.1	- Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.240.000,00	(400.000,00)	92,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	119.360.000,00	116.665.506,00	(2.694.494,00)	97,74	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Kawasan Permukiman	2.828.917.000,00	2.707.120.000,00	(121.797.000,00)	95,69	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	19.900.000,00	2.590.000,00	(17.310.000,00)	13,02	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	19.900.000,00	2.590.000,00	(17.310.000,00)	13,02	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	2.590.000,00	(17.310.000,00)	13,02	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	2.809.017.000,00	2.704.530.000,00	(104.487.000,00)	96,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.02	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	2.809.017.000,00	2.704.530.000,00	(104.487.000,00)	96,28	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	2.809.017.000,00	2.704.530.000,00	(104.487.000,00)	96,28	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.02.5.1.6	- Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	921.279.000,00	786.153.294,00	(135.125.706,00)	85,33	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	280.000.000,00	267.336.292,00	(12.663.708,00)	95,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.325.000,00	26.451.800,00	(2.873.200,00)	90,20	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	29.325.000,00	26.451.800,00	(2.873.200,00)	90,20	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	31.175.000,00	30.659.500,00	(515.500,00)	98,35	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	31.175.000,00	30.659.500,00	(515.500,00)	98,35	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	42.500.000,00	42.280.000,00	(220.000,00)	99,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03.5.1.1	- Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	25.580.000,00	25.360.000,00	(220.000,00)	99,14	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70.987.500,00	69.146.656,00	(1.840.844,00)	97,41	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	70.987.500,00	69.146.656,00	(1.840.844,00)	97,41	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60.547.000,00	56.896.756,00	(3.650.244,00)	93,97	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	60.547.000,00	56.896.756,00	(3.650.244,00)	93,97	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	45.465.500,00	41.901.580,00	(3.563.920,00)	92,16	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.07.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	45.465.500,00	41.901.580,00	(3.563.920,00)	92,16	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	332.601.000,00	220.337.899,00	(112.263.101,00)	66,25	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	218.441.000,00	108.549.500,00	(109.891.500,00)	49,69	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	218.441.000,00	108.549.500,00	(109.891.500,00)	49,69	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	39.800.000,00	37.461.700,00	(2.338.300,00)	94,12	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	34.160.000,00	31.821.700,00	(2.338.300,00)	93,15	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	15.000.000,00	14.969.300,00	(30.700,00)	99,80	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.969.300,00	(30.700,00)	99,80	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.360.000,00	59.357.399,00	(2.601,00)	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	59.360.000,00	59.357.399,00	(2.601,00)	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	308.678.000,00	298.479.103,00	(10.198.897,00)	96,70	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.278.000,00	59.099.703,00	(178.297,00)	99,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	59.278.000,00	59.099.703,00	(178.297,00)	99,70	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	249.400.000,00	239.379.400,00	(10.020.600,00)	95,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.05.5.1.1	- Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	243.760.000,00	233.739.400,00	(10.020.600,00)	95,89	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.180.933.200,00	953.908.350,00	(227.024.850,00)	80,78	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	1.085.933.200,00	858.908.350,00	(227.024.850,00)	79,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	1.085.933.200,00	858.908.350,00	(227.024.850,00)	79,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.074.253.200,00	847.228.350,00	(227.024.850,00)	78,87	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01.5.1.5	- Belanja Hibah	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.05	<i>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.05.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Pemasaran Pariwisata	100.000.000,00	98.593.810,00	(1.406.190,00)	98,59	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	100.000.000,00	98.593.810,00	(1.406.190,00)	98,59	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	70.000.000,00	68.748.810,00	(1.251.190,00)	98,21	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	68.748.810,00	(1.251.190,00)	98,21	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	30.000.000,00	29.845.000,00	(155.000,00)	99,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.845.000,00	(155.000,00)	99,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	105.000.000,00	21.332.100,00	(83.667.900,00)	20,32	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	105.000.000,00	21.332.100,00	(83.667.900,00)	20,32	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	21.332.100,00	(18.667.900,00)	53,33	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	21.332.100,00	(18.667.900,00)	53,33	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.04.5.1.1	- Belanja Pegawai	7.670.000,00	0,00	(7.670.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	57.330.000,00	0,00	(57.330.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.833.076.699,00	6.979.364.671,00	(853.712.028,00)	89,10	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	4.758.963.307,00	3.973.439.881,00	(785.523.426,00)	83,49	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	166.857.050,00	142.042.700,00	(24.814.350,00)	85,13	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	166.857.050,00	142.042.700,00	(24.814.350,00)	85,13	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.592.106.257,00	3.831.397.181,00	(760.709.076,00)	83,43	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	4.592.106.257,00	3.831.397.181,00	(760.709.076,00)	83,43	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	3.074.113.392,00	3.005.924.790,00	(68.188.602,00)	97,78	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	107.934.150,00	95.149.000,00	(12.785.150,00)	88,15	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	107.934.150,00	95.149.000,00	(12.785.150,00)	88,15	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.030.937.361,00	1.009.667.740,00	(21.269.621,00)	97,94	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.030.937.361,00	1.009.667.740,00	(21.269.621,00)	97,94	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.750.891.881,00	1.718.596.550,00	(32.295.331,00)	98,16	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.750.891.881,00	1.718.596.550,00	(32.295.331,00)	98,16	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	184.350.000,00	182.511.500,00	(1.838.500,00)	99,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	184.350.000,00	182.511.500,00	(1.838.500,00)	99,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.360.059.270,00	2.828.940.912,00	(4.531.118.358,00)	38,44	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	1.747.602.834,00	645.551.916,00	(1.102.050.918,00)	36,94	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1.450.000,00	1.449.900,00	(100,00)	99,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	1.449.900,00	(100,00)	99,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	225.609.500,00	181.394.400,00	(44.215.100,00)	80,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	225.609.500,00	181.394.400,00	(44.215.100,00)	80,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	74.582.500,00	28.075.500,00	(46.507.000,00)	37,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	74.582.500,00	28.075.500,00	(46.507.000,00)	37,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	5.000.834,00	3.000.000,00	(2.000.834,00)	59,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	5.000.834,00	3.000.000,00	(2.000.834,00)	59,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.440.960.000,00	431.632.116,00	(1.009.327.884,00)	29,95	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.07.5.1.1	- Belanja Pegawai	3.820.000,00	0,00	(3.820.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.07.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.437.140.000,00	431.632.116,00	(1.005.507.884,00)	30,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	1.953.849.000,00	1.180.161.560,00	(773.687.440,00)	60,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	537.037.750,00	433.040.550,00	(103.997.200,00)	80,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	537.037.750,00	433.040.550,00	(103.997.200,00)	80,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	29.049.000,00	25.000.000,00	(4.049.000,00)	86,06	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	29.049.000,00	25.000.000,00	(4.049.000,00)	86,06	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.387.762.250,00	722.121.010,00	(665.641.240,00)	52,03	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.387.762.250,00	722.121.010,00	(665.641.240,00)	52,03	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.373.999.436,00	763.944.436,00	(1.610.055.000,00)	32,18	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	254.870.000,00	40.309.200,00	(214.560.800,00)	15,82	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	251.240.000,00	40.309.200,00	(210.930.800,00)	16,04	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.053.463.000,00	671.091.000,00	(1.382.372.000,00)	32,68	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	2.053.463.000,00	671.091.000,00	(1.382.372.000,00)	32,68	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5.000.000,00	2.800.000,00	(2.200.000,00)	56,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.800.000,00	(2.200.000,00)	56,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	29.793.000,00	19.780.800,00	(10.012.200,00)	66,39	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.06.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.310.000,00	0,00	(1.310.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	28.483.000,00	19.780.800,00	(8.702.200,00)	69,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	10.800.000,00	9.890.000,00	(910.000,00)	91,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.09.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.09.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	9.890.000,00	(910.000,00)	91,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	20.073.436,00	20.073.436,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.11.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	20.073.436,00	20.073.436,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.04	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	1.284.608.000,00	239.283.000,00	(1.045.325.000,00)	18,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 02 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	1.284.608.000,00	239.283.000,00	(1.045.325.000,00)	18,63	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 03 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	1.284.608.000,00	239.283.000,00	(1.045.325.000,00)	18,63	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03	Program Penanggulangan Bencana	2.653.353.400,00	2.447.707.856,00	(205.645.544,00)	92,25	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	804.800,00	774.800,00	(30.000,00)	96,27	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	804.800,00	774.800,00	(30.000,00)	96,27	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	804.800,00	774.800,00	(30.000,00)	96,27	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	898.800.800,00	789.435.806,00	(109.364.994,00)	87,83	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000,00	71.884.000,00	(8.116.000,00)	89,86	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	71.884.000,00	(8.116.000,00)	89,86	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	61.805.486,00	59.387.450,00	(2.418.036,00)	96,09	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	61.805.486,00	59.387.450,00	(2.418.036,00)	96,09	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	25.000.000,00	22.976.500,00	(2.023.500,00)	91,91	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 04 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.976.500,00	(2.023.500,00)	91,91	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	252.117.500,00	199.587.900,00	(52.529.600,00)	79,16	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 05 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	252.117.500,00	199.587.900,00	(52.529.600,00)	79,16	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	78.686.214,00	64.491.000,00	(14.195.214,00)	81,96	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 06 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	78.686.214,00	64.491.000,00	(14.195.214,00)	81,96	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	92.920.400,00	69.691.250,00	(23.229.150,00)	75,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 07 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	92.920.400,00	69.691.250,00	(23.229.150,00)	75,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	308.271.200,00	301.417.706,00	(6.853.494,00)	97,78	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 08 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	308.271.200,00	301.417.706,00	(6.853.494,00)	97,78	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	1.753.747.800,00	1.657.497.250,00	(96.250.550,00)	94,51	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.167.692.900,00	1.149.795.550,00	(17.897.350,00)	98,47	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	1.167.692.900,00	1.149.795.550,00	(17.897.350,00)	98,47	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	406.054.900,00	360.250.650,00	(45.804.250,00)	88,72	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 03 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	256.054.900,00	210.250.650,00	(45.804.250,00)	82,11	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 03 . 5 . 1 . 5	- Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	180.000.000,00	147.451.050,00	(32.548.950,00)	81,92	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	147.451.050,00	(32.548.950,00)	81,92	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Pencatatan Sipil	266.883.000,00	257.189.114,00	(9.693.886,00)	96,37	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	266.883.000,00	257.189.114,00	(9.693.886,00)	96,37	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	266.883.000,00	257.189.114,00	(9.693.886,00)	96,37	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	266.883.000,00	257.189.114,00	(9.693.886,00)	96,37	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	400.000.000,00	122.554.636,00	(277.445.364,00)	30,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	400.000.000,00	122.554.636,00	(277.445.364,00)	30,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000,00	122.554.636,00	(277.445.364,00)	30,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	27.740.000,00	15.294.636,00	(12.445.364,00)	55,14	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.5	- Belanja Hibah	365.000.000,00	100.000.000,00	(265.000.000,00)	27,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.324.884.900,00	4.261.438.652,00	(63.446.248,00)	98,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	3.633.573.900,00	3.618.223.952,00	(15.349.948,00)	99,58	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.633.573.900,00	3.618.223.952,00	(15.349.948,00)	99,58	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03.5.1.1	- Belanja Pegawai	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	3.631.363.900,00	3.616.013.952,00	(15.349.948,00)	99,58	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02	<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	691.311.000,00	643.214.700,00	(48.096.300,00)	93,04	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	691.311.000,00	643.214.700,00	(48.096.300,00)	93,04	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.07.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	691.311.000,00	643.214.700,00	(48.096.300,00)	93,04	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.097.142.950,00	3.399.257.578,00	(697.885.372,00)	82,97	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	4.097.142.950,00	3.399.257.578,00	(697.885.372,00)	82,97	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	325.871.000,00	304.794.600,00	(21.076.400,00)	93,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	325.871.000,00	304.794.600,00	(21.076.400,00)	93,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	128.008.150,00	111.784.250,00	(16.223.900,00)	87,33	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	128.008.150,00	111.784.250,00	(16.223.900,00)	87,33	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.070.286.300,00	711.398.502,00	(358.887.798,00)	66,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.07.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.070.286.300,00	711.398.502,00	(358.887.798,00)	66,47	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	133.913.500,00	65.516.500,00	(68.397.000,00)	48,92	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.09.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	133.913.500,00	65.516.500,00	(68.397.000,00)	48,92	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.359.572.000,00	1.268.693.326,00	(90.878.674,00)	93,32	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.10.5.1.1	- Belanja Pegawai	845.000.000,00	811.650.000,00	(33.350.000,00)	96,05	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.10.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	514.572.000,00	457.043.326,00	(57.528.674,00)	88,82	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	131.077.000,00	125.257.000,00	(5.820.000,00)	95,56	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.11.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	131.077.000,00	125.257.000,00	(5.820.000,00)	95,56	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	948.415.000,00	811.813.400,00	(136.601.600,00)	85,60	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.13.5.1.1	- Belanja Pegawai	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.13.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	921.895.000,00	785.293.400,00	(136.601.600,00)	85,18	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.461.094.254,00	3.777.359.300,00	(683.734.954,00)	84,67	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	4.461.094.254,00	3.777.359.300,00	(683.734.954,00)	84,67	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	75.000.000,00	40.736.000,00	(34.264.000,00)	54,31	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	40.736.000,00	(34.264.000,00)	54,31	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.798.653.254,00	1.709.625.800,00	(89.027.454,00)	95,05	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.798.653.254,00	1.709.625.800,00	(89.027.454,00)	95,05	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	98.316.000,00	61.675.500,00	(36.640.500,00)	62,73	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.11.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	98.316.000,00	61.675.500,00	(36.640.500,00)	62,73	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.489.125.000,00	1.965.322.000,00	(523.803.000,00)	78,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.19.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	2.489.125.000,00	1.965.322.000,00	(523.803.000,00)	78,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	20.000.000,00	18.020.000,00	(1.980.000,00)	90,10	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02	<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	20.000.000,00	18.020.000,00	(1.980.000,00)	90,10	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	20.000.000,00	18.020.000,00	(1.980.000,00)	90,10	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.020.000,00	(1.980.000,00)	90,10	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.291.527.000,00	1.284.395.152,00	(7.131.848,00)	99,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.291.527.000,00	1.284.395.152,00	(7.131.848,00)	99,45	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1.291.527.000,00	1.284.395.152,00	(7.131.848,00)	99,45	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	80.247.000,00	73.115.152,00	(7.131.848,00)	91,11	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 5	- Belanja Hibah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03	Program Pengembangan Kurikulum	370.526.000,00	242.466.350,00	(128.059.650,00)	65,44	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01	<i>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>	240.526.000,00	140.271.750,00	(100.254.250,00)	58,32	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	240.526.000,00	140.271.750,00	(100.254.250,00)	58,32	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 04 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	240.526.000,00	140.271.750,00	(100.254.250,00)	58,32	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02	<i>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</i>	130.000.000,00	102.194.600,00	(27.805.400,00)	78,61	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	60.000.000,00	34.114.800,00	(25.885.200,00)	56,86	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	34.114.800,00	(25.885.200,00)	56,86	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	70.000.000,00	68.079.800,00	(1.920.200,00)	97,26	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	68.079.800,00	(1.920.200,00)	97,26	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	174.687.000,00	136.129.724,00	(38.557.276,00)	77,93	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01	<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	70.687.000,00	57.201.174,00	(13.485.826,00)	80,92	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	70.687.000,00	57.201.174,00	(13.485.826,00)	80,92	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	70.687.000,00	57.201.174,00	(13.485.826,00)	80,92	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02	<i>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	104.000.000,00	78.928.550,00	(25.071.450,00)	75,89	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	104.000.000,00	78.928.550,00	(25.071.450,00)	75,89	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	104.000.000,00	78.928.550,00	(25.071.450,00)	75,89	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	756.501.136,00	630.964.150,00	(125.536.986,00)	83,41	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	173.538.636,00	119.798.750,00	(53.739.886,00)	69,03	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	51.300.000,00	35.067.750,00	(16.232.250,00)	68,36	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 04 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	51.300.000,00	35.067.750,00	(16.232.250,00)	68,36	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	45.778.636,00	25.531.500,00	(20.247.136,00)	55,77	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 05 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	45.778.636,00	25.531.500,00	(20.247.136,00)	55,77	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	76.460.000,00	59.199.500,00	(17.260.500,00)	77,43	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 06 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	76.460.000,00	59.199.500,00	(17.260.500,00)	77,43	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	17.000.000,00	6.799.800,00	(10.200.200,00)	40,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	17.000.000,00	6.799.800,00	(10.200.200,00)	40,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 03 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	6.799.800,00	(10.200.200,00)	40,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	565.962.500,00	504.365.600,00	(61.596.900,00)	89,12	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	565.962.500,00	504.365.600,00	(61.596.900,00)	89,12	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	565.962.500,00	504.365.600,00	(61.596.900,00)	89,12	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.04 . 02 . 5 . 1 . 5	- Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	20.679.904.277,00	12.091.260.314,00	(8.588.643.963,00)	58,47	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	20.412.214.277,00	11.863.754.914,00	(8.548.459.363,00)	58,12	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	20.412.214.277,00	11.863.754.914,00	(8.548.459.363,00)	58,12	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	20.412.214.277,00	11.863.754.914,00	(8.548.459.363,00)	58,12	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	267.690.000,00	227.505.400,00	(40.184.600,00)	84,99	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	267.690.000,00	227.505.400,00	(40.184.600,00)	84,99	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 01 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.03 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	266.480.000,00	226.295.400,00	(40.184.600,00)	84,92	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.100.957.700,00	1.100.047.500,00	(910.200,00)	99,92	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	1.100.957.700,00	1.100.047.500,00	(910.200,00)	99,92	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	4.438.200,00	3.528.000,00	(910.200,00)	79,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	3.428.200,00	2.518.000,00	(910.200,00)	73,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.05.5.1.5	- Belanja Hibah	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.281.757.000,00	1.211.754.900,00	(70.002.100,00)	94,54	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	1.189.550.000,00	1.144.116.000,00	(45.434.000,00)	96,18	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.189.550.000,00	1.144.116.000,00	(45.434.000,00)	96,18	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.180.000.000,00	1.134.566.000,00	(45.434.000,00)	96,15	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02	<i>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	92.207.000,00	67.638.900,00	(24.568.100,00)	73,36	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	92.207.000,00	67.638.900,00	(24.568.100,00)	73,36	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	8.050.000,00	5.050.000,00	(3.000.000,00)	62,73	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	84.157.000,00	62.588.900,00	(21.568.100,00)	74,37	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.1.6	- Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.473.327.400,00	7.274.345.190,00	(198.982.210,00)	97,34	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	970.826.400,00	934.693.690,00	(36.132.710,00)	96,28	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	50.340.000,00	46.140.000,00	(4.200.000,00)	91,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	50.340.000,00	46.140.000,00	(4.200.000,00)	91,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	10.000.000,00	5.893.690,00	(4.106.310,00)	58,94	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.893.690,00	(4.106.310,00)	58,94	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	910.486.400,00	882.660.000,00	(27.826.400,00)	96,94	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	910.486.400,00	882.660.000,00	(27.826.400,00)	96,94	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	6.436.251.000,00	6.275.988.200,00	(160.262.800,00)	97,51	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.340.000.000,00	3.304.250.500,00	(35.749.500,00)	98,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	3.340.000.000,00	3.304.250.500,00	(35.749.500,00)	98,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01.5.1.5	- Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1.440.000.000,00	1.393.440.000,00	(46.560.000,00)	96,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.440.000.000,00	1.393.440.000,00	(46.560.000,00)	96,77	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.1.5	- Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	800.000.000,00	761.855.000,00	(38.145.000,00)	95,23	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	761.855.000,00	(38.145.000,00)	95,23	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.03.5.1.5	- Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	480.000.000,00	457.060.000,00	(22.940.000,00)	95,22	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	480.000.000,00	457.060.000,00	(22.940.000,00)	95,22	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.04.5.1.5	- Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	360.000.000,00	343.590.000,00	(16.410.000,00)	95,44	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	343.590.000,00	(16.410.000,00)	95,44	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.05.5.1.5	- Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	16.251.000,00	15.792.700,00	(458.300,00)	97,18	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.08.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	16.251.000,00	15.792.700,00	(458.300,00)	97,18	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03	<i>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	66.250.000,00	63.663.300,00	(2.586.700,00)	96,10	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	66.250.000,00	63.663.300,00	(2.586.700,00)	96,10	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	66.250.000,00	63.663.300,00	(2.586.700,00)	96,10	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	11.526.458.941,00	6.972.646.634,00	(4.553.812.307,00)	60,49	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	3.640.924.002,00	2.256.397.608,00	(1.384.526.394,00)	61,97	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	134.237.000,00	73.564.285,00	(60.672.715,00)	54,80	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	134.237.000,00	73.564.285,00	(60.672.715,00)	54,80	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	263.670.000,00	50.730.000,00	(212.940.000,00)	19,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	263.670.000,00	50.730.000,00	(212.940.000,00)	19,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	3.243.017.002,00	2.132.103.323,00	(1.110.913.679,00)	65,74	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03.5.1.1	- Belanja Pegawai	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	216.497.002,00	165.029.256,00	(51.467.746,00)	76,23	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03.5.1.4	- Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	1.940.554.067,00	(1.059.445.933,00)	64,69	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03.5.1.6	- Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02	<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	287.820.000,00	218.025.584,00	(69.794.416,00)	75,75	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	20.149.200,00	10.502.600,00	(9.646.600,00)	52,12	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	20.149.200,00	10.502.600,00	(9.646.600,00)	52,12	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	177.108.700,00	136.685.534,00	(40.423.166,00)	77,18	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	160.188.700,00	119.765.534,00	(40.423.166,00)	74,77	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	90.562.100,00	70.837.450,00	(19.724.650,00)	78,22	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	90.562.100,00	70.837.450,00	(19.724.650,00)	78,22	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	447.784.000,00	304.098.373,00	(143.685.627,00)	67,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	429.475.000,00	294.205.983,00	(135.269.017,00)	68,50	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	317.452.000,00	207.650.000,00	(109.802.000,00)	65,41	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	112.023.000,00	86.555.983,00	(25.467.017,00)	77,27	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	9.039.000,00	4.907.080,00	(4.131.920,00)	54,29	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	9.039.000,00	4.907.080,00	(4.131.920,00)	54,29	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	9.270.000,00	4.985.310,00	(4.284.690,00)	53,78	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	9.270.000,00	4.985.310,00	(4.284.690,00)	53,78	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.04	<i>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>	7.149.930.939,00	4.194.125.069,00	(2.955.805.870,00)	58,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	7.092.580.939,00	4.175.052.069,00	(2.917.528.870,00)	58,87	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.04.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	35.920.000,00	25.000.000,00	(10.920.000,00)	69,60	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.04.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	819.010.091,00	125.252.069,00	(693.758.022,00)	15,29	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.04.01.5.1.6	- Belanja Bantuan Sosial	6.237.650.848,00	4.024.800.000,00	(2.212.850.848,00)	64,52	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	57.350.000,00	19.073.000,00	(38.277.000,00)	33,26	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.04.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	57.350.000,00	19.073.000,00	(38.277.000,00)	33,26	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	95.323.840,00	93.326.833,00	(1.997.007,00)	97,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03	<i>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</i>	95.323.840,00	93.326.833,00	(1.997.007,00)	97,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	95.323.840,00	93.326.833,00	(1.997.007,00)	97,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	94.313.840,00	92.316.833,00	(1.997.007,00)	97,88	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Perlindungan Perempuan	203.399.000,00	26.928.750,00	(176.470.250,00)	13,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	26.095.000,00	26.092.750,00	(2.250,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	26.095.000,00	26.092.750,00	(2.250,00)	99,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	26.095.000,00	26.092.750,00	(2.250,00)	99,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	177.304.000,00	836.000,00	(176.468.000,00)	0,47	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	177.304.000,00	836.000,00	(176.468.000,00)	0,47	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	177.304.000,00	836.000,00	(176.468.000,00)	0,47	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.906.210.500,00	1.841.674.125,00	(1.064.536.375,00)	63,37	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	1.330.759.250,00	856.312.725,00	(474.446.525,00)	64,35	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	544.662.000,00	334.585.725,00	(210.076.275,00)	61,43	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	544.662.000,00	334.585.725,00	(210.076.275,00)	61,43	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	786.097.250,00	521.727.000,00	(264.370.250,00)	66,37	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	22.920.000,00	21.010.000,00	(1.910.000,00)	91,67	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	763.177.250,00	500.717.000,00	(262.460.250,00)	65,61	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	1.575.451.250,00	985.361.400,00	(590.089.850,00)	62,54	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	22.700.000,00	1.131.000,00	(21.569.000,00)	4,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	22.700.000,00	1.131.000,00	(21.569.000,00)	4,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52.600.000,00	34.745.000,00	(17.855.000,00)	66,06	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	52.600.000,00	34.745.000,00	(17.855.000,00)	66,06	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.338.544.250,00	845.887.200,00	(492.657.050,00)	63,19	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.03.5.1.1	- Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.315.624.250,00	822.967.200,00	(492.657.050,00)	62,55	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	161.607.000,00	103.598.200,00	(58.008.800,00)	64,11	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	161.607.000,00	103.598.200,00	(58.008.800,00)	64,11	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Promosi Penanaman Modal	241.020.000,00	225.824.000,00	(15.196.000,00)	93,70	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	241.020.000,00	225.824.000,00	(15.196.000,00)	93,70	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	130.420.000,00	126.958.000,00	(3.462.000,00)	97,35	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	130.420.000,00	126.958.000,00	(3.462.000,00)	97,35	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	110.600.000,00	98.866.000,00	(11.734.000,00)	89,39	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	106.560.000,00	94.826.000,00	(11.734.000,00)	88,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.918.136.966,00	3.416.167.404,00	(501.969.562,00)	87,19	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	3.918.136.966,00	3.416.167.404,00	(501.969.562,00)	87,19	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.398.752.312,00	3.246.267.592,00	(152.484.720,00)	95,51	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	3.398.752.312,00	3.246.267.592,00	(152.484.720,00)	95,51	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	48.125.154,00	48.025.000,00	(100.154,00)	99,79	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	48.125.154,00	48.025.000,00	(100.154,00)	99,79	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000,00	9.598.000,00	(402.000,00)	95,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.598.000,00	(402.000,00)	95,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	296.759.500,00	0,00	(296.759.500,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.05.5.1.1	- Belanja Pegawai	6.630.000,00	0,00	(6.630.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	290.129.500,00	0,00	(290.129.500,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	67.000.000,00	45.607.648,00	(21.392.352,00)	68,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.08.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	45.607.648,00	(21.392.352,00)	68,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	70.000.000,00	49.321.364,00	(20.678.636,00)	70,46	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.11.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	49.321.364,00	(20.678.636,00)	70,46	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	12.500.000,00	8.347.800,00	(4.152.200,00)	66,78	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.13.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	8.347.800,00	(4.152.200,00)	66,78	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	60,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.18.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	60,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.724.838.039,00	4.163.429.330,00	(561.408.709,00)	88,12	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	4.624.788.039,00	4.064.597.030,00	(560.191.009,00)	87,89	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.720.660.920,00	2.498.390.890,00	(222.270.030,00)	91,83	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	2.720.660.920,00	2.498.390.890,00	(222.270.030,00)	91,83	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.904.127.119,00	1.566.206.140,00	(337.920.979,00)	82,25	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.904.127.119,00	1.566.206.140,00	(337.920.979,00)	82,25	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.03	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*****</i>	96.050.000,00	94.832.300,00	(1.217.700,00)	98,73	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.03 . 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****	96.050.000,00	94.832.300,00	(1.217.700,00)	98,73	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.03 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	96.050.000,00	94.832.300,00	(1.217.700,00)	98,73	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	120.285.000,00	96.219.500,00	(24.065.500,00)	79,99	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	120.285.000,00	96.219.500,00	(24.065.500,00)	79,99	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	81.485.000,00	68.588.000,00	(12.897.000,00)	84,17	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	81.485.000,00	68.588.000,00	(12.897.000,00)	84,17	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	38.800.000,00	27.631.500,00	(11.168.500,00)	71,22	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 04 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	38.800.000,00	27.631.500,00	(11.168.500,00)	71,22	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	427.500.000,00	399.861.000,00	(27.639.000,00)	93,53	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</i>	427.500.000,00	399.861.000,00	(27.639.000,00)	93,53	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400.000.000,00	399.861.000,00	(139.000,00)	99,97	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 03 . 5 . 1 . 5	- Belanja Hibah	400.000.000,00	399.861.000,00	(139.000,00)	99,97	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 05 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 05 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	26.290.000,00	0,00	(26.290.000,00)	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	840.120.236,00	446.743.556,00	(393.376.680,00)	53,18	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	840.120.236,00	446.743.556,00	(393.376.680,00)	53,18	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	230.000.000,00	216.975.000,00	(13.025.000,00)	94,34	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	(1.010.000,00)	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	228.990.000,00	216.975.000,00	(12.015.000,00)	94,75	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	594.800.000,00	214.504.400,00	(380.295.600,00)	36,06	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 06 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	7.050.000,00	0,00	(7.050.000,00)	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 06 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	587.750.000,00	214.504.400,00	(373.245.600,00)	36,50	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15.320.236,00	15.264.156,00	(56.080,00)	99,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.07.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.07.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	15.320.236,00	15.264.156,00	(56.080,00)	99,63	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.08.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	31.000.000,00	28.859.800,00	(2.140.200,00)	93,10	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	31.000.000,00	28.859.800,00	(2.140.200,00)	93,10	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	31.000.000,00	28.859.800,00	(2.140.200,00)	93,10	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	28.859.800,00	(2.140.200,00)	93,10	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	837.377.000,00	832.722.676,00	(4.654.324,00)	99,44	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	837.377.000,00	832.722.676,00	(4.654.324,00)	99,44	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	837.377.000,00	832.722.676,00	(4.654.324,00)	99,44	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	837.377.000,00	832.722.676,00	(4.654.324,00)	99,44	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	34.276.430.000,00	33.045.274.950,00	(1.231.155.050,00)	96,41	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01	<i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	34.276.430.000,00	33.045.274.950,00	(1.231.155.050,00)	96,41	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	34.091.280.000,00	32.948.088.050,00	(1.143.191.950,00)	96,65	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	34.091.280.000,00	32.948.088.050,00	(1.143.191.950,00)	96,65	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	185.150.000,00	97.186.900,00	(87.963.100,00)	52,49	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	185.150.000,00	97.186.900,00	(87.963.100,00)	52,49	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	91.610.000,00	60.955.050,00	(30.654.950,00)	66,54	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01	<i>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>	65.085.000,00	48.361.000,00	(16.724.000,00)	74,30	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	65.085.000,00	48.361.000,00	(16.724.000,00)	74,30	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	62.665.000,00	45.941.000,00	(16.724.000,00)	73,31	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.03	<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>	26.525.000,00	12.594.050,00	(13.930.950,00)	47,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	26.525.000,00	12.594.050,00	(13.930.950,00)	47,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.03.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	26.525.000,00	12.594.050,00	(13.930.950,00)	47,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.03.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	4.279.870.712,00	3.591.329.145,00	(688.541.567,00)	83,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	4.279.870.712,00	3.591.329.145,00	(688.541.567,00)	83,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	28.530.000,00	28.230.620,00	(299.380,00)	98,95	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	28.530.000,00	28.230.620,00	(299.380,00)	98,95	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.251.340.712,00	3.563.098.525,00	(688.242.187,00)	83,81	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.04.5.1.1	- Belanja Pegawai	4.760.000,00	0,00	(4.760.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	4.246.580.712,00	3.563.098.525,00	(683.482.187,00)	83,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.055.846.153,00	2.186.190.027,00	(869.656.126,00)	71,54	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01	<i>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</i>	3.055.846.153,00	2.186.190.027,00	(869.656.126,00)	71,54	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	590.500.000,00	382.833.000,00	(207.667.000,00)	64,83	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	590.500.000,00	382.833.000,00	(207.667.000,00)	64,83	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	684.950.000,00	668.657.575,00	(16.292.425,00)	97,62	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	684.950.000,00	668.657.575,00	(16.292.425,00)	97,62	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	58.500.000,00	53.904.075,00	(4.595.925,00)	92,14	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	58.500.000,00	53.904.075,00	(4.595.925,00)	92,14	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	305.050.000,00	227.354.025,00	(77.695.975,00)	74,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	305.050.000,00	227.354.025,00	(77.695.975,00)	74,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	350.450.000,00	307.929.400,00	(42.520.600,00)	87,87	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.09.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	350.450.000,00	307.929.400,00	(42.520.600,00)	87,87	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	1.038.880.153,00	519.474.452,00	(519.405.701,00)	50,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.11.5.1.1	- Belanja Pegawai	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.11.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.012.360.153,00	492.954.452,00	(519.405.701,00)	48,69	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	16.300.000,00	15.396.950,00	(903.050,00)	94,46	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.13.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	15.396.950,00	(903.050,00)	94,46	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	11.216.000,00	10.640.550,00	(575.450,00)	94,87	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.14.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	11.216.000,00	10.640.550,00	(575.450,00)	94,87	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.496.923.000,00	1.389.022.834,00	(107.900.166,00)	92,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02	<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	26.680.000,00	18.880.000,00	(7.800.000,00)	70,76	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	26.680.000,00	18.880.000,00	(7.800.000,00)	70,76	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	26.680.000,00	18.880.000,00	(7.800.000,00)	70,76	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	1.470.243.000,00	1.370.142.834,00	(100.100.166,00)	93,19	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	700.400.000,00	633.401.000,00	(66.999.000,00)	90,43	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.02.5.1.5	- Belanja Hibah	700.400.000,00	633.401.000,00	(66.999.000,00)	90,43	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	73.643.000,00	72.728.400,00	(914.600,00)	98,76	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	73.643.000,00	72.728.400,00	(914.600,00)	98,76	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	696.200.000,00	664.013.434,00	(32.186.566,00)	95,38	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	149.198.000,00	122.213.800,00	(26.984.200,00)	81,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.05.5.1.5	- Belanja Hibah	547.002.000,00	541.799.634,00	(5.202.366,00)	99,05	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	8.953.223.410,00	7.970.707.268,00	(982.516.142,00)	89,03	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01	<i>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	8.953.223.410,00	7.970.707.268,00	(982.516.142,00)	89,03	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	120.000.000,00	113.268.500,00	(6.731.500,00)	94,39	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.04.5.1.1	- Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	119.320.000,00	113.268.500,00	(6.051.500,00)	94,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	200.000.000,00	146.056.500,00	(53.943.500,00)	73,03	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	146.056.500,00	(53.943.500,00)	73,03	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	8.633.223.410,00	7.711.382.268,00	(921.841.142,00)	89,32	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.06.5.1.1	- Belanja Pegawai	4.760.000,00	0,00	(4.760.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	8.628.463.410,00	7.711.382.268,00	(917.081.142,00)	89,37	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	572.935.200,00	451.112.472,00	(121.822.728,00)	78,74	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	170.764.860,00	147.875.800,00	(22.889.060,00)	86,60	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	170.764.860,00	147.875.800,00	(22.889.060,00)	86,60	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	170.764.860,00	147.875.800,00	(22.889.060,00)	86,60	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02	<i>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</i>	87.214.340,00	67.551.590,00	(19.662.750,00)	77,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	87.214.340,00	67.551.590,00	(19.662.750,00)	77,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	87.214.340,00	67.551.590,00	(19.662.750,00)	77,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04	<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	255.000.000,00	191.823.600,00	(63.176.400,00)	75,22	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	210.000.000,00	169.495.100,00	(40.504.900,00)	80,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	39.495.100,00	(40.504.900,00)	49,37	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.01.5.1.5	- Belanja Hibah	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	45.000.000,00	22.328.500,00	(22.671.500,00)	49,62	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	22.328.500,00	(22.671.500,00)	49,62	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.05	<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</i>	59.956.000,00	43.861.482,00	(16.094.518,00)	73,16	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	59.956.000,00	43.861.482,00	(16.094.518,00)	73,16	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.05.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	59.956.000,00	43.861.482,00	(16.094.518,00)	73,16	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	45.000.000,00	44.999.736,00	(264,00)	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	45.000.000,00	44.999.736,00	(264,00)	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	44.999.736,00	(264,00)	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.999.736,00	(264,00)	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01	<i>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04	Program Rehabilitasi Sosial	1.845.313.128,00	1.631.170.739,00	(214.142.389,00)	88,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	1.626.993.128,00	1.435.849.138,00	(191.143.990,00)	88,25	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.354.966.564,00	1.180.301.578,00	(174.664.986,00)	87,11	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	14.966.564,00	13.736.578,00	(1.229.986,00)	91,78	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.06.5.1.6	- Belanja Bantuan Sosial	1.340.000.000,00	1.166.565.000,00	(173.435.000,00)	87,06	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	250.676.564,00	243.274.960,00	(7.401.604,00)	97,05	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.09.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.09.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	50.676.564,00	43.274.960,00	(7.401.604,00)	85,39	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.09.5.1.5	- Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	21.350.000,00	12.272.600,00	(9.077.400,00)	57,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.10.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.410.000,00	0,00	(1.410.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.10.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	19.940.000,00	12.272.600,00	(7.667.400,00)	61,55	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02	<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	218.320.000,00	195.321.601,00	(22.998.399,00)	89,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02 . 03	Penyediaan Permakanan	218.320.000,00	195.321.601,00	(22.998.399,00)	89,47	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02 . 03 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02 . 03 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	218.320.000,00	195.321.601,00	(22.998.399,00)	89,47	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	319.051.000,00	214.209.100,00	(104.841.900,00)	67,14	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01	<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	135.609.000,00	108.064.400,00	(27.544.600,00)	79,69	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60.000.000,00	41.596.400,00	(18.403.600,00)	69,33	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	58.590.000,00	40.186.400,00	(18.403.600,00)	68,59	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	75.609.000,00	66.468.000,00	(9.141.000,00)	87,91	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	75.609.000,00	66.468.000,00	(9.141.000,00)	87,91	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.03	<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	97.745.000,00	43.730.000,00	(54.015.000,00)	44,74	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.03 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	97.745.000,00	43.730.000,00	(54.015.000,00)	44,74	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.03 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	97.745.000,00	43.730.000,00	(54.015.000,00)	44,74	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.04	<i>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>	20.200.000,00	14.727.000,00	(5.473.000,00)	72,91	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.04 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	20.200.000,00	14.727.000,00	(5.473.000,00)	72,91	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.04 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	14.727.000,00	(5.473.000,00)	72,91	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.05	<i>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.05 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.05 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.06	<i>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>	65.497.000,00	47.687.700,00	(17.809.300,00)	72,81	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.06 . 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	65.497.000,00	47.687.700,00	(17.809.300,00)	72,81	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.06 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	65.497.000,00	47.687.700,00	(17.809.300,00)	72,81	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	30.000.000,00	23.512.100,00	(6.487.900,00)	78,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01	<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	30.000.000,00	23.512.100,00	(6.487.900,00)	78,37	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.000.000,00	23.512.100,00	(6.487.900,00)	78,37	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.010.000,00	(200.000,00)	83,47	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	28.790.000,00	22.502.100,00	(6.287.900,00)	78,16	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02	<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02 . 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02 . 03 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.02 . 03 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05	Program Hubungan Industrial	349.410.000,00	177.771.400,00	(171.638.600,00)	50,88	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	110.000.000,00	48.833.000,00	(61.167.000,00)	44,39	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	110.000.000,00	48.833.000,00	(61.167.000,00)	44,39	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 03 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	9.090.000,00	8.080.000,00	(1.010.000,00)	88,89	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 03 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	100.910.000,00	40.753.000,00	(60.157.000,00)	40,39	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02	<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	239.410.000,00	128.938.400,00	(110.471.600,00)	53,86	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02 . 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	129.710.000,00	88.129.800,00	(41.580.200,00)	67,94	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02 . 01 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	11.110.000,00	10.100.000,00	(1.010.000,00)	90,91	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	118.600.000,00	78.029.800,00	(40.570.200,00)	65,79	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02 . 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000,00	5.316.900,00	(6.683.100,00)	44,31	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	5.316.900,00	(6.683.100,00)	44,31	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02 . 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	53.400.000,00	16.879.950,00	(36.520.050,00)	31,61	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02 . 03 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	53.400.000,00	16.879.950,00	(36.520.050,00)	31,61	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02 . 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	44.300.000,00	18.611.750,00	(25.688.250,00)	42,01	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02 . 04 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	44.300.000,00	18.611.750,00	(25.688.250,00)	42,01	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	108.080.848,00	105.484.908,00	(2.595.940,00)	97,60	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01	<i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>	108.080.848,00	105.484.908,00	(2.595.940,00)	97,60	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	108.080.848,00	105.484.908,00	(2.595.940,00)	97,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	105.050.848,00	102.454.908,00	(2.595.940,00)	97,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	685.934.800,00	652.986.640,00	(32.948.160,00)	95,20	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	685.934.800,00	652.986.640,00	(32.948.160,00)	95,20	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	103.140.000,00	100.573.700,00	(2.566.300,00)	97,51	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	103.140.000,00	100.573.700,00	(2.566.300,00)	97,51	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	40.000.000,00	34.326.778,00	(5.673.222,00)	85,82	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	34.326.778,00	(5.673.222,00)	85,82	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	44.225.000,00	22.433.700,00	(21.791.300,00)	50,73	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	44.225.000,00	22.433.700,00	(21.791.300,00)	50,73	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.07.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	498.569.800,00	495.652.462,00	(2.917.338,00)	99,41	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.09.5.1.1	- Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.09.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	488.909.800,00	485.992.462,00	(2.917.338,00)	99,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	535.110.000,00	319.512.075,00	(215.597.925,00)	59,71	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	172.952.000,00	107.787.250,00	(65.164.750,00)	62,32	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	172.952.000,00	107.787.250,00	(65.164.750,00)	62,32	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	172.952.000,00	107.787.250,00	(65.164.750,00)	62,32	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.02	<i>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	145.094.000,00	116.687.650,00	(28.406.350,00)	80,42	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	145.094.000,00	116.687.650,00	(28.406.350,00)	80,42	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	145.094.000,00	116.687.650,00	(28.406.350,00)	80,42	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.03	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	217.064.000,00	95.037.175,00	(122.026.825,00)	43,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.03 . 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	217.064.000,00	95.037.175,00	(122.026.825,00)	43,78	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.03 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	217.064.000,00	95.037.175,00	(122.026.825,00)	43,78	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	42.150.000,00	42.144.400,00	(5.600,00)	99,99	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	42.150.000,00	42.144.400,00	(5.600,00)	99,99	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	42.150.000,00	42.144.400,00	(5.600,00)	99,99	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 03 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 03 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	41.140.000,00	41.134.400,00	(5.600,00)	99,99	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	390.304.000,00	353.647.900,00	(36.656.100,00)	90,61	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	390.304.000,00	353.647.900,00	(36.656.100,00)	90,61	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	390.304.000,00	353.647.900,00	(36.656.100,00)	90,61	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	383.254.000,00	346.597.900,00	(36.656.100,00)	90,44	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	40.000.000,00	24.974.300,00	(15.025.700,00)	62,44	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	40.000.000,00	24.974.300,00	(15.025.700,00)	62,44	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	24.974.300,00	(15.025.700,00)	62,44	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	24.974.300,00	(15.025.700,00)	62,44	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	37.000.000,00	33.380.000,00	(3.620.000,00)	90,22	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01	<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air</i>	37.000.000,00	33.380.000,00	(3.620.000,00)	90,22	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	37.000.000,00	33.380.000,00	(3.620.000,00)	90,22	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	33.380.000,00	(3.620.000,00)	90,22	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.863.046.000,00	2.737.992.437,00	(125.053.563,00)	95,63	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.863.046.000,00	2.737.992.437,00	(125.053.563,00)	95,63	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	462.500.000,00	361.188.000,00	(101.312.000,00)	78,09	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.01 . 08 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	462.500.000,00	361.188.000,00	(101.312.000,00)	78,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.399.646.000,00	2.376.804.437,00	(22.841.563,00)	99,05	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.12.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	2.399.646.000,00	2.376.804.437,00	(22.841.563,00)	99,05	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.16.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	64.000.000,00	60.525.250,00	(3.474.750,00)	94,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01	<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>	64.000.000,00	60.525.250,00	(3.474.750,00)	94,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	64.000.000,00	60.525.250,00	(3.474.750,00)	94,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	60.525.250,00	(3.474.750,00)	94,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	12.953.436,00	12.953.436,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	12.953.436,00	12.953.436,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	12.953.436,00	12.953.436,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	12.953.436,00	12.953.436,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	521.302.016,00	485.130.700,00	(36.171.316,00)	93,06	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	521.302.016,00	485.130.700,00	(36.171.316,00)	93,06	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	264.850.860,00	259.513.800,00	(5.337.060,00)	97,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	257.590.860,00	252.253.800,00	(5.337.060,00)	97,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	256.451.156,00	225.616.900,00	(30.834.256,00)	87,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	256.451.156,00	225.616.900,00	(30.834.256,00)	87,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	981.000.000,00	822.762.000,00	(158.238.000,00)	83,87	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01	<i>Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.02	<i>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	981.000.000,00	822.762.000,00	(158.238.000,00)	83,87	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	981.000.000,00	822.762.000,00	(158.238.000,00)	83,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	981.000.000,00	822.762.000,00	(158.238.000,00)	83,87	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	365.730.962,00	330.684.628,00	(35.046.334,00)	90,42	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	365.730.962,00	330.684.628,00	(35.046.334,00)	90,42	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	290.930.962,00	256.034.628,00	(34.896.334,00)	88,01	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	290.930.962,00	256.034.628,00	(34.896.334,00)	88,01	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	74.800.000,00	74.650.000,00	(150.000,00)	99,80	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	74.800.000,00	74.650.000,00	(150.000,00)	99,80	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	558.657.000,00	368.589.000,00	(190.068.000,00)	65,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	558.657.000,00	368.589.000,00	(190.068.000,00)	65,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	237.712.000,00	162.056.000,00	(75.656.000,00)	68,17	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	237.712.000,00	162.056.000,00	(75.656.000,00)	68,17	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	312.857.000,00	204.562.500,00	(108.294.500,00)	65,39	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	312.857.000,00	204.562.500,00	(108.294.500,00)	65,39	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	8.088.000,00	1.970.500,00	(6.117.500,00)	24,36	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	8.088.000,00	1.970.500,00	(6.117.500,00)	24,36	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	268.190.000,00	99.628.520,00	(168.561.480,00)	37,15	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	268.190.000,00	99.628.520,00	(168.561.480,00)	37,15	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	268.190.000,00	99.628.520,00	(168.561.480,00)	37,15	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	268.190.000,00	99.628.520,00	(168.561.480,00)	37,15	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	779.456.700,00	604.017.020,00	(175.439.680,00)	77,49	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	779.456.700,00	604.017.020,00	(175.439.680,00)	77,49	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.860.000,00	1.521.200,00	(2.338.800,00)	39,41	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	1.521.200,00	(2.338.800,00)	39,41	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	775.596.700,00	602.495.820,00	(173.100.880,00)	77,68	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	775.596.700,00	602.495.820,00	(173.100.880,00)	77,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	185.144.000,00	180.409.822,00	(4.734.178,00)	97,44	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	185.144.000,00	180.409.822,00	(4.734.178,00)	97,44	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02 . 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	185.144.000,00	180.409.822,00	(4.734.178,00)	97,44	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02 . 02 . 5 . 1 . 1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 05 . 2.02 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	185.144.000,00	180.409.822,00	(4.734.178,00)	97,44	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.660.161.615,00	3.168.131.801,00	(1.492.029.814,00)	67,98	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	4.660.161.615,00	3.168.131.801,00	(1.492.029.814,00)	67,98	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	943.105.900,00	772.352.200,00	(170.753.700,00)	81,89	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	943.105.900,00	772.352.200,00	(170.753.700,00)	81,89	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	277.172.800,00	162.368.700,00	(114.804.100,00)	58,58	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	277.172.800,00	162.368.700,00	(114.804.100,00)	58,58	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	167.020.400,00	135.650.350,00	(31.370.050,00)	81,22	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 03 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	167.020.400,00	135.650.350,00	(31.370.050,00)	81,22	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	140.598.400,00	95.817.500,00	(44.780.900,00)	68,15	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 05 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	140.598.400,00	95.817.500,00	(44.780.900,00)	68,15	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.166.000,00	1.225.000,00	(2.941.000,00)	29,40	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 08 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	4.166.000,00	1.225.000,00	(2.941.000,00)	29,40	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3.670.000,00	2.174.490,00	(1.495.510,00)	59,25	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 10 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	3.670.000,00	2.174.490,00	(1.495.510,00)	59,25	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.124.428.115,00	1.998.543.561,00	(1.125.884.554,00)	63,97	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 11 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	3.124.428.115,00	1.998.543.561,00	(1.125.884.554,00)	63,97	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	150.000.000,00	128.156.749,00	(21.843.251,00)	85,44	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01	<i>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	150.000.000,00	128.156.749,00	(21.843.251,00)	85,44	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	150.000.000,00	128.156.749,00	(21.843.251,00)	85,44	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 01 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	128.156.749,00	(21.843.251,00)	85,44	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 06 . 2.01 . 03 . 5 . 1 . 2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	156.866.564,00	156.675.500,00	(191.064,00)	99,88	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	91.000.000,00	90.809.800,00	(190.200,00)	99,79	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	91.000.000,00	90.809.800,00	(190.200,00)	99,79	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	64.990.000,00	64.799.800,00	(190.200,00)	99,71	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01.5.1.5	- Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.02	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	65.866.564,00	65.865.700,00	(864,00)	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.866.564,00	30.865.800,00	(764,00)	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.02.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	10.866.564,00	10.865.800,00	(764,00)	99,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.02.03.5.1.5	- Belanja Hibah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	34.999.900,00	(100,00)	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.02.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.999.900,00	(100,00)	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.02.04.5.1.5	- Belanja Hibah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06	Program Penanganan Bencana	738.230.000,00	695.910.950,00	(42.319.050,00)	94,27	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	715.090.000,00	675.795.350,00	(39.294.650,00)	94,50	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	18.190.000,00	13.320.450,00	(4.869.550,00)	73,23	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	16.580.000,00	11.710.450,00	(4.869.550,00)	70,63	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	696.900.000,00	662.474.900,00	(34.425.100,00)	95,06	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.04.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	175.290.000,00	166.364.900,00	(8.925.100,00)	94,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.04.5.1.5	- Belanja Hibah	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.04.5.1.6	- Belanja Bantuan Sosial	375.000.000,00	349.500.000,00	(25.500.000,00)	93,20	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.02	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	23.140.000,00	20.115.600,00	(3.024.400,00)	86,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	23.140.000,00	20.115.600,00	(3.024.400,00)	86,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.02.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	23.140.000,00	20.115.600,00	(3.024.400,00)	86,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100.000.000,00	80.619.000,00	(19.381.000,00)	80,62	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	100.000.000,00	80.619.000,00	(19.381.000,00)	80,62	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100.000.000,00	80.619.000,00	(19.381.000,00)	80,62	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	97.980.000,00	78.599.000,00	(19.381.000,00)	80,22	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	25.000.000,00	22.810.000,00	(2.190.000,00)	91,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01	<i>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	25.000.000,00	22.810.000,00	(2.190.000,00)	91,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	22.810.000,00	(2.190.000,00)	91,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.810.000,00	(2.190.000,00)	91,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	56.250.000,00	45.729.900,00	(10.520.100,00)	81,30	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.02	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	56.250.000,00	45.729.900,00	(10.520.100,00)	81,30	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	56.250.000,00	45.729.900,00	(10.520.100,00)	81,30	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.02.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	56.250.000,00	45.729.900,00	(10.520.100,00)	81,30	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	292.470.140,00	186.193.900,00	(106.276.240,00)	63,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	292.470.140,00	186.193.900,00	(106.276.240,00)	63,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	292.470.140,00	186.193.900,00	(106.276.240,00)	63,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.03.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	291.060.140,00	184.783.900,00	(106.276.240,00)	63,49	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	185.000.000,00	152.498.400,00	(32.501.600,00)	82,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	185.000.000,00	152.498.400,00	(32.501.600,00)	82,43	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	25.000.000,00	13.773.400,00	(11.226.600,00)	55,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	13.773.400,00	(11.226.600,00)	55,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	160.000.000,00	138.725.000,00	(21.275.000,00)	86,70	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	155.960.000,00	134.685.000,00	(21.275.000,00)	86,36	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	40.000.000,00	27.392.500,00	(12.607.500,00)	68,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	40.000.000,00	27.392.500,00	(12.607.500,00)	68,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	40.000.000,00	27.392.500,00	(12.607.500,00)	68,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.03.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	38.990.000,00	26.382.500,00	(12.607.500,00)	67,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.04.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.000.000,00	30.956.535,00	(4.043.465,00)	88,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	35.000.000,00	30.956.535,00	(4.043.465,00)	88,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.000.000,00	30.956.535,00	(4.043.465,00)	88,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	33.990.000,00	29.946.535,00	(4.043.465,00)	88,10	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	40.000.000,00	36.789.500,00	(3.210.500,00)	91,97	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	40.000.000,00	36.789.500,00	(3.210.500,00)	91,97	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40.000.000,00	36.789.500,00	(3.210.500,00)	91,97	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	38.790.000,00	35.579.500,00	(3.210.500,00)	91,72	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07	Program Penyuluhan Pertanian	763.220.000,00	513.499.275,00	(249.720.725,00)	67,28	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	763.220.000,00	513.499.275,00	(249.720.725,00)	67,28	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	111.882.200,00	45.732.500,00	(66.149.700,00)	40,88	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	111.882.200,00	45.732.500,00	(66.149.700,00)	40,88	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	384.837.800,00	296.426.775,00	(88.411.025,00)	77,03	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	284.837.800,00	196.426.775,00	(88.411.025,00)	68,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.02.5.1.5	- Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	266.500.000,00	171.340.000,00	(95.160.000,00)	64,29	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	266.500.000,00	171.340.000,00	(95.160.000,00)	64,29	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07	Program Perlindungan Khusus Anak	238.684.000,00	62.061.350,00	(176.622.650,00)	26,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	43.100.000,00	43.097.550,00	(2.450,00)	99,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	43.100.000,00	43.097.550,00	(2.450,00)	99,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	42.090.000,00	42.087.550,00	(2.450,00)	99,99	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.02	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan</i>	195.584.000,00	18.963.800,00	(176.620.200,00)	9,70	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	195.584.000,00	18.963.800,00	(176.620.200,00)	9,70	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.02.02.5.1.1	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	180.584.000,00	3.963.800,00	(176.620.200,00)	2,19	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.02.02.5.1.5	- Belanja Hibah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07.2.03.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.08	Program Penataan Bangunan Gedung	8.899.828.300,00	7.622.099.471,00	(1.277.728.829,00)	85,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.08.2.01	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	8.899.828.300,00	7.622.099.471,00	(1.277.728.829,00)	85,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	608.800.000,00	315.845.671,00	(292.954.329,00)	51,88	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.08.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	608.800.000,00	315.845.671,00	(292.954.329,00)	51,88	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4.026.170.000,00	3.122.064.350,00	(904.105.650,00)	77,54	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.08.2.01.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	4.026.170.000,00	3.122.064.350,00	(904.105.650,00)	77,54	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.264.858.300,00	4.184.189.450,00	(80.668.850,00)	98,11	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.08.2.01.12.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	4.264.858.300,00	4.184.189.450,00	(80.668.850,00)	98,11	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.08	Program Pengembangan UMKM	150.000.000,00	126.079.000,00	(23.921.000,00)	84,05	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.08.2.01	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</i>	150.000.000,00	126.079.000,00	(23.921.000,00)	84,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	150.000.000,00	126.079.000,00	(23.921.000,00)	84,05	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.08.2.01.01.5.1.1	- Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.08.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	146.970.000,00	123.049.000,00	(23.921.000,00)	83,72	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	142.500.000,00	62.550.100,00	(79.949.900,00)	43,89	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.09.2.01	<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>	142.500.000,00	62.550.100,00	(79.949.900,00)	43,89	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.09.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	130.000.000,00	61.410.100,00	(68.589.900,00)	47,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.09.2.01.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	61.410.100,00	(68.589.900,00)	47,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	12.500.000,00	1.140.000,00	(11.360.000,00)	9,12	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.09.2.01.06.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	1.140.000,00	(11.360.000,00)	9,12	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	227.055.200,00	187.415.429,00	(39.639.771,00)	82,54	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.09.2.01	<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	227.055.200,00	187.415.429,00	(39.639.771,00)	82,54	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	227.055.200,00	187.415.429,00	(39.639.771,00)	82,54	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.09.2.01.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	227.055.200,00	187.415.429,00	(39.639.771,00)	82,54	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.10	Program Penyelenggaraan Jalan	20.568.492.000,00	18.687.055.329,00	(1.881.436.671,00)	90,85	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.10.2.01	<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	20.568.492.000,00	18.687.055.329,00	(1.881.436.671,00)	90,85	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.10.2.01.04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	195.466.000,00	154.977.200,00	(40.488.800,00)	79,29	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.10.2.01.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	195.466.000,00	154.977.200,00	(40.488.800,00)	79,29	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	20.373.026.000,00	18.532.078.129,00	(1.840.947.871,00)	90,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.10.2.01.11.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	20.373.026.000,00	18.532.078.129,00	(1.840.947.871,00)	90,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.11	Program Pengelolaan Persampahan	4.149.039.280,00	3.990.637.163,00	(158.402.117,00)	96,18	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.11.2.01	<i>Pengelolaan Sampah</i>	4.149.039.280,00	3.990.637.163,00	(158.402.117,00)	96,18	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.258.139.280,00	1.130.261.943,00	(127.877.337,00)	89,84	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.11.2.01.04.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	1.008.139.280,00	880.261.943,00	(127.877.337,00)	87,32	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.11.2.01.04.5.1.5	- Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	163.407.000,00	137.186.220,00	(26.220.780,00)	83,95	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.11.2.01.05.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	163.407.000,00	137.186.220,00	(26.220.780,00)	83,95	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.727.493.000,00	2.723.189.000,00	(4.304.000,00)	99,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.11.2.01.07.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	2.727.493.000,00	2.723.189.000,00	(4.304.000,00)	99,84	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	10.000.000,00	7.445.000,00	(2.555.000,00)	74,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.11.2.03	<i>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</i>	10.000.000,00	7.445.000,00	(2.555.000,00)	74,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	10.000.000,00	7.445.000,00	(2.555.000,00)	74,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.11.2.03.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.445.000,00	(2.555.000,00)	74,45	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.937.400.000,00	1.315.725.131,00	(621.674.869,00)	67,91	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.12.2.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	868.400.000,00	788.549.500,00	(79.850.500,00)	90,80	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	850.000.000,00	786.523.000,00	(63.477.000,00)	92,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.12.2.02.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	850.000.000,00	786.523.000,00	(63.477.000,00)	92,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	18.400.000,00	2.026.500,00	(16.373.500,00)	11,01	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.12.2.02.03.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	2.026.500,00	(16.373.500,00)	11,01	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.12.2.03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	974.000.000,00	445.257.031,00	(528.742.969,00)	45,71	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	624.000.000,00	137.758.481,00	(486.241.519,00)	22,08	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.12.2.03.01.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	624.000.000,00	137.758.481,00	(486.241.519,00)	22,08	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	350.000.000,00	307.498.550,00	(42.501.450,00)	87,86	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.12.2.03.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	307.498.550,00	(42.501.450,00)	87,86	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.12.2.04	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	95.000.000,00	81.918.600,00	(13.081.400,00)	86,23	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	95.000.000,00	81.918.600,00	(13.081.400,00)	86,23	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.12.2.04.02.5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	81.918.600,00	(13.081.400,00)	86,23	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.0.00.00.5.2	BELANJA MODAL	238.674.307.650,00	189.606.772.936,00	(49.067.534.714,00)	79,44	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.0.00	<i>Non Kegiatan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.0.00.00.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.0.00.00.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.00.0.00.00.5.2.6	- Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.724.800.897,00	24.009.271.950,00	(7.715.528.947,00)	75,68	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	564.211.000,00	458.219.925,00	(105.991.075,00)	81,21	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	498.762.500,00	424.784.000,00	(73.978.500,00)	85,17	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.02.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	498.762.500,00	424.784.000,00	(73.978.500,00)	85,17	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.02.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.656.000,00	31.100.000,00	(556.000,00)	98,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.03.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.656.000,00	31.100.000,00	(556.000,00)	98,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.422.500,00	0,00	(6.422.500,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.05.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.422.500,00	0,00	(6.422.500,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.370.000,00	2.335.925,00	(25.034.075,00)	8,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.06.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.370.000,00	2.335.925,00	(25.034.075,00)	8,53	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	11.239.421.154,00	10.404.299.546,00	(835.121.608,00)	92,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.450.575.000,00	1.183.205.853,00	(267.369.147,00)	81,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.02.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.450.575.000,00	1.183.205.853,00	(267.369.147,00)	81,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.185.557.826,00	1.121.141.000,00	(64.416.826,00)	94,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.05.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.185.557.826,00	1.121.141.000,00	(64.416.826,00)	94,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.05.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.090.769.450,00	1.008.281.800,00	(82.487.650,00)	92,44	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.10.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.090.769.450,00	1.008.281.800,00	(82.487.650,00)	92,44	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.512.518.878,00	7.091.670.893,00	(420.847.985,00)	94,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.11.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.319.518.878,00	6.899.979.893,00	(419.538.985,00)	94,27	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.11.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	193.000.000,00	191.691.000,00	(1.309.000,00)	99,32	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.11.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	47.273.500,00	45.710.000,00	(1.563.500,00)	96,69	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.948.500,00	45.710.000,00	(238.500,00)	99,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.03.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.948.500,00	45.710.000,00	(238.500,00)	99,48	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.325.000,00	0,00	(1.325.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.04.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.325.000,00	0,00	(1.325.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.083.487.400,00	2.063.150.200,00	(20.337.200,00)	99,02	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	34.943.000,00	25.000.000,00	(9.943.000,00)	71,55	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.05.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.300.000,00	25.000.000,00	(2.300.000,00)	91,58	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.05.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.643.000,00	0,00	(7.643.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.917.586.000,00	1.909.814.200,00	(7.771.800,00)	99,59	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.09.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.917.586.000,00	1.909.814.200,00	(7.771.800,00)	99,59	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.375.000,00	2.275.000,00	(100.000,00)	95,79	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.10.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.375.000,00	2.275.000,00	(100.000,00)	95,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	128.583.400,00	126.061.000,00	(2.522.400,00)	98,04	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.11.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.583.400,00	62.730.000,00	(853.400,00)	98,66	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.11.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	63.331.000,00	(1.669.000,00)	97,43	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.11.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	17.356.727.503,00	10.620.708.279,00	(6.736.019.224,00)	61,19	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	17.356.727.503,00	10.620.708.279,00	(6.736.019.224,00)	61,19	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.10.01.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.854.027.023,00	9.842.954.979,00	(6.011.072.044,00)	62,08	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.10.01.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	908.200.000,00	459.137.500,00	(449.062.500,00)	50,55	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.10.01.5.2.4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.000.480,00	9.950.000,00	(55.050.480,00)	15,31	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.10.01.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	529.500.000,00	308.665.800,00	(220.834.200,00)	58,29	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.14	<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	433.680.340,00	417.184.000,00	(16.496.340,00)	96,20	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	188.303.340,00	178.759.000,00	(9.544.340,00)	94,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.14.02.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.303.340,00	178.759.000,00	(9.544.340,00)	94,93	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	245.377.000,00	238.425.000,00	(6.952.000,00)	97,17	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.14.03.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.177.000,00	206.525.000,00	(5.652.000,00)	97,34	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.01.2.14.03.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.200.000,00	31.900.000,00	(1.300.000,00)	96,08	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pemberdayaan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.04.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pembinaan Perpustakaan	10.500.000,00	8.845.100,00	(1.654.900,00)	84,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	10.500.000,00	8.845.100,00	(1.654.900,00)	84,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	10.500.000,00	8.845.100,00	(1.654.900,00)	84,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.09.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.500.000,00	8.845.100,00	(1.654.900,00)	84,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	31.721.894.280,00	18.099.326.703,00	(13.622.567.577,00)	57,06	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	23.963.448.114,00	14.170.874.529,00	(9.792.573.585,00)	59,14	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	7.155.587.000,00	2.974.321.250,00	(4.181.265.750,00)	41,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.155.587.000,00	2.974.321.250,00	(4.181.265.750,00)	41,57	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	89.271.300,00	61.222.000,00	(28.049.300,00)	68,58	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.12.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.271.300,00	61.222.000,00	(28.049.300,00)	68,58	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.619.610.800,00	2.720.254.700,00	(2.899.356.100,00)	48,41	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.13.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.567.810.800,00	2.668.815.700,00	(2.898.995.100,00)	47,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.13.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.800.000,00	51.439.000,00	(361.000,00)	99,30	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.600.212.914,00	8.069.417.579,00	(2.530.795.335,00)	76,13	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.14.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.600.212.914,00	8.069.417.579,00	(2.530.795.335,00)	76,13	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.16.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	148.766.100,00	0,00	(148.766.100,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.17.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.766.100,00	0,00	(148.766.100,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	300.000.000,00	296.147.000,00	(3.853.000,00)	98,72	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.18.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	198.033.000,00	(1.967.000,00)	99,02	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.18.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	98.114.000,00	(1.886.000,00)	98,11	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.512.000,00	(488.000,00)	99,02	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.19.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.512.000,00	(488.000,00)	99,02	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	7.648.186.866,00	3.828.042.324,00	(3.820.144.542,00)	50,05	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.13.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	7.479.102.591,00	3.710.979.324,00	(3.768.123.267,00)	49,62	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.14.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.479.102.591,00	3.710.979.324,00	(3.768.123.267,00)	49,62	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.200.000,00	1.188.000,00	(12.000,00)	99,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.16.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	1.188.000,00	(12.000,00)	99,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	32.440.000,00	25.325.000,00	(7.115.000,00)	78,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.26.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.440.000,00	25.325.000,00	(7.115.000,00)	78,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	135.444.275,00	90.550.000,00	(44.894.275,00)	66,85	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.34.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.444.275,00	90.550.000,00	(44.894.275,00)	66,85	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	110.259.300,00	100.409.850,00	(9.849.450,00)	91,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	110.259.300,00	100.409.850,00	(9.849.450,00)	91,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.03.03.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.259.300,00	100.409.850,00	(9.849.450,00)	91,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pengelolaan Pendidikan	38.653.772.558,00	36.246.829.529,00	(2.406.943.029,00)	93,77	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	26.241.899.151,00	24.640.678.964,00	(1.601.220.187,00)	93,90	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.548.087.000,00	1.486.106.000,00	(61.981.000,00)	96,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.04.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.000.000,00	160.900.000,00	(9.100.000,00)	94,65	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.04.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.378.087.000,00	1.325.206.000,00	(52.881.000,00)	96,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.732.316.100,00	1.668.851.100,00	(63.465.000,00)	96,34	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.05.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.680.000,00	166.520.000,00	(11.160.000,00)	93,72	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.05.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.554.636.100,00	1.502.331.100,00	(52.305.000,00)	96,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	509.610.600,00	501.335.600,00	(8.275.000,00)	98,38	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.06.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	509.610.600,00	501.335.600,00	(8.275.000,00)	98,38	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	8.959.331.250,00	8.589.610.800,00	(369.720.450,00)	95,87	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.22.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.959.331.250,00	8.589.610.800,00	(369.720.450,00)	95,87	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13.492.554.201,00	12.394.775.464,00	(1.097.778.737,00)	91,86	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.29.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.965.977.367,00	11.137.818.314,00	(828.159.053,00)	93,08	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.29.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.526.576.834,00	1.256.957.150,00	(269.619.684,00)	82,34	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	12.306.693.407,00	11.516.256.565,00	(790.436.842,00)	93,58	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	885.000.000,00	833.202.000,00	(51.798.000,00)	94,15	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.06.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	885.000.000,00	833.202.000,00	(51.798.000,00)	94,15	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.168.000.000,00	1.143.886.500,00	(24.113.500,00)	97,94	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.12.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.168.000.000,00	1.143.886.500,00	(24.113.500,00)	97,94	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.123.143.600,00	1.097.195.475,00	(25.948.125,00)	97,69	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.35.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.123.143.600,00	1.097.195.475,00	(25.948.125,00)	97,69	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.130.549.807,00	8.441.972.590,00	(688.577.217,00)	92,46	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.42.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.436.630.357,00	4.917.080.440,00	(519.549.917,00)	90,44	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.42.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.693.919.450,00	3.524.892.150,00	(169.027.300,00)	95,42	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04	<i>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	105.180.000,00	89.894.000,00	(15.286.000,00)	85,47	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.09.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	100.000.000,00	89.894.000,00	(10.106.000,00)	89,89	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.11.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	89.894.000,00	(10.106.000,00)	89,89	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.180.000,00	0,00	(5.180.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.04.17.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.180.000,00	0,00	(5.180.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	11.277.731.000,00	10.055.026.100,00	(1.222.704.900,00)	89,16	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.000.000.000,00	931.143.000,00	(68.857.000,00)	93,11	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.2.4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 06 . 5 . 2 . 4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1.000.000.000,00	931.143.000,00	(68.857.000,00)	93,11	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 21 . 5 . 2 . 4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000.000,00	931.143.000,00	(68.857.000,00)	93,11	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 47 . 5 . 2 . 4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 53 . 5 . 2 . 4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	10.277.731.000,00	9.123.883.100,00	(1.153.847.900,00)	88,77	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	422.500.000,00	207.447.900,00	(215.052.100,00)	49,10	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 01 . 5 . 2 . 4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	422.500.000,00	207.447.900,00	(215.052.100,00)	49,10	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.631.481.000,00	8.836.768.200,00	(794.712.800,00)	91,75	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 14 . 5 . 2 . 4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.631.481.000,00	8.836.768.200,00	(794.712.800,00)	91,75	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	223.750.000,00	79.667.000,00	(144.083.000,00)	35,61	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 21 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.750.000,00	41.300.000,00	(2.450.000,00)	94,40	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02 . 21 . 5 . 2 . 4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180.000.000,00	38.367.000,00	(141.633.000,00)	21,32	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	11.849.000,00	11.849.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01	<i>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	11.849.000,00	11.849.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	11.849.000,00	11.849.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.01 . 01 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.849.000,00	11.849.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.861.051.000,00	1.809.537.000,00	(51.514.000,00)	97,23	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03	<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	1.861.051.000,00	1.809.537.000,00	(51.514.000,00)	97,23	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.861.051.000,00	1.809.537.000,00	(51.514.000,00)	97,23	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 04 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.250.000,00	54.798.000,00	(452.000,00)	99,18	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 04 . 5 . 2 . 3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.805.801.000,00	1.754.739.000,00	(51.062.000,00)	97,17	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 04 . 5 . 2 . 4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.03 . 04 . 5 . 2 . 5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	286.439.000,00	273.215.000,00	(13.224.000,00)	95,38	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.02	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	286.439.000,00	273.215.000,00	(13.224.000,00)	95,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	286.439.000,00	273.215.000,00	(13.224.000,00)	95,38	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286.439.000,00	273.215.000,00	(13.224.000,00)	95,38	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.000.000,00	7.700.000,00	(300.000,00)	96,25	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	8.000.000,00	7.700.000,00	(300.000,00)	96,25	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.01.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	8.000.000,00	7.700.000,00	(300.000,00)	96,25	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	7.700.000,00	(300.000,00)	96,25	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.537.764.000,00	3.442.438.800,00	(95.325.200,00)	97,31	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	3.468.725.000,00	3.374.403.800,00	(94.321.200,00)	97,28	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.998.725.000,00	2.904.403.800,00	(94.321.200,00)	96,85	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.2.4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.998.725.000,00	2.904.403.800,00	(94.321.200,00)	96,85	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.03.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.05	<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	69.039.000,00	68.035.000,00	(1.004.000,00)	98,55	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	69.039.000,00	68.035.000,00	(1.004.000,00)	98,55	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.05.02.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.039.000,00	68.035.000,00	(1.004.000,00)	98,55	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	564.683.000,00	446.550.000,00	(118.133.000,00)	79,08	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<i>Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	564.683.000,00	446.550.000,00	(118.133.000,00)	79,08	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	564.683.000,00	446.550.000,00	(118.133.000,00)	79,08	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.04.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	564.683.000,00	446.550.000,00	(118.133.000,00)	79,08	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.01.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	941.398.514,00	878.525.920,00	(62.872.594,00)	93,32	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	48.750.000,00	48.700.000,00	(50.000,00)	99,90	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.750.000,00	48.700.000,00	(50.000,00)	99,90	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.750.000,00	48.700.000,00	(50.000,00)	99,90	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	892.648.514,00	829.825.920,00	(62.822.594,00)	92,96	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	629.613.993,00	574.144.920,00	(55.469.073,00)	91,19	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.633.050,00	176.302.920,00	(45.330.130,00)	79,55	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.950.345,00	104.093.000,00	(2.857.345,00)	97,33	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.2.4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	301.030.598,00	293.749.000,00	(7.281.598,00)	97,58	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	263.034.521,00	255.681.000,00	(7.353.521,00)	97,20	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.03.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.034.521,00	28.954.000,00	(4.080.521,00)	87,65	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.03.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.568.000,00	(432.000,00)	97,84	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.03.5.2.4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	210.000.000,00	207.159.000,00	(2.841.000,00)	98,65	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.063.471.000,00	1.032.347.564,00	(31.123.436,00)	97,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.02.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.063.471.000,00	1.032.347.564,00	(31.123.436,00)	97,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.063.471.000,00	1.032.347.564,00	(31.123.436,00)	97,07	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.06.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	293.187.418,00	289.540.000,00	(3.647.418,00)	98,76	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.06.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	770.283.582,00	742.807.564,00	(27.476.018,00)	96,43	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.04	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.04.02.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03	Program Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.07.5.2.4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03	Program Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	410.756.000,00	400.280.000,00	(10.476.000,00)	97,45	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	410.756.000,00	400.280.000,00	(10.476.000,00)	97,45	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	410.756.000,00	400.280.000,00	(10.476.000,00)	97,45	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 03 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	410.756.000,00	400.280.000,00	(10.476.000,00)	97,45	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	500.000.000,00	478.390.000,00	(21.610.000,00)	95,68	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01	<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	500.000.000,00	478.390.000,00	(21.610.000,00)	95,68	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	400.000.000,00	381.500.000,00	(18.500.000,00)	95,38	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 07 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	195.000.000,00	(5.000.000,00)	97,50	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 07 . 5 . 2 . 3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	186.500.000,00	(13.500.000,00)	93,25	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	96.890.000,00	(3.110.000,00)	96,89	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 10 . 5 . 2 . 5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	96.890.000,00	(3.110.000,00)	96,89	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.356.000.000,00	1.335.980.000,00	(20.020.000,00)	98,52	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01	<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	1.300.000.000,00	1.286.780.000,00	(13.220.000,00)	98,98	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.300.000.000,00	1.286.780.000,00	(13.220.000,00)	98,98	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5 . 2 . 3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.300.000.000,00	1.286.780.000,00	(13.220.000,00)	98,98	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 02 . 5 . 2 . 5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02	<i>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	56.000.000,00	49.200.000,00	(6.800.000,00)	87,86	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	56.000.000,00	49.200.000,00	(6.800.000,00)	87,86	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01 . 5 . 2 . 3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01 . 5 . 2 . 5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	56.000.000,00	49.200.000,00	(6.800.000,00)	87,86	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.494.704.000,00	1.329.305.000,00	(165.399.000,00)	88,93	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	1.494.704.000,00	1.329.305.000,00	(165.399.000,00)	88,93	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.494.704.000,00	1.329.305.000,00	(165.399.000,00)	88,93	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.01 . 01 . 5 . 2 . 3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.494.704.000,00	1.329.305.000,00	(165.399.000,00)	88,93	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.233.749.000,00	1.153.741.310,00	(80.007.690,00)	93,52	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	1.233.749.000,00	1.153.741.310,00	(80.007.690,00)	93,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 01 . 5 . 2 . 4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	1.233.749.000,00	1.153.741.310,00	(80.007.690,00)	93,52	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 08 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.043.749.000,00	967.766.310,00	(75.982.690,00)	92,72	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 03 . 2.02 . 08 . 5 . 2 . 3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.000.000,00	185.975.000,00	(4.025.000,00)	97,88	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	173.446.067,00	136.962.000,00	(36.484.067,00)	78,97	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	123.696.067,00	87.627.000,00	(36.069.067,00)	70,84	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	123.696.067,00	87.627.000,00	(36.069.067,00)	70,84	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.696.067,00	87.627.000,00	(36.069.067,00)	70,84	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.03	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*****</i>	49.750.000,00	49.335.000,00	(415.000,00)	99,17	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.03 . 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****	49.750.000,00	49.335.000,00	(415.000,00)	99,17	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.03 . 02 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.750.000,00	49.335.000,00	(415.000,00)	99,17	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.540.000,00	3.300.000,00	(240.000,00)	93,22	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	3.540.000,00	3.300.000,00	(240.000,00)	93,22	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.540.000,00	3.300.000,00	(240.000,00)	93,22	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 02 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.540.000,00	3.300.000,00	(240.000,00)	93,22	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	5.092.428.288,00	4.743.165.780,00	(349.262.508,00)	93,14	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	5.092.428.288,00	4.743.165.780,00	(349.262.508,00)	93,14	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	48.000.000,00	47.705.680,00	(294.320,00)	99,39	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 01 . 5 . 2 . 5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	48.000.000,00	47.705.680,00	(294.320,00)	99,39	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.044.428.288,00	4.695.460.100,00	(348.968.188,00)	93,08	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 04 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.648.818.488,00	1.443.584.000,00	(205.234.488,00)	87,55	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 04 . 5 . 2 . 3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.384.209.800,00	3.241.376.100,00	(142.833.700,00)	95,78	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 04 . 5 . 2 . 4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 04 . 5 . 2 . 5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.400.000,00	10.500.000,00	(900.000,00)	92,11	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04 . 2.01 . 05 . 5 . 2 . 5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.357.000,00	1.325.000,00	(32.000,00)	97,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	1.357.000,00	1.325.000,00	(32.000,00)	97,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.357.000,00	1.325.000,00	(32.000,00)	97,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.03.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.357.000,00	1.325.000,00	(32.000,00)	97,64	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.05.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	6.479.656.450,00	6.021.054.450,00	(458.602.000,00)	92,92	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01	<i>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	6.479.656.450,00	6.021.054.450,00	(458.602.000,00)	92,92	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	5.900.000.000,00	5.510.453.000,00	(389.547.000,00)	93,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.05.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.900.000.000,00	5.510.453.000,00	(389.547.000,00)	93,40	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	579.656.450,00	510.601.450,00	(69.055.000,00)	88,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.06.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	579.656.450,00	510.601.450,00	(69.055.000,00)	88,09	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04	<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.04.01.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04	Program Rehabilitasi Sosial	372.832.000,00	293.040.000,00	(79.792.000,00)	78,60	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	372.832.000,00	293.040.000,00	(79.792.000,00)	78,60	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	62.100.000,00	60.050.000,00	(2.050.000,00)	96,70	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.09.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.100.000,00	60.050.000,00	(2.050.000,00)	96,70	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	310.732.000,00	232.990.000,00	(77.742.000,00)	74,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.10.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310.732.000,00	232.990.000,00	(77.742.000,00)	74,98	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	18.419.152,00	18.419.000,00	(152,00)	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01	<i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>	18.419.152,00	18.419.000,00	(152,00)	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	18.419.152,00	18.419.000,00	(152,00)	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.419.152,00	17.419.000,00	(152,00)	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01.5.2.5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	199.100.000,00	185.682.500,00	(13.417.500,00)	93,26	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	199.100.000,00	185.682.500,00	(13.417.500,00)	93,26	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.06.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	199.100.000,00	185.682.500,00	(13.417.500,00)	93,26	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.16.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.100.000,00	185.682.500,00	(13.417.500,00)	93,26	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	595.000.000,00	501.202.000,00	(93.798.000,00)	84,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.02	<i>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	595.000.000,00	501.202.000,00	(93.798.000,00)	84,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	595.000.000,00	501.202.000,00	(93.798.000,00)	84,24	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.02.02.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.000.000,00	304.602.000,00	(65.398.000,00)	82,32	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.02.02.5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	225.000.000,00	196.600.000,00	(28.400.000,00)	87,38	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.231.144,00	14.070.000,00	(23.161.144,00)	37,79	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	37.231.144,00	14.070.000,00	(23.161.144,00)	37,79	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.231.144,00	14.070.000,00	(23.161.144,00)	37,79	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.11.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.231.144,00	14.070.000,00	(23.161.144,00)	37,79	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06	Program Penanganan Bencana	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.04.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.05.5.2.4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01.5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.0-00.0-00.0-00.00.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 07 . 2.01 . 03 . 5 . 2 . 5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 08	Program Penataan Bangunan Gedung	41.989.104.000,00	40.216.870.000,00	(1.772.234.000,00)	95,78	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 08 . 2.01	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	41.989.104.000,00	40.216.870.000,00	(1.772.234.000,00)	95,78	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 08 . 2.01 . 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	41.989.104.000,00	40.216.870.000,00	(1.772.234.000,00)	95,78	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 08 . 2.01 . 02 . 5 . 2 . 3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.989.104.000,00	40.216.870.000,00	(1.772.234.000,00)	95,78	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	770.000.000,00	677.220.000,00	(92.780.000,00)	87,95	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01	<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>	770.000.000,00	677.220.000,00	(92.780.000,00)	87,95	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01 . 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	770.000.000,00	677.220.000,00	(92.780.000,00)	87,95	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01 . 03 . 5 . 2 . 4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	770.000.000,00	677.220.000,00	(92.780.000,00)	87,95	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.001.300,00	49.520.570,00	(480.730,00)	99,04	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01	<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	50.001.300,00	49.520.570,00	(480.730,00)	99,04	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01 . 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50.001.300,00	49.520.570,00	(480.730,00)	99,04	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01 . 01 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.300,00	0,00	(1.300,00)	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 09 . 2.01 . 01 . 5 . 2 . 5	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.520.570,00	(479.430,00)	99,04	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10	Program Penyelenggaraan Jalan	55.525.779.000,00	35.082.439.100,00	(20.443.339.900,00)	63,18	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01	<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	55.525.779.000,00	35.082.439.100,00	(20.443.339.900,00)	63,18	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 06 . 5 . 2 . 4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 08	Rekonstruksi Jalan	55.094.271.000,00	34.663.819.100,00	(20.430.451.900,00)	62,92	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 08 . 5 . 2 . 4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.094.271.000,00	34.663.819.100,00	(20.430.451.900,00)	62,92	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	431.508.000,00	418.620.000,00	(12.888.000,00)	97,01	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 10 . 2.01 . 11 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	431.508.000,00	418.620.000,00	(12.888.000,00)	97,01	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 11	Program Pengelolaan Persampahan	454.750.000,00	445.650.000,00	(9.100.000,00)	98,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 11 . 2.01	<i>Pengelolaan Sampah</i>	454.750.000,00	445.650.000,00	(9.100.000,00)	98,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 11 . 2.01 . 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	454.750.000,00	445.650.000,00	(9.100.000,00)	98,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 11 . 2.01 . 05 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.100.000,00	161.135.000,00	(2.965.000,00)	98,19	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 11 . 2.01 . 05 . 5 . 2 . 3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.900.000,00	85.415.000,00	(485.000,00)	99,44	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 11 . 2.01 . 05 . 5 . 2 . 4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	204.750.000,00	199.100.000,00	(5.650.000,00)	97,24	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 11 . 2.01 . 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 11 . 2.01 . 07 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	177.600.000,00	172.193.560,00	(5.406.440,00)	96,96	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 12 . 2.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	81.600.000,00	78.781.560,00	(2.818.440,00)	96,55	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 12 . 2.02 . 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	81.600.000,00	78.781.560,00	(2.818.440,00)	96,55	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 12 . 2.02 . 03 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.600.000,00	78.781.560,00	(2.818.440,00)	96,55	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 12 . 2.04	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	96.000.000,00	93.412.000,00	(2.588.000,00)	97,30	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 12 . 2.04 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	96.000.000,00	93.412.000,00	(2.588.000,00)	97,30	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 12 . 2.04 . 02 . 5 . 2 . 2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.000.000,00	93.412.000,00	(2.588.000,00)	97,30	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 5 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	(53.938.954.270,00)	25,66	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00	Non Program	0,00	11.881.430.880,00	11.881.430.880,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00	<i>Non Kegiatan</i>	0,00	11.881.430.880,00	11.881.430.880,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00	Non Sub Kegiatan	0,00	11.881.430.880,00	11.881.430.880,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 5 . 3 . 1	- Belanja Tidak Terduga	0,00	11.881.430.880,00	11.881.430.880,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	72.557.615.273,00	6.737.230.123,00	(65.820.385.150,00)	9,29	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04	<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	72.557.615.273,00	6.737.230.123,00	(65.820.385.150,00)	9,29	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	72.557.615.273,00	6.737.230.123,00	(65.820.385.150,00)	9,29	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 09 . 5 . 3 . 1	- Belanja Tidak Terduga	72.557.615.273,00	6.737.230.123,00	(65.820.385.150,00)	9,29	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 5 . 4	BELANJA TRANSFER	675.562.515.700,00	672.768.458.757,00	(2.794.056.943,00)	99,59	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00	Non Program	0,00	380.846.601.000,00	380.846.601.000,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00	<i>Non Kegiatan</i>	0,00	380.846.601.000,00	380.846.601.000,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00	Non Sub Kegiatan	0,00	380.846.601.000,00	380.846.601.000,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 5 . 4 . 2	- Belanja Bantuan Keuangan	0,00	380.846.601.000,00	380.846.601.000,00	0,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	675.562.515.700,00	291.921.857.757,00	(383.640.657.943,00)	43,21	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04	<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	675.562.515.700,00	291.921.857.757,00	(383.640.657.943,00)	43,21	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	656.506.646.100,00	275.493.045.100,00	(381.013.601.000,00)	41,96	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 08 . 5 . 4 . 2	- Belanja Bantuan Keuangan	656.506.646.100,00	275.493.045.100,00	(381.013.601.000,00)	41,96	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	19.055.869.600,00	16.428.812.657,00	(2.627.056.943,00)	86,21	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02 . 2.04 . 10 . 5 . 4 . 1	- Belanja Bagi Hasil	19.055.869.600,00	16.428.812.657,00	(2.627.056.943,00)	86,21	
	JUMLAH BELANJA	2.949.643.677.710,28	2.493.406.881.542,00	(456.236.796.168,28)	84,53	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(417.159.044.325,28)	76.630.895.831,00	493.789.940.156,28	(18,37)	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH	464.159.044.325,28	464.089.680.010,28	(69.364.315,00)	99,99	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	440.659.044.325,28	440.589.680.010,28	(69.364.315,00)	99,98	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	440.659.044.325,28	440.589.680.010,28	(69.364.315,00)	99,98	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 6 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	440.659.044.325,28	440.589.680.010,28	(69.364.315,00)	99,98	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 6. 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 6. 2. 1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0-00.0-00.0-00.00 . 00 . 0.00 . 00 . 6. 2. 2	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	0,00	100,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	417.159.044.325,28	417.089.680.010,28	(69.364.315,00)	99,98	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	493.720.575.841,28	493.720.575.841,28	0,00	

BUPATI KLATEN

cap ttd

SRI MULYANI

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN										
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021										
KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.544.987.722.302,28	1.262.305.173.702,00	218.895.223.163,00	171.094.822.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	Pendidikan	907.655.686.439,00	756.098.993.942,00	39.314.343.558,00	36.878.734.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN	907.655.686.439,00	756.098.993.942,00	39.314.343.558,00	36.878.734.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01	Dinas Pendidikan	812.224.004.126,00	666.754.854.937,00	16.590.718.550,00	15.943.800.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	743.344.990.676,00	605.396.049.491,00	560.050.000,00	533.719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	282.390.000,00	94.880.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.770.000,00	33.193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.620.000,00	61.686.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	740.043.441.676,00	603.169.581.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	739.873.441.676,00	603.106.644.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000.000,00	11.442.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	70.000.000,00	51.494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	665.000.000,00	210.318.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	665.000.000,00	210.318.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	624.300.000,00	480.779.660,00	213.200.000,00	197.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	15.003.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	356.800.000,00	330.790.100,00	213.200.000,00	197.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	24.911.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	72.500.000,00	70.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	39.600.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.289.000,00	2.288.900,00	346.850.000,00	336.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.289.000,00	2.288.900,00	346.850.000,00	336.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.202.570.000,00	1.092.419.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	257.470.000,00	195.741.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	945.100.000,00	896.678.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	525.000.000,00	345.781.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000,00	87.036.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000,00	239.276.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	19.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	34.207.057.450,00	28.048.254.146,00	16.030.668.550,00	15.410.081.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5.295.038.050,00	4.216.133.925,00	12.749.344.950,00	12.245.903.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	58.098.000,00	57.940.500,00	1.548.087.000,00	1.486.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	60.624.050,00	59.026.000,00	1.732.316.100,00	1.668.851.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	21.030.000,00	20.531.500,00	509.610.600,00	501.335.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.400.000.000,00	975.233.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	750.000.000,00	725.296.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	40.000.000,00	28.426.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	151.086.000,00	36.810.000,00	8.959.331.250,00	8.589.610.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	90.000.000,00	72.252.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	200.000.000,00	125.285.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	550.000.000,00	414.975.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	207.000.000,00	147.927.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	867.200.000,00	763.456.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	900.000.000,00	789.872.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.859.144.400,00	4.544.422.475,00	3.176.143.600,00	3.074.283.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	115.000.000,00	108.234.000,00	885.000.000,00	833.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	32.000.000,00	24.854.350,00	1.168.000.000,00	1.143.886.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	265.000.000,00	254.297.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	295.000.000,00	282.621.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	455.000.000,00	432.641.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	260.000.000,00	247.515.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.500.000.000,00	939.970.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	55.000.000,00	28.641.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	11.744.400,00	6.942.675,00	1.123.143.600,00	1.097.195.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.000.000,00	62.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	125.000.000,00	90.275.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000,00	210.511.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	153.800.000,00	75.478.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.021.600.000,00	1.632.928.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	170.000.000,00	146.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	21.225.600.000,00	17.644.999.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	232.400.000,00	163.769.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	45.000.000,00	15.416.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	178.800.000,00	116.246.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	775.000.000,00	402.808.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	19.994.400.000,00	16.946.757.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.827.275.000,00	1.642.698.360,00	105.180.000,00	89.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00	100.000.000,00	89.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	82.400.000,00	62.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	52.400.000,00	42.366.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	270.000.000,00	247.706.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.282.020.000,00	1.155.386.490,00	5.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.02.2.04.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	140.455.000,00	134.485.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	370.526.000,00	242.466.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	240.526.000,00	140.271.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	240.526.000,00	140.271.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	130.000.000,00	102.194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	60.000.000,00	34.114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	70.000.000,00	68.079.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	34.276.430.000,00	33.045.274.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	34.276.430.000,00	33.045.274.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	34.091.280.000,00	32.948.088.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	185.150.000,00	97.186.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	25.000.000,00	22.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	22.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.06.2.01.02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	22.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02	TK Negeri Pembina Klaten	25.675.000,00	21.184.170,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.675.000,00	21.184.170,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.500.000,00	11.487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	1.496.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	4.991.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.175.000,00	9.696.670,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00	5.834.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.175.000,00	3.862.450,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.03	SD Negeri	55.516.850.160,00	53.214.803.998,00	13.492.554.201,00	12.394.775.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.03.02	Program Pengelolaan Pendidikan	55.516.850.160,00	53.214.803.998,00	13.492.554.201,00	12.394.775.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.03.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	55.516.850.160,00	53.214.803.998,00	13.492.554.201,00	12.394.775.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.03.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	55.516.850.160,00	53.214.803.998,00	13.492.554.201,00	12.394.775.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.04	SMP Negeri	39.665.929.973,00	35.888.096.287,00	9.130.549.807,00	8.441.972.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.04.02	Program Pengelolaan Pendidikan	39.665.929.973,00	35.888.096.287,00	9.130.549.807,00	8.441.972.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.04.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	39.665.929.973,00	35.888.096.287,00	9.130.549.807,00	8.441.972.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.04.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	39.665.929.973,00	35.888.096.287,00	9.130.549.807,00	8.441.972.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05	SPNF SKB Cawas	223.227.180,00	220.054.550,00	99.196.000,00	98.185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	157.404.000,00	154.233.400,00	99.196.000,00	98.185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.904.000,00	26.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	4.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.904.000,00	10.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.500.000,00	97.381.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	27.123.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.500.000,00	55.478.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00	29.974.740,00	99.196.000,00	98.185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	99.196.000,00	98.185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	29.974.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.02	Program Pengelolaan Pendidikan	65.823.180,00	65.821.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	55.023.180,00	55.021.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1-01.0-00.0-00.01.05.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	55.023.180,00	55.021.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Kesehatan	483.355.727.038,28	375.485.876.014,00	49.781.630.609,00	29.407.032.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

</

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1-02.0-00.0-00.01	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	483.355.727.038,28	375.485.876.014,00	49.781.630.609,00	29.407.032.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01	Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras	291.787.578.489,28	216.456.218.156,00	33.303.827.202,00	19.942.123.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	161.724.102.607,28	129.353.833.527,00	9.237.307.961,00	5.688.864.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.300.000,00	47.167.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.300.000,00	47.167.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.839.267.066,00	47.306.133.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.735.125.696,00	28.912.053.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.586.295.844,00	2.417.411.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.419.525.526,00	15.955.068.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.320.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.745.000,00	13.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	16.745.000,00	13.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	673.635.881,00	554.096.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.500.000,00	22.411.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.736.500,00	123.667.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	143.955.381,00	134.533.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	119.244.000,00	113.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.200.000,00	160.393.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.067.200,00	10.056.500,00	703.008.826,00	686.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.680.000,00	1.672.500,00	250.022.826,00	246.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.387.200,00	8.384.000,00	452.986.000,00	440.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.568.370.494,00	2.428.303.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.250.000,00	9.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	393.754.000,00	298.718.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.489.406.494,00	1.448.549.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	672.960.000,00	671.159.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.109.407.633,00	2.006.312.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	459.311.316,00	381.765.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.757.500,00	59.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	377.845.000,00	368.532.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	645.093.817,00	629.846.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	566.400.000,00	566.399.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	95.458.309.333,28	76.987.930.529,00	8.534.299.135,00	5.001.866.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	59.050.000,00	39.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.123.061.250,00	785.526.778,00	101.856.971,00	87.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	94.276.198.083,28	76.163.398.751,00	8.432.442.164,00	4.914.117.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	109.933.936.634,00	75.652.688.393,00	24.066.519.241,00	14.253.258.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	24.136.687.230,00	16.161.894.277,00	16.308.073.075,00	10.324.806.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	21.440.000,00	17.092.800,00	7.155.587.000,00	2.974.321.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.400.000.000,00	1.380.449.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.693.452.700,00	8.022.540.263,00	89.271.300,00	61.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	42.580.000,00	0,00	1.252.468.000,00	598.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	23.563.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.170.130,00	0,00	2.733.550.870,00	2.270.827.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	32.370.805,00	31.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	4.872.496.000,00	4.369.346.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	102.050.000,00	81.751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	3.109.302.220,00	2.742.465.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.506.458.280,00	2.205.767.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	6.208.233.900,00	1.662.398.182,00	148.766.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.705.808.704,00	59.439.222.616,00	7.648.186.866,00	3.828.042.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	211.093.000,00	202.065.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.854.000,00	16.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.559.160.500,00	2.316.398.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.960.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.640.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	43.420.000,00	40.158.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	51.812.000,00	18.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	86.084.000,00	76.860.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	25.761.000,00	24.118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.760.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.630.000,00	18.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.440.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	72.350.000,00	64.229.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.800.000,00	0						

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.440.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	881.825.750,00	87.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	31.060.000,00	214.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	20.792.902.550,00	13.222.459.640,00	2.572.932.170,00	1.056.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	18.515.591.386,00	5.459.105.074,00	4.906.170.421,00	2.654.413.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	774.668.650,00	569.329.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15.060.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	152.932.500,00	61.348.490,00	1.200.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	495.755.400,00	353.014.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	42.800.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	498.305.000,00	335.059.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	64.915.752,00	13.577.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	56.550.000,00	51.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	136.291.200,00	116.788.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40.950.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	463.695.000,00	396.072.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	552.065.000,00	394.123.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.411.654.400,00	33.930.657.400,00	32.440.000,00	25.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	63.920.000,00	75.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	8.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	592.495.725,00	563.113.009,00	135.444.275,00	90.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	2.525.515.000,00	205.896.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	331.032.000,00	22.674.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	404.000.000,00	319.417.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	73.240.700,00	51.771.500,00	110.259.300,00	100.409.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	32.500.000,00	26.915.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20.000.000,00	9.777.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	20.740.700,00	15.078.200,00	110.259.300,00	100.409.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	18.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	19.581.336.248,00	11.073.952.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP di Wilayah Kabupaten/Kota	19.313.646.248,00	10.846.446.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	6.158.012.000,00	629.661.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	15.784.248,00	11.427.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	13.139.850.000,00	10.205.357.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	267.690.000,00	227.505.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	267.690.000,00	227.505.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	319.051.000,00	214.209.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	135.609.000,00	108.064.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Trad	60.000.000,00	41.596.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Ob	75.609.000,00	66.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang	97.745.000,00	43.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Prodi	97.745.000,00	43.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (D	20.200.000,00	14.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	20.200.000,00	14.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	65.497.000,00	47.687.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	65.497.000,00	47.687.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	229.152.000,00	161.534.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	172.952.000,00	107.787.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	172.952.000,00	107.787.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.200.000,00	53.747.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	56.200.000,00	53.747.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02	Puskesmas Klaten Tengah	4.868.523.245,00	4.105.456.208,00	351.607.200,00	273.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.210.971.493,00	3.834.433.823,00	195.191.000,00	140.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.871.787.400,00	2.719.320.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.871.787.400,00	2.719.320.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.784.248,00	15.640.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.784.248,00	15.640.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.323.399.845,00	1.099.472.350,00	195.191.000,00	140.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.323.399.845,00	1.099.472.350,00	195.191.000,00	140.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	625.983.256,00	251.471.580,00	156.416.200,00	133.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.472.000,00	156.416.200,00	133.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	42.153.000,00	37.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	114.263.200,00	95.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	48.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	575.983.256,00	202.999.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.570.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	73.440.000,00	35.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.893.800,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.050.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	130.770.000,00	41.190.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	31.794.900,00	14.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.625.000,00	6.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	101.834.000,00	36.956.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	97.020.000,00	20.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	6.370.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	65.555.000,00	35.648.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.568.496,00	19.550.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.568.496,00	19.550.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	31.568.496,00	19.550.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03	Puskesmas Klatan Selatan	5.532.915.460,00	4.815.541.000,00	468.582.673,00	391.281.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.857.255.460,00	4.411.207.333,00	196.128.959,00	167.500.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.396.908.460,00	3.181.794.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.396.908.460,00	3.181.794.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.460.347.000,00	1.229.412.896,00	196.128.959,00	167.500.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.460.347.000,00	1.229.412.896,00	196.128.959,00	167.500.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	598.525.000,00	334.905.000,00	272.453.714,00	223.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	272.453.714,00	223.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	188.453.000,00	154.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	34.000.714,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	50.000.000,00	49.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	598.525.000,00	334.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.910.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.560.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	6.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	44.190.000,00	18.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.090.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.840.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5.400.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	5.400.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.320.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.240.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	276.580.000,00	151.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16.470.000,00	11.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.500.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.720.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	34.230.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.885.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	45.090.000,00	19.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.700.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	44.670.000,00	41.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.080.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	1.080.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	51.305.000,00	49.898.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	51.305.000,00	49.898.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	51.305.000,00	49.898.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	25.830.000,00	19.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.830.000,00	19.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.001.03.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	25.830.								

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04	Puskesmas Kalikotes	4.797.113.226,00	3.858.681.860,00	318.717.210,00	202.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.180.388.226,00	3.667.747.696,00	110.045.210,00	82.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.965.120.188,00	2.708.545.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.965.120.188,00	2.708.545.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.215.268.038,00	959.202.340,00	110.045.210,00	82.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.215.268.038,00	959.202.340,00	110.045.210,00	82.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	543.792.504,00	158.595.000,00	208.672.000,00	120.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.120.000,00	0,00	208.672.000,00	120.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	800.000,00	0,00	86.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	320.000,00	0,00	72.000.000,00	71.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	50.000.000,00	49.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	542.672.504,00	158.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	29.346.000,00	28.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.820.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	44.860.000,00	35.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.000.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.395.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.780.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	3.780.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.070.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	227.863.504,00	34.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	23.577.000,00	9.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	30.158.000,00	4.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.296.000,00	15.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.300.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.182.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	45.030.000,00	7.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	23.110.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.568.496,00	23.389.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.568.496,00	23.389.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	31.568.496,00	23.389.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	41.364.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.444.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	30.444.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05	Puskesmas Ngawan	5.366.864.665,00	4.526.929.622,00	402.443.500,00	229.162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.647.841.665,00	4.216.122.374,00	150.225.500,00	124.272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.808.925.065,00	2.635.796.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.808.925.065,00	2.635.796.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.838.916.600,00	1.580.325.587,00	150.225.500,00	124.272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.838.916.600,00	1.580.325.587,00	150.225.500,00	124.272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	703.238.752,00	295.023.000,00	252.218.000,00	104.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.018.000,00	252.218.000,00	104.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	128.250.000,00	69.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	123.968.000,00	35.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	653.238.752,00	246.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.969.000,00	41.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19.305.000,00	19.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	46.800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.370.000,00	10.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.635.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.870.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	246.555.300,00	48.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	92.820.000,00	57.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.950.000,00	540.000,							

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21.301.852,00	16.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	15.784.248,00	15.784.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	15.784.248,00	15.784.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	15.784.248,00	15.784.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06	Puskesmas Kebonarum	4.034.930.205,00	3.153.925.762,00	299.833.000,00	205.239.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.341.430.205,00	2.986.859.992,00	177.724.000,00	109.359.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.650.361.751,00	2.444.696.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.650.361.751,00	2.444.696.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	691.068.454,00	542.163.193,00	177.724.000,00	109.359.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	691.068.454,00	542.163.193,00	177.724.000,00	109.359.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	630.363.008,00	112.857.000,00	122.109.000,00	95.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.417.000,00	122.109.000,00	95.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	87.984.000,00	63.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	34.125.000,00	32.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	580.363.008,00	63.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	50.515.000,00	6.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.560.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	15.120.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	16.415.000,00	5.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	249.480.000,00	24.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	54.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.245.000,00	16.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.700.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	108.150.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	17.225.008,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	63.136.992,00	54.208.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	63.136.992,00	54.208.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	63.136.992,00	54.208.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.06.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07	Puskesmas Wedi	7.166.128.775,00	6.145.009.996,00	589.755.000,00	324.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.418.291.607,00	5.834.750.733,00	215.182.000,00	192.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.986.581.601,00	3.700.741.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.986.581.601,00	3.700.741.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.522.832,00	10.415.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.522.832,00	10.415.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.421.187.174,00	2.123.594.172,00	215.182.000,00	192.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.421.187.174,00	2.123.594.172,00	215.182.000,00	192.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	726.791.504,00	289.536.708,00	374.573.000,00	132.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.571.000,00	374.573.000,00	132.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	81.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	292.600.000,00	132.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	676.791.504,00	239.965.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.566.000,00	21.070.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.710.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	48.120.000,00	29.637.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.550.000,00	2.105.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.450.000,00	3.205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.130.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	306.285.000,00	47.635.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.07.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	720.000,00	0,00	0,						

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.00.000	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.00.000.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.071.758.687,00	5.469.262.230,00	370.521.000,00	310.627.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.710.099.090,00	3.497.439.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.710.099.090,00	3.497.439.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.307.080,00	18.343.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.307.080,00	18.343.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.335.352.517,00	1.953.479.306,00	370.521.000,00	310.627.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.335.352.517,00	1.953.479.306,00	370.521.000,00	310.627.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	634.075.008,00	382.219.000,00	349.763.000,00	272.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	349.763.000,00	272.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	194.685.000,00	146.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	105.078.000,00	77.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	50.000.000,00	48.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	634.075.008,00	382.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17.448.000,00	15.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.240.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	44.988.000,00	40.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.610.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.160.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5.760.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	2.160.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.020.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.080.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	272.364.008,00	105.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15.470.000,00	15.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60.415.000,00	53.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	131.844.000,00	88.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	29.056.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	20.480.000,00	14.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	36.829.912,00	36.578.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	36.829.912,00	36.578.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.10.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	36.829.912,00	36.578.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11	Puskesmas Prambanan	5.253.905.210,00	4.560.227.439,00	363.093.320,00	62.360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.561.217.210,00	4.139.732.568,00	163.102.900,00	62.360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.048.250.339,00	2.895.947.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.048.250.339,00	2.895.947.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.512.966.871,00	1.243.785.053,00	163.102.900,00	62.360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.512.966.871,00	1.243.785.053,00	163.102.900,00	62.360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	661.119.300,00	393.075.990,00	199.990.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.458.000,00	199.990.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	120.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	79.977.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	611.119.300,00	343.617.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.242.000,00	25.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	31.282.000,00	31.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.000.000,00	106.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.160.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	234.300.900,00	103.125.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15.600.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.090.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22.210.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	84.956.400,00	72.017.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.705.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	137.973.000,00	83.094.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	25.600.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.568.700,00	27.418.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.568.700,00	27.418.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	31.568.700,00	27.418.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.11.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12	Puskesmas Kebondalem Lor	4.592.794.346,00	3.856.608.080,00	312.392.250,00	167.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.066.157.146,00	3.685.377.992,00	123.488.250,00	117.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.871.566.958,00	2.682.076.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.871.566.958,00	2.682.076.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.194.590.188,00	1.003.301.305,00	123.488.250,00	117.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.194.590.188,00	1.003.301.305,00	123.488.250,00	117.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	479.295.251,00	129.105.132,00	188.904.000,00	49.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	391.200,00	0,00	188.904.000,00	49.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	391.200,00	0,00	160.754.000,00	49.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	28.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	478.904.051,00	129.105.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35.190.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	190.840.000,00	52.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	41.364.500,00	8.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	53.476.000,00	29.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.798.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	16.800.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	45.565.551,00	18.935.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	42.221.949,00	42.221.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetaygunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	42.221.949,00	42.221.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	42.221.949,00	42.221.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.12.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13	Puskesmas Manisrenggo	6.911.686.120,00	5.823.883.271,00	437.728.825,00	334.897.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.100.293.695,00	5.578.122.666,00	252.291.250,00	203.167.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.036.915.147,00	3.791.058.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.036.915.147,00	3.791.058.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.127.575,00	16.920.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.127.575,00	16.920.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.037.250.973,00	1.770.144.539,00	252.291.250,00	203.167.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.037.250.973,00	1.770.144.539,00	252.291.250,00	203.167.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	774.813.820,00	209.182.000,00	185.437.575,00	131.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	185.437.575,00	131.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	29.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	106.040.575,00	82.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	50.000.000,00	49.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	774.813.820,00	209.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.320.100,00	22.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	21.710.000,00	16.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.190.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	398.122.508,00	76.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48.165.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.587.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	55.126.100,00	32.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	61.668.000,00	32.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	83.795.000,00	10.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	9.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	36.578.605,00	36.578.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetaygunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	36.578.605,00	36.578.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.13.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	36.578.605,00	36.578.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14	Puskesmas Kemalang	6.604.643.196,00	5.233.367.522,00	921.343.850,00	301.491.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.864.131.196,00	5.035.282.086,00	638.833.850,00	159.216.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.335.809.723,00	3.161.099.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.335.809.723,00	3.161.099.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.528.321.473,00	1.874.182.530,00	638.833.850,00	159.216.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.528.321.473,00	1.874.182.530,00	638.833.850,00	159.216.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	724.727.752,00	182.732.000,00	282.510.000,00	142.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.400.000,00	282.510.000,00	142.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	186.510.000,00	82.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	96.000.000,00	60.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	674.727.752,00	133.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.816.000,00	32.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	85.767.000,00	35.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	61.616.000,00	9.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	275.052.752,00	26.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13.260.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.528.000,00	4.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	33.830.000,00	10.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	13.728.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.340.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	37.610.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	26.322.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	10.530.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	15.784.248,00	15.353.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	15.784.248,00	15.353.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.14.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	15.784.248,00	15.353.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15	Puskesmas Karangngoko	5.258.685.190,00	4.198.360.816,00	491.621.760,00	410.806.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.598.998.190,00	3.945.147.408,00	207.516.750,00	181.185.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.075.377.543,00	2.808.720.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.075.377.543,00	2.808.720.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.523.620.647,00	1.136.426.930,00	207.516.750,00	181.185.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.523.620.647,00	1.136.426.930,00	207.516.750,00	181.185.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	612.334.256,00	205.860.664,00	284.105.010,00	229.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.403.000,00	284.105.010,00	229.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	179.975.600,00	127.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	104.129.410,00	102.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	562.334.256,00	156.457.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.908.000,00	13.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	37.080.000,00	33.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.480.000,00	4.250.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.910.000,00	9.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.140.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	244.880.000,00	32.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22.720.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.320.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	54.967.000,00	19.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.430.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	71.221.256,00	21.589.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	29.280.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	47.352.744,00	47.352.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	47.352.744,00	47.352.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.15.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	47.352.744,00	47.352.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16	Puskesmas Jatinom	5.758.969.465,00	4.805.751.856,00	234.742.575,00	112.257.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.053.287.465,00	4.590.422.926,00	58.100.000,00	57.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.350.520.363,00	3.212.021.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.350.520.363,0								

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.702.767.102,00	1.378.401.267,00	58.100.000,00	57.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.702.767.102,00	1.378.401.267,00	58.100.000,00	57.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	668.850.418,00	178.499.018,00	176.642.575,00	55.107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	176.642.575,00	55.107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	88.402.000,00	30.279.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	88.240.575,00	24.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	618.850.418,00	178.499.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.358.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.850.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.620.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	51.804.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	16.180.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.460.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	240.870.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	40.335.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.560.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.510.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	94.626.400,00	74.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	67.236.000,00	32.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	38.801.018,00	22.361.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	36.831.582,00	36.829.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	36.831.582,00	36.829.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	36.831.582,00	36.829.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.16.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17	Puskesmas Kayumas	4.345.964.526,00	3.610.038.075,00	636.682.600,00	544.432.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.691.544.526,00	3.289.697.355,00	462.534.600,00	420.715.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.338.458.061,00	2.194.824.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.338.458.061,00	2.194.824.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.353.086.465,00	1.094.872.385,00	462.534.600,00	420.715.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.353.086.465,00	1.094.872.385,00	462.534.600,00	420.715.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	607.067.256,00	280.880.100,00	174.148.000,00	123.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	53.220.000,00	49.500.000,00	174.148.000,00	123.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.220.000,00	0,00	129.398.000,00	79.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	44.750.000,00	43.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	553.847.256,00	231.380.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	54.920.000,00	54.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	41.205.000,00	36.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.320.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	16.500.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.670.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	244.800.000,00	77.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.655.000,00	4.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.266.000,00	2.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23.286.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	98.996.256,00	24.922.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3.754.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	41.475.000,00	21.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	47.352.744,00	39.460.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	47.352.744,00	39.460.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.17.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	47.352.744,00	39.460.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18	Puskesmas Karanganom	6.243.141.701,00	5.186.059.893,00	703.373.880,00	309.890.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.529.680.701,00	4.986.850.476,00	351.404.075,00	309.890.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.666.062.142,00	3.429.310.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.666.062.142,00	3.429.310.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.863.618.559,00	1.557.539.491,00	351.404.075,00	309.890.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.863.618.559,00	1.557.539.491,00	351.404.075,00	309.890.5					

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.080.000,00	351.969.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	152.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	199.590.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	48.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	606.522.504,00	119.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	83.660.000,00	16.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.550.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.140.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	54.495.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	47.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8.468.000,00	8.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.488.000,00	988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	255.750.000,00	29.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27.150.000,00	11.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.500.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	49.650.000,00	15.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	27.151.504,00	10.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	10.260.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.568.496,00	27.502.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.568.496,00	27.502.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	31.568.496,00	27.502.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	25.370.000,00	3.765.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.370.000,00	3.765.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.18.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	25.370.000,00	3.765.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19	Puskesmas Tulung	4.600.629.839,00	4.066.887.290,00	462.000.000,00	196.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.889.894.839,00	3.590.599.966,00	282.000.000,00	196.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.732.374.539,00	2.556.649.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.732.374.539,00	2.556.649.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.157.520.300,00	1.033.950.312,00	282.000.000,00	196.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.157.520.300,00	1.033.950.312,00	282.000.000,00	196.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	620.716.504,00	390.786.986,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.655.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	143.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	36.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	570.716.504,00	341.131.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.490.000,00	36.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	78.416.000,00	76.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.600.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.140.000,00	8.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	244.710.000,00	89.531.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15.060.000,00	13.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	38.620.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	69.055.000,00	63.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	9.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	42.410.000,00	13.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	17.287.504,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.568.496,00	31.510.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.568.496,00	31.510.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	31.568.496,00	31.510.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	58.450.000,00	53.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.450.000,00	53.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.19.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	58.450.000,00	53.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.20	Puskesmas Majegan	5.041.244.394,00	4.104.895.717,00	322.398.250,00	177.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.20.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.20.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.20.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.20.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.347.915.412,00	3.931.869.706,00	200.923.000,00	177.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.20.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.121.521.282,00	2.910.020.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.20.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.121.521.282,00	2.910.020.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.20.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.361.018,00	22.325.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.20.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.361.018,00	22.325.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.20.01.2.10	P									

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.204.033.112,00	999.523.615,00	200.923.000,00	177.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	656.498.900,00	136.232.000,00	121.475.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.520.000,00	121.475.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	82.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	38.925.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	606.498.900,00	86.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	42.930.500,00	6.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	21.960.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	278.000.000,00	29.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	101.803.500,00	17.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	33.540.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	93.088.900,00	19.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	6.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	36.830.082,00	36.794.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	36.830.082,00	36.794.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.20.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	36.830.082,00	36.794.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21	Puskesmas Polanharjo	5.762.412.783,00	4.746.131.824,00	467.153.000,00	149.423.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.979.997.783,00	4.491.800.233,00	162.795.000,00	149.423.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.580.302.097,00	3.301.320.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.580.302.097,00	3.301.320.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.399.695.686,00	1.190.479.510,00	162.795.000,00	149.423.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.399.695.686,00	1.190.479.510,00	162.795.000,00	149.423.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	742.352.628,00	225.072.512,00	304.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.200.000,00	304.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	150.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	154.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	692.352.628,00	175.872.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.630.000,00	16.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.200.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	74.268.000,00	41.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.490.000,00	4.783.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.855.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	304.975.000,00	58.429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16.992.000,00	6.463.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.240.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	70.868.000,00	15.001.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	60.535.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	27.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	29.069.628,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	23.676.372,00	23.345.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	23.676.372,00	23.345.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	23.676.372,00	23.345.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	16.386.000,00	5.913.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.386.000,00	5.913.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.21.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.386.000,00	5.913.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.22	Puskesmas Delanggu	7.737.665.791,00	6.526.111.224,00	984.781.555,00	373.463.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.033.346.915,00	6.247.075.100,00	678.221.555,00	87.143.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.855.002.285,00	4.522.607.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.855.002.285,00	4.522.607.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.892.124,00	3.946.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.892.124,00	3.946.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0-00.0-00.01.22.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.170.452.506,00	1.720.521.635,00	678.221.555,00	87.143.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.170.452.506,00	1.720.521.635,00	678.221.555,00	87.143.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	696.426.752,00	271.144.000,00	306.560.000,00	286.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.440.000,00	13.280.000,00	306.560.000,00	286.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.440.000,00	13.280.000,00	209.200.000,00	193.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	97.360.000,00	93.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	682.986.752,00	257.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	74.432.000,00	56.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.520.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	66.150.000,00	56.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	34.080.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.080.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	900.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	244.858.752,00	42.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	23.805.000,00	9.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.185.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.780.000,00	34.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	54.950.000,00	27.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	6.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	9.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	27.412.000,00	6.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	36.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.892.124,00	7.892.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Peninggunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	7.892.124,00	7.892.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.22.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	7.892.124,00	7.892.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23	Puskemas Juwiring	8.447.753.754,00	6.932.019.534,00	630.881.330,00	306.041.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.593.544.462,00	6.505.885.552,00	185.373.000,00	140.270.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.363.597.673,00	4.074.581.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.363.597.673,00	4.074.581.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.630.708,00	2.630.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.630.708,00	2.630.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.227.316.081,00	2.428.673.679,00	185.373.000,00	140.270.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.227.316.081,00	2.428.673.679,00	185.373.000,00	140.270.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	724.245.132,00	329.130.000,00	445.508.330,00	165.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	445.508.330,00	165.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	265.303.500,00	116.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	130.204.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	50.000.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	724.245.132,00	329.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45.858.000,00	35.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	900.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	84.514.000,00	72.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.670.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.129.100,00	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	349.200.032,00	60.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	69.598.000,00	51.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.136.000,00	8.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	88.284.000,00	50.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	33.226.000,00	21.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.890.000,00	1.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	52.614.160,00	52.359.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Peninggunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	52.614.160,00	52.359.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	52.614.160,00	52.359.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	77.350.000,00	44.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77.350.000,00	44.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.23.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	77.350.000,00	44.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24	Puskemas Wonosari I	5.336.084.682,00	4.453.598.183,00	422.264.307,00	310.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.807.544.222,00	4.221.484.408,00	198.618.792,00	127.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.371.800.711,00	3.133.569.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.371.800.711,00	3.133.569.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.153.540,00	12.697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.153.540,00	12.697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.422.589.971,00	1.075.217.243,00	198.618.792,00	127.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.422.589.971,00	1.075.217.243,00	198.618.792,00	127.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	510.125.504,00	214.337.135,00	223.645.515,00	182.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	223.645.515,00	182.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	137.970.400,00	113.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	35.675.115,00	19.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	50.000.000,00	49.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	510.125.504,00	214.337.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.973.000,00	32.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	26.708.000,00	25.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.740.000,00	8.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.981.000,00	7.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	191.696.800,00	25.098.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	57.331.000,00	37.288.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	29.260.000,00	2.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	53.578.000,00	43.708.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	67.177.000,00	26.502.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	16.534.704,00	4.694.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	18.414.956,00	17.776.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetaygunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	18.414.956,00	17.776.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	18.414.956,00	17.776.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.24.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25	Puskesmas Wonosari II	4.547.374.341,00	3.875.696.566,00	286.719.915,00	255.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.060.693.451,00	3.734.165.618,00	72.995.800,00	53.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.718.622.028,00	2.510.360.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.718.622.028,00	2.510.360.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.730.310,00	18.206.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.730.310,00	18.206.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.322.341.113,00	1.205.599.157,00	72.995.800,00	53.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.322.341.113,00	1.205.599.157,00	72.995.800,00	53.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	459.058.200,00	125.746.700,00	213.724.115,00	201.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	391.200,00	0,00	213.724.115,00	201.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	122.978.000,00	113.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	40.746.115,00	39.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	50.000.000,00	49.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	458.667.000,00	125.746.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.724.000,00	15.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	31.432.000,00	12.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	720.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	188.354.000,00	38.854.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	28.906.000,00	24.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36.546.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	48.020.000,00	7.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5.220.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44.335.000,00	16.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	27.622.690,00	15.784.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetaygunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	27.622.690,00	15.784.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.25.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	27.622.690,00	15.784.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26	Puskesmas Cepher	5.047.472.357,00	4.253.172.572,00	476.273.000,00	370.288.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.448.670.357,00	4.060.625.136,00	276.173.000,00	213.388.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.794.398.524,00	2.600.255.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.794.398.524,00	2.600.255.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.654.271.833,00	1.460.369.798,00	276.173.000,00	213.388.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.654.271.833,00	1.460.369.798,00	276.173.000,00	213.388.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Per									

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.400.000,00	0,00	167.500.000,00	156.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	32.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	580.614.000,00	177.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.724.000,00	25.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	53.508.000,00	40.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.470.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	221.855.000,00	36.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14.850.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	47.475.000,00	13.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	60.460.000,00	40.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.890.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	71.235.000,00	10.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	12.432.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	15.788.000,00	15.353.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	15.788.000,00	15.353.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.26.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	15.788.000,00	15.353.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27	Puskesmas Jambu Kulon	4.547.961.638,00	3.340.482.517,00	410.088.500,00	118.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.935.543.638,00	3.183.438.192,00	205.888.500,00	118.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.575.274.547,00	2.345.309.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.575.274.547,00	2.345.309.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.360.269.091,00	838.128.682,00	205.888.500,00	118.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.360.269.091,00	838.128.682,00	205.888.500,00	118.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	566.501.000,00	117.877.453,00	204.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	204.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	127.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	76.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	566.501.000,00	117.877.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	29.650.000,00	11.148.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	61.118.000,00	42.796.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.448.000,00	1.248.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.125.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.740.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	220.910.000,00	17.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9.810.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	64.070.000,00	13.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	52.510.000,00	1.624.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	55.464.000,00	18.689.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	10.166.000,00	3.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.569.000,00	30.706.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.569.000,00	30.706.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	31.569.000,00	30.706.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	14.348.000,00	8.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.348.000,00	8.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.27.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.348.000,00	8.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28	Puskesmas Pedan	7.409.233.816,00	6.183.396.721,00	411.878.875,00	324.920.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.591.261.816,00	5.782.972.641,00	143.566.000,00	87.170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.899.827.816,00	3.673.352.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.899.827.816,00	3.673.352.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.691.434.000,00	2.109.620.319,00	143.566.000,00	87.170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.691.434.000,00	2.109.620.319,00	143.566.000,00	87.170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	769.209.000,00	357.412.309,00	268.312.875,00	237.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan									

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	105.000.000,00	81.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	163.312.875,00	156.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	48.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	719.209.000,00	308.701.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	64.942.000,00	58.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	36.730.000,00	10.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	31.030.000,00	18.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	46.946.000,00	30.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.860.000,00	2.435.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	900.000,00	531.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	268.790.100,00	80.156.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	69.030.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	93.246.900,00	38.347.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.232.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	6.300.000,00	402.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	82.102.000,00	48.682.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	47.353.000,00	43.011.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendencygunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	47.353.000,00	43.011.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	47.353.000,00	43.011.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.28.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29	Puskesmas Karangdowo	6.699.831.806,00	6.985.839.963,00	1.211.066.590,00	660.917.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.887.312.806,00	6.413.241.619,00	862.676.590,00	400.877.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.498.259.498,00	4.214.022.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.498.259.498,00	4.214.022.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.389.053.308,00	2.199.218.622,00	862.676.590,00	400.877.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.389.053.308,00	2.199.218.622,00	862.676.590,00	400.877.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	765.166.256,00	525.245.600,00	348.390.000,00	260.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	56.840.000,00	49.359.000,00	348.390.000,00	260.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.840.000,00	0,00	288.990.000,00	203.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	59.400.000,00	56.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	708.326.256,00	475.886.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75.970.000,00	71.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.700.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	79.918.000,00	74.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	46.234.000,00	19.253.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	30.767.000,00	26.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	271.928.256,00	105.390.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14.702.000,00	7.669.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.264.000,00	22.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	108.607.000,00	105.025.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.420.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	37.468.000,00	34.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	47.352.744,00	47.352.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendencygunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	47.352.744,00	47.352.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	47.352.744,00	47.352.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.29.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30	Puskesmas Cawas I	6.334.708.776,00	5.367.913.588,00	661.503.500,00	259.403.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.682.396.776,00	5.125.755.539,00	461.526.000,00	259.403.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.865.422.776,00	3.642.473.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.865.422.776,00	3.642.473.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.816.974.000,00	1.483.281.684,00	461.526.000,00	259.403.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.816.974.000,00	1.483.281.684,00	461.526.000,00	259.403.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	604.959.200,00	199.936.100,00	199.977.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	199.977.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	78.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	121.112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	554.959.200,00	199.936.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45.750.000,00	32.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	27.030.000,00	17.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.830.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.230.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	236.387.400,00	55.207.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.050.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.680.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	117.146.800,00	51.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	9.400.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	59.475.000,00	23.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	47.352.800,00	42.221.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	47.352.800,00	42.221.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	47.352.800,00	42.221.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.30.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31	Puskesmas Cawas II	4.916.426.473,00	4.162.546.048,00	390.518.785,00	163.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.369.761.473,00	3.962.920.614,00	204.750.000,00	103.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.954.723.053,00	2.776.152.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.954.723.053,00	2.776.152.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.415.038.420,00	1.186.768.168,00	204.750.000,00	103.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.415.038.420,00	1.186.768.168,00	204.750.000,00	103.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	505.090.504,00	171.456.000,00	185.768.785,00	59.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	51.305.000,00	49.194.000,00	185.768.785,00	59.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.305.000,00	0,00	75.340.000,00	59.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	110.428.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	453.785.504,00	122.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.702.000,00	8.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	52.940.000,00	6.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.360.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.880.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	179.313.504,00	42.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17.560.000,00	4.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.978.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	18.310.000,00	7.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	8.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50.490.000,00	43.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	6.498.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	18.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.568.496,00	26.839.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.568.496,00	26.839.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	31.568.496,00	26.839.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	10.006.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.006.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.31.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.006.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32	Puskesmas Trucuk I	6.298.140.244,00	5.109.985.395,00	327.915.000,00	227.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.662.716.214,00	4.894.082.224,00	217.035.000,00	146.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.340.974.655,00	3.108.383.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.340.974.655,00	3.108.383.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.576.770,00	6.397.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.576.770,00	6.397.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.315.164.789,00	1.779.301.891,00	217.035.000,00	146.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.315.164.789,00	1.779.301.891,00	217.035.000,00	146.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	626.216.552,00	206.947.000,00	110.880.000,00	80.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	52.364.800,00	51.890.000,00	110.880.000,00	80.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.364.800,00	2.140.000,00	75.800.000,00	61.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	35.080.000,00	19.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	573.851.752,00	155.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15.795.000,00	6.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.430.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	27.148.152,00	16.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	210.332.600,00	44.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27.810.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.347.000,00	1.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	98.270.000,00	21.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	81.724.000,00	22.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.060.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.655.000,00	22.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.207.478,00	8.956.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	9.207.478,00	8.956.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.32.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	9.207.478,00	8.956.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33	Puskesmas Trucuk II	4.877.153.172,00	4.300.773.971,00	429.236.665,00	367.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.239.903.836,00	3.864.815.619,00	311.825.665,00	260.478.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.544.190.679,00	2.387.791.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.544.190.679,00	2.387.791.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.045.664,00	15.581.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.045.664,00	15.581.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.674.667.493,00	1.461.442.041,00	311.825.665,00	260.478.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.674.667.493,00	1.461.442.041,00	311.825.665,00	260.478.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	577.404.008,00	385.295.760,00	117.411.000,00	106.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	53.293.000,00	52.728.000,00	117.411.000,00	106.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.293.000,00	3.178.000,00	114.211.000,00	103.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	3.200.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	524.111.008,00	332.567.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.133.000,00	32.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	27.265.000,00	19.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.580.000,00	8.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.480.000,00	1.269.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	228.575.000,00	140.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	33.918.000,00	23.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	37.880.000,00	21.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	49.580.000,00	46.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	54.810.008,00	36.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	8.300.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	270.000,00	0,00	0,00	0,00					

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	42.091.328,00	41.908.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	17.754.000,00	8.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.754.000,00	8.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.33.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17.754.000,00	8.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34	Puskesmas Bayat	8.114.442.710,00	6.449.072.552,00	699.674.070,00	519.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.340.840.837,00	6.167.997.516,00	360.732.000,00	303.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.888.408.505,00	3.661.499.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.888.408.505,00	3.661.499.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.483.127,00	11.463.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.483.127,00	11.463.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.440.949.205,00	2.495.033.804,00	360.732.000,00	303.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.440.949.205,00	2.495.033.804,00	360.732.000,00	303.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	729.108.318,00	247.339.392,00	338.942.070,00	216.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	66.335.000,00	63.670.000,00	338.942.070,00	216.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16.335.000,00	14.670.000,00	119.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	219.242.070,00	186.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	662.773.318,00	183.669.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	42.119.000,00	20.529.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.630.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	98.046.000,00	53.532.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.160.000,00	1.422.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.852.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.060.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.870.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	252.280.000,00	26.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	28.570.000,00	12.402.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	66.331.318,00	25.610.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.910.000,00	687.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88.275.000,00	37.633.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	9.900.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.923.555,00	31.095.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.923.555,00	31.095.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	31.923.555,00	31.095.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	12.570.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.570.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.34.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.570.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.615.664.780,00	83.291.762.127,00	84.133.715.738,00	61.189.352.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	94.615.664.780,00	83.291.762.127,00	84.133.715.738,00	61.189.352.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.615.664.780,00	83.291.762.127,00	84.133.715.738,00	61.189.352.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54.976.056.658,00	49.081.056.197,00	2.018.842.000,00	1.658.728.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.000.000,00	88.971.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.000.000,00	48.577.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.000.000,00	40.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.097.997.000,00	24.389.195.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.617.197.000,00	24.121.738.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120.000.000,00	15.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000,00	23.564.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	310.800.000,00	212.227.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,00	16.527.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	410.000.000,00	205.247.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.000.000,00	46.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000,00	14.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.000.000,00	1.572.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	330.000.000,00	142.579.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	651.044.000,00	386.918.852,00	36.656.000,00	31.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	16.199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	99.569.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.844.000,00	19.383.000,00	31.656.000,00	31.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	99.384.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	8.892.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	75.000.000,00	43.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324.200.000,00	100.309.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000,00	4.900.000,00	1.982.186.000,00	1.627.628.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	899.936.000,00	653.029.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	230.000.000,00	216.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	4.900.000,00	852.250.000,00	758.407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.707.874.000,00	22.392.826.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.052.874.000,00	21.181.136.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	143.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.490.000.000,00	1.054.014.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.949.141.658,00	1.612.996.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	415.800.000,00	251.368.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.841.658,00	1.361.627.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.400.875.000,00	3.116.207.499,00	14.746.456.000,00	13.429.429.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	179.500.000,00	131.552.000,00	1.000.000.000,00	931.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	0,00	0,00	1.000.000.000,00	931.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.02.2.01.47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	119.500.000,00	103.337.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	28.214.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.221.375.000,00	2.984.655.499,00	13.746.456.000,00	12.498.286.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	272.500.000,00	90.738.000,00	422.500.000,00	207.447.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.275.000,00	0,00	2.998.725.000,00	2.904.403.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLSH Rencana Tata Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1.450.000.000,00	1.118.949.882,00	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	0,00	9.631.481.000,00	8.836.768.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.497.600.000,00	1.774.967.617,00	223.750.000,00	79.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	12.731.941.122,00	11.091.717.971,00	11.465.938.738,00	10.660.878.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	12.731.941.122,00	11.091.717.971,00	11.465.938.738,00	10.660.878.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.778.717.712,00	3.121.010.703,00	4.986.282.288,00	4.639.824.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	120.000.000,00	113.268.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	200.000.000,00	146.056.500,00	5.900.000.000,00	5.510.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	8.633.223.410,00	7.711.382.268,00	579.656.450,00	510.601.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	900.000,00	0,00	199.100.000,00	185.682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	900.000,00	0,00	199.100.000,00	185.682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	900.000,00	0,00	199.100.000,00	185.682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.10	Program Penyelenggaraan Jalan	20.568.492.000,00	18.687.055.329,00	55.525.779.000,00	35.082.439.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	20.568.492.000,00	18.687.055.329,00	55.525.779.000,00	35.082.439.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.10.2.01.04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	195.466.000,00	154.977.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	0,00	0,00	55.094.271.000,00	34.663.819.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	20.373.026.000,00	18.532.078.129,00	431.508.000,00	418.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.937.400.000,00	1.315.725.131,00	177.600.000,00	172.193.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	868.400.000,00	788.549.500,00	81.600.000,00	78.781.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	850.000.000,00	786.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	18.400.000,00	2.026.500,00	81.600.000,00	78.781.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	974.000.000,00	445.257.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	624.000.000,00	137.758.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	350.000.000,00	307.498.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	95.000.000,00	81.918.600,00	96.000.000,00	93.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1-03.2-11.2-15.01.01.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	95.000.000,00	81.918.600,00	96.000.000,00	93.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	29.540.057.054,00	24.651.184.033,00	43.776.472.500,00	41.861.360.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.1-03.0-00.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29.540.057.054,00	24.651.184.033,00	43.776.472.500,00	41.861.360.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.1-03.0-00.01.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.540.057.054,00	24.651.184.033,00	43.776.472.500,00	41.861.360.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.1-03.0-00.01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.969.131.500,00	6.542.180.959,00	1.017.368.500,00	967.270.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.1-03.0-00.01.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000,00	67.737.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.1-03.0-00.01.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	41.321.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.1-03.0-00.01.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00	26.416.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.1-03.0-00.01.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.972.928.683,00	4.383.166.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.1-03.0-00.01.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.669.718.937,00	4.175.617.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.1-03.0-00.01.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000.000,00	22.238.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.1-03.0-00.01.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	130.000.000,00	119.508.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.1-03.0-00.01.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	73.209.746,00	65.802.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.1-03.0-00.01.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.000.000,00	128.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.1-03.0-00.01.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000,00	24.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.1-03.0-00.01.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110.000.000,00	103.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1-04.1-03.0-00.01.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.180.000,00	274.415.000,00	2.820.000,00	2.335.925,00	0,00	0,00	0,00	0,

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA									
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA			
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.800.000,00	32.318.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.380.000,00	1.380.000,00	95.120.000,00	92.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.380.000,00	1.380.000,00	95.120.000,00	92.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.100.000,00	88.240.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.130.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.250.000,00	37.227.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.720.000,00	48.012.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.645.000,00	542.104.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	347.353.000,00	326.218.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	213.932.000,00	210.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.360.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.529.817.000,00	2.464.720.102,00	286.439.000,00	273.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.829.463.000,00	1.801.267.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	1.604.365.000,00	1.577.508.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan K	20.000.000,00	19.400.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5.500.000,00	5.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	181.965.000,00	181.764.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Beruans Hak	4.000.000,00	3.909.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	13.633.000,00	13.214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	700.354.000,00	663.452.500,00	286.439.000,00	273.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.295.000,00	4.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	335.765.000,00	329.662.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	360.294.000,00	329.494.700,00	286.439.000,00	273.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.03	Program Penanggulangan Bencana	31.214.000,00	31.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	31.214.000,00	31.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	31.214.000,00	31.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	837.377.000,00	832.722.676,00	3.540.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	837.377.000,00	832.722.676,00	3.540.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	837.377.000,00	832.722.676,00	3.540.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Sosial	19.401.809.306,00	13.302.183.431,00	1.503.961.758,00	1.389.462.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	19.401.809.306,00	13.302.183.431,00	1.503.961.758,00	1.389.462.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.	19.401.809.306,00	13.302.183.431,00	1.503.961.758,00	1.389.462.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.192.476.064,00	5.688.151.342,00	42.158.758,00	38.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.000.000,00	31.843.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.000.000,00	31.843.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.468.742.064,00	5.001.820.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.448.292.064,00	4.981.370.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.450.000,00	20.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.000.000,00	99.129.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.000.000,00	26.705.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	29.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.620.000,00	9.260.000,00	42.158.758,00	38.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	4.715.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.620.000,00	9.260.000,00	37.443.758,00	33.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.000.000,00	209.959.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000,00	62.797.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.000.000,00	145.621.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.114.000,00	336.137.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.780.000,00	181.220.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.207.000,00	88.862.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.127.000,00	66.055.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.02	Program Pemberdayaan Sosial	1.548.563.608,00	1.496.280.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	64.280.608,00	62.750.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	39.280.608,00	37.936.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	25.000.000,00	24.814.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	342.190.000,00	328.633.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	17.390.000,00	17.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1-06.2-08.2-14.06.01.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	324.800.000,00	311.243.275,00	0,00							

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 02	Program Pendaftaran Penduduk	605.708.000,00	586.385.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 02 . 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	605.708.000,00	586.385.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 02 . 2.01 . 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	587.708.000,00	569.675.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 02 . 2.01 . 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	18.000.000,00	16.710.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 03	Program Pencatatan Sipil	266.883.000,00	257.189.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 03 . 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	266.883.000,00	257.189.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 03 . 2.01 . 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	266.883.000,00	257.189.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 03 . 2.01 . 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	64.000.000,00	60.525.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 05 . 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	64.000.000,00	60.525.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.01 . 01 . 05 . 2.01 . 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	64.000.000,00	60.525.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.884.558.755,00	7.813.707.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.884.558.755,00	7.813.707.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.884.558.755,00	7.813.707.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.280.486.989,00	3.744.553.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.966.103.448,00	3.444.329.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.963.628.448,00	3.444.329.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.414.107,00	80.720.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.979.900,00	2.512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	16.852.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.463.207,00	25.461.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.724.000,00	2.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.247.000,00	15.170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.232.900,00	87.077.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	34.686.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.232.900,00	50.390.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.736.534,00	132.424.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.005.294,00	57.986.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.09 . 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.731.240,00	74.438.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.918.136.966,00	3.416.167.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 04 . 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.918.136.966,00	3.416.167.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 04 . 2.01 . 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.398.752.312,00	3.246.267.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 04 . 2.01 . 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	48.125.154,00	48.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 04 . 2.01 . 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000,00	9.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 04 . 2.01 . 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	296.759.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 04 . 2.01 . 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	67.000.000,00	45.607.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 04 . 2.01 . 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	70.000.000,00	49.321.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 04 . 2.01 . 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	12.500.000,00	8.347.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 04 . 2.01 . 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	15.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	685.934.800,00	652.986.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 05 . 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemb	685.934.800,00	652.986.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 05 . 2.01 . 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Ka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 05 . 2.01 . 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat De	103.140.000,00	100.573.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 05 . 2.01 . 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	40.000.000,00	34.326.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 05 . 2.01 . 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	44.225.000,00	22.433.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 05 . 2.01 . 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 05 . 2.01 . 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	498.569.800,00	495.652.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Perhubungan	8.941.795.037,00	8.088.936.389,00	318.589.000,00	309.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01	DINAS PERHUBUNGAN	8.941.795.037,00	8.088.936.389,00	318.589.000,00	309.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01	Dinas Perhubungan	8.941.795.037,00	8.088.936.389,00	318.589.000,00	309.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.423.894.037,00	5.666.854.076,00	249.550.000,00	241.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.170.000,00	7.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.170.000,00	7.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.250.344.037,00	4.630.959.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.235.344.037,00	4.616.070.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.000.000,00	14.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.370.000,00	249.742.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	3.923.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.970.000,00	55.804.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	124.144.000,00	115.430.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.600.000,00	46.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.156.000,00	26.574.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.450.000,00	6.999.850,00	249.550.000,00	241.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.07 . 05										

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	691.311.000,00	643.214.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2-16.2-21.2-20.01.01.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	691.311.000,00	643.214.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.524.290.575,00	18.139.692.494,00	3.235.154.000,00	3.063.243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	21.524.290.575,00	18.139.692.494,00	3.235.154.000,00	3.063.243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	21.524.290.575,00	18.139.692.494,00	3.235.154.000,00	3.063.243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.007.229.575,00	16.085.463.558,00	1.740.450.000,00	1.733.938.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.659.052.575,00	12.052.154.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.609.052.575,00	12.045.854.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.000.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000,00	265.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	265.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	522.827.000,00	413.911.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000,00	30.370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.827.000,00	86.288.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	230.000.000,00	224.925.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	45.000.000,00	20.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.000.000,00	47.978.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.089.919.000,00	2.945.106.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	384.000.000,00	289.940.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.702.919.000,00	2.652.173.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.431.000,00	408.815.470,00	1.740.450.000,00	1.733.938.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	209.570.000,00	194.574.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.550.000,00	9.550.000,00	1.740.450.000,00	1.733.938.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	216.311.000,00	204.691.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	1.681.757.000,00	1.334.309.536,00	1.494.704.000,00	1.329.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.589.550.000,00	1.266.670.636,00	1.494.704.000,00	1.329.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000,00	122.554.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.189.550.000,00	1.144.116.000,00	1.494.704.000,00	1.329.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.03.2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	92.207.000,00	67.638.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	92.207.000,00	67.638.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	30.000.000,00	23.512.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	30.000.000,00	23.512.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.000.000,00	23.512.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	390.304.000,00	353.647.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	390.304.000,00	353.647.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	390.304.000,00	353.647.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	185.000.000,00	152.498.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	185.000.000,00	152.498.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	25.000.000,00	13.773.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	160.000.000,00	138.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	80.000.000,00	64.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	80.000.000,00	64.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40.000.000,00	36.789.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.07.2.01.03	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	40.000.000,00	27.392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.08	Program Pengembangan UMKM	150.000.000,00	126.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	150.000.000,00	126.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2-17.3-30.0-00.03.01.08.2.01.01	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	150.000.000,00	126.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	Penanaman Modal	4.572.420.962,00	3.758.707.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.572.420.962,00	3.758.707.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.572.420.962,00	3.758.707.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.552.458.962,00	2.987.456.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.932.708.962,00	2.434.429.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.931.296.962,00	2.433.994.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.412.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.700.000,00	203.742.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.900.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	47.910.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.000.000,00	71.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.400.000,00	6.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	40.500.000,00	28.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.800.000,00	43.857.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.800.000,00	217.991.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.01.2.08.01	Penyediaan									

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.250.000,00	131.293.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.750.000,00	59.477.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.500.000,00	71.815.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.03	Program Promosi Penanaman Modal	241.020.000,00	225.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	241.020.000,00	225.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	130.420.000,00	126.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	110.600.000,00	98.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	120.285.000,00	96.219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	120.285.000,00	96.219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	81.485.000,00	68.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	38.800.000,00	27.631.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	558.657.000,00	368.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	558.657.000,00	368.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	237.712.000,00	162.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	312.857.000,00	204.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	8.088.000,00	1.970.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100.000.000,00	80.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	80.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Se	100.000.000,00	80.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	Perpustakaan	4.313.120.000,00	3.820.083.327,00	10.500.000,00	8.845.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	4.313.120.000,00	3.820.083.327,00	10.500.000,00	8.845.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01	Dinas Arsip dan Perpustakaan	4.313.120.000,00	3.820.083.327,00	10.500.000,00	8.845.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.058.335.480,00	3.572.713.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.750.000,00	3.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.750.000,00	3.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.589.225.820,00	3.129.111.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.588.095.740,00	3.128.024.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.130.080,00	1.087.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.663.000,00	50.799.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.460.000,00	4.358.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.602.925,00	7.164.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.800.075,00	3.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.200.000,00	5.768.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.805.000,00	9.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.795.000,00	20.034.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.353.660,00	186.365.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.000.000,00	89.619.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.353.660,00	92.461.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.343.000,00	202.719.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.333.000,00	114.741.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.010.000,00	87.977.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.02	Program Pembinaan Perpustakaan	159.460.680,00	154.042.853,00	10.500.000,00	8.845.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.135.000,00	19.579.500,00	10.500.000,00	8.845.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	17.475.000,00	17.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.160.000,00	1.148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1.500.000,00	1.402.000,00	10.500.000,00	8.845.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.524.680,00	125.724.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	130.524.680,00	125.724.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	8.801.000,00	8.738.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	8.801.000,00	8.738.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	95.323.840,00	93.326.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	95.323.840,00	93.326.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	95.323.840,00	93.326.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	66.397.123.503,00	56.172.445.445,00	4.071.801.152,00	3.798.447.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	Pariwisata	10.488.528.630,00	9.717.600.872,00	1.910.893.152,00	1.859.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2-22.3-26.2-19.04	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	10.488.528.630,00	9.717.600.872,00	1.910.893.152,00	1.859.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2-22.3-26.2-19.04.01	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	10.488.528.630,00	9.717.600.872,00	1.910.893.152,00	1.859.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2-22.3-26.2-19.04.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.027.535.782,00	5.432.813.507,00	31.423.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2-22.3-26.2-19.04.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.604.000,00	65.049.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2-22.3-26.2-19.04.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.604.000,00	65.049.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2-22.3-26.2-19.04.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.865.471.782,00	4.312.952.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2-22.3-26.2-19.04.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.846.551.782,00	4.295.837.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2-22.3-26.2-19.04.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.920.000,00	17.115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2-22.3-26.2-19.04.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.920.000,00	153.561.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2-22.3-26.2-19.04.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	39.599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	59.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.920.000,00	4.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	24.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	24.970.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	31.423.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	31.423.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.600.000,00	455.079.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.600.000,00	2.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.000.000,00	117.136.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	352.000.000,00	335.628.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.940.000,00	446.169.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.310.000,00	210.999.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	87.950.000,00	86.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	156.680.000,00	148.274.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.02	Program Pengembangan Kebudayaan	2.440.082.984,00	2.311.182.795,00	1.861.051.000,00	1.809.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.190.183.000,00	1.130.860.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	148.900.000,00	145.424.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	220.200.000,00	175.916.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	512.932.000,00	512.930.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	117.223.500,00	111.956.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminasi	190.927.500,00	184.631.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.886.000,00	40.021.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	40.886.000,00	40.021.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.209.013.984,00	1.140.301.728,00	1.861.051.000,00	1.809.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	369.675.984,00	345.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	839.338.000,00	795.235.728,00	1.861.051.000,00	1.809.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.03	Program Pemasaran Pariwisata	1.391.527.000,00	1.382.988.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.391.527.000,00	1.382.988.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	70.000.000,00	68.748.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1.291.527.000,00	1.284.395.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	30.000.000,00	29.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	629.382.864,00	590.615.608,00	18.419.152,00	18.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	629.382.864,00	590.615.608,00	18.419.152,00	18.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	108.080.848,00	105.494.908,00	18.419.152,00	18.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	264.850.860,00	259.513.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.3.26.2-19.04.01.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	256.451.156,00	225.616.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	Pertanian	47.868.830.463,00	40.020.343.910,00	1.400.030.000,00	1.304.351.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	47.868.830.463,00	40.020.343.910,00	1.400.030.000,00	1.304.351.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	47.868.830.463,00	40.020.343.910,00	1.400.030.000,00	1.304.351.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.232.006.630,00	27.605.250.761,00	145.075.000,00	129.736.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.522.330,00	21.914.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	15.266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.522.330,00	6.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.131.899.301,00	26.656.559.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.100.399.301,00	26.643.679.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.500.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.000.000,00	23.730.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24.000.000,00	23.730.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.077.500,00	140.227.200,00	89.522.500,00	74.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.995.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	47.663.900,00	83.100.000,00	74.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.577.500,00	15.934.800,00	6.422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.100.000,00	18.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.400.000,00	38.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	55.552.500,00	55.178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	55.552.500,00	55.178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	516.465.610,00	449.904.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	5.789.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.500.000,00	152.641.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.965.610,00	291.474.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.341.889,00	306.214.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.051.125,00	67.342.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.3.25.2-09.01.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.290.764,00	238.872.452,0							

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	57.623.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.500.000,00	4.080.000,00	196.195.000,00	188.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	400.000,00	0,00	39.600.000,00	32.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.100.000,00	4.080.000,00	156.595.000,00	155.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.648.000,00	148.240.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.900.000,00	1.307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.748.000,00	146.933.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.727.000,00	183.295.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.450.000,00	104.305.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.277.000,00	78.989.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1.515.650.000,00	1.132.218.900,00	564.683.000,00	446.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1.515.650.000,00	1.132.218.900,00	564.683.000,00	446.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	135.000.000,00	108.394.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	469.200.000,00	170.115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	808.650.000,00	766.486.000,00	564.683.000,00	446.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	102.800.000,00	87.223.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.285.933.200,00	975.240.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.190.933.200,00	880.240.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	1.085.933.200,00	858.908.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.03.2.01.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	21.332.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	91.610.000,00	60.955.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	65.085.000,00	48.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	65.085.000,00	48.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	26.525.000,00	12.594.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	26.525.000,00	12.594.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.05	Program Hubungan Industrial	349.410.000,00	177.771.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000,00	48.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	110.000.000,00	48.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	239.410.000,00	128.938.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	129.710.000,00	88.129.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000,00	5.316.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta N	53.400.000,00	16.879.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.3-31.2-07.3-32.05.01.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	44.300.000,00	18.611.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	116.579.339.053,00	96.060.656.027,00	1.939.284.340,00	1.840.927.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Sekretariat Daerah	59.559.685.053,00	48.878.886.911,00	1.447.678.340,00	1.379.573.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.601.546.294,00	6.892.770.792,00	12.050.000,00	11.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.601.546.294,00	6.892.770.792,00	12.050.000,00	11.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.979.406.894,00	4.476.276.936,00	12.050.000,00	11.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.877.961.894,00	3.463.643.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.863.051.894,00	3.461.126.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.910.000,00	2.517.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.077.000,00	113.742.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.677.000,00	14.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.144.000,00	30.169.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.165.000,00	36.304.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	2.464.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	14.990.000,00	10.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.101.000,00	19.498.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	12.050.000,00	11.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	12.050.000,00	11.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	371.210.000,00	338.098.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.250.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.000.000,00	128.356.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.000.000,00	95.564.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.960.000,00	110.617.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.158.000,00	560.792.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	407.928.000,00	404.113.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	165.230.000,00	156.678.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.03	Program Penanggulangan Bencana	2.622.139.400,00	2.416.493.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	804.800,00	774.800,00	0,00						

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	30.591.486,00	28.173.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	25.000.000,00	22.976.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	252.117.500,00	199.587.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	78.686.214,00	64.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	92.920.400,00	69.691.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	308.271.200,00	301.417.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.753.747.800,00	1.657.497.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.167.692.900,00	1.149.795.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	406.054.900,00	360.250.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1-05.0-00.0-00.04.01.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	180.000.000,00	147.451.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	51.958.138.759,00	41.986.116.119,00	1.435.628.340,00	1.367.868.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01	Bagian Pemerintahan	1.429.193.181,00	1.237.380.812,00	16.500.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.204.763.745,00	1.032.140.592,00	16.500.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.025.216.181,00	898.326.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.024.216.181,00	897.696.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.000.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.677.564,00	100.316.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.072.564,00	19.707.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.234.000,00	28.222.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.601.000,00	4.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.770.000,00	34.163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.000.000,00	13.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	16.500.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	16.500.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.870.000,00	33.497.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.780.000,00	16.157.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.090.000,00	17.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	224.429.436,00	205.240.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	165.207.436,00	151.321.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	9.705.000,00	8.947.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Wilayah	59.531.436,00	51.697.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	95.971.000,00	90.677.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	59.222.000,00	53.918.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	59.222.000,00	53.918.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.02	Bagian Administrasi Pembangunan	1.568.618.812,00	1.368.201.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.280.798.812,00	1.150.176.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.154.829.812,00	1.055.734.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.146.879.812,00	1.054.839.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.950.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.959.000,00	27.269.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.483.000,00	25.793.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.010.000,00	67.173.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.760.000,00	63.623.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.250.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	287.820.000,00	218.025.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	287.820.000,00	218.025.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	20.149.200,00	10.502.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	177.108.700,00	136.685.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	90.562.100,00	70.837.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03	Bagian Hukum	2.949.222.500,00	2.384.882.680,00	56.000.000,00	55.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.136.977.000,00	1.784.902.640,00	56.000.000,00	55.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.580.938.000,00	1.446.958.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.580.938.000,00	1.446.958.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.000.000,00	215.124.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang	400.000.000,00	215.124.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.904.000,00	33.804.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.821.000,00	8.413.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.800.000,00	7.792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.255.000,00	1.436.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.028.000,00	16.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	56.000.000,00	55.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	56.000.000,00	55.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.205.000,00	53.237.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.205.000,00	53.237.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.930.000,00	35.777.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	26.877.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.930.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	812.245.500,00	599							

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.02.2.03.02	Fasilitas Bantuan Hukum	473.334.000,00	353.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	142.480.500,00	103.152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.01.2.09.03	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	12.092.812.947,00	7.510.901.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.01.2.09.04	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.301.958.006,00	1.060.378.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.01.2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.194.068.006,00	986.334.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.194.068.006,00	986.334.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.170.000,00	31.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.820.000,00	14.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.430.000,00	13.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.920.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.820.000,00	11.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.820.000,00	11.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.01.2.09.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.900.000,00	30.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.900.000,00	30.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.03.2.01.01	Program Perekonomian Dan Pembangunan	10.790.854.941,00	6.450.522.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.03.2.01.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	3.640.924.002,00	2.256.397.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	134.237.000,00	73.564.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	263.670.000,00	50.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	3.243.017.002,00	2.132.103.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.03.2.04.01	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	7.149.930.939,00	4.194.125.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	7.092.580.939,00	4.175.052.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.04.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	57.350.000,00	19.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.09.03	Bagian Organisasi	1.986.383.027,00	1.693.295.915,00	91.493.000,00	87.091.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.09.03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.986.383.027,00	1.693.295.915,00	91.493.000,00	87.091.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.540.800.777,00	1.353.261.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.539.800.777,00	1.353.261.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.782.200,00	47.931.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.400.000,00	14.723.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.498.200,00	7.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.084.000,00	3.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.800.000,00	1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	21.453.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.07.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	344.300,00	300.000,00	91.493.000,00	87.091.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	344.300,00	300.000,00	91.493.000,00	87.091.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.09.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.760.000,00	24.605.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.880.000,00	23.955.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.880.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.13.01	Penataan Organisasi	321.459.750,00	265.961.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	105.662.700,00	84.324.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	99.788.750,00	81.335.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.05.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	116.008.300,00	100.301.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.09.03	Bagian Kesejahteraan Rakyat	4.523.111.632,00	3.940.229.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.09.03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.562.185.220,00	1.233.152.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.341.176.000,00	1.123.672.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.322.456.000,00	1.121.782.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.720.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.969.220,00	72.087.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.195.220,00	13.835.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.084.000,00	2.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	74.200.000,00	27.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.590.000,00	14.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.810.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.350.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.460.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.09.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.730.000,00	22.291.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.730.000,00	22.291.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.02.2.02.01	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2.960.926.412,00	2.707.077.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.02.2.02.01	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.960.926.412,00	2.707.077.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.02.2.02.01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.690.216.412,00	1.450.374.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.239.210.000,00	1.238.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.06.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	31.500.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.01.01	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.372.778.732,00	3.950.859.040,00	748.341.840,00	724.026.500,00</					

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.112.800,00	104.999.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	33.198.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	34.507.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.404.800,00	7.202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.708.000,00	14.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	15.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.826.000,00	43.664.500,00	314.661.500,00	306.842.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	25.564.500,00	25.564.500,00	66.250.000,00	65.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.261.500,00	18.100.000,00	248.411.500,00	241.192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.156.400,00	174.624.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	23.536.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.156.400,00	151.087.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.000.000,00	121.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.000.000,00	79.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.871.591.336,00	1.773.513.192,50	433.680.340,00	417.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	316.091.000,00	301.763.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	954.758.336,00	889.970.627,50	188.303.340,00	178.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.07.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	600.742.000,00	581.779.164,00	245.377.000,00	238.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08	Bagian Umum	20.201.450.152,00	17.509.982.645,00	471.127.500,00	440.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.201.450.152,00	17.509.982.645,00	471.127.500,00	440.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.729.690.818,00	5.693.211.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.629.690.818,00	5.658.891.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000.000,00	34.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.952.996.000,00	1.731.519.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	222.740.000,00	173.598.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.000.000,00	149.615.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	34.194.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	24.256.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	130.000.000,00	116.073.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	42.000.000,00	40.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.122.256.000,00	1.097.927.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	94.963.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.645.500,00	37.672.000,00	471.127.500,00	440.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	112.500.000,00	91.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.645.500,00	37.672.000,00	358.627.500,00	348.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.887.246.988,00	3.430.239.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.145.000,00	58.329.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.000.000.000,00	1.695.085.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	274.600.000,00	274.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.542.501.988,00	1.402.263.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.561.244.846,00	3.099.626.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	241.900.000,00	227.486.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.026.229.448,00	848.431.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	17.325.000,00	17.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	717.044.000,00	689.262.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.558.746.398,00	1.317.396.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.588.576.000,00	1.185.606.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	268.576.000,00	156.657.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	99.905.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.120.000.000,00	829.043.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangga Sekretaris Daerah	2.443.050.000,00	2.332.108.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.510.000.000,00	1.480.932.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	740.000.000,00	703.025.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.08.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	193.050.000,00	148.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.09	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	2.834.567.776,00	2.390.382.235,00	52.166.000,00	45.116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.386.783.776,00	2.086.283.862,00	52.166.000,00	45.116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.304.475.776,00	2.037.857.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.303.395.776,00	2.037.047.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.080.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.048.000,00	23.131.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.196.000,00	11.298.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.291.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.233.000,00	1.232.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.800.000,00	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.819.000,00	4.564.000,00	0,00	0,00	0,00				

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.120.750,00	1.215.900,00	251.180.250,00	223.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	500.000,00	498.000,00	27.500.000,00	26.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.620.750,00	717.900,00	223.680.250,00	196.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.536.000,00	257.585.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.998.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.650.000,00	147.656.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.886.000,00	103.929.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.840.000,00	156.425.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.930.000,00	126.515.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.910.000,00	29.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.199.829.000,00	1.919.764.976,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.553.229.000,00	1.306.433.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	102.041.000,00	60.581.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	40.000.000,00	34.028.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	110.395.000,00	72.954.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	74.150.000,00	59.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	255.649.000,00	247.127.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	949.244.000,00	811.882.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	21.750.000,00	19.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	167.198.000,00	160.848.542,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	50.000.000,00	48.342.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	117.198.000,00	112.506.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	378.802.000,00	356.011.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	75.000.000,00	74.591.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	125.000.000,00	121.905.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	178.802.000,00	159.514.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100.600.000,00	96.471.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100.600.000,00	96.471.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	921.279.000,00	786.153.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	280.000.000,00	267.336.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.325.000,00	26.451.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	31.175.000,00	30.659.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	42.500.000,00	42.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70.987.500,00	69.146.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60.547.000,00	56.896.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	45.465.500,00	41.901.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	332.601.000,00	220.337.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	218.441.000,00	108.549.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	39.800.000,00	37.461.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	15.000.000,00	14.969.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.360.000,00	59.357.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	308.678.000,00	298.479.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.278.000,00	59.099.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5-01.5-05.5-02.02.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	249.400.000,00	239.379.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Keuangan	31.238.332.108,00	26.075.152.662,00	914.103.200,00	850.173.800,00	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	675.562.515.700,00	672.768.458.757,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	31.238.332.108,00	26.075.152.662,00	914.103.200,00	850.173.800,00	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	675.562.515.700,00	672.768.458.757,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	31.238.332.108,00	26.075.152.662,00	914.103.200,00	850.173.800,00	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	675.562.515.700,00	672.768.458.757,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881.430.880,00	0,00	380.846.601.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.00.000	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881.430.880,00	0,00	380.846.601.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.00.000.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881.430.880,00	0,00	380.846.601.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.477.449.774,00	17.901.581.307,00	414.103.200,00	371.783.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.453.944.214,00	15.635.736.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.448.944.214,00	15.630.816.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	204.200.600,00	201.830.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	204.200.600,00	201.830.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.772.000,00	279.982.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.991.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.742.000,00	78.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	14.995.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.010.000,00	63.142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.020.000,00	53.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	49.838.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	940.500.000,00	705.312.625,00	414.103.200,00	371.783.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	940.500.000,00	705.312.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	414.103.200,00	371.783.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.670.290,00	359.089.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.850.000,00	4.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air								

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173.820.290,00	170.770.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.215.362.670,00	719.630.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.014.059.100,00	523.545.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	127.211.770,00	122.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.091.800,00	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.607.893.231,00	2.588.123.750,00	0,00	0,00	72.557.615.273,00	6.737.230.123,00	675.562.515.700,00	291.921.857.757,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.566.151.081,00	1.199.224.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	17.000.000,00	15.426.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	24.200.000,00	10.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	3.278.000,00	1.860.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	660.503.081,00	535.484.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	859.570.000,00	636.399.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	779.786.000,00	370.278.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	74.151.000,00	24.318.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	17.275.000,00	14.439.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	124.449.000,00	76.683.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan	81.875.000,00	40.467.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah	41.851.000,00	15.842.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	160.902.000,00	98.598.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	82.565.000,00	59.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	196.718.000,00	40.164.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.142.115.650,00	975.584.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	81.250.000,00	72.640.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan K	104.125.000,00	60.190.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	54.100.000,00	35.524.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	727.722.650,00	636.424.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	174.918.000,00	170.804.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	119.840.500,00	43.036.100,00	0,00	0,00	72.557.615.273,00	6.737.230.123,00	675.562.515.700,00	291.921.857.757,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	119.840.500,00	43.036.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.506.646.100,00	275.493.045.100,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	72.557.615.273,00	6.737.230.123,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.055.869.600,00	16.428.812.657,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.097.142.950,00	3.399.257.578,00	500.000.000,00	478.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.097.142.950,00	3.399.257.578,00	500.000.000,00	478.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	325.871.000,00	304.794.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	128.008.150,00	111.784.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.070.286.300,00	711.398.502,00	400.000.000,00	381.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	133.913.500,00	65.516.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsnahhan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.359.572.000,00	1.268.693.326,00	100.000.000,00	96.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	131.077.000,00	125.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	948.415.000,00	811.813.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.055.846.153,00	2.186.190.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.055.846.153,00	2.186.190.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	590.500.000,00	382.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	684.950.000,00	668.657.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	58.500.000,00	53.904.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	305.050.000,00	227.354.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	350.450.000,00	307.929.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	1.038.880.153,00	519.474.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	16.300.000,00	15.396.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5-02.0-00.0-00.04.01.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	11.216.000,00	10.640.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	Kepegawaian	8.498.191.500,00	7.684.757.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	8.498.191.500,00	7.684.757.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	8.498.191.500,00	7.684.757.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.397.083.500,00	4.949.808.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.861.083.500,00	4.451.637.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.851.083.500,00	4.442.097.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.000.000,00	333.153.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000,00	47.215.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.000.000,00	56.948.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	95.000.000,00	94.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.000.000,00	134.221.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.000.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5-03.5-04.0-00.01.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	120.000,00	0,00						

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.01									
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.01 . 03	896.907.510,00	820.392.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.01 . 03	627.919.510,00	568.911.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.01 . 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.01 . 06	30.388.000,00	25.751.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.01 . 08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.01 . 10	38.850.000,00	36.417.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.01 . 11	199.750.000,00	189.311.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.02	1.667.400.490,00	1.537.479.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.02 . 01	268.200.000,00	164.826.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.02 . 02	101.300.000,00	79.470.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.02 . 07	1.297.900.490,00	1.293.183.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.03	404.800.000,00	256.449.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.03 . 02	361.000.000,00	221.192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.03 . 04	20.000.000,00	16.597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.03 . 14	23.800.000,00	18.659.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.04	132.000.000,00	120.627.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.04 . 02	24.844.000,00	20.308.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.04 . 04	16.400.000,00	15.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.04 . 08	56.200.000,00	51.135.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5-03.5-04.0-00.01 . 01 . 02 . 2.04 . 10	34.556.000,00	33.384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.591.384.950,00	10.441.134.142,00	726.025.895,00	683.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Inspektorat	13.591.384.950,00	10.441.134.142,00	726.025.895,00	683.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	INSPEKTORAT KABUPATEN	13.591.384.950,00	10.441.134.142,00	726.025.895,00	683.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	Inspektorat Kabupaten	13.591.384.950,00	10.441.134.142,00	726.025.895,00	683.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01									
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01	9.912.334.450,00	8.274.932.542,00	726.025.895,00	683.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.02	8.009.574.256,00	6.980.621.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.02 . 01	7.939.554.256,00	6.945.221.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.02 . 02		70.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06	530.842.000,00	235.890.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 01	24.648.000,00	23.436.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 02	54.071.700,00	32.124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 05	55.981.300,00	44.122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 06	12.000.000,00	10.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 08	134.237.000,00	42.787.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.06 . 09	249.904.000,00	82.647.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.07	55.562.500,00	31.159.000,00	726.025.895,00	683.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.07 . 11	55.562.500,00	31.159.000,00	726.025.895,00	683.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.08	664.275.694,00	517.325.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.08 . 01	6.390.000,00	3.508.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.08 . 02	274.200.000,00	194.600.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.08 . 04	383.685.694,00	319.216.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.09	652.080.000,00	509.936.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.09 . 02	272.400.000,00	190.438.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.09 . 09	262.000.000,00	254.633.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.09 . 11	117.680.000,00	64.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 02	772.840.000,00	324.527.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 02 . 2.01	306.068.000,00	124.391.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 02 . 2.01 . 01	55.000.000,00	7.200.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 02 . 2.01 . 03	13.857.000,00	3.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 02 . 2.01 . 04	13.450.000,00	4.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 02 . 2.01 . 05	185.665.000,00	99.602.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 02 . 2.01 . 07		38.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 02 . 2.02	466.772.000,00	200.136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 02 . 2.02 . 01	62.400.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 02 . 2.02 . 02	404.372.000,00	198.821.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 03	2.906.210.500,00	1.841.674.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 03 . 2.01	1.330.759.250,00	856.312.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 03 . 2.01 . 01	544.662.000,00	334.585.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 03 . 2.01 . 02	786.097.250,00	521.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 03 . 2.02	1.575.451.250,00	985.361.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 03 . 2.02 . 01	22.700.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 03 . 2.02 . 02	52.600.000,00	34.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 03 . 2.02 . 03	1.338.544.250,00	845.887.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 03 . 2.02 . 04	161.607.000,00	103.598.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	89.274.476.857,00	73.477.661.595,00	3.211.988.250,00	2.990.054.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	89.274.476.857,00	73.477.661.595,00	3.211.988.250,00	2.990.054.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	KECAMATAN PRAMBANAN	3.212.184.860,00	2.714.206.334,00	141.100.000,00	136.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	Kecamatan Prambanan	3.212.184.860,00	2.714.206.334,00	141.100.000,00	136.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7-01.0-00.0-00.01 . 01	2.605.425.860,00	2.243.340.584,00	141.100.000,00	136.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7-01.0-00.0-00.01 . 01 . 01 . 2.02	2.381.841.860,00	2.071.330.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.288.000,00	39.008.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.534.000,00	6.229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.259.000,00	15.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.510.000,00	7.964.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.875.000,00	9.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	141.100.000,00	136.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	141.100.000,00	136.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.196.000,00	62.295.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.400.000,00	16.353.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.796.000,00	45.942.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.100.000,00	70.706.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.631.000,00	27.751.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.500.000,00	6.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.969.000,00	36.403.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	254.505.000,00	182.756.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	254.505.000,00	182.756.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	254.505.000,00	182.756.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.04	Program Koordinasi Ketenraman Dan Ketertiban Umum	16.363.000,00	13.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.363.000,00	13.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16.363.000,00	13.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	81.208.100,00	71.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	81.208.100,00	71.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.05.2.01.02	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	81.208.100,00	71.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	254.682.900,00	203.019.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	254.682.900,00	203.019.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.06.2.01.01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18.126.000,00	16.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.275.000,00	14.845.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.226.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.166.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	207.889.900,00	163.843.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02	KECAMATAN GANTIWARNO	2.752.967.765,00	2.321.188.737,00	48.750.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01	Kecamatan Gantiwarno	2.752.967.765,00	2.321.188.737,00	48.750.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.252.084.865,00	1.861.840.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.929.429.761,00	1.557.685.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.902.429.761,00	1.553.005.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.000.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.000.000,00	35.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.888.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	12.903.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000,00	14.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.968.000,00	106.909.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.799.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000,00	7.979.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.968.000,00	96.129.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.687.104,00	161.475.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.830.000,00	44.577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.857.104,00	98.370.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	18.527.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	245.161.600,00	224.292.650,00	48.750.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	245.161.600,00	224.292.650,00	48.750.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	245.161.600,00	224.292.650,00	48.750.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.04	Program Koordinasi Ketenraman Dan Ketertiban Umum	100.100.000,00	91.832.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.100.000,00	91.832.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	93.100.000,00	85.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.000.000,00	6.294.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	18.000.000,00	17.540.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.000.000,00	17.540.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.05.2.01.02	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18.000.000,00	17.540.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	137.621.300,00	125.682.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	137.621.300,00	125.682.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.06.2.01.01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	32.542.000,00	29.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.200.100,00	5.200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000,00	5.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.06.2.01.05	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	88.879.200,00	80.275.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03	KECAMATAN WEDI	3.373.367.357,00	2.84							

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	205.829.500,00	78.784.150,00	11.100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.06.2.01.01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.000.000,00	2.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.300.000,00	10.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.06.2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000,00	863.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.06.2.01.05	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.000.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.06.2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	172.529.500,00	62.630.150,00	11.100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05	KECAMATAN CAWAS	3.319.961.325,00	2.707.844.327,00	148.919.400,00	132.795.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01	Kecamatan Cawas	3.319.961.325,00	2.707.844.327,00	148.919.400,00	132.795.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.686.591.995,00	2.251.156.597,00	148.919.400,00	132.795.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.394.524.725,00	1.996.280.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.393.624.725,00	1.995.380.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.453.650,00	51.371.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.875.000,00	3.752.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.971.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.818.650,00	5.817.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	34.880.000,00	28.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.880.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.254.270,00	2.204.000,00	148.919.400,00	132.795.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.254.270,00	2.204.000,00	148.919.400,00	132.795.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.183.000,00	71.489.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.620.000,00	4.497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.702.000,00	10.170.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.861.000,00	56.821.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.176.350,00	129.810.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.676.000,00	17.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.363.350,00	80.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.137.000,00	31.906.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	206.858.000,00	163.116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	206.858.000,00	163.116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.820.000,00	13.449.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	192.038.000,00	149.666.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	96.000.000,00	93.748.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	96.000.000,00	93.748.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	89.000.000,00	86.748.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.000.000,00	6.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.800.000,00	17.797.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	17.800.000,00	17.797.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	17.800.000,00	17.797.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	312.711.330,00	182.026.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	312.711.330,00	182.026.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.06.2.01.01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	54.984.400,00	44.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.06.2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000,00	9.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.06.2.01.05	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000,00	5.841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.06.2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	237.726.930,00	121.874.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06	KECAMATAN TRUCUK	2.743.152.117,00	2.294.934.145,00	62.400.644,00	48.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01	Kecamatan Trucuk	2.743.152.117,00	2.294.934.145,00	62.400.644,00	48.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.124.631.761,00	1.769.696.895,00	39.870.000,00	37.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.913.291.761,00	1.578.321.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.877.291.761,00	1.545.821.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.000.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.600.000,00	31.814.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	23.100.000,00	11.867.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	39.870.000,00	37.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	39.870.000,00	37.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.400.000,00	92.969.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	15.512.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.400.000,00	73.457.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.340.000,00	66.591.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000,00	12.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.840.000,00	14.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.500.000,00	38.791.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	207.501.000,00	194.624.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	177.000.000,00	171.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	177.000.000,00	171.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	93.800.000,00	92.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	83.200.000,00	79.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	31.800.000,00	29.172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	31.800.000,00	29.172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	31.800.000,00	29.172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	202.219.356,00	129.866.500,00	22.530.644,00	11.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	202.219.356,00	129.866.500,00	22.530.644,00	11.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.000.000,00	6.986.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.000.000,00	10.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.900.000,00	3.892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.000.000,00	17.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.319.356,00	90.928.500,00	22.530.644,00	11.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07	KECAMATAN KEBONARUM	2.545.257.646,00	2.115.134.187,00	70.580.000,00	70.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01	Kecamatan Kebonarum	2.545.257.646,00	2.115.134.187,00	70.580.000,00	70.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.169.361.838,00	1.800.958.587,00	70.580.000,00	70.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.904.188.646,00	1.607.824.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.889.188.646,00	1.595.534.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.000.000,00	12.289.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.196.092,00	77.806.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	2.994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.384.092,00	27.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.695.000,00	12.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.125.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.972.000,00	14.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.020.000,00	19.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	70.580.000,00	70.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	70.580.000,00	70.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.181.950,00	73.098.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	13.798.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.181.950,00	47.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.795.150,00	42.229.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.877.450,00	16.739.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.917.700,00	25.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	221.321.708,00	171.458.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	221.321.708,00	171.458.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	49.863.550,00	48.062.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	171.458.158,00	123.395.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	110.881.100,00	109.257.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	110.881.100,00	109.257.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	95.720.000,00	94.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.161.100,00	14.921.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.473.300,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.473.300,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9.473.300,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.219.700,00	28.730.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.219.700,00	28.730.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.042.500,00	10.317.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.065.200,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.597.500,00	3.532.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.514.500,00	12.380.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08	KECAMATAN JOGONALAN	2.563.718.232,00	2.248.672.097,00	173.750.000,00	170.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01	Kecamatan Jogonalan	2.563.718.232,00	2.248.672.097,00	173.750.000,00	170.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.110.193.152,00	1.859.894.665,00	173.750.000,00	170.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.801.103.298,00	1.577.138.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.796.153.298,00	1.572.458.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.950.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.726.534,00	44.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	10.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.232.400,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.644.134,00	27.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.850.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.240.000,00	1.200.000,00	173.750.000,00	170.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	55.500.000,00	55.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan									

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.819.000,00	56.373.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.320.000,00	6.273.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	47.000.000,00	46.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	39.000.000,00	38.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.800.000,00	64.252.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.800.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	26.237.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000,00	35.255.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.000.000,00	65.060.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.000.000,00	37.280.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	311.854.000,00	260.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	311.854.000,00	260.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	311.854.000,00	260.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	129.100.000,00	111.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	129.100.000,00	111.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	112.000.000,00	100.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	17.100.000,00	10.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.000.000,00	9.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.000.000,00	9.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.05.2.01.02	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12.000.000,00	9.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	167.890.000,00	136.427.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	167.890.000,00	136.427.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.06.2.01.01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17.900.000,00	10.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000,00	5.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.06.2.01.05	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.990.000,00	12.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	130.000.000,00	107.907.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11	KECAMATAN CEPER	3.103.507.204,00	2.647.127.348,00	84.993.425,00	73.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01	Kecamatan Ceper	3.103.507.204,00	2.647.127.348,00	84.993.425,00	73.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.546.264.204,00	2.164.700.039,00	84.993.425,00	73.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.265.107.629,00	1.933.195.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.247.618.629,00	1.915.735.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.489.000,00	17.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.839.825,00	91.882.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.957.500,00	6.957.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	63.532.325,00	61.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.850.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.216.750,00	51.494.840,00	84.993.425,00	73.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.216.750,00	51.494.840,00	84.993.425,00	73.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.500.000,00	62.193.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	19.358.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.500.000,00	39.834.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.600.000,00	25.933.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.600.000,00	13.624.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	10.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	138.536.000,00	115.604.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	138.536.000,00	115.604.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	138.536.000,00	115.604.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	106.407.000,00	96.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	106.407.000,00	96.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	95.507.000,00	91.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.900.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.600.000,00	19.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.600.000,00	19.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.05.2.01.02	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	19.600.000,00	19.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	292.700.000,00	250.432.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	292.7								

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	69.800.000,00	58.360.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12	KECAMATAN PEDAN	2.748.844.095,00	2.344.880.551,00	41.650.000,00	41.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01	Kecamatan Pedan	2.748.844.095,00	2.344.880.551,00	41.650.000,00	41.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.109.318.095,00	1.738.478.551,00	41.650.000,00	41.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.916.988.095,00	1.561.245.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.916.988.095,00	1.561.245.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	41.650.000,00	41.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	41.650.000,00	41.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.680.000,00	128.260.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	10.650.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.680.000,00	102.610.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.650.000,00	39.022.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	9.671.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	4.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.650.000,00	24.352.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	54.006.000,00	53.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	54.006.000,00	53.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44.006.000,00	43.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	192.936.000,00	190.182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	192.936.000,00	190.182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	182.936.000,00	180.947.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00	9.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	210.000.000,00	181.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	210.000.000,00	181.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.05.2.01.02	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	210.000.000,00	181.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	182.584.000,00	181.310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	182.584.000,00	181.310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.06.2.01.01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20.000.000,00	19.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.000.000,00	14.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000,00	9.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.06.2.01.05	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.000.000,00	14.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	122.584.000,00	122.220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13	KECAMATAN KARANGDOWO	3.198.299.988,00	2.790.407.122,00	139.468.000,00	128.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01	Kecamatan Karangdowo	3.198.299.988,00	2.790.407.122,00	139.468.000,00	128.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.668.973.988,00	2.324.635.322,00	139.468.000,00	128.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.414.660.988,00	2.090.864.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.398.460.988,00	2.075.474.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.200.000,00	15.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.927.000,00	54.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.727.000,00	18.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.100.000,00	15.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	24.100.000,00	21.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.333.000,00	0,00	139.468.000,00	128.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	400.000,00	0,00	30.000.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	933.000,00	0,00	109.468.000,00	99.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.363.000,00	65.973.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.900.000,00	10.318.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000,00	12.458.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.463.000,00	43.195.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.690.000,00	112.894.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000,00	7.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.750.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.172.000,00	63.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.768.000,00	38.925.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	242.328.000,00	215.362.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	242.328.000,00	215.362.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.000.000,00	8.891.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	231.328.000,00	206.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	181.839.000,00	169.489.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	181.839.000,00	169.489.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	86.600.000,00								

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	43.259.000,00	28.501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	43.259.000,00	28.501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	43.259.000,00	28.501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.900.000,00	52.418.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.900.000,00	52.418.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9.400.000,00	8.802.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.500.000,00	9.464.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.500.000,00	9.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.500.000,00	25.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14	KECAMATAN JUWIRING	3.186.163.356,00	2.550.452.640,00	26.950.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01	Kecamatan Juwiring	3.186.163.356,00	2.550.452.640,00	26.950.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.513.372.184,00	2.194.386.140,00	26.950.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.288.607.727,00	2.012.129.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.286.762.727,00	2.010.329.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.845.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.998.000,00	30.438.850,00	26.950.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.108.000,00	20.708.650,00	26.950.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.080.000,00	1.680.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.330.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.480.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.843.217,00	74.213.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.582.629,00	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	24.940.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.260.588,00	46.098.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.923.240,00	77.604.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.633.000,00	6.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.666.000,00	40.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.424.240,00	30.909.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	69.424.000,00	49.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	69.424.000,00	49.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000,00	9.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	59.424.000,00	40.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	140.058.000,00	105.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	140.058.000,00	105.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	127.305.000,00	103.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12.753.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.650.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.650.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9.650.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	453.659.172,00	200.716.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	453.659.172,00	200.716.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.023.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.271.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.281.900,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.208.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	431.875.272,00	195.390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15	KECAMATAN WONOSARI	3.525.963.869,00	2.785.884.123,00	40.000.000,00	39.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01	Kecamatan Wonosari	3.525.963.869,00	2.785.884.123,00	40.000.000,00	39.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.936.273.869,00	2.410.830.173,00	40.000.000,00	39.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.643.022.869,00	2.163.004.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.615.762.869,00	2.156.919.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.500.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.760.000,00	3.385.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.596.000,00	25.679.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.836.000,00	8.835.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	3.838.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.600.000,00	7.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.660.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	40.000.000,00	39.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	40.000.000,00	39.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.300.000,00	123.506.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.900.000,00	9.020.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.900.000,00	24.778.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.500.000,00	89.708.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.355.000,00	98.639.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.605.000,00	35.605							

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.400.000,00	19.691.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.600.000,00	57.608.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.310.000,00	27.410.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.01.2.09.05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.850.000,00	11.415.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	8.960.000,00	8.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.500.000,00	7.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	278.808.000,00	266.046.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	278.808.000,00	266.046.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	278.808.000,00	266.046.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	98.150.000,00	94.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	98.150.000,00	94.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	88.150.000,00	87.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00	6.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	18.000.000,00	13.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.000.000,00	13.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18.000.000,00	13.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	238.063.000,00	213.734.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	238.063.000,00	213.734.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18.000.000,00	17.617.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22.000.000,00	21.197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.700.000,00	11.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.418.000,00	5.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	174.945.000,00	157.266.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18	KECAMATAN KARANGANOM	2.997.568.320,00	2.220.303.498,00	16.500.000,00	15.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01	Kecamatan Karanganyam	2.997.568.320,00	2.220.303.498,00	16.500.000,00	15.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.349.678.320,00	1.816.808.648,00	16.500.000,00	15.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.058.718.095,00	1.639.539.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.023.168.095,00	1.605.699.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.550.000,00	33.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.677.225,00	45.111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	1.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.827.225,00	13.875.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.591.000,00	4.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.393.000,00	24.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	16.500.000,00	15.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	16.500.000,00	15.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.969.000,00	81.194.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.000.000,00	16.508.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.469.000,00	64.185.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.314.000,00	50.963.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.762.000,00	10.866.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.702.000,00	34.246.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	228.500.000,00	205.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	228.500.000,00	205.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	228.500.000,00	205.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	153.200.000,00	120.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	153.200.000,00	120.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	68.000.000,00	48.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	85.200.000,00	71.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	41.800.000,00	24.530.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	41.800.000,00	24.530.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	41.800.000,00	24.530.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	224.390.000,00	53.254.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	224.390.000,00	53.254.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10.400.000,00	3.476.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.500.000,00	5.434.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.500.000,00	5.799.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.900.000,00	8.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	175.090.000,00	29.919.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19	KECAMATAN TULUNG	3.090.147.179,00	2.373.843.904,00	23.920.000,00	17.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01	Kecamatan Tulung	3.090.147.179,00	2.373.843.904,00	23.920.000,00	17.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.433.100.679,00	2.020.956.454,00	22.820.000,00	17.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.002.500,00	6.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.002.500,00	6.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.192.336.179,00	1.869.143.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.01.2.02.01	Penyediaan									

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.400.755,00	76.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.800.755,00	12.718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	8.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.100.000,00	50.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.500.000,00	80.635.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.000.000,00	18.910.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.500.000,00	56.725.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.740.000,00	116.559.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.240.000,00	14.643.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.000.000,00	78.751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.500.000,00	23.165.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	211.733.000,00	188.931.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	211.733.000,00	188.931.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000,00	19.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	191.733.000,00	169.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	176.476.000,00	170.881.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	176.476.000,00	170.881.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	176.476.000,00	170.881.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	34.482.000,00	27.913.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.482.000,00	27.913.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	34.482.000,00	27.913.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	111.281.500,00	92.907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	111.281.500,00	92.907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10.000.000,00	9.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000,00	9.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.22.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	91.281.500,00	74.207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23	KECAMATAN KALIKOTES	3.343.631.059,00	2.387.619.317,00	100.405.000,00	98.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01	Kecamatan Kalikotes	3.343.631.059,00	2.387.619.317,00	100.405.000,00	98.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.872.239.259,00	1.997.105.517,00	100.405.000,00	98.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.671.398.059,00	1.831.903.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.653.398.059,00	1.823.824.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.000.000,00	8.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.038.260,00	50.043.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.177.260,00	21.444.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.151.000,00	14.514.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.210.000,00	13.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.500.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.375.950,00	9.109.600,00	58.465.000,00	56.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.355.000,00	1.353.600,00	20.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.020.950,00	7.756.000,00	38.465.000,00	37.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.931.000,00	61.104.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.000,00	2.895.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.031.000,00	14.214.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.000.000,00	43.994.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.495.990,00	44.944.220,00	41.940.000,00	41.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	5.587.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.495.990,00	24.642.400,00	41.940.000,00	41.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.000.000,00	14.714.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	194.360.100,00	175.674.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	194.360.100,00	175.674.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.900.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	183.460.100,00	170.674.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	188.477.700,00	156.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	188.477.700,00	156.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	99.300.000,00	89.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	89.177.700,00	67.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	34.922.200,00	17.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.922.200,00	17.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	34.922.200,00	17.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.631.800,00	40.845.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekom									

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.06.2.01.03	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.800.000,00	3.799.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.23.01.06.2.01.11	Facilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42.231.800,00	33.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24	KECAMATAN KLATEN UTARA	5.532.027.218,00	4.887.325.836,00	374.897.667,00	370.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01	Kecamatan Klaten Utara	3.018.865.397,00	2.645.533.524,00	126.500.000,00	124.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.549.292.229,00	2.258.063.724,00	126.500.000,00	124.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.367.721.229,00	2.097.371.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.367.631.228,00	2.097.371.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.160.000,00	27.856.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	1.993.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.998.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.06.08	Facilitas Kunjungan Tamu	18.000.000,00	17.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.160.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	61.500.000,00	61.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	61.500.000,00	61.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.411.000,00	102.698.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.997.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.911.000,00	45.206.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.500.000,00	54.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.500.000,00	28.637.200,00	65.000.000,00	63.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.000.000,00	4.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.500.000,00	24.499.200,00	65.000.000,00	63.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	135.571.000,00	110.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	135.571.000,00	110.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.645.000,00	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	127.926.000,00	103.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	89.050.000,00	89.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95.453.932,00	89.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	92.575.000,00	89.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.878.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.435.000,00	683.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.435.000,00	683.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.05.2.01.02	Facilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1.435.000,00	683.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	237.113.236,00	187.043.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	237.113.236,00	187.043.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.06.2.01.01	Facilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	73.502.000,00	51.523.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.06.2.01.02	Facilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.06.2.01.03	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.06.2.01.05	Facilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.01.06.2.01.11	Facilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	161.576.236,00	135.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02	Kelurahan Barendong	1.264.159.782,00	1.124.437.332,00	213.853.667,00	211.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	765.330.019,00	634.915.852,00	43.500.000,00	43.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	700.180.499,00	572.879.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	695.260.499,00	568.559.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.920.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.798.160,00	12.766.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.728.160,00	5.696.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.01.2.06.08	Facilitas Kunjungan Tamu	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	43.500.000,00	43.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	43.500.000,00	43.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.674.240,00	33.453.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	7.779.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.674.240,00	25.674.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.677.120,00	15.816.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.677.120,00	15.677.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	399.183.430,00	390.034.480,00	160.000.000,00	158.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	399.183.430,00	390.034.480,00	160.000.000,00	158.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	135.014.950,00	134.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	264.168.480,00	256.034.480,00	160.000.000,00	158.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	99.646.333,00	99.487.000,00	10.353.667,00	10.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	99.646.333,00	99.487.000,00	10.353.667,00	10.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	14.971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.02.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	84.646.333,00	84.516.000,00	10.353.667,00	10.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03	Kelurahan Gergunung	1.249.002.039,00	1.117.354.980,00	34.544.000,00	34.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	731.097.259,00	602.965.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	640.928.499,00	519.482.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	639.128.499,00	517.682.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01.2.06.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.348.644,00	17.062.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	922.500,00	897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.411.144,00	5.410.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.015.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.511.360,00	50.591.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000,00	10.052.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.511.360,00	37.538.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.308.756,00	15.829.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.471.636,00	2.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.837.120,00	13.791.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	417.448.780,00	414.741.740,00	25.000.000,00	24.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	417.448.780,00	414.741.740,00	25.000.000,00	24.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.975.000,00	6.974.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	235.749.540,00	233.076.000,00	25.000.000,00	24.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	174.724.240,00	174.691.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100.456.000,00	99.648.200,00	9.544.000,00	9.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.456.000,00	99.648.200,00	9.544.000,00	9.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.550.000,00	10.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.24.03.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	89.906.000,00	89.196.200,00	9.544.000,00	9.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25	KECAMATAN KLATEN TENGAH	9.326.963.721,00	7.876.348.077,00	948.797.384,00	853.256.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01	Kecamatan Klaten Tengah	2.409.905.280,00	2.123.163.586,00	154.823.300,00	153.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.993.381.030,00	1.716.880.936,00	154.823.300,00	153.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.740.527.580,00	1.469.409.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.740.527.580,00	1.469.409.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.200.000,00	35.644.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.150.000,00	6.148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	13.445.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.397.700,00	24.954.000,00	118.823.300,00	117.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.397.700,00	24.954.000,00	118.823.300,00	117.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.354.920,00	95.082.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.500.000,00	33.619.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.854.920,00	61.462.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.900.830,00	91.791.316,00	36.000.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.828.000,00	28.741.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.317.000,00	22.282.000,00	36.000.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.755.830,00	40.767.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	144.560.000,00	144.350.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	144.560.000,00	144.350.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.360.000,00	9.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	135.200.000,00	134.996.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	95.470.000,00	95.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95.470.000,00	95.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	88.100.000,00	88.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.370.000,00	7.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.470.000,00	9.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.470.000,00	9.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.05.2.01.02	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9.470.000,00	9.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	167.024.250,00	157.008.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	167.024.250,00	157.008.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.06.2.01.01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	39.533.000,00	35.925.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.150.000,00	3.147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	124.341.250,00	117.935.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.02	Kelurahan Kabupaten	951.994.186,00	726.347.246,00	164.700.495,00	123.108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	676.024.188,00	458.375.176,00	24.150.000,00	23.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	584.691.300,00	376.156.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	584.691.300,00	376.156.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7-01.0-00.0-00.25.04.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	83.410.225,00	62.996.000,00	19.630.575,00	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05	Kelurahan Mojayan	1.155.842.513,00	994.603.669,00	48.850.468,00	35.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	881.112.021,00	726.681.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	768.003.300,00	618.200.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	767.553.300,00	618.200.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.262.931,00	8.260.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.782.000,00	3.780.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.127.931,00	2.127.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.593.000,00	1.592.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.922.790,00	84.519.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.143.000,00	2.142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.807.000,00	10.404.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.982.790,00	69.982.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.923.000,00	15.700.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.450.000,00	2.228.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.473.000,00	13.472.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	177.505.814,00	177.390.670,00	36.075.146,00	29.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	177.505.814,00	177.390.670,00	36.075.146,00	29.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.476.000,00	12.361.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	35.714.250,00	28.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	165.029.814,00	165.028.870,00	360.896,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	97.224.678,00	90.531.500,00	12.775.322,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	97.224.678,00	90.531.500,00	12.775.322,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	4.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.05.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	92.224.678,00	85.531.600,00	12.775.322,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06	Kelurahan Buntalan	1.178.261.649,00	930.273.857,00	272.448.947,00	253.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	838.325.856,00	613.367.717,00	4.800.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	751.929.096,00	545.703.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	746.979.096,00	545.703.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.823.020,00	15.194.700,00	4.800.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.443.100,00	2.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.256.420,00	2.820.500,00	4.800.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.297.100,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.592.400,00	1.363.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.234.000,00	7.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.327.120,00	39.493.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000,00	11.830.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.890.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.837.120,00	27.232.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.246.620,00	12.976.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.409.500,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.837.120,00	12.837.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	242.711.115,00	234.736.740,00	254.873.625,00	246.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	242.711.115,00	234.736.740,00	254.873.625,00	246.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	22.592.500,00	22.230.000,00	163.000.000,00	158.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	132.718.615,00	126.945.240,00	91.873.625,00	88.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	87.400.000,00	85.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	97.224.678,00	82.169.400,00	12.775.322,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	97.224.678,00	82.169.400,00	12.775.322,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	2.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.06.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	92.224.678,00	79.362.400,00	12.775.322,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07	Kelurahan Bareng	1.338.065.306,00	1.115.917.208,00	20.887.661,00	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	929.668.979,00	731.451.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	846.803.897,00	653.137.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	846.803.897,00	653.137.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.891.276,00	28.304.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.665.026,00	9.374.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.092.500,00	3.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.609.750,00	1.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.524.000,00	14.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.136.686,00	35.583.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.400.000,00	7.851.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.736.686,00	27.731.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.837.120,00	14.427.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.837.120,00	14.427.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	307.533.988,00	293.763.440,00	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	307.533.988,00	293.763.440,00	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.524.250,00	12.283.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.894.200,00	145.155.500,00	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	143.115.538,00	136.324.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100.862.339,00	90.702.000,00	9.137.661,00	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.862.339,00	90.702.000,00	9.137.661,00	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	14.528.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.25.07.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	85.862.339,00	76.173.500,00	9.137.661,00	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26	KECAMATAN KLATEN SELATAN	3.863.354.855,00	3.394.512.060,00	55.447.000,00	54.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01	Kecamatan Klaten Selatan	2.558.130.264,00	2.212.711.553,00	43.747.000,00	42.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.067.528.995,00	1.785.301.853,00	43.747.000,00	42.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.748.263.264,00	1.475.063.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.741.513.264,00	1.470.563.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.750.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.815.771,00	27.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	3.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.493.771,00	10.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.322.000,00	8.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	41.372.000,00	40.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	41.372.000,00	40.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.884.240,00	102.107.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	17.839.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.834.240,00	84.268.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.565.720,00	180.408.565,00	2.375.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.900.000,00	13.030.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	113.004.200,00	112.929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.987.280,00	18.804.000,00	2.375.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.674.240,00	35.645.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	182.730.749,00	164.554.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	182.730.749,00	164.554.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.100.000,00	6.299.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	174.630.749,00	158.254.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	217.366.520,00	199.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	217.366.520,00	199.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	213.366.520,00	195.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Neg	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.000.000,00	9.711.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.000.000,00	9.711.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Birtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12.000.000,00	9.711.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78.504.000,00	53.888.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78.504.000,00	53.888.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	60.504.000,00	45.790.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.000.000,00	5.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02	Kelurahan Gayamprit	1.305.224.591,00	1.181.800.507,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	744.819.000,00	623.350.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	652.647.000,00	532.737.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	652.647.000,00	532.737.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.573.000,00	30.356.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.063.000,00	8.043.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00	999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.860.000,00	1.697.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.650.000,00	16.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.841.000,00	37.995.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.200.000,00	10.955.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.641.000,00	26.639.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.758.000,00	22.661.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.000.000,00	1.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.758.000,00	19.667.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	462.105.591,00	460.206.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	462.105.591,00	460.206.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.331.000,00	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA								
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	274.187.591,00	272.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	87.637.000,00	87.636.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	96.950.000,00	96.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	98.300.000,00	98.243.150,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	98.300.000,00	98.243.150,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.573.500,00	11.572.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.26.02.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	86.726.500,00	86.670.950,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4.797.583.481,00	3.762.721.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	4.797.583.481,00	3.762.721.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.797.583.481,00	3.762.721.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.797.583.481,00	3.762.721.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.893.245.641,00	1.999.293.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.704.068.841,00	1.850.863.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.600.118.553,00	1.793.532.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.950.288,00	57.331.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.065.000,00	39.854.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	1.997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	9.981.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.300.000,00	14.210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.755.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.070.000,00	5.775.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.741.288,00	38.025.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.200.000,00	17.821.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.541.288,00	19.547.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.370.512,00	70.550.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.999.512,00	19.825.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.691.000,00	48.643.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.680.000,00	2.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	41.260.000,00	35.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	41.260.000,00	35.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	41.260.000,00	35.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.100.957.700,00	1.100.047.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	1.100.957.700,00	1.100.047.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	4.438.200,00	3.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	427.500.000,00	399.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	427.500.000,00	399.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	400.000.000,00	399.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	42.150.000,00	42.144.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	42.150.000,00	42.144.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	42.150.000,00	42.144.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	292.470.140,00	186.193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	292.470.140,00	186.193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dinj, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	292.470.140,00	186.193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.962.849.239.087,28	1.612.412.988.846,00	238.674.307.650,00	189.606.772.936,00	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	675.562.515.700,00	672.768.458.757,00	

BUPATI KLATEN

cap ttd

SRI MULIYANI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2021 (AUDITED)	2020 (AUDITED)
Saldo Anggaran Lebih Awal	B.6.1	440.659.044.325,28	382.909.001.110,28
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	B.6.2	440.589.680.010,28	382.687.702.548,28
Sub Total		69.364.315,00	221.298.562,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	B.6.3	493.720.575.841,28	440.659.044.325,28
Sub Total		493.789.940.156,28	440.880.342.887,28
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	B.6.4	(69.364.315,00)	(221.298.562,00)
Lain-lain	B.6.5	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	B.6.6	493.720.575.841,28	440.659.044.325,28

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini

BUPATI KLATEN

cap ttd

SRI MULYANI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	REF	SALDO 2021 (AUDITED)	SALDO 2020 (AUDITED)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
8	PENDAPATAN - LO	D.6.1	2.326.297.103.222,70	2.207.957.186.475,65	118.339.916.747,05	5,36
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	D.6.1.1	390.384.965.910,70	318.205.762.330,65	72.179.203.580,05	22,68
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	D.6.1.1.1	132.137.822.530,00	125.756.589.585,00	6.381.232.945,00	5,07
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	D.6.1.1.2	14.793.426.383,00	15.161.095.196,00	(367.668.813,00)	(2,43)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	D.6.1.1.3	36.399.630.516,70	10.434.543.951,65	25.965.086.565,05	248,84
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	D.6.1.1.4	207.054.086.481,00	166.853.533.598,00	40.200.552.883,00	24,09
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	D.6.1.2	1.734.297.818.985,00	1.771.404.880.342,00	(37.107.061.357,00)	(2,09)
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	D.6.1.2.1	1.545.624.272.463,00	1.518.948.954.811,00	26.675.317.652,00	1,76
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	D.6.1.2.2	-	57.067.155.000,00	(57.067.155.000,00)	-
8.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	D.6.1.2.3	188.673.546.522,00	180.584.457.531,00	8.089.088.991,00	4,48
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	D.6.1.2.4	-	14.804.313.000,00	(14.804.313.000,00)	(100,00)
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	D.6.1.3	201.614.318.327,00	118.346.543.803,00	83.267.774.524,00	70,36
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	D.6.1.3.1	93.625.070.827,00	118.346.543.803,00	(24.721.472.976,00)	(20,89)
8.3.2	Dana Darurat - LO	D.6.1.3.2	-	-	-	-
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	D.6.1.3.3	107.989.247.500,00	-	107.989.247.500,00	-
9	BEBAN	D.6.2	2.246.773.802.142,32	2.209.959.791.230,26	36.814.010.912,06	1,67
9.1.1	Beban Pegawai - LO	D.6.2.1	1.004.600.514.884,00	1.046.522.937.578,00	(41.922.422.694,00)	(4,01)
9.1.2	Beban Persediaan	D.6.2.2	293.008.612.243,72	199.691.340.501,59	93.317.271.742,13	46,73
9.1.3	Beban Jasa	D.6.2.3	310.579.657.992,17	114.896.805.156,00	195.682.852.836,17	170,31
9.1.4	Beban Pemeliharaan	D.6.2.4	51.153.254.279,00	32.709.542.502,00	18.443.711.777,00	56,39
9.1.5	Beban Perjalanan Dinas	D.6.2.5	25.270.595.323,00	49.281.573.072,00	(24.010.977.749,00)	(48,72)
9.1.6	Beban Bunga	D.6.2.6	-	-	-	-
9.1.7	Beban Subsidi	D.6.2.7	1.940.554.067,00	1.988.515.348,00	(47.961.281,00)	(2,41)
9.1.8	Beban Hibah	D.6.2.8	28.410.769.759,00	186.729.697.533,56	(158.318.927.774,56)	(84,79)
9.1.9	Beban Bantuan Sosial	D.6.2.9	5.540.865.000,00	3.511.725.000,00	2.029.140.000,00	57,78
9.1.10	Beban Penyusutan	D.6.2.10	241.367.068.664,18	225.808.219.072,51	15.558.849.591,67	6,89
9.1.11	Beban Penyisihan Piutang	D.6.2.11	-3.626.496.504,75	5.014.687.331,60	(8.641.183.836,35)	(172,32)
9.1.12	Beban Transfer	D.6.2.12	285.619.055.842,00	343.804.748.135,00	(58.185.692.293,00)	(16,92)
9.1.13	Beban Lain-lain	D.6.2.13	2.909.350.593,00	-	2.909.350.593,00	-
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		79.523.301.080,38	(2.002.604.754,61)	81.525.905.834,99	(4.070,99)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	D.6.3.1	-	-	-	-
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	D.6.3.2	-	-	-	-
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	D.6.3.3	-	-	-	-
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	D.6.3.4	-	-	-	-
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	D.6.3.5	-	-	-	-
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	D.6.3.6	7.306.291.836,00	56.585.518.537,00	(49.279.226.701,00)	(87,09)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON	D.6.3	(7.306.291.836,00)	(56.585.518.537,00)	-	-
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		72.217.009.244,38	(58.588.123.291,61)	130.805.132.535,99	(223,26)
	POS LUAR BIASA	D.6.4				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	D.6.4.1	-	-	-	-
9.4.1	Beban Tak Terduga	D.6.4.2	15.047.117.681,91	7.064.400,00	15.040.053.281,91	-
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(15.047.117.681,91)	(7.064.400,00)	-	-
	SURPLUS/DEFISIT-LO	D.6.5	57.169.891.562,47	(58.595.187.691,61)	115.765.079.254,08	(197,57)

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini

BUPATI KLATEN

cap ttd

SRI MULYANI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2021 (AUDITED)	2020 (AUDITED)
EKUITAS AWAL	F.6.1	3.545.901.778.749,34	4.143.042.591.152,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	F.6.2	57.169.891.562,47	-58.595.187.691,61
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:	F.6.3		
Koreksi Nilai Persediaan	F.6.3.1	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	F.6.3.2	-	-
Koreksi ekuitas lainnya	F.6.3.3	(96.197.070.693,09)	(538.545.624.711,05)
EKUITAS AKHIR	F.6.4	3.506.874.599.618,72	3.545.901.778.749,34

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini

BUPATI KLATEN

cap ttd

SRI MULYANI



**NERACA
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

REKENING	URAIAN	REF	2021 (AUDITED)	2020 (AUDITED)
1	ASET	C.6.1		
1.1	ASET LANCAR	C.6.1.1		
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	C.6.1.1.1	440.420.393.555,00	384.810.735.418,00
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	C.6.1.1.2	-	39.988.400,00
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.6.1.1.3	-	-
1.1.1.04	Kas di BLUD	C.6.1.1.4	47.050.337.659,28	47.538.710.726,28
1.1.1.05	Kas di Bendahara BOS	C.6.1.1.5	6.249.844.627,00	8.269.609.781,00
1.1.1.07	Kas Lainnya	C.6.1.1.6	47.125.000,00	8.419.076.995,00
1.1.1.08	Setara Kas	C.6.1.1.7	-	-
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	C.6.1.1.8	-	-
1.1.3.01	Piutang Pajak Daerah	C.6.1.1.9	48.494.367.965,00	49.767.669.697,00
1.1.5.01.01	Penyisihan Piutang Piutang Pajak Netto		(33.549.690.423,00)	(35.139.279.745,79)
			14.944.677.542,00	14.628.389.951,21
1.1.3.02	Piutang Retribusi Daerah	C.6.1.1.10	586.814.359,00	242.301.199,00
1.1.5.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi Piutang Retribusi Netto		(233.350.305,00)	(199.081.819,00)
			353.464.054,00	43.219.380,00
1.1.3.04	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	C.6.1.1.11	19.990.555.249,70	-
1.1.5.01.04	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	C.6.1.1.12	63.845.037.797,46	16.142.483.689,46
			(7.892.165.564,15)	(9.963.341.232,11)
			55.952.872.233,31	6.179.142.457,35
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	C.6.1.1.13	11.984.477.171,00	8.927.774.691,00
	Piutang Transfer Antar Daerah	C.6.1.1.14	2.776.175.889,00	21.805.978.475,00
	Piutang Lainnya		-	-
1.1.5.02.01	Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Netto	C.6.1.1.15	3.251.514.114,00	3.251.514.114,00
			(3.251.514.114,00)	(3.251.514.114,00)
			-	-
1.1.4.04	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	C.6.1.1.16	326.910.909,00	329.410.912,00
1.1.5.02.04	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto		(326.910.909,00)	(329.410.912,00)
			-	-
1.1.6.03	Beban Dibayar Dimuka	C.6.1.1.17	340.702.216,00	321.505.058,17
1.1.7	Persediaan	C.6.1.1.18	84.183.162.728,03	166.048.476.462,66
	JUMLAH ASET LANCAR		684.293.787.924,32	667.032.607.795,67
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	C.6.1.2		
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	C.6.1.2.1	-	-
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	C.6.1.2.2		
1.2.2.1	Penyertaan Modal		187.445.272.695,00	178.945.272.695,00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		187.445.272.695,00	178.945.272.695,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		187.445.272.695,00	178.945.272.695,00
1.3	ASET TETAP	C.6.1.3		
1.3.1	Tanah	C.6.1.3.1	872.759.316.356,00	832.215.833.323,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	C.6.1.3.2	854.480.555.825,00	781.817.876.877,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	C.6.1.3.3	1.001.172.413.563,00	955.733.620.648,00
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.6.1.3.4	1.614.799.656.227,07	1.563.883.565.527,07
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	C.6.1.3.5	285.230.432.895,92	268.305.695.189,98
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.6.1.3.6	68.515.490.490,00	57.293.192.856,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	C.6.1.3.7	(2.220.769.712.141,48)	(1.902.339.513.028,89)
	JUMLAH ASET TETAP		2.476.188.153.215,51	2.556.910.271.392,16
1.4	DANA CADANGAN	C.6.1.4		
1.4.1	Dana Cadangan		15.000.000.000,00	-
	JUMLAH DANA CADANGAN		15.000.000.000,00	-

REKENING	URAIAN	REF	2021 (AUDITED)	2020 (AUDITED)
1.5	ASET LAINNYA	C.6.1.5		
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	C.6.1.5.1	-	-
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	C.6.1.5.2	9.532.430.760,00	9.532.430.760,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(936.882.158,00)	-
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	C.6.1.5.3	11.915.835.753,00	14.623.881.573,00
1.5.3.6	Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(9.549.827.058,33)	(9.933.861.374,71)
	Aset Tidak Berwujud Netto		2.366.008.694,67	4.690.020.198,29
1.5.4	Aset Lain-lain	C.6.1.5.4	307.712.802.765,38	337.649.859.547,22
1.5.4.2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(166.390.981.433,16)	(187.982.591.350,00)
	Aset Lain-lain Netto		141.321.821.332,22	149.667.268.197,22
	JUMLAH ASET LAINNYA		152.283.378.628,89	163.889.719.155,51
	JUMLAH ASET		3.515.210.592.463,72	3.566.777.871.038,34
2	KEWAJIBAN	C.6.2		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.6.2.1		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	C.6.2.1.1	47.125.000,00	29.775.000,00
2.1.2	Utang Bunga	C.6.2.1.2	-	-
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.6.2.1.3	-	-
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	C.6.2.1.4	1.010.639.032,00	1.036.228.404,00
2.1.5	Utang Belanja	C.6.2.1.5	7.273.021.055,00	13.502.079.212,00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	C.6.2.1.6	5.207.758,00	6.308.009.673,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		8.335.992.845,00	20.876.092.289,00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	C.6.2.2		
2.2.1	Utang Dalam Negeri	C.6.2.2.1	-	-
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	C.6.2.2.2	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN		8.335.992.845,00	20.876.092.289,00
3	EKUITAS	C.6.3		
3.1	EKUITAS			
3.1.1	Ekuitas		3.506.874.599.618,72	3.545.901.778.749,34
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.515.210.592.463,72	3.566.777.871.038,34

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini

BUPATI KLATEN

cap ttd

SRI MULYANI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2021 (AUDITED)	2020 (AUDITED)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	E.6.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah - LRA		126.672.231.091,00	116.132.536.269,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		14.405.348.660,00	14.760.621.483,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		16.409.075.267,00	17.577.664.499,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		157.254.391.764,00	180.955.362.938,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		1.531.837.675.983,00	1.516.494.102.076,00
DID		10.729.894.000,00	57.067.155.000,00
Dana Desa		380.846.601.000,00	
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		206.950.349.108,00	163.789.663.880,00
Bantuan Keuangan - LRA		753.000.000,00	14.804.313.000,00
Pendapatan Hibah - LRA		15.627.000.000,00	115.170.740.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA		107.989.247.500,00	380.846.600.500,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.569.474.814.373,00	2.577.598.759.645,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		1.006.278.863.371,00	1.046.020.322.799,00
Belanja Barang dan Jasa		570.241.936.649,00	414.532.192.723,00
Belanja Subsidi		1.940.554.067,00	1.988.515.348,00
Belanja Hibah		28.410.769.759,00	106.572.669.759,00
Belanja Bantuan Sosial		5.540.865.000,00	3.511.725.000,00
Belanja Tak Terduga		18.618.661.003,00	90.590.754.081,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		14.417.776.871,00	11.521.060.644,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		2.011.035.786,00	1.734.202.949,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		514.402.196.100,00	710.469.812.200,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		141.937.450.000,00	1.096.519.500,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.303.800.108.606,00	2.388.037.775.003,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		265.674.705.767,00	189.560.984.642,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	E.6.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA		523.763.000,00	506.976.709,00
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA			-
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA		39.200.000,00	30.100.000,00
Pencairan Dana Cadangan		-	26.000.000.000,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-
Jumlah Arus Kas Masuk		562.963.000,00	26.537.076.709,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah		-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		68.901.715.247,00	70.270.376.590,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		66.197.965.314,00	49.518.428.837,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		48.969.127.000,00	30.032.863.863,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		5.537.965.375,00	7.305.050.284,00
Pembentukan Dana Cadangan		15.000.000.000,00	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		8.500.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		213.106.772.936,00	158.126.719.574,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(212.543.809.936,00)	(131.589.642.865,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	E.6.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

URAIAN	REF	2021 (AUDITED)	2020 (AUDITED)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	E.6.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		141.615.394.107,00	134.242.068.170,00
Jumlah Arus Kas Masuk		141.615.394.107,00	134.242.068.170,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		141.667.408.422,00	134.551.577.067,00
Jumlah Arus Kas Keluar		141.667.408.422,00	134.551.577.067,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(52.014.315,00)	(309.508.897,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas		53.078.881.516,00	57.661.832.880,00
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran		440.688.819.325,28	383.026.986.445,28
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran	493.767.700.841,28	440.688.819.325,28	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	
Kas Lainnya	-	-	
Saldo Akhir Kas	493.767.700.841,28	440.688.819.325,28	

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini

BUPATI KLATEN

cap ttd

SRI MULYANI



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda No 10 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (pemda bersangkutan);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021;
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021;
29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021;
30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021;



31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- a. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Jurisdiksi Tempat Entitas.
- b. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya.
- c. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.

Bab III Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- a. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- b. Kebijakan Keuangan
- c. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- a. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan
- b. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab V Kebijakan Akuntansi

- a. Entitas Pelaporan
- b. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- a. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 6.a.1 Pendapatan - LRA
 - 6.a.2 Belanja
 - 6.a.3 Pembiayaan
- b. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c. Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 6.c.1 Aset
 - 6.c.2 Kewajiban
 - 6.c.3 Ekuitas
- d. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 6.d.1 Pendapatan – LO
 - 6.d.2 Beban
 - 6.d.3 Kegiatan Non Operasional
 - 6.d.4 Akun Luar Biasa
- e. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 6.e.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 6.e.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 6.e.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 6.e.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- f. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VII Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

Bab VIII Penutup



BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Sebagaimana disyaratkan dalam PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan pada Paragraf 55, pada bagian ini disajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, sebagai tambahan informasi yang belum disajikan dalam bagian sebelumnya.

2.1 Pembentukan Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Klaten berkedudukan tetap di Jl.Pemuda Nomor 294 Klaten, Jawa Tengah.

2.2 Kondisi Geografis

Luas wilayah Kabupaten Klaten 65.556 Ha yang secara administratif terbagi menjadi 26 Kecamatan meliputi 391 Desa dan 10 Kelurahan. Secara astronomis terletak di antara 07° 32' 19" LS – 07° 48' 33" LS dan 110° 26' 14" BT – 110° 47' 51" BT dengan ketinggian wilayah antara 100 – 400 m diatas permukaan air laut (dpal). Kabupaten Klaten berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur, Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi DIY) di sebelah selatan dan Kabupaten Sleman (Provinsi DIY) di sebelah barat.

Kabupaten Klaten berada di antara tiga kota besar, yaitu Yogyakarta (30 km), Surakarta atau Solo (30 km), dan Semarang (100 km). Ketiga kota tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, budaya, dan pendidikan yang mempengaruhi perkembangan Kabupaten Klaten, baik dari aspek penduduk, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya maupun aspek lain. Tersedianya jalur transportasi darat yang menghubungkan tiga kota tersebut, fasilitas Bandara Internasional Adi Sumarmo di Solo, Bandara Ahmad Yani dan Pelabuhan Laut Tanjung Mas di Semarang serta New International Airport dan status Yogyakarta sebagai kota pendidikan mempunyai implikasi terhadap perkembangan Kabupaten Klaten.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Klaten

2.3 Kondisi Topografis

Berdasarkan ketinggian tempat, Kabupaten Klaten terbagi menjadi empat wilayah, yaitu:

1. Wilayah dengan ketinggian <100 m dpal, meliputi sebagian Kecamatan Juwiring, Karangdowo, dan Cawas;
2. Wilayah dengan ketinggian 100-200 m dpal, meliputi Kecamatan : Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (selatan), Ngawen (selatan dan timur), Cepher, Pedan, Karangnom (timur), Polanharjo (timur), Delanggu, Juwiring (barat), dan Wonosari (barat);
3. Wilayah dengan ketinggian 200-400 m dpal, meliputi Kecamatan : Manisrenggo, Jogonalan (utara), Karangnongko, Kebonarum (utara), Ngawen (utara), Jatinom, Karangnom (barat), Tulung, dan Polanharjo (barat);
4. Wilayah dengan ketinggian 400-1.000 m dpal, meliputi Kecamatan : Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil), dan Tulung (sebagian kecil).

Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang kondisi umum penyusun batuan, pola aliran air permukaan dan air tanah (hidrologi), yang dapat menjadi kendala dalam hal komunikasi dan transportasi, namun demikian dapat mendatangkan keuntungan dalam hal pengembangan diversifikasi tanaman pangan dan keberadaan sumberdaya air untuk irigasi, drainase, *domestic use* maupun kebutuhan air minum. Dalam hal ini Kabupaten Klaten dapat memasok kebutuhan air minum masyarakat Kota Solo.

2.4 Organisasi Pemerintahan

Pada saat Laporan Keuangan ini disusun, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki 51 Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) OPD berbentuk sekretariat, yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah; 5 (lima) OPD berbentuk Badan; 16 (enambelas) OPD berbentuk Dinas; Satu (1) OPD Inspektorat setingkat Badan/Dinas, Satu (1) OPD setingkat Badan/Dinas; dan 26 Kecamatan.

Untuk OPD setingkat Sekretariat, Badan dan Dinas dipimpin oleh Pejabat Eselon II, untuk Kantor dan Kecamatan dipimpin oleh Pejabat Eselon III. Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang membawahi 9 (sembilan) Kepala Bagian, sedang Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian.



Perkembangan keorganisasian daerah Kabupaten Klaten sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Badan Layanan Masyarakat Tahun 2021

Organisasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021	Jumlah				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Sekretariat	2	2	2	2	2
2. Badan	4	4	4	4	5
3. Dinas	16	16	16	16	16
4. Kantor	1	1	1	1	-
5. Kecamatan	26	26	26	26	26
7. Satuan Setingkat Badan	1	1	1	1	1
8. Inspektorat	1	1	1	1	1
Jumlah	51	51	51	51	51

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten, Tahun 2021

Selain itu terdapat 391 Pemerintahan Desa, 10 Kelurahan, dan 3.703 Dukuh yang tersebar di 26 Kecamatan, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Desa, Kelurahan, Dukuh, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah (Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	16	-	183	24,43
02 Gantiwarno	16	-	149	25,64
03 Wedi	19	-	178	24,38
04 Bayat	18	-	228	39,43
05 Cawas	20	-	238	34,47
06 Trucuk	18	-	171	33,81
07 Kalikotes	7	-	99	12,98
08 Kebonarum	7	-	65	9,67
09 Jogonalan	18	-	202	26,7
10 Manisrenggo	16	-	252	26,96
11 Karangnongko	14	-	35	26,74
12 Ngawen	13	-	124	16,97
13 Ceper	18	-	42	24,45
14 Pedan	14	-	151	19,17
15 Karangdowo	19	-	161	29,23



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah (Km2)
16 Juwiring	19	-	208	29,79
17 Wonosari	18	-	149	31,14
18 Delanggu	16	-	37	18,78
19 Polanharjo	18	-	44	23,84
20 Karanganyam	19	-	48	24,06
21 Tulung	18	-	185	32
22 Jatinom	17	1	207	35,53
23 Kemalang	13	-	214	51,66
24 Klaten Selatan	11	1	112	14,43
25 Klaten Tengah	3	6	97	8,92
26 Klaten Utara	6	2	124	10,38
Jumlah 2021	391	10	3.703	655,56
2020	391	10	3.703	655,56
2019	391	10	3.703	655,56
2018	391	10	3.703	655,56
2017	391	10	3.703	655,56

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Klaten, 2021

Kecamatan Cawas merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 20 (dua puluh) Desa dan terkecil di Kecamatan Klaten Tengah yaitu sebanyak 3 (tiga) Desa dan 6 (enam) Kelurahan.



2.5 Demografi

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2021

Kecamatan	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
-1	-2	-3	-4	-5
Prambanan	25.103	25.915	51.018	96,87
Gantiwarno	17.094	17.734	34.828	96,39
Wedi	23.251	24.590	47.841	94,55
Bayat	26.181	27.494	53.675	95,22
Cawas	24.552	26.205	50.757	93,69
Trucuk	35.348	36.092	71.440	97,94
Kalikotes	16.838	17.419	34.257	96,66
Kebonarum	8.710	9.249	17.959	94,17
Jogonalan	27.340	27.999	55.339	97,65
Manisrenggo	19.796	20.816	40.612	95,1
Karangnongko	15.987	16.727	32.714	95,58
Ngawen	20.220	20.540	40.760	98,44
Ceper	29.205	29.786	58.991	98,05
Pedan	21.152	21.777	42.929	97,13
Karangdowo	18.945	19.872	38.817	95,34
Juwiring	26.388	27.658	54.046	95,41
Wonosari	29.219	30.162	59.381	96,87
Delanggu	19.462	20.383	39.845	95,48
Polanharjo	17.890	18.833	36.723	94,99
Karanganom	20.029	21.019	41.048	95,29
Tulung	22.471	23.320	45.791	96,36
Jatinom	27.295	28.068	55.363	97,25
Kemalang	18.344	18.653	36.997	98,34
Klaten Selatan	22.479	22.998	45.477	97,74
Klaten Tengah	19.474	20.748	40.222	93,86
Klaten Utara	23.740	24.416	48.156	97,23
Jumlah 2021	627.600	632.906	1.206.506	99,16
2020	576.513	598.473	1.174.986	96,33
2019	660.326	664.457	1.324.783	99,38
2018	737.355	747.461	1.484.816	98,65
2017	738.541	747.885	1.486.426	98,75

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kab. Klaten (p.38)

2.6 Sarana dan Prasarana Pokok

2.6.1 Sarana dan Tenaga Pendidikan

Jumlah guru TK sebanyak 2.385 guru; sekolah negeri tingkat pendidikan SD sebanyak 6.991 guru, guru SMP Negeri: 2.948 guru. Selain itu terdapat 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi, baik tingkat Diploma Tiga (D3) maupun Sarjana Strata Satu (S1) dengan 416 pengajar/dosen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sarana pendidikan di Kabupaten Klaten cukup lengkap.



2.6.2 Sarana dan Tenaga Kesehatan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Klaten baik negeri maupun swasta dalam rangka pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Sarana Kesehatan Negeri dan Swasta di Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)	1
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1
3	Rumah Sakit Umum Swasta	6
4	Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD)	1
5	Rumah Sakit Khusus Bedah	1
6	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak	1
7	Puskesmas	34
8	Puskesmas Pembantu	84
9	Apotek	194
10	Posyandu	2276
11	Balai Kesehatan Masyarakat	1

Sumber : <http://dinkes.klatenkab.go.id/>

Sedangkan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter	374
2	Dokter Sub. Spesialis Dasar	4
3	Dokter Sub. Spesialis/ Kompetensi Tambahan Lainnya	33
4	Dokter Spesialis	239
5	Dokter Gigi	78
6	Dokter Spesialis Gigi	15
7	Bidan	888
8	Kefarmasian	487
9	Perawat	2227
10	Psikologi Klinis	11
11	Radiografer	87
12	Terapi Wicara	11
13	Akupasi Terapi	2
14	Fisioterapis	96
15	Analisis Kesehatan	269
16	Perekam Medis	244
17	Sanitarian/ Tenaga Kesehatan Lingkungan	149
18	Tenaga Gizi	146
19	Tenaga Kesehatan Tradisional	
20	Ortotis Prostetis	3
21	Akupunur Terapis	14
22	Refraksion Optisien	8

Sumber : <http://dinkes.klatenkab.go.id/>



2.6.3 Prasarana Jalan dan Jembatan

Prasarana jalan Kabupaten Klaten Tahun 2021 sepanjang 783.89 kilometer (km) dapat digambarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 02.

Jalan tersebut di atas merupakan jalan kabupaten. Sedangkan jalan nasional dan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Klaten masing-masing sepanjang 33.17 km dan 34.83 km. Jalan desa/lokal dan jalan lingkungan masing-masing sepanjang 2.171.006 km dan 1.494.610 km.

Jumlah jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021 sebanyak 348 buah, seluruhnya sepanjang 3817.10 km. Kondisi jembatan pada umumnya baik, dan untuk jembatan di jalan nasional merupakan jembatan baru.

2.6.4 Prasarana Irigasi/Pengairan

Jumlah prasarana irigasi/pengairan di Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

Tabel 2.6 Prasarana Pengairan Kabupaten Klaten Tahun 2021

Keterangan	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Sumber Air	Buah	174	174	174	216	216
Waduk	Unit	1	1	1	1	1
Sarana Pengairan Teknis						
Saluran Primer	Km	43.076	43.076	43.076	45.376	46.062
Saluran Sekunder	Km		482.970	482.970	512.748	452.481
Saluran Tersier	Km	482.97				

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, Tahun 2021

2.7 Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan

Visi Pemerintah Kabupaten Klaten tertuang dalam Perda No.13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, yaitu **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Klaten*, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. *Maju*, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. *Mandiri*, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. *Berdaya saing*, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.



Sedangkan Misi Pembangunan Daerah untuk mengimplementasikan Visi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

2.8 Personalia

2.8.1 Pimpinan Daerah

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDh/WKDh)

Kabupaten Klaten dipimpin seorang Bupati, yang untuk periode Tahun 2019-2024 dijabat oleh Hj. Sri Mulyani selaku Kepala Daerah dan Yoga Hardaya selaku Wakil Kepala Daerah.

2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Klaten terdiri dari 50 Anggota, yang berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Klaten periode 2019-2024, dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2019-2024

Nama	Jabatan
1. Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom	Ketua DPRD
2. H. Triyono, Spd. MM	Wakil Ketua I DPRD
3. Marjuki, SIP	Wakil Ketua II DPRD
4. H. Hariyanto, Spd	Wakil Ketua III DPRD
5. Eko Prasetyo, S.E.,M.Si.	Ketua Komisi I
6. Agus Riyanto	Ketua Komisi II
7. H. Basuki Effendi	Ketua Komisi III
8. H. Edi Sasongko	Ketua Komisi IV

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten 2021

2.8.2 Pegawai Daerah

Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2021, adalah sebagaimana tercantum dalam basis data kepegawaian Pemkab Klaten (SIMPEG).



BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ekonomi Makro

Pandemi Covid-19 datang ke Indonesia dimulai sejak pertengahan Maret 2020, yang berdampak pada jumlah penderita termasuk korban jiwa terus meningkat hingga sampai dengan saat ini. Langkah-langkah pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial yang diambil oleh pemerintah berakibat pada berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi.

Pada komponen pembentuk PDRB Kabupaten Klaten, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, transportasi dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar imbas wabah Covid-19, padahal sektor industri pengolahan adalah penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Klaten. Selain sektor industri pengolahan, sektor konstruksi juga diproyeksikan akan mengalami penurunan akibat terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek infrastruktur pemerintah. Oleh karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi, salah satu upaya tersebut adalah stimulasi melalui percepatan belanja - belanja daerah dalam APBD yang mengarah pada sektor tersebut.

Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran makro pembangunan pada tahun 2021, seperti tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, angka inflasi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 3.1 Ekonomi Makro Kab. Klaten Tahun 2021

Keterangan	Satuan/Unit	2019	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5	-1,18	-1,18
Tingkat Kemiskinan	%	12,28	12,89	13,49
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,54	5,46	5,48
Rasio Gini (Jawa Tengah)	%	0.378	0.361	0,355
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	75,29	75,56	76,21

Sumber : Bappeda Kab. Klaten, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten dari tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 TPT di Klaten adalah 5,46% meningkat sebesar 1,92% dibanding tahun 2019 sebesar 3,54%, dan pada tahun 2021 naik lagi sebesar 0,02% menjadi 5,48%. Mayoritas, tingkat pengangguran tersebut didominasi oleh lulusan pelajar SMA/ SMK sederajat.

Pada tahun 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,355 mengalami penurunan sebesar 0.006 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2020 yaitu sebesar 0.361 sedangkan gini ratio 2020 mengalami penurunan sebesar 0.017 poin dibandingkan tahun 2019 sebesar 0.361. Gini Ratio digunakan untuk mengukur derajat kesenjangan pendapatan dan kekayaan penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klaten terus mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. IPM menjelaskan bagaimana Penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Hasil yang menunjukkan kenaikan IPM di Kabupaten Klaten selama 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten telah berhasil dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Klaten selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan. Tahun 2019 tingkat kemiskinan sebesar 12,28% sedangkan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,61% sedangkan tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 0,60% hal itu sangat



dimungkinkan karena situasi pandemi yang sedang dialami saat ini sehingga mempengaruhi pada turunnya tingkat kemiskinan masyarakat di Pemerintah Kabupaten Klaten.

3.2 Kebijakan Keuangan

3.2.1 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Penerimaan yang Sah melalui perbaikan sistem dan prosedur;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah agar seluruh potensinya dapat masuk ke Kas Daerah;
- c. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah;
- d. Peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan asli daerah untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.2.2 Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah Tahun 2021 diproyeksikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Meningkatkan Proporsi Belanja Modal dan Investasi yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat, serta memiliki efek ganda terhadap kemajuan bidang-bidang kehidupan lainnya;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui sinkronisasi program dan kegiatan antar urusan dan bidang yang menjadi kewenangan daerah, serta melakukan pengawasan secara intensif serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawas fungsional maupun masyarakat;
3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan menyusun laporan akuntabilitas oleh setiap OPD dan pengendalian kegiatan setiap Pimpinan OPD;
4. Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2.3 Kebijakan Umum Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2021 diarahkan untuk:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam keadaan berimbang;
- b. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal pada BUMD

3.2.4 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan Daerah

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah, kebijakan umum perubahan pendapatan daerah diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

3.2.5 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Belanja Daerah



Belanja daerah Tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah diarahkan antara lain untuk:

- Meningkatkan Proporsi Belanja Modal dan Investasi yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat, serta memiliki efek ganda terhadap kemajuan bidang-bidang kehidupan lainnya;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui penyusunan Standar Analisis Belanja, Standar Harga dan Tolok Ukur Kinerja serta intensifikasi pengawasan, baik oleh aparatur pengawas fungsional maupun masyarakat;
- Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah antara lain dengan menyusun laporan akuntabilitas oleh setiap OPD dan pengendalian kegiatan setiap Pimpinan OPD;
- Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2.6 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan di bidang pembiayaan meliputi:

- Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam keadaan seimbang;
- Mengembangkan penyertaan modal dan memenuhi kewajiban pada pihak ketiga.

3.2.7 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2021 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2021 Sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp2.570.037.777.373,00 atau 101,48% dari anggaran sebesar Rp2.532.484.633.385,00, OPD yang mengelola pendapatan sebanyak 13 OPD dari 51 OPD yang ada di Kabupaten Klaten. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai oleh 13 OPD tersebut.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA per OPD

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Persen %
Sekretariat Daerah	6.282.559.182,00	6.116.497.864,00	166.061.318,00	97,36
Dinas Kesehatan	125.305.249.733,00	135.085.791.273,00	-9.780.541.540,00	107,81
DPUPR	551.548.000,00	1.179.752.950,00	-628.204.950,00	213,90
Disbudparpora	615.600.000,00	837.599.759,00	-221.999.759,00	136,06
BPKD	2.389.182.678.470,00	2.414.863.464.870,00	-25.680.786.400,00	101,07
DPKPP	174.096.000,00	211.781.000,00	-37.685.000,00	121,65
Disdagkop UKM	4.892.000.000,00	6.240.490.243,00	-1.348.490.243,00	127,57
Disperwaskim	2.250.000.000,00	2.219.869.804,00	30.130.196,00	98,66
Dishub	1.958.176.000,00	1.809.147.810,00	149.028.190,00	92,39
Disperinaker	350.000.000,00	386.135.800,00	-36.135.800,00	110,32
Diskominfo	900.000.000,00	1.079.634.000,00	-179.634.000,00	119,96
Dinas LHK	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	70,00
Satpol pp	12.726.000,00	612.000,00	12.114.000,00	4,81
Jumlah	2.532.484.633.385,00	2.570.037.777.373,00	-37.553.143.988,00	101,48

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BPKD selain sebagai OPD juga sebagai Satuan



Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) termasuk 34 puskesmas dan 1 RSUD sehingga terdapat 86 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten. Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp2.274.081.162.010,28,00 dan terealisasi sebesar Rp1.820.638.422.785,00 atau 80,06% sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan APBD TA 2021 mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan, tingkat kegiatan yang direncanakan, dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan. Penyusunan anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan anggaran yang direncanakan dan prakiraan satu tahun ke depan bagi program yang bersangkutan.



BAB IV

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD maupun Perubahan APBD TA 2021, Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi sumber dayanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan TA 2021, disajikan sebagai berikut.

4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan

Secara garis besar Realisasi APBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Realisasi APBD Tahun 2021

1. Realisasi Pendapatan	2.570.037.777.373,00	
2. Realisasi Belanja	1.820.638.422.785,00	
3. Realisasi Transfer	672.768.458.757,00	
4. Surplus (Defisit)		76.630.895.831,00
5. Realisasi Pembiayaan :		
a. Penerimaan	440.589.680.010,28	
b. Pengeluaran	23.500.000.000,00	
c. Pembiayaan Netto		417.089.680.010,28
6. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan		493.720.575.841,28

Realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

4.1.1 Realisasi Pendapatan

4.1.1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	277.915.340.915,00
2) Realisasi sebesar	Rp	315.304.009.782,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	<u>37.388.668.867,00</u>

Realisasi PAD Tahun 2021 sebesar 113,45% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

1) Pajak Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	115.200.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	126.672.231.091,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	<u>11.472.231.091,00</u>

Penerimaan pajak daerah sebesar 109,96 % dari anggarannya.

Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa yang menjadi Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan.



2) Retribusi Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	12.352.582.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	14.405.348.660,00
Lebih dari anggaran sebesar		<u>2.052.766.660,00</u>

Penerimaan retribusi daerah sebesar 116,62 % dari anggarannya.

Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa yang menjadi Retribusi Daerah adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Perpanjangan IMTA.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	12.974.459.182,00
b) Realisasi sebesar	Rp	16.409.075.267,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	<u>3.434.616.085,00</u>

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 126,47 % dari anggarannya.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	137.388.299.733,00
b) Realisasi sebesar	Rp	157.817.354.764,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	<u>20.429.055.031,00</u>

Penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar 114,87% dari anggarannya. Rekening ini menampung penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tidak masuk kategori pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (meliputi penjualan drum bekas, penjualan hasil penebangan pohon, penjualan bahan-bahan bekas bangunan), Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Penerimaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi, Pendapatan Pengembalian (PPh pasal 21, ASKES, Kelebihan Gaji), Hasil Pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan BLUD, dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

4.1.1.2 Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer dari Pemerintah, adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.130.432.992.470,00
b) Realisasi sebesar	Rp	2.131.117.520.091,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	<u>13.826.990.432,00</u>

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebesar 100,03 % dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:



4.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.919.548.317.470,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.923.414.170.983,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	<u>3.865.853.513,00</u>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021 sebesar 100,20 % dari anggarannya dengan rincian sebagai berikut:

4.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.527.971.822.470,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.531.837.675.983,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	<u>3.865.853.513,00</u>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021 sebesar 100,25 % dari anggarannya. Terdiri atas:

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

(1) Dianggarkan sebesar	Rp	38.345.857.000,00
(2) Realisasi sebesar	Rp	51.087.942.633,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	<u>12.742.085.633,00</u>

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 133,23 % dari anggarannya.

2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	1.149.421.184.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	1.149.421.184.000,00
Sama dengan anggarannya sebesar	Rp	<u>0,00</u>

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 100% dari anggarannya.

3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	69.287.830.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	60.725.376.316,00
	Rp	<u>8.562.453.684,00</u>

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 87,64% dari anggarannya.

Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang tujuan penggunaannya untuk membiayai bidang infrastruktur jalan, bidang infrastruktur irigasi, bidang keluarga berencana, bidang kesehatan, bidang kelautan dan perikanan, bidang lingkungan hidup, bidang perdagangan, bidang pertanian, dan bidang pendidikan.

4) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	270.916.951.470,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	<u>270.603.173.034,00</u>



Rp 313.778.436,00

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 99,88% dari anggarannya.

Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang tujuan penggunaannya untuk membiayai tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional kesehatan, akreditasi puskesmas, jaminan persalinan, bantuan operasional keluarga berencana, tunjangan khusus guru, dan pelayanan administrasi kependudukan.

4.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

a) Dianggarkan Sebesar	Rp 10.729.894.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp 10.729.894.000,00
	Rp <u>0,00</u>

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 100% dari anggarannya

4.1.1.2.1.3 Dana Desa

a) Dianggarkan Sebesar	Rp 380.846.601.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp 380.846.601.000,00
	Rp <u>0,00</u>

Realisasi Dana Desa Sebesar 100% dari anggarannya.

4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

a) Dianggarkan Sebesar	Rp 210.884.675.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp 207.703.349.108,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp <u>3.181.325.892,00</u>

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 98,49% dari anggarannya dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Bagi Hasil

a) Dianggarkan Sebesar	Rp 193.321.675.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp 206.950.349.108,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp <u>13.628.674.108,00</u>

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil sebesar 107,05% dari anggarannya.

Penerimaan bagi hasil pajak sebesar 107,05% dari anggarannya. Penerimaan ini berasal dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

2) Bantuan Keuangan

a) Dianggarkan Sebesar	Rp 17.563.000.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp 753.000.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp <u>16.810.000.000,00</u>

Realisasi Bantuan Keuangan sebesar 4,29% dari anggarannya.



4.1.1.3 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	124.136.300.000,00
2) Realisasi sebesar	Rp	123.616.247.500,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	520.025.500,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2021 sebesar 99,58 % dari anggarannya, yang merupakan gabungan antara pendapatan lainnya dan pendapatan hibah dengan perincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	14.540.000.000,00
2) Realisasi sebesar	Rp	15.627.000.000,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	1.087.000.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2021 dari Pemerintah sebesar 107,48 % dari anggarannya.

2. Realisasi Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	109.596.300.000,00
2) Realisasi sebesar	Rp	107.989.247.500,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	1.607.052.500,00

Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2021 berupa Dana Desa sebesar 98,53 % dari anggarannya.

4.1.2 Realisasi Belanja

a. Dianggarkan sebesar	Rp	2.274.081.162.010,28
b. Realisasi sebesar	Rp	1.820.638.422.785,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	453.442.739.225,28

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar 80,06 % dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

4.1.2.1 Belanja Operasi:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	1.962.849.239.087,28
2) Realisasi sebesar	Rp	1.612.412.988.846,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	350.436.250.241,28

Realisasi belanja operasi sebesar 82,15 % dari anggarannya, terdiri atas:

1) Belanja Pegawai:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.197.490.511.452,00
------------------------	----	----------------------



b) Realisasi sebesar	Rp	1.006.278.863.371,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	191.211.648.081,00

Realisasi belanja pegawai sebesar 84,03 % dari anggarannya.

2) Belanja Barang dan Jasa:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	721.795.055.287,28
b) Realisasi sebesar	Rp	570.241.936.649,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	151.553.118.638,28

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar 79,00 % dari anggarannya. Belanja ini digunakan untuk biaya operasional kantor dan aparat antara lain belanja bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus/hari-hari tertentu, perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja kursus pelatihan PNS, honor non pegawai, honor non PNS, belanja barang jasa untuk tanggap darurat bencana.

3) Belanja Subsidi:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	3.000.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.940.554.067,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	1.059.445.933,00

Realisasi belanja subsidi sebesar 64,69 % dari anggarannya.

4) Belanja Hibah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	32.611.021.500,00
b) Realisasi sebesar	Rp	28.410.769.759,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	4.200.251.741,00

Realisasi belanja hibah sebesar 87,12 % dari anggarannya.

5) Belanja Bantuan Sosial:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	7.952.650.848,00
b) Realisasi sebesar	Rp	5.540.865.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	2.411.785.848,00

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar 69,67 % dari anggarannya. Belanja ini dipergunakan untuk membiayai Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Masyarakat, Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.

4.1.2.2 Belanja Modal:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	238.674.307.650,00
2) Realisasi sebesar	Rp	189.606.772.936,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	38.999.396.403,00

Realisasi belanja modal sebesar 79,44 % dari anggarannya, terdiri dari :



- 1) Belanja Modal Tanah:
Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2021.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	87.843.880.861,00
b) Realisasi sebesar	Rp	68.901.715.247,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	18.942.165.614,00

Realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar 78,44 % dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk membiayai pengadaan alat-alat besar darat, alat bantu, alat angkutan darat bermotor dan tidak bermotor, alat bengkel bermesin dan tidak bermesin, alat ukur, alat pengolahan, alat kantor, alat rumah tangga, meja dan kursi kerja/rapat, alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar, alat kedokteran, alat kesehatan umum, unit alat laboratorium, alat peraga praktik sekolah, alat lab lingkungan hidup, komputer unit, peralatan komputer, alat pelindung, alat SAR, peralatan olahraga, peralatan dan mesin BOS dan BLUD.

- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	73.655.759.427,00
b) Realisasi sebesar	Rp	66.197.965.314,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	7.457.794.113,00

Realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar 89,87 % dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk pengadaan Gedung tempat kerja, gedung tempat tinggal, candi/tugu peringatan/prasasti, tugu/tanada batas, gedung dan bangunan BLUD.

- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	70.877.758.078,00
b) Realisasi sebesar	Rp	48.969.127.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	21.908.631078,00

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar 69,09 % dari anggarannya.

Belanja ini dipergunakan untuk pengadaan Jalan, bangunan air irigasi, instalasi pengolahan sampah, jaringan listrik, jalan, jaringan dan irigasi BLUD.

- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	6.296.909.284,00
b) Realisasi sebesar	Rp	5.537.965.375,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	758.943.909,00

Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar 87,95 % dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk pengadaan bahan perpustakaan tercetak, alat bercorak kebudayaan, tanaman, aset tetap dalam renovasi, aset tidak berwujud, aset tetap lainnya BOS dan BLUD.

4.1.2.3 Belanja Tak Terduga:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	72.557.615.273,00
2) Realisasi sebesar	Rp	18.618.661.003,00



Kurang dari anggaran sebesar Rp 53.938.954.270,00

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar 25,66 % dari anggarannya.

Belanja tak terduga ini digunakan untuk belanja pengembalian sisa dana hibah rekonstruksi dan rehabilitasi sebesar Rp2.006.080.123,00, belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp597.225.000,00, Belanja penanganan covid-19 sebesar Rp15.937.755.880,00, Belanja Penanganan Bencana Alam Gunung Merapi sebesar Rp77.600.000,00

4.1.3 Realisasi Transfer:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	675.562.515.700,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>672.768.458.757,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	2.794.056.943,00

Realisasi Transfer Tahun 2021 sebesar 99,59 % dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

4.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	19.055.869.600,00
2) Realisasi sebesar	Rp	<u>16.428.812.657,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	2.627.056.943,00

Realisasi bagi hasil pendapatan sebesar 86,21 % dari anggarannya, dipergunakan untuk belanja bagi hasil Pajak dan pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota/Desa, terdiri dari :

1) Bagi Hasil Pajak Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	16.833.654.367,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>14.417.776.871,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	2.415.877.496,00

Realisasi bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebesar 85,65 % dari anggarannya, Realisasi bagi hasil pajak daerah dipergunakan untuk bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa.

2) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.222.215.233,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>2.011.035.786,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	211.179.447,00

Realisasi bagi hasil pendapatan lainnya sebesar 90,50 % dari anggarannya, Realisasi bagi hasil pendapatan lainnya dipergunakan untuk bagi hasil pendapatan lainnya kepada Pemerintah Desa.

4.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	656.506.646.100,00
2) Realisasi sebesar	Rp	<u>656.339.646.100,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	167.000.000,00

Realisasi bantuan keuangan sebesar 99,88 % dari anggarannya, dipergunakan untuk bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan lainnya, terdiri dari :



1. Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	514.402.196.100,00
b) Realisasi sebesar	Rp	514.402.196.100,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar 100% dari anggarannya. Realisasi Transfer ini terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan ke Desa yang Bersifat Umum.

2. Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	142.104.450.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	141.937.450.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	167.000.000,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar 99,88 % dari anggarannya, sisa realisasi sebesar Rp167.000.000,00 terdiri dari pengembalian kelebihan Transfer ke Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring sebesar Rp170.000.000,00 dan anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.000.000,00.

4.1.4 Realisasi Pembiayaan

4.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	440.659.044.325,28
2) Realisasi sebesar	Rp	440.589.680.010,28
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	69.364.315,00

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 99,94 % dari anggaran, meliputi penggunaan SiLPA, dengan rincian sebagai berikut:

Penggunaan SiLPA Tahun Lalu:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	440.659.044.325,28
2) Realisasi sebesar	Rp	440.589.680.010,28
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	69.364.315,00

Realisasi penerimaan SiLPA sebesar 99,94 % dari anggarannya.

4.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	23.500.000.000,00
2) Realisasi sebesar	Rp	23.500.000.000,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar 100,00% dari anggarannya, yang dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi pemerintah dengan perincian sebagai berikut:

1) Pembentukan Dana Cadangan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	15.000.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	15.000.000.000,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Pembentukan Dana Cadangan sebesar 100,00 % dari anggarannya, yang dipergunakan untuk Cadangan Biaya Pilkada Tahun 2024.



2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	8.500.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	8.500.000.000,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar 100,00 % dari anggarannya, merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp8.500.000.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Merapi sebesar Rp4.500.000.000,00 dan PT.BPR Bank Klaten (Perseroda) sebesar Rp4.000.000.000,00.

4.1.4.3 Pembiayaan Netto:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	417.159.044.325,28
2) Realisasi sebesar	Rp	417.089.680.010,28
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	69.364.315,00

Realisasi pembiayaan netto sebesar 99,98 % dari anggarannya, yang merupakan selisih dari Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan.

4.1.5 Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan:

a. Dianggarkan sebesar	Rp	0,00
b. Realisasi sebesar	Rp	493.720.575.841,28
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	493.720.575.841,28

Realisasi SiLPA tahun berjalan merupakan hasil penjumlahan dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan netto, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rincian SiLPA Tahun 2021

Rincian SiLPA :	2021
1) Kas di Kasda	440.420.393.555,00
2) Kas di BLUD	47.050.337.659,28
3) Kas di Bendahara BOS	6.249.844.627,00
JUMLAH:	493.720.575.841,28

4.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pencapaian target pendapatan dan belanja secara umum antara lain:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang penarikan pajak/retribusi;
2. Belum optimalnya penanganan pemungutan pajak dan retribusi;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi;
4. Belum optimalnya peran serta/dukungan masyarakat;
5. Peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD masih rendah;
6. Lemahnya sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar hukum;
7. Masih rendahnya tingkat pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
8. Masih terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi, khususnya tenaga yang memiliki keahlian profesi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar.



BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Klaten yang terdiri dari 51 OPD selaku entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah basis akrual, untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Klaten menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2020 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penyusunan LKPD sudah mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang berakibat berubahnya atas rekening.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening meliputi

- 1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Neraca
- 2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran
- 3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Laporan Operasional

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusunan laporan keuangan yakni neraca, LRA dan LO yang terdiri atas:

1. Klasifikasi Neraca
 - Aset
 - Kewajiban
 - Ekuitas
2. Klasifikasi Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Pendapatan
 - Belanja



- Pembiayaan
- 3. Klasifikasi Laporan Operasional (LO)
 - Pendapatan-LO
 - Beban

Dalam Penyusunan LKPD Tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengacu pada rekening yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Untuk menjembatani atas perubahan peraturan terkait dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka diperlukan adanya mapping kode rekening.

5.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

5.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

5.3.1.1 Umum

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- a. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang



ditetapkan.

- b. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

4. Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LRA sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.1.2 Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
3. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

5.3.1.3 Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5.3.1.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
 - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.



5.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

5.3.2.1 Umum

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LO sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.2.2 Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.



2. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
 - 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu /Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

5.3.2.3 Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5.3.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan



- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

5.3.3.1 Umum

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

3. Definisi Belanja

- 1) **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) **Belanja** merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 3) **Belanja** terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- 4) **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- 5) **Belanja pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) **Belanja barang dan jasa** adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- 7) **Belanja Bunga** merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) **Belanja Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) **Belanja Hibah** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 10) **Belanja Bantuan Sosial** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk



melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- 11) **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 12) **Belanja Tak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- 13) **Belanja Transfer** adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 14) **Belanja daerah** diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
 - b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

5.3.3.2 Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

5.3.3.3 Pengukuran

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

5.3.3.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.



5.3.4 Kebijakan Akuntansi Beban

5.3.4.1 Umum

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- 1) **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) **Beban** merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
- 3) **Beban Operasi** adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- 4) **Beban Operasi** terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- 5) **Beban pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) **Beban Barang dan Jasa** merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- 7) **Beban Bunga** merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) **Beban Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) **Beban Hibah** merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 10) **Beban Bantuan Sosial** merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.



- 11) **Beban Penyusutan dan Amortisasi** adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- 12) **Beban Penyisihan Piutang** merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- 13) **Beban Lain-lain** adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- 14) **Beban Transfer** merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 15) **Beban Non Operasional** adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- 16) **Beban Luar Biasa** adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

4. Klasifikasi

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban sebagaimana tercantum dalam Bagan Akun Standar.

5.3.4.2 Pengakuan

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban



- diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
 9. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
 10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - c. Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

5.3.4.3 Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.



2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

5.3.4.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - b. Beban Transfer
 - c. Beban Non Operasional
 - d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

5.3.5.1 Umum

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Transfer** adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. **Transfer Masuk (LRA)** adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
- c. **Transfer Keluar (LRA)** adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- d. **Pendapatan Transfer (LO)** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. **Beban Transfer (LO)** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang



diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- f. Transfer diklasifikasi menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- g. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar.

5.3.5.2 Pengakuan

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau;
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

5.3.5.3 Pengukuran

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.



5.3.5.4 Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
2. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

5.3.5.5 Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

5.3.6.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
- b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Pembiayaan (financing)** adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - **Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - **Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
 - **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
 - **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
 - **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 - **Surplus/Defisit** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

4. Klasifikasi Pembiayaan

- a. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- c. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



5.3.6.2 Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

5.3.6.3 Pengukuran

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

5.3.6.4 Akuntansi Pembiayaan Netto

1. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

5.3.6.5 Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

5.3.6.6 Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

5.3.6.7 Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.



- Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.

5.3.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

5.3.7.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi kas dan setara kas pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

3. Definisi

- a. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b. **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

4. Klasifikasi

- a. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- b. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- c. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.
- d. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - 1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - 2) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.



Tabel 5.1 Kas dan Setara Kas

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di OPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dana hibah masyarakat untuk korban gempa/musibah lainnya
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)

5.3.7.2 Pengakuan

1. Secara umum pengakuan aset dilakukan:
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

5.3.7.3 Pengukuran

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

5.3.7.4 Penyajian Dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

1. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
2. Kebijakan manajemen setara kas;
3. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan, seperti PPN/PPH yang dipungut, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain.



5.3.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

5.3.8.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

3. Definisi

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
- c. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
- d. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
 - 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
 - 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
- e. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
- f. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - 2) Investasi Jangka Panjang Permanen



Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

4. Klasifikasi

Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.8.2 Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

5.3.8.3 Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

a. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.



b. Investasi jangka panjang non permanen:

- 1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
- 2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- 3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 4) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

d. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.



e. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

5.3.8.4 Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

5.3.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

5.3.9.1 Umum

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
- b. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b. **Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya.
- d. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).



5.3.9.2 Pengakuan

1. Piutang diakui *pada saat penyusunan laporan keuangan* ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas dan;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
6. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
7. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
8. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
9. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
10. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM /Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
11. Piutang Perikatan timbul karena adanya perikatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan.



5.3.9.3 Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi



- penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
6. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
 7. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
 8. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.
 9. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
 10. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak selain PBB-P2 dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
 11. Penggolongan Kualitas Piutang retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
 12. Penggolongan Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 12 (dua) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan.
 13. Penggolongan Kualitas Piutang Perikatan, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
 - c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; dan



- d. kualitas macet apabila:
- Dalam dalam jangka waktu lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; atau
 - Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

5.3.9.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 30% dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 50% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 80% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, serta Piutang Perikatan ditetapkan sebesar:
 - a. 5% (lima permil) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

5.3.9.5 Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.



- 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
7. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
8. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
9. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
 - g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down maupun write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

5.3.9.6 Pengungkapan

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;



- c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d. jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
3. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/retribusi atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

5.3.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

5.3.10.1 Umum

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4. Klasifikasi

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

5.3.10.2 Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat:
 - a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

5.3.10.3 Pengakuan Beban

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan



yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

5.3.10.4 Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*). Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama Keluar Pertama Metode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis).

5.3.10.5 Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan 2 metode:

1. Metode Perpetual
Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
2. Metode Periodik
Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.



5.3.10.6 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca.

5.3.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

5.3.11.1 Umum

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
- c. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - 1) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
 - 2) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

3. Definisi

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Masa manfaat adalah:



- 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- d. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
 - e. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
 - f. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 - g. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
 - h. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
 - i. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama
 - j. lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
 - k. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
 - l. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
 - m. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
 - n. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
 - o. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
 - p. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
 - q. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanah;
 - 2) Peralatan dan Mesin;
 - 3) Gedung dan Bangunan;
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - 5) Aset Tetap Lainnya;
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
 - r. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - s. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.
 - t. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



- u. Jalan, Irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati (termasuk didalamnya yaitu Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan yang berada di wilayah Kelurahan Kabupaten Klaten).
- v. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- w. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- x. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.3.11.2 Pengakuan Aset Tetap

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat Ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara (termasuk barang berisiko tinggi hilang/rusak). Adapun daftar atas barang yang dikecualikan akan diatur tersendiri dengan Surat Edaran;
 - d. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - e. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - g. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal..
2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang,



maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

6. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

- 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
 - a) Peralatan dan Mesin adalah Rp500.000,00 ;
 - b) Gedung dan Bangunan adalah Rp20.000.000,00 ;
 - c) Aset Tetap Lainnya adalah Rp500.000,00;
 - d) Batas minimal kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya (berupa koleksi perpustakaan/buku, aset renovasi, hewan dan tanaman) dan konstruksi dalam pengerjaan.

Belanja peralatan dan mesin diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang memiliki kriteria sebagai barang yang berbahan kaca, plastik, keramik, kain dan lainnya yang sejenis, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap. Selanjutnya rincian jenis barang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran.

7. Batasan Pengakuan Aset Tetap Lainnya Tanaman

- a. Tanaman diakui sebagai aset tetap lainnya dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Diameter batang minimal 20 cm; dan
 - 2) Ketinggian batang dari permukaan tanah sampai dengan percabangan pertama minimal 3 m.
- b. Barang berupa alat olah raga di sekolah yang mudah rusak dan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
- c. Buku yang diberikan kepada siswa untuk sarana proses pembelajaran diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
- d. Gambar atau lukisan yang berbahan kertas diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya.

5.3.11.3 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 35 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk



perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

5.3.11.4 Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (*initialdelivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handlingcost*);
 - e. biaya pemasangan (*instalationcost*);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
6. Biaya perolehan jalan (termasuk didalamnya adalah jalan kabupaten dan jalan lingkungan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Klaten), jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.



8. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
9. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun nonkonstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara sistematis dan wajar dengan nilai aset.
10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
11. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

5.3.11.5 Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

5.3.11.6 Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

5.3.11.7 Aset Tetap Digunakan Bersama

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan perawatan dan pemeliharaan oleh Entitas Akuntansi.

5.3.11.8 Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

5.3.11.9 Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap



juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

5.3.11.10 Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya berita acara serah terima hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

5.3.11.11 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau penambahan fungsi, dan/atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap dengan tidak merubah bentuk fisik semula.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan Rp20.000.000,00 ke atas.
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin berupa overhaul sebesar Rp500.000,00 ke atas.



4. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat dikapitalisasi pada aset tetap apabila memenuhi kriteria 1,2,3, dan 4.

5.3.11.12 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

5.3.11.13 Penyusutan

Mekanisme Penyusutan aset tetap diatur tersendiri diluar peraturan bupati ini.

5.3.11.14 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

5.3.11.15 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

5.3.11.16 Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:



- 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
 4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

5.3.11.17 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

5.3.11.18 Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

5.3.11.19 Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi



- secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
 3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

5.3.11.20 Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa DED (*Detailed Engineering Design*) yang tidak dilanjutkan dengan pembangunan fisik dikeluarkan dari neraca setelah 5 tahun.
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya secara permanen, dapat diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Proses pengerjaan fisik telah mencapai lebih dari 90%, dan
 - b. Sudah dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

5.3.11.21 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:



- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
12. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

5.3.11.22 Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;



3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4. Uang muka kerja yang diberikan; dan
5. Retensi.

5.3.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

5.3.12.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - 1) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
 - 2) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

3. Definisi

- a. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- b. **Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
- c. **Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
- d. **Kewajiban jangka panjang** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- e. **Kewajiban jangka pendek** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. **Utang Beban** adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- g. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
- h. **Pendapatan Diterima Dimuka** adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- i. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

4. Klasifikasi

Klasifikasi atas kewajiban sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.12.2 Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan



- perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
 3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
 4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
 5. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
 6. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
 7. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali.
 8. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
 9. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
 10. Utang Beban, diakui pada saat:
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
 11. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
 12. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
 - a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima.tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 13. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.



14. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

5.3.12.3 Pengukuran Dan Penilaian

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

5.3.12.4 Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;



- 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- c. Biaya pinjaman:
- 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.



BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. (PSAP 02, Paragraf 9).

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemda, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemda secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. (Perbup Nomor 40 Tahun 2021, Bab I, Huruf G, Poin 3)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten telah menganggarkan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau APBD-P TA 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.1 Anggaran dan Realisasi APBD TA 2021

Perhitungan APBD	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan	2.532.484.633.385,00	2.570.037.777.373,00	101,48	2.578.135.836.354,00
2. Belanja	2.274.081.162.010,28	1.820.638.422.785,00	80,06	1.820.342.899.284,00
3. Transfer	675.562.515.700,00	672.768.458.757,00	99,59	724.821.595.293,00
4. Surplus (Defisit) Anggaran	(417.159.044.325,28)	76.630.895.831,00	(18,37)	32.971.341.777,00
5. Penerimaan Pembiayaan	440.659.044.325,28	440.589.680.010,28	99,98	408.687.702.548,28
6. Pengeluaran Pembiayaan	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
7. Pembiayaan Bersih (Netto)	417.159.044.325,28	417.089.680.010,28	99,98	407.687.702.548,28
SiLPA	0,00	493.720.575.841,28	0,00	440.659.044.325,28

Anggaran dan realisasi APBD dan/atau APBD-P TA 2021 disajikan dalam mata uang rupiah dengan uraian sebagai berikut. (PSAP 02, Paragraf 10).

A.6.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba PD/BUMD atau kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis objek, subjek dan besaran tarif pajak/retribusi daerah selanjutnya ditetapkan dalam Perda.

Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah daerah Provinsi, serta Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi.



Penerimaan dari Pemerintah Pusat dialokasikan dalam APBN yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri Keuangan RI d.h.i. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan daerah baik berasal dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp2.570.037.777.373,00 (101,48%) dari anggarannya sebesar Rp2.532.484.633.385,00, dan turun sebesar Rp8.098.058.981,00 (0,31%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp2.578.135.836.354,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	277.915.340.915,00	315.304.009.782,00	113,45	329.963.261.898,00
2. Pendapatan Transfer	2.130.432.992.470,00	2.131.117.520.091,00	100,03	1.752.155.233.956,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	124.136.300.000,00	123.616.247.500,00	99,58	496.017.340.500,00
Jumlah	2.532.484.633.385,00	2.570.037.777.373,00	101,48	2.578.135.836.354,00

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 menurut obyeknya dapat dijelaskan sebagai berikut.

A.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp315.304.009.782,00 (113,45%) dari anggaran sebesar Rp277.915.340.915,00 dan turun sebesar Rp14.659.252.116 (4,44%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp329.963.261.898,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.3 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pajak Daerah	115.200.000.000,00	126.672.231.091,00	109,96	116.132.536.269,00
2. Retribusi Daerah	12.352.582.000,00	14.405.348.660,00	116,62	14.760.621.483,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.974.459.182,00	16.409.075.267,00	126,47	17.577.664.499,00
4. Lain-lain PAD yang Sah	137.388.299.733,00	157.817.354.764,00	114,87	181.492.439.647,00
Jumlah	277.915.340.915,00	315.304.009.782,00	113,45	329.963.261.898,00

Adapun anggaran dan realisasi masing-masing PAD TA 2021 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 menurut rincian objeknya dapat disajikan sebagai berikut:

A.6.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. (Bultek Nomor 24).

Pengelolaan pajak daerah meliputi pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan peraturan lainnya yang berlaku dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 6A.4 Tarif Pajak Daerah TA 2021

Uraian	Perda		Penaan Pajak	
	Nomor	Tahun	Tarif	Dasar Penaaan
1. Hotel	16	2011	10%	Pembayaran dari Pengunjung
2. Restoran	16	2011	10%	Pembayaran dari Pengunjung
3. Hiburan	16	2011	5–20%	Kegiatan (event)
4. Reklame	16	2011	25%	Nilai Sewa (NJOPR dan NSPR)
5. Penerangan Jalan	16	2011	1,5–9 %	Nilai Jual Tenaga Listrik (PLN)
6. Parkir	16	2011	30%	Pembayaran dari Pengunjung
7. Mineral Bukan Logam & Batuan	16	2011	25%	Nilai Jual (Harga x Volume/Tonase)
8. Sarang Burung Walet	16	2011	10%	Nilai Jual Sarang Burung Walet
9. PBB P2	17	2011	0,100% & 0,20%	NJOP
10. BPHTB	9	2010	5%	NJOP
11. Air Tanah	8	2010	20%	Nilai Perolehan Air Tanah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp126.672.231.091,00 (109,96%) dari anggarannya sebesar Rp115.200.000.000,00, dan naik sebesar Rp10.539.694.822 (9,08%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp116.132.536.269,00. Anggaran dan realisasi tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Hotel	800.000.000,00	889.869.463,00	111,23	730.525.400,00
2. Restoran	6.000.000.000,00	6.792.280.356,00	113,20	6.292.061.597,00
3. Hiburan	600.000.000,00	290.498.850,00	48,42	476.762.897,00
4. Reklame	3.700.000.000,00	4.052.430.331,00	109,53	3.679.872.836,00
5. Pajak Penerangan Jalan	40.500.000.000,00	44.672.632.498,00	110,30	41.879.307.509,00
6. Parkir	700.000.000,00	331.419.425,00	47,35	643.413.548,00
7. Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.031.638.820,00	101,05	3.217.528.300,00
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000.000,00	651.230.250,00	10,85	3.419.032.000,00
9. Pajak Bumi & bangunan	29.500.000.000,00	32.548.285.626,00	110,33	31.788.061.644,00
10. Pajak BPHTB	24.400.000.000,00	33.411.945.472,00	136,93	24.005.970.538,00
Jumlah	115.200.000.000,00	126.672.231.091,00	109,96	116.132.536.269,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pendapatan pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Dasar pengelolaan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2021 sebesar Rp889.869.463,00 (111,23%) dari anggarannya sebesar Rp800.000.000,00 dan naik sebesar Rp159.344.063,00 (21,81%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp730.525.400,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2021

Uraian	TA 2021				TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Wajib Pajak	Realisasi (Rp)
Pajak Hotel	600.000.000,00	762.651.635,00	127,11	1	730.525.400,00
Pajak Motel	200.000.000,00	127.217.828,00	63,61	56	0,00
Jumlah	800.000.000,00	889.869.463,00	111,23	57	730.525.400,00



Kenaikan realisasi Pajak Hotel sebesar Rp162.651.635,00 diakibatkan karena meningkatnya kegiatan dari pemerintah dan perusahaan yang menggunakan paket ruang meeting selain penggunaan kamar hotel.

2. Pajak Restoran

Pendapatan pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Dasar pengelolaan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2021 sebesar Rp6.792.280.356,00,00 (113,20%) dari anggarannya sebesar Rp6.000.000.000,00 dan naik sebesar Rp500.218.759,00 (7,95%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp6.292.061.597,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2021

Uraian	TA 2020			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.008.867.000,00	2.777.678.048,00	138,27	1.916.032.221,00
b. Pajak Warung dan Sejenisnya	1.133.000,00	1.133.000,00	100,00	21.072.200,00
c. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.990.000.000,00	4.013.469.308,00	100,59	4.354.957.176,00
Jumlah	6.000.000.000,00	6.792.280.356,00	113,20	6.292.061.597,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

- Kenaikan realisasi pajak Rumah Makan dikontribusi oleh bertambahnya omset pendapatan rumah makan dampak dari berakhirnya kegiatan PPKM dari Pemerintah.
- Realisasi Pajak Katering TA 2021 turun sebesar Rp341.487.868,00 (7,84%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp4.345.957.176,00, disumbang oleh karena berkurangnya anggaran kegiatan makan minum berdampak pada pajak katering.
- Dari pendapatan pajak warung sebesar Rp1.133.000,00 terdiri dari dua wajib pajak.

3. Pajak Hiburan

Pendapatan pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dasar pengelolaan pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2021 sebesar Rp290.498.850,00 (48,42%) dari anggarannya sebesar Rp600.000.000,00 dan turun sebesar Rp186.264.047,00 (39,07%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp476.762.897,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	86.000.000,00	5.408.035,00	6,29	19.419.537,00
b. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	228.000.000,00	164.230.315,00	72,03	222.192.310,00
c. Pertandingan Olahraga	186.000.000,00	108.790.500,00	58,49	235.151.050,00
d. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	100.000.000,00	12.070.000,00	12,07	0,00
Jumlah	600.000.000,00	290.498.850,00	48,42	476.762.897,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pajak Hiburan dapat disajikan sebagai berikut:



- a. Realisasi Pajak Hiburan Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana TA 2021 sebesar Rp5.408.035,00 (6,29%) dari anggarannya sebesar Rp86.000.000,00 turun sebesar Rp14.011.502,00 (72,15%) dibanding realisasi TA 2020 Rp19.419.537,00 dikarenakan berkurangnya kegiatan penyelenggaraan hiburan pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
- b. Realisasi Pajak Hiburan Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan TA 2021 sebesar Rp164.230.315,00 (72,03%) dari anggarannya sebesar Rp228.000.000,00 turun sebesar Rp57.961.995,00 (26,09%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp222.192.310,00 dikarenakan berkurangnya kegiatan penyelenggaraan hiburan ketangkasan.
- c. Realisasi Pajak Pertandingan Olah Raga TA 2021 sebesar Rp108.790.500,00 (58,49%) dari anggarannya sebesar Rp186.000.000,00 turun sebesar Rp126.360.550,00 (53,73%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp235.151.050,00. Penurunan dikarenakan berkurangnya kegiatan penyelenggaraan hiburan olah raga.
- d. Realisasi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) TA 2021 sebesar Rp12.070.000,00 (12,07%) dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 naik sebesar Rp12.070.000,00 (100%) dibanding Realisasi TA 2020.

4. Pajak Reklame

Pendapatan pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Dasar pengelolaan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi penerimaan Pajak Reklame TA 2021 sebesar Rp4.052.430.331,00 (109,53%) dari anggarannya sebesar Rp3.700.000.000,00 dan naik sebesar Rp372.557.495,00 (10,12%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.679.872.836,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.9 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	2.300.000.000,00	1.785.813.805,00	77,64	1.628.930.970,00
b. Reklame Kain	1.400.000.000,00	2.266.616.526,00	161,90	2.050.941.866,00
Jumlah	3.700.000.000,00	4.052.430.331,00	109,53	3.679.872.836,00

Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Kain lebih dari anggaran dikarenakan adanya iklan baru dan masih ada potensi pemasangan reklame kain.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pendapatan pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain. Dasar pengelolaan pajak penerangan jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain TA 2021 sebesar Rp44.672.632.498,00 (110,30%) dari anggarannya sebesar Rp40.500.000.000,00 dan naik sebesar Rp2.793.324.989,00 (6,67%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp41.879.307.509,00.

Pencapaian realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain TA 2021 sebesar 110,30% dari anggaran atau melampaui target yang ditetapkan dan terjadi



kenaikan dibandingkan realisasi TA 2020, kenaikan dikarenakan program Pemerintah tentang Subsidi dan pengurangan pajak listrik sudah dihapus.

Pemungutan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Klaten sesuai Naskah Perjanjian Kerjasama antara PLN dengan Pemkab Klaten No.14 Tahun 2004 dan No.024/PJ-061/APJ-KLT/2004 tentang Pemungutan, Penyetoran dan Pembayaran Rekening Listrik PPI Pemkab Klaten.

6. Pajak Parkir

Pendapatan pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengelolaan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2021 sebesar Rp331.419.425,00 (47,35%) dari anggarannya sebesar Rp700.000.000,00 yang terdiri dari 96 Wajib Pajak dan turun sebesar Rp311.994.123,00 (48,49%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp643.413.548,00.

7. Pajak Air Tanah

Pendapatan pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengelolaan pajak air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak air Tanah.

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2021 sebesar Rp3.031.638.820,00 (101,05%) dari anggarannya sebesar Rp3.000.000.000,00 terdiri dari 119 Wajib Pajak dari berbagai macam nama obyek pajak diantaranya beberapa perusahaan dan hotel. Turun sebesar Rp185.889.480,00 (5,78%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.217.528.300,00.

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dasar pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2021 sebesar Rp651.230.250,00 (10,85%) dari anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00, dan turun sebesar Rp2.767.801.750,00 (80,95%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.419.032.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pajak Batu Kapur, Pasir, dan Mineral Bukan Logam dan Lainnya, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.10 Anggaran dan Realisasi
 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Batu Kapur	1.000.000,00	1.119.250,00	111,93	1.177.000,00
b. Pajak Pasir dan Kerikil	5.999.000.000,00	650.111.000,00	10,84	3.417.855.000,00
Jumlah	6.000.000.000,00	651.230.250,00	10,85	3.419.032.000,00

Realisasi Pajak Pasir dan Kerikil mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan ada beberapa izin pertambangan yang tidak atau belum mengajukan perpanjangan izin sehingga potensi pajak berkurang. Jumlah Wajib Pajak Pasir dan Kerikil pada Tahun Anggaran 2021 sebanyak 70 Wajib Pajak.



9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pendapatan PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengelolaan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2021 sebesar Rp32.548.285.626,00 (110,33%) dari anggarannya sebesar Rp29.500.000.000,00, dan naik sebesar Rp760.223.982,00 (2,39%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp31.788.061.644,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBB-P2 TA 2021

Uraian	TA 2021	
	Realisasi (Rp)	Jumlah Wilayah
PBBP2		
Kelurahan	2.590.800.710,00	10
Desa	29.957.484.916,00	391
Jumlah	32.548.285.626,00	401

Pencapaian realisasi Pajak PBB-P2 TA 2021 lebih dari target yang telah ditetapkan disebabkan adanya pembayaran tunggakan.

10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pendapatan BPHTB merupakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengelolaan BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp33.411.945.472,00 (136,93%) dari anggarannya sebesar Rp24.400.000.000,00, dan naik sebesar Rp9.405.974.934,00 (39,18%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp24.005.970.538,00.

Sejak TA 2012 pemungutan BPHTB dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Klaten. Pengalihan tersebut didasarkan atas Berita Acara Serah Terima No. BA.-01/WPJ.32/KP.05/2011 tanggal 14 Januari 2012 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Realisasi pajak BPHTB tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 dikarenakan bertambahnya transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Klaten pada tahun 2021.

A.6.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dasar-dasar hukum terkait Retribusi terdapat pada Lampiran A. 1 Perda Retribusi. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis antara lain :

1. Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum yang merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Daerah



merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Tabel 6A.12 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	196.950.000,00	343.010.000,00	174,16	285.274.500,00
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	452.000.000,00	824.440.000,00	182,40	747.848.690,00
3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.785.000,00	42.970.000,00	742,78	3.530.000,00
4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	956.387.000,00	997.503.500,00	104,30	1.011.684.500,00
5 Retribusi Pelayanan Pasar	2.588.987.849,00	3.906.527.328,00	150,89	3.757.560.037,00
6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	953.804.000,00	761.172.310,00	79,80	820.223.200,00
7 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12.726.000,00	612.000,00	4,81	480.000,00
8 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.000.000,00	92.500.000,00	205,56	63.050.000,00
9 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	60.000.000,00	106.873.500,00	178,12	0,00
10 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	900.000.000,00	1.079.634.000,00	119,96	962.761.000,00
Jumlah	6.171.639.849,00	8.155.242.638,00	132,14	7.652.411.927,00

1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan merupakan retribusi atas segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditunjukkan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya. Dasar pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2021 sebesar Rp343.010.000,00 (174,16%) dari anggarannya sebesar Rp196.950.000,00, naik sebesar Rp57.735.500,00 (20,24%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp285.274.500,00. Realisasi mengalami kenaikan dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.

1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2021 sebesar Rp824.440.000,00 (182,40%) dari anggarannya sebesar Rp452.000.000,00, dan naik sebesar Rp76.591.310,00 (10,24%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp747.848.690,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengalami peningkatan disebabkan adanya intensifikasi petugas pemungut retribusi, serta adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah.



1.3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan retribusi atas penggunaan tanah makam milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu untuk keperluan pemakaman mayat dan pembakaran mayat dan/atau kerangka mayat. Dasar pengelolaan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat TA 2021 sebesar Rp42.970.000,00 (742,78%) dari anggaran sebesar Rp5.785.000,00 dan naik sebesar Rp39.440.000,00 (1117,28%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.530.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat mengalami kenaikan disebabkan karena meningkatnya aktifitas pemakaman di makam milik Pemerintah Daerah di Tegal Binangun.

1.4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan Pungutan Daerah atas Jasa Pemberian Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2021 adalah sebesar Rp997.503.500,00 (104,30%) dari anggaran sebesar Rp956.387.000,00 dan turun sebesar Rp14.181.000,00 (1,40%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.011.684.500,00. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mengalami penurunan karena adanya pemberlakuan jam operasional baru terkait Program Pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19 pada titik-titik objek pendapatan.

1.5 Retribusi Pelayanan Pasar

Pendapatan retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pelayanan pasar dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2021 sebesar Rp3.906.527.328,00 (150,89%) dari anggaran sebesar Rp2.588.987.849,00 dan naik sebesar Rp148.967.291,00 (3,96%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.757.560.037,00. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar mengalami kenaikan karena adanya optimalisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar.



1.6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan retribusi atas serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan. Dasar pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2021 adalah sebesar Rp761.172.310,00 (79,80%) dari anggaran sebesar Rp953.804.000,00 dan turun sebesar Rp59.050.890,00 (7,20%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp820.223.200,00. Realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan karena adanya penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian.

1.7 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pendapatan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran TA 2021 sebesar Rp612.000,00 (4,81%) dari anggaran sebesar Rp12.726.000,00 dan naik sebesar Rp132.000,00 (27,50%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp480.000,00.

Realisasi pendapatan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tidak mencapai target yang dianggarkan disebabkan karena belum optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran.

1.8 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus merupakan retribusi atas Pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah terhadap kakus yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pengelolaan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus TA 2021 sebesar Rp92.500.000,00 (205,56%) dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00 dan naik sebesar Rp29.450.000,00 (46,71%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp63.050.000,00. Realisasi pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus melampaui target anggaran dan terdapat peningkatan karena adanya penambahan armada.



1.9 Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA.2021 sebesar Rp106.873.500,00 dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00 (178,12%) sedangkan realisasi TA 2020 Sebesar Rp0,00

1.10 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pendapatan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi merupakan retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. Dasar pengelolaan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2021 sebesar Rp1.079.634.000,00 (119,96%) dari anggaran sebesar Rp900.000.000,00, dan naik sebesar Rp. 116.873.000,00 (12,14%) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp962.761.000,00.

Realisasi Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi melampaui target yang dianggarkan karena bertambahnya bangunan tower baru yang menjadi obyek retribusi sehingga potensi pendapatan juga bertambah.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Tabel 6A.13 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	952.749.000,00	937.184.895,00	98,37	1.053.304.579,00
2 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	2.093.012.151,00	2.047.346.415,00	97,82	690.720.006,00
3 Retribusi Terminal	47.985.000,00	50.472.000,00	105,18	58.207.000,00
4 Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00	7.800.000,00
5 Retribusi Rumah Potong Hewan	39.996.000,00	43.560.000,00	108,91	41.756.000,00
6 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	575.600.000,00	770.970.000,00	133,94	841.173.000,00
7 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	111.600.000,00	132.755.000,00	118,96	114.640.000,00
Jumlah	3.830.942.151,00	3.989.288.310,00	104,13	2.807.600.585,00

2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi atas setiap pelayanan penggunaan dan pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/ atau dikuasai Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dikelola oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Bagian Humas.



Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2021 sebesar Rp937.184.895,00 (98,37%) dari anggaran sebesar Rp952.749.000,00 dan turun sebesar Rp116.119.684,00 (11,02%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.053.304.579,00.

Realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah mengalami penurunan dikarenakan dampak dari pandemi Covid 19 yang terjadi di tahun 2021 diantaranya :

- a. Untuk realisasi penyewaan gedung RSPD dan sponsor mengalami penurunan karena masih adanya pandemi covid 19 sehingga banyak acara pernikahan maupun lainnya mengalami penundaan atau pembatalan.
- b. Untuk BPKD retribusi penyewaan tanah dan bangunan mengalami penurunan karena banyak bangunan yang tidak diperpanjang masa kontraknya dan ada objek retribusi yang dialihkan pengelolaannya ke Disparbudpora.

2.2 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

Pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan merupakan retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Realisasi penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2021 adalah sebesar Rp2.047.346.415,00 (97,82%) dari anggaran sebesar Rp2.093.012.151,00 dan naik sebesar Rp1.356.626.409,00 (196,41%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp690.720.006,00.

Realisasi pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan mengalami kenaikan dikarenakan kondisi perekonomian di tahun 2021 sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020.

2.3 Retribusi Terminal

Pendapatan retribusi terminal merupakan retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi terminal dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Terminal TA 2021 adalah sebesar Rp50.472.000,00 (105,18%) dari anggaran sebesar Rp47.985.000,00 dan turun sebesar Rp7.735.000,00 (13,29%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp58.207.000,00.

Realisasi pendapatan retribusi terminal melampaui target yang dianggarkan dan mengalami penurunan dikarenakan mobilitas yang menggunakan kendaraan umum menurun karena adanya pembatasan mobilisasi antar daerah ditingkat masyarakat.

2.4 Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pendapatan retribusi tempat khusus parkir merupakan retribusi atas pelayanan tempat yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi tempat khusus parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2



Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi tempat khusus parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2021 sebesar Rp7.000.000,00 (70%) dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan turun sebesar Rp800.000,00 (10,26%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp7.800.000,00.

Realisasi untuk tahun 2021 mengalami penurunan karena mobilitas masyarakat yang menurun.

2.5 Retribusi Rumah Potong Hewan

Pendapatan retribusi rumah potong hewan merupakan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi rumah potong hewan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi rumah potong hewan dikelola oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Terdapat dua Rumah Potong Hewan di Kabupaten Klaten yang masih beroperasi di Tahun 2021 yaitu Rumah Potong Hewan Pedan dan Rumah Potong Hewan Kota Klaten.

Realisasi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2021 sebesar Rp43.560.000,00 (108,91%) dari anggaran sebesar Rp39.996.000,00 dan naik sebesar Rp1.804.000,00 (4,32%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp41.756.000,00.

2.6 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga merupakan retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan Retribusi Tempat Pariwisata TA 2021 sebesar Rp770.970.000,00 (133,94%) dari anggaran sebesar Rp575.600.000,00 dan turun sebesar Rp70.203.000,00 (8,35%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp841.173.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.14 Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Obyek Wisata Mata Air Cokro	350.000.000,00	464.890.000,00	132,83	265.788.000,00
Obyek Wisata Makam Pandanaran	65.600.000,00	96.200.000,00	146,65	100.600.000,00
Obyek Wisata Jombor Permai-Sidoguro	100.000.000,00	139.920.000,00	139,92	423.235.000,00
Obyek Wisata Pemandian Jolotundo	50.000.000,00	63.095.000,00	126,19	45.765.000,00
Obyek Wisata Lain-Lain	10.000.000,00	6.865.000,00	68,65	5.785.000,00
Jumlah	575.600.000,00	770.970.000,00	133,94	841.173.000,00

Realisasi retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan karena penutupan objek wisata terkait dengan adanya kebijakan PPKM darurat dari Pemerintah.



2.7 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah. Dasar pengelolaan retribusi penjualan produksi usaha daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi penjualan produksi usaha daerah dikelola oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Realisasi penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp132.755.000,00 (118,96%) dari anggaran sebesar Rp111.600.000,00 dan naik sebesar Rp18.115.000,00 (15,80%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp114.640.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.15 Anggaran dan Realisasi
 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Usaha Benih Tanaman	54.000.000,00	75.132.500,00	139,13	72.000.000,00
Retribusi Usaha Benih Ikan	57.600.000,00	57.622.500,00	100,04	42.640.000,00
Jumlah	111.600.000,00	132.755.000,00	118,96	114.640.000,00

Realisasi pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah mengalami peningkatan karena adanya produksi benih varietas baru yaitu Rojo Lele Srinuk dan Rojo Lele Sinar yang harga jual benihnya lebih tinggi dibanding dengan varietas padi inpari lainnya.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pemberian izin dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan. Retribusi Perizinan Tertentu dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel 6A.16 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	1.874.681.912,00	93,73	3.836.808.371,00
2 Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	-	15.000,00
3 Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	350.000.000,00	386.135.800,00	110,32	463.785.600,00
Jumlah	2.350.000.000,00	2.260.817.712,00	96,21	4.300.608.971,00

Realisasi masing-masing objek Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2021 dan 2020 sesuai dengan rincian objeknya, diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pendapatan retribusi IMB merupakan retribusi atas jasa pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Dasar pengelolaan retribusi IMB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu. Retribusi IMB dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Realisasi penerimaan Retribusi IMB TA 2021 adalah sebesar Rp1.874.681.912,00 (93,73%) dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dan turun sebesar Rp1.962.126.459,00 (51,14%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.836.808.371,00.



Realisasi pendapatan retribusi IMB pada tahun 2021 tidak melampaui target yang dianggarkan dan mengalami penurunan dikarenakan tidak optimalnya sosialisasi perizinan yang dilaksanakan. Retribusi IMB pada tahun 2021 hanya diberlakukan mulai Bulan Januari sampai dengan bulan September sedangkan mulai Bulan Oktober sampai Bulan Desember tidak dikenakan tarif Retribusi IMB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pemerintah menghapuskan izin mendirikan bangunan. Sebagai gantinya pemerintah menetapkan ketentuan baru yang dinamakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketentuan lebih lanjut tentang PBG diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan Gedung (PP 16/2021) yang merupakan salah satu aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru.

2. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Pendapatan retribusi izin trayek merupakan retribusi atas Izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Dasar pengelolaan retribusi izin trayek berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu. Retribusi izin trayek dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Untuk Retribusi Izin Trayek pada TA 2021 sudah tidak dianggarkan lagi karena sudah tidak ada lagi yang memperpanjang izin trayek sedangkan realisasi TA 2020 sebesar Rp15.000,00.

3. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pendapatan retribusi perpanjangan IMTA merupakan pungutan sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Dasar pengelolaan retribusi perpanjangan IMTA berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Retribusi perpanjangan IMTA dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Realisasi penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA TA 2021 adalah sebesar Rp386.135.800,00 (110,32%) dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan turun sebesar Rp77.649.800,00 (16,74%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp463.785.600,00. Retribusi perpanjangan IMTA Tahun anggaran 2021 terdiri dari 11 Wajib Pajak.

Realisasi pendapatan retribusi perpanjangan IMTA 2021 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya disebabkan karena adanya pembatasan ijin masuk warga negara asing.

A.6.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meliputi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Merapi, PT BPR Bank Klaten (Perseroda), PT BPR BKK Tulung (Perseroda), PT Aneka Usaha (Perseroda), PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) dan Bank Jateng. Hak Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berkenaan ditetapkan berdasarkan laba bersih tahun buku sebelumnya setelah taksiran pajak penghasilan badan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), perjanjian kerjasama/MoU, dan peraturan terkait lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp16.409.075.267,00 (126,47%) dari anggarannya sebesar Rp12.974.459.182,00, dan



turun sebesar Rp1.168.589.232,00 (6,65%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp17.577.664.499,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.17 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusda TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 PDAM Tirta Merapi	2.625.364.800,00	2.625.364.782,00	100,00	3.106.587.201,00
2 Bank Klaten	3.027.933.300,00	3.027.933.300,00	100,00	3.668.325.155,00
4 Bank Jateng	7.000.000.000,00	10.434.543.903,00	149,06	10.429.563.919,00
5 Aneka Usaha	321.161.082,00	321.233.282,00	100,02	370.635.990,00
6 PT. PRPP	0,00	0,00	0,00	2.552.234,00
Jumlah	12.974.459.182,00	16.409.075.267,00	126,47	17.577.664.499,00

Penurunan realisasi penerimaan Bagian Laba Perusda TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten, Pasal 41 ayat (1) ditetapkan laba bersih PDAM Tirta Merapi untuk dana pembangunan daerah sebesar 30% dan untuk anggaran belanja daerah sebesar 25%. Dengan demikian bagian laba PDAM Tirta Merapi yang menjadi hak Pemerintah Daerah adalah sebesar 55% (30% + 25%) dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan atau sebesar Rp3.572.062.127,00.
2. Berdasarkan Akta Notaris No. 30 Tanggal 29 Januari Tahun 2020 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten Pasal 24 ayat (1) ditetapkan bagian laba untuk Daerah/Deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen). Dengan demikian bagian laba PT BPR Bank Klaten yang menjadi hak pemda adalah sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp3.369.181.220,00.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Jateng melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang pada tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2022. Realisasi deviden PT Bank Jateng Tahun 2021 sebesar Rp10.434.543.903,00. Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tanggal 28 Januari 2022 yang tertuang dalam akta Nomor 21 tanggal 28 Januari 2022 Kabupaten Klaten memperoleh deviden sebesar Rp.11.341.811.839,00.
4. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2020 pasal 20 ayat (1) ditetapkan Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen). Dengan demikian bagian laba dari PT. Aneka Usaha yang menjadi hak Pemkab Klaten ditetapkan sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.336.312.824,00.
5. Berdasarkan Laporan Keuangan PT. PRPP tahun 2021 tidak ada penyetoran bagian laba ke Pemerintah Kabupaten Klaten.

A.6.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah.

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 adalah sebesar Rp157.817.354.764,00 (114,87%) dari anggarannya sebesar Rp137.388.299.733,00 dan turun sebesar Rp23.675.084.883,00



(13,04%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp181.492.439.647,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut. Adapun rincian realisasi masing-masing objek Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 dan 2020 sesuai dengan rincian objeknya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6A.18 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	39.200.000,00	392,00	30.100.000,00
2 Hasil Penjualan Aset Lainnya	120.000.000,00	523.763.000,00	436,47	506.976.709,00
3 Hasil dari Bangunan Guna Serah	150.000.000,00	174.987.892,00	116,66	212.948.466,00
4 Hasil Kerjasama Daerah	0,00	53.762.759,00	0,00	0,00
5 Jasa Giro	12.000.000.000,00	11.400.351.701,00	95,00	17.954.945.150,00
6 Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00	6.616.438.346,00
7 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	2.500.003,00	0,00	27.318.184,00
8 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	545.040.946,00	0,00	43.340.624,00
9 Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	205.338.178,00	0,00	580.183.128,00
10 Pendapatan dari Pengembalian	0,00	10.129.629.012,00	0,00	162.720.546,00
11 Pendapatan BLUD	125.108.299.733,00	134.742.781.273,00	107,70	140.783.482.400,00
12 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.573.986.094,00
Jumlah	137.388.299.733,00	157.817.354.764,00	114,87	181.492.439.647,00

1. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya

Realisasi Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp39.200.000,00 (392%) dari Anggaran sebesar Rp10.000.000,00 naik sebesar Rp9.100.000,00 (30,23%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp30.100.000,00. Realisasi atas Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya berupa hasil Penjualan Penebangan Pohon Turus Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Hasil Penjualan Aset Lainnya

Pendapatan hasil penjualan aset lainnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pendapatan hasil penjualan aset lainnya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Realisasi Hasil Penjualan Aset Lainnya TA 2021 sebesar Rp523.763.000,00 (436,47%) dari Anggaran sebesar Rp120.000.000,00 naik sebesar Rp16.786.291,00 (3,31%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp506.976.709,00.

Realisasi atas hasil Penjualan Aset Lainnya terdiri dari hasil Penjualan Bongkaran yang sudah diperhitungkan nilainya atas nilai aset yang baru sebesar Rp520.488.000,00 yang terdiri dari Penjualan Bongkaran, Gedung Pasar Gede, Jembatan Kepurun I&II, Pintu Air SDA, Kantor BPBD, Bangunan Tempat Ibadah Permanent Bagian Umum Setda, Kantor Kecamatan Cawas dan Penjualan Drum Bekas sebesar RP3.275.000,00.

3. Hasil Dari Bangunan Guna Serah

Realisasi Hasil Dari Bangunan Guna Serah TA 2021 sebesar Rp174.987.892,00 (116,66%) dari anggaran sebesar Rp 150.000.000,00. Dan turun sebesar Rp 37.960.574,00 (17,83%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp212.948.466,00.

Realisasi dari Hasil Bangunan Guna Serah merupakan Pendapatan atas Sewa Rusunawa.

4. Hasil Kerja Sama Daerah

Pada TA 2021 terdapat realisasi Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp53.762.759,00 meskipun tidak dianggarkan di TA 2021.



Realisasi dari Hasil Kerjasama Daerah merupakan Pendapatan atas Pendapatan Lain-Lain paket Wisata Candi Plaosan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Nomor 14030/H.H1/KB/2019 dan Nomor 02/PKS/Tahun 2019. Sedangkan untuk Candi Sojiwan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Nomor 14029/H.H1/KB/2019 dan Nomor 03/PKS/Tahun 2019.

5. Jasa Giro

Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemilik rekening giro atau giran karena saldo gironya yang mengendap di bank. Dasar pengelolaan pendapatan jasa giro berdasarkan Counter Rate suku bunga giro yang diberikan oleh pihak Bank untuk Giro Pemerintah Daerah. Pendapatan jasa giro dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2021 sebesar Rp11.400.351.701,00 (95,00%) dari anggarannya sebesar Rp12.000.000.000,00, dan turun sebesar Rp6.543.093.446,00, (36,44%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp17.954.945.150,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.19 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Jasa Giro Pada Kasda	12.000.000.000,00	11.100.202.631,00	92,50	13.396.622.373,00
b) Jasa Giro Pada Kas di Bendahara	0,00	300.149.070,00	0,00	818.747.588,00
Jumlah	12.000.000.000,00	11.400.351.701,00	95,00	14.215.369.961,00

6. Pendapatan Lain Lain-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pendapatan Dana Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2021 tidak dianggarkan dan terdapat realisasi sebesar Rp2.500.003,00 dan realisasi TA 2020 sebesar Rp27.318.184,00.

Realisasi dari PAD yang Sah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2021 merupakan Setoran Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) an. MS.

7. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada penyedia jasa yang dalam melakukan pekerjaan mengalami keterlambatan, sehingga dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan kontrak masing-masing.

Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2021 sebesar Rp545.040.946,00, dan naik sebesar Rp501.700.322,00 (1157,58%) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp43.340.624,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Bidang Pendidikan	0,00	6.555.000,00	0,00	0,00
2 Bidang Kesehatan	0,00	557.669,00	0,00	4.790.524,00
3 Bidang Pekerjaan Umum	0,00	66.044.077,00	0,00	21.036.100,00
4 Bidang Perumahan Rakyat	0,00	471.884.200,00	0,00	17.514.000,00
5 Bidang Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	545.040.946,00	0,00	43.340.624,00

Realisasi pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan penyedia jasa yang terlambat



menyelesaikan pekerjaannya bertambah dan terjadinya wanprestasi pada beberapa proyek pekerjaan di TA 2021.

8. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan denda pajak merupakan denda yang dikenakan karena sampai dengan jatuh tempo SKP wajib pajak belum melunasi pembayaran. Dasar pengelolaan pendapatan denda pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Pendapatan denda pajak dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi Pendapatan Denda Pajak TA 2021 sebesar Rp205.338.178,00, dan turun sebesar Rp374.844.950,00 (64,61%) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp580.183.128,00. Dikarenakan adanya Pembebasan Denda dan Penghapusan Denda Pajak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 971.1/207 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak 2009-2021 di Kabupaten Klaten.

9. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian merupakan Realisasi Pendapatan Lain-Lain yang di Tahun 2021 tidak ada Rekening Pendapatannya. Pendapatan dari pengembalian dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2021 sebesar Rp10.129.629.012,00, dan naik sebesar Rp9.966.908.466,00 (6125,17%) dari TA 2020 sebesar Rp162.720.546,00.

10. Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2021 sebesar Rp134.742.781.273,00 (107,70%) dari anggarannya sebesar Rp125.108.299.733,00 dan turun sebesar Rp6.040.701.127,00 (4,29%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp140.783.482.400,00. Realisasi tersebut meliputi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD, Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD, dan Pendapatan Lain-lain BLUD, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Pendapatan BLUD	125.108.299.733,00	134.742.781.273,00	107,70	0,00
b Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	0,00	0,00	139.838.384.322,00
c Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	0,00	0,00	0,00	81.500.000,00
d Pendapatan Lain-lain BLUD	0,00	0,00	0,00	863.598.078,00
Jumlah	125.108.299.733,00	134.742.781.273,00	107,70	140.783.482.400,00

Realisasi Pendapatan BLUD terdapat pada RSUD Bagas Waras dan 34 Puskesmas dengan status BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Realisasi Pendapatan BLUD mengalami penurunan dikarenakan terjadi pengurangan peserta BPJS sehingga pendapatan atas Jasa Layanan Umum BLUD berupa kapitasi mengalami penurunan. Tingkat kunjungan pasien juga berkurang karena masa pandemi dan PPKM baik rawat inap maupun rawat jalan. Ditahun sebelumnya terdapat pendapatan dari uji rapid kepada petugas Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara sedangkan tahun 2021 pendapatan ini tidak ada.



Dari pendapatan BLUD sebesar Rp134.742.781.273,00 terdiri dari Pendapatan jasa Layanan Umum sebesar Rp133.388.245.371,00, dari Pendapatan Kerjasama sebesar Rp92.080.000,00 dan dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah sebesar Rp1.262.455.902,00.

11. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

Pada TA 2021 tidak terdapat anggaran maupun realisasi lain-lain PAD yang sah lainnya karena pada TA 2021 masuk ke Pendapatan Hibah, sedangkan pada TA 2020 sebesar Rp14.573.986.094,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.22 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Sumbangan Pihak III PT. Tirta Investama	0,00	0,00	0,00	13.000.000.000,00
b Sumbangan Pihak III PTPN X	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
c Penerimaan Lainnya yang tidak dianggarkan	0,00	0,00	0,00	1.498.986.094,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	14.573.986.094,00

Sumbangan pihak ke tiga ini di TA 2021 masuk ke dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah pada jenis pendapatan hibah pada obyek sumbangan pihak ke tiga atau sejenis.

A.6.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp2.131.117.520.091,00 atau 100,03% dari anggaran sebesar Rp2.130.432.992.470,00 dan naik sebesar Rp378.962.286.135,00 atau 21,63% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.752.155.233.956,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021

Pendapatan Transfer	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.919.548.317.470,00	1.923.414.170.983,00	100,20	1.573.561.257.076,00
b Pendapatan Transfer Antar Daerah	210.884.675.000,00	207.703.349.108,00	98,49	178.593.976.880,00
Jumlah	2.130.432.992.470,00	2.131.117.520.091,00	100,03	1.752.155.233.956,00

Adapun rincian dan penjelasan realisasi masing-masing objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 dan 2020 sesuai dengan rincian objeknya, dapat diuraikan sebagai berikut.

A.6.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 sebesar Rp1.923.414.170.983,00 atau 100,20% dari anggaran sebesar Rp1.919.548.317.470,00 dan naik sebesar Rp349.852.913.907,00 atau 22,23 % dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.573.561.257.076,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 6A.24 Anggaran dan Realisasi
 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Dana Perimbangan	1.527.971.822.470,00	1.531.837.675.983,00	100,25	1.516.494.102.076,00
2 Dana Insentif Daerah (DID)	10.729.894.000,00	10.729.894.000,00	100,00	57.067.155.000,00
3 Dana Desa	380.846.601.000,00	380.846.601.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.919.548.317.470,00	1.923.414.170.983,00	100,20	1.573.561.257.076,00



Pada Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Dana Desa ada pada rekening Pendapatan Transfer Lainnya.

A.6.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan TA 2021 sebesar Rp1.531.837.675.983,00 atau 100,25% dari anggaran sebesar Rp1.527.971.822.470,00 dan naik sebesar Rp15.343.573.907,00 atau 1,01 % dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.516.494.102.076,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.25 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	38.345.857.000,00	51.087.942.633,00	133,23	41.978.389.803,00
2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.149.421.184.000,00	1.149.421.184.000,00	100,00	1.167.212.792.000,00
3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.287.830.000,00	60.725.376.316,00	87,64	31.595.623.254,00
4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	270.916.951.470,00	270.603.173.034,00	99,88	275.707.297.019,00
Jumlah	1.527.971.822.470,00	1.531.837.675.983,00	100,25	1.516.494.102.076,00

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021 sebesar Rp51.087.942.633,00 atau 133,23% dari anggaran sebesar Rp38.345.857.000,00 dan naik sebesar Rp9.109.552.830,00 atau 21,7 % dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp41.978.389.803,00.

Atas kurang bayar Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) diatur lebih lanjut dengan PMK Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021.

Tabel 6A.26 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.085.639.000,00	8.325.153.464,00	163,70	4.959.825.386,00
2 DBH PPh Pasal 21	17.134.276.000,00	20.115.200.378,00	117,40	0,00
3 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	3.722.456.600,00	0,00	21.341.972.372,00
4 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	14.620.464.000,00	16.806.947.344,00	114,95	13.895.448.837,00
5 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	70.404.000,00	12.048.900,00	17,11	56.090.685,00
6 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	60.022.500,00	0,00	711.359.243,00
7 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	53.648.000,00	108.913.482,00	203,01	38.123.288,00
8 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	1.204.491,00	0,00	0,00
9 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.863.000,00	1.271.925,00	68,27	511.153,00
10 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	251.244.000,00	577.104.399,00	229,70	186.782.550,00
11 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.357.619.150,00	120,32	788.276.289,00
Jumlah	38.345.857.000,00	51.087.942.633,00	133,23	41.978.389.803,00

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah yang dialokasikan kepada daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. Dasar pengelolaan pendapatan DAU berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Pendapatan DAU dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 sebesar Rp1.149.421.184.000,00 atau 100% dari anggarannya Rp1.149.421.184.000,00, dan turun sebesar Rp17.791.608.000,00 atau 1,52% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.167.212.792.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:



**Tabel 6A.27 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Dana
 Alokasi Umum TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAU	1.137.278.796.000,00	1.149.421.184.000,00	101,07	1.167.212.792.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.660.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	8.482.388.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.149.421.184.000,00	1.149.421.184.000,00	100,00	1.167.212.792.000,00

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA

Pendapatan DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dasar pengelolaan pendapatan DAK Fisik berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Pendapatan DAK Fisik dikelola oleh SKPD penerima.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA TA 2021 sebesar Rp60.725.376.316,00 atau 87,64% dari anggaran Rp69.287.830.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.28 Anggaran dan Realisasi Penerimaan DAK Fisik TA 2021

No	Jenis DAK	Anggaran	Realisasi	%
1	DAK Reguler	35.562.025.000	29.236.180.843	82,21
	Bidang Pendidikan	13.035.526.000	12.526.824.950	96,10
	Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	11.632.228.000	6.632.941.393	57,02
	Bidang Jalan	10.894.271.000	10.076.414.500	92,49
2	DAK Penugasan	33.725.805.000	31.489.195.473	93,37
	Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	6.588.658.000	5.776.279.026	87,67
	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.851.000.000	2.610.744.000	91,57
	Bidang Irigasi	1.865.417.000	1.751.257.000	93,88
	Bidang Pertanian	8.170.000.000	7.932.882.010	97,10
	Bidang Kelautan dan Perikanan	700.400.000	633.401.000	90,43
	Bidang Industri Kecil dan Menengah	1.373.333.000	1.213.036.000	88,33
	Bidang Air Minum	2.489.125.000	1.965.322.000	78,96
	Bidang Sanitasi	5.127.139.000	5.100.897.437	99,49
	Bidang Perumahan dan Permukiman	2.809.017.000	2.809.017.000	100,00
	Bidang Pariwisata	1.751.716.000	1.696.360.000	96,84
	TOTAL	69.287.830.000	60.725.376.316	87,64

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pendapatan DAK Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. Dasar pengelolaan pendapatan DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Pendapatan DAK Non Fisik dikelola oleh SKPD penerima.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik TA 2021 sebesar Rp270.603.173.034,00 atau 99,88% dari anggaran Rp270.916.951.470,00 dan turun sebesar Rp5.104.123.985,00 atau 1,85% dibanding realisasi DAK – Non Fisik TA 2020 sebesar Rp275.707.297.019,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 6A.29 Anggaran dan Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 DAK Non Fisik-TPG PNSD	217.369.395.000,00	217.369.395.000,00	100,00	206.036.791.000,00
2 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	993.000.000,00	993.000.000,00	100,00	1.485.700.000,00
3 DAK Non Fisik-BOP PAUD	18.332.520.590,00	18.322.320.590,00	99,94	18.267.831.365,00
4 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.184.600.000,00	1.184.600.000,00	100,00	1.072.626.850,00
5 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17.780.477.015,00	23.014.806.748,00	129,44	38.843.785.860,00
6 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	1.262.283.000,00	0,00	0,00	0,00
7 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	2.394.215.000,00	0,00	0,00	0,00
8 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	2.338.452.000,00	0,00	0,00	0,00
9 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.831.308.273,00	5.531.850.104,00	94,86	0,00
10 DAK Non Fisik-PK2UKM	762.766.000,00	390.304.000,00	51,17	0,00
11 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.808.148.192,00	1.808.148.192,00	100,00	3.877.632.824,00
12 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	859.786.400,00	859.786.400,00	100,00	289.061.700,00
13 DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	0,00	372.462.000,00	0,00	0,00
14 DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	5.833.867.420,00
15 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	756.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	270.916.951.470,00	270.603.173.034,00	99,88	275.707.297.019,00

A.6.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) TA 2021 sebesar Rp10.729.894.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp10.729.894.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Bidang Kesehatan – Digitalisasi, Bidang Kesehatan - Umum dan Bidang Penguatan Ekonomi sebagaimana disajikan terinci pada Tabel berikut:

Tabel 6A.30 Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2021

Uraian	TA 2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BIDANG KESEHATAN - DIGITALISASI	5.529.894.000,00	5.529.894.000,00	100,00
1. Pengadaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.529.894.000,00	5.529.894.000,00	100,00
BIDANG KESEHATAN - UMUM	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	100,00
1. Pengadaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	100,00
BIDANG PENGUATAN EKONOMI	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
1. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
2. Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
3. Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
Jumlah	10.729.894.000,00	10.729.894.000,00	100,00

A.6.1.2.1.3 Dana Desa

Realisasi Dana Desa TA 2021 sebesar Rp380.846.601.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp380.846.601.000,00 pada rekening Dana Desa. Sedangkan di TA 2020 realisasinya ada pada rekening lain lain pendapatan yang sah pada rincian pendapatan Lainnya Pendapatan Dana Desa sebesar Rp380.846.600.500,00. Rincian Dana Desa TA 2021 per desa sebagaimana disajikan pada lampiran A.2 Rincian anggaran dan realisasi Dana Desa.

A.6.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Transfer Antar Daerah TA 2021 sebesar Rp207.703.349.108,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp210.884.675.000,00, sedangkan di TA 2020 realisasinya sebesar Rp178.593.976.880,00

Tabel 6A.31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2021

Pendapatan Transfer Antar Daerah	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	193.321.675.000,00	206.950.349.108,00	107,05	163.789.663.880,00
2 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	17.563.000.000,00	753.000.000,00	4,29	14.804.313.000,00
Jumlah	210.884.675.000,00	207.703.349.108,00	98,49	178.593.976.880,00

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi lebih kecil dari anggarannya dikarenakan terdapat kendala dalam proses administrasi atas verifikasi RKO



pada aplikasi SIMBANKEU sehingga proses pengajuan Rencana Kerja Operasional (RKO) tidak bisa dilakukan. Hal ini mengakibatkan bantuan transfer tidak terealisasi 100%.

A.6.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil pajak merupakan Bagi Hasil Pajak dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Realisasi pendapatan bagi hasil pajak meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Jawa Tengah Nomor 970/007 Tahun 2021 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi TA 2021 sebesar Rp206.950.349.108,00 atau 107,05% dari anggaran sebesar Rp193.321.675.000,00, dan naik sebesar Rp43.160.685.228,00 atau 26,35% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp163.789.663.880,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.32 Anggaran dan Realisasi
Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi TA 2021**

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	PKB	56.979.340.000,00	60.148.813.461,00	105,56	44.059.970.189,00
2	BBNKB	34.116.477.000,00	32.194.666.710,00	94,37	21.969.308.458,00
3	PBBKB	48.982.594.000,00	55.959.505.835,00	114,24	37.387.503.844,00
4	PPPAP	270.862.000,00	317.502.872,00	117,22	245.970.114,00
5	P Rokok	52.972.402.000,00	58.329.860.230,00	110,11	60.126.911.275,00
	Jumlah	193.321.675.000,00	206.950.349.108,00	107,05	163.789.663.880,00

Dari realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi TA 2021 sebesar Rp206.950.349.108,00 terdapat kurang bayar atas Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 yang telah dibayarkan di Tahun 2021 sebesar Rp21.805.978.475,00 dan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp185.144.370.633,00. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 25/BA-RKN/KAB-KOTA/1/2022 masih terdapat kurang bayar sebesar Rp2.776.175.889,00.

A.6.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dasar pengelolaan pendapatan bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan bantuan keuangan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2021 menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp17.563.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp753.000.000,00 (4,29%) atau turun sebesar Rp14.051.313.000,00 (94,91%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp14.804.313.000,00,

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi lebih kecil dari anggarannya dikarenakan terdapat kendala dalam proses administrasi atas verifikasi RKO pada aplikasi SIMBANKEU sehingga proses pengajuan Rencana Kerja Operasional (RKO) tidak bisa dilakukan. Hal ini mengakibatkan bantuan transfer tidak terealisasi 100%.



A.6.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 sebesar Rp123.616.247.500,00 (99,58%) dari anggaran sebesar Rp124.136.300.000,00 dan turun sebesar Rp372.401.093.000,00 (75,08%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp496.017.340.500,00. Sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.33 Anggaran dan Realisasi
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Hibah	14.540.000.000,00	15.627.000.000,00	107,48	115.170.740.000,00
2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	109.596.300.000,00	107.989.247.500,00	98,53	380.846.600.500,00
Jumlah	124.136.300.000,00	123.616.247.500,00	99,58	496.017.340.500,00

Adapun rincian dan penjelasan realisasi masing-masing objek Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 dan 2020 sesuai dengan rincian objeknya, dapat diuraikan sebagai berikut:

A.6.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan setiap penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan pendapatan hibah berdasarkan Peraturan/Perjanjian antara pemberi hibah dengan Pemerintah Daerah/SKPD penerima hibah. Pendapatan bantuan hibah dikelola oleh masing-masing SKPD penerima hibah.

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2021 adalah sebesar Rp15.627.000.000,00 atau (107,48%) dari anggaran sebesar Rp14.540.000.000,00, turun sebesar Rp99.543.740.000,00 (86,43%) dibandingkan TA 2020 sebesar Rp115.170.740.000,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.34 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	1.500.000.000,00	2.652.000.000,00	176,80	0,00
2 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya	13.040.000.000,00	12.975.000.000,00	99,50	0,00
3 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	0,00	0,00	0,00	114.867.760.000,00
4 Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	302.980.000,00
Jumlah	14.540.000.000,00	15.627.000.000,00	107,48	115.170.740.000,00

Pendapatan Hibah diakui pada saat kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pendapatan di ukur dan di catat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan dan pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa uang yang peruntukannya di Tahun 2021 di PDAM Tirta Merapi yang merupakan Pendapatan Hibah Air Minum Perkotaan dan



Pedesaan Tahun Anggaran 2021. Sedangkan unuk Sumbangan Pihak Ketiga berupa sumbangan uang dari PT. Tirta Investama dan PT. Sari Husada.

A.6.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan TA 2021 adalah sebesar Rp107.989.285.000,00 atau 98,53% dari anggaran sebesar Rp109.596.300.000,00, dan turun sebesar Rp272.857.315.500,00 atau (71,64%) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp380.846.600.500,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.35 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan TA 2021

Lain- lain Pendapatan	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Lain-lain Pendapatan	109.596.300.000,00	107.989.285.000,00	98,53	0,00
2 Pendapatan Dana Desa	0,00	0,00	0,00	380.846.600.500,00
Jumlah	109.596.300.000,00	107.989.285.000,00	98,53	380.846.600.500,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Tahun 2021 merupakan Pendapatan atas Dana BOS yang pada Tahun Anggaran 2020 tercatat di Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pada Pendapatan Hibah Dana BOS.

A.6.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp1.820.638.422.785,00 (80,06%) dari anggaran sebesar Rp2.274.081.162.010,28 dan naik sebesar Rp295.523.501,00 (0,02%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.820.342.899.284,00 sebagaimana dapat dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Operasi (BO)	1.962.849.239.087,28	1.612.412.988.846,00	82,15	1.572.625.425.629,00
2. Belanja Modal (BM)	238.674.307.650,00	189.606.772.936,00	79,44	157.126.719.574,00
3. Belanja Tak Terduga (BTT)	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	25,66	90.590.754.081,00
Jumlah	2.274.081.162.010,28	1.820.638.422.785,00	80,06	1.820.342.899.284,00

Belanja Daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang kemudian diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek. Sedangkan penyajiannya dalam LRA diklasifikasikan menurut belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer yang merupakan gabungan dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, sebagaimana dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

A.6.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2021 adalah sebesar Rp1.612.412.988.846,00 atau 82,15% dari anggaran sebesar Rp1.962.849.239.087,00 dan naik sebesar Rp39.787.563.217,00 (2,53%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.572.625.425.629,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Pegawai	1.197.490.511.452,00	1.006.278.863.371,00	84,03	1.046.020.322.799,00
2. Belanja Barang dan Jasa	721.795.055.287,28	570.241.936.649,00	79,00	423.557.260.173,00
3. Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	1.940.554.067,00	64,69	1.988.515.348,00
4. Belanja Hibah	32.611.021.500,00	28.410.769.759,00	87,12	97.547.602.309,00
5. Belanja Bantuan Sosial	7.952.650.848,00	5.540.865.000,00	69,67	3.511.725.000,00
Jumlah	1.962.849.239.087,28	1.612.412.988.846,00	82,15	1.572.625.425.629,00



A.6.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 adalah sebesar Rp1.006.278.863.371,00 atau 84,03% dari anggaran sebesar Rp1.197.490.511.452,00, dan turun sebesar Rp39.741.459.428,00 (3,8%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.046.020.322.799,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	773.645.128.530,00	624.193.567.521,00	80,68	651.364.907.613,00
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS	129.369.915.047,00	110.271.699.588,00	85,24	39.169.607.672,00
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	228.492.185.230,00	211.155.495.899,00	92,41	303.536.956.636,00
4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.518.759.000,00	27.767.340.110,00	94,07	21.254.610.400,00
5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.252.979.638,00	1.001.606.100,00	79,94	0,00
6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.120.000,00	100,00	993.120.000,00
7. Belanja Pegawai BLUD	34.218.424.007,00	30.896.034.153,00	90,29	9.524.212.078,00
8. Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	20.176.908.400,00
Jumlah	1.197.490.511.452,00	1.006.278.863.371,00	84,03	1.046.020.322.799,00

Rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Pegawai OPD TA 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2021 adalah sebesar Rp624.193.567.521,00 atau 80,68% dari anggaran sebesar Rp773.645.128.530,00, dan turun sebesar Rp27.171.340.092,00 (4,17%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp651.364.907.613,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	569.922.480.400,00	474.163.824.956,00	83,20	500.841.948.959,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.334.159.000,00	3.193.966.683,00	95,80	-
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	48.503.307.720,00	40.557.056.482,00	83,62	43.169.984.141,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	357.147.000,00	349.494.366,00	97,86	-
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.445.438.000,00	5.987.848.000,00	92,90	7.860.606.000,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	37.357.797.000,00	30.713.984.000,00	82,22	34.137.407.000,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	305.248.000,00	-	0,00	-
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	11.194.654.000,00	8.062.765.500,00	72,02	6.913.672.000,00
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	103.030.000,00	-	0,00	-
10	Belanja Tunjangan Beras PNS	29.187.205.160,00	23.850.259.650,00	81,71	21.206.531.340,00
11	Belanja Tunjangan Beras PPPK	278.488.000,00	272.154.360,00	97,73	-
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.853.745.400,00	1.915.304.893,00	39,46	2.821.041.969,00
13	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	12.289.000,00	-	0,00	-
14	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.106.528,00	6.440.162,00	53,20	6.304.719,00
15	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	147.000,00	29.412,00	20,01	-
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	55.788.733.019,00	31.066.822.101,00	55,69	30.285.123.070,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	313.901.752,00	143.992.663,00	45,87	-
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.121.860.075,00	969.666.829,00	86,43	4.122.288.415,00
19	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	6.634.000,00	6.486.150,00	97,77	-
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.370.427.226,00	2.914.012.864,00	86,46	-
21	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	19.900.000,00	19.458.450,00	97,78	-
22	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.156.430.250,00	-	0,00	-
	Jumlah	773.645.128.530,00	624.193.567.521,00	80,68	651.364.907.613,00

2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS TA 2021 adalah sebesar



Rp110.271.699.588,00 atau 85,24% dari anggarannya sebesar Rp129.369.915.047,00 dan naik sebesar Rp71.102.091.916,00 (181,52%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp39.169.607.672,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan
 Penghasilan PNS TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	49.195.457.837,00	43.312.603.192,00	88,04	39.091.907.672,00
2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.935.146.484,00	1.664.658.139,94	86,02	0,00
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.024.629.770,00	1.741.780.402,00	86,03	77.700.000,00
4 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	76.214.680.956,00	63.552.657.854,06	83,39	0,00
Jumlah	129.369.915.047,00	110.271.699.588,00	85,24	39.169.607.672,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN TA 2021 adalah sebesar Rp211.155.495.899,00 atau 92,41% dari anggarannya sebesar Rp228.492.185.230,00 dan turun sebesar Rp92.381.460.737,00 (30,43%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp303.536.956.636,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan
 berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.720.943.248,00	4.360.432.629,00	92,36	5.319.976.609,00
2 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	540.425.462,00	444.317.211,00	82,22	721.867.190,00
3 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	218.661.109.930,00	202.575.243.160,00	92,64	0,00
4 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	77.686.000,00	0,00	0,00	213.037.341.180,00
5 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.335.200.000,00	1.152.470.000,00	86,31	0,00
6 Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	1.574.825.000,00
7 Belanja Jasa Taga Administrasi	0,00	0,00	0,00	65.447.772.012,00
8 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	90.028.590,00	79.262.899,00	88,04	0,00
9 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.641.420.000,00	1.499.720.000,00	91,37	16.533.087.645,00
10 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	364.972.000,00	232.400.000,00	63,68	902.087.000,00
11 Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.060.400.000,00	811.650.000,00	76,54	0,00
Jumlah	228.492.185.230,00	211.155.495.899,00	92,41	303.536.956.636,00

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2021 adalah sebesar Rp27.767.340.110,00 atau 94,07% dari anggarannya sebesar Rp29.518.759.000,00 dan naik sebesar Rp6.512.729.710,00 (30,647%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp21.254.610.400,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6A.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100,00	0,00
2 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.409.000,00	131.544.000,00	84,64	0,00
3 Belanja Tunjangan Beras DPRD	240.000.000,00	147.229.860,00	61,35	0,00
4 Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	100,00	95.508.000,00
5 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100,00	100.485.000,00
6 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	154.202.000,00	148.352.400,00	96,21	0,00
7 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	65.772.000,00	0,00	0,00	8.820.000.000,00
8 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	2.252.867.400,00
9 Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.190.300.000,00	99,33	0,00
10 Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	445.750.000,00
11 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	39.000.000,00	67.642,00	0,17	0,00
12 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	624.400.000,00	98.104.440,00	15,71	0,00
13 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	8.000.000,00	2.292.192,00	28,65	0,00
14 Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.000.000,00	6.876.576,00	68,77	0,00
15 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.240.951.000,00	7.003.864.000,00	96,73	5.400.000.000,00
16 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.084.800.000,00	6.393.264.000,00	90,24	4.140.000.000,00
17 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	45.780.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	29.518.759.000,00	27.767.340.110,00	94,07	21.254.610.400,00

5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2021 adalah sebesar Rp1.001.606.100,00 atau 79,94% dari anggarannya sebesar Rp1.252.979.638,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	85.237.000,00	51.000.000,00	59,83	0,00
2 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.248.000,00	3.024.000,00	26,88	0,00
3 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	124.980.000,00	91.800.000,00	73,45	0,00
4 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.881.000,00	4.490.040,00	50,56	0,00
5 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.807.000,00	988.113,00	14,52	0,00
6 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.111.000,00	1.160,00	0,10	0,00
7 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	29.289.000,00	4.939.200,00	16,86	0,00
8 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	205.000,00	103.680,00	50,58	0,00
9 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	818.000,00	311.040,00	38,02	0,00
10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	907.200.000,00	781.474.981,00	86,14	0,00
11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	77.203.638,00	63.473.886,00	82,22	0,00
Jumlah	1.252.979.638,00	1.001.606.100,00	79,94	0,00

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2020 terdapat di pos Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH.

6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2021 adalah sebesar Rp993.120.000,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp993.120.000,00 atau sama dengan Realisasi TA 2020 sebesar Rp993.120.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.44 Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
b Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
Jumlah	993.120.000,00	993.120.000,00	100,00	993.120.000,00



7. Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2021 adalah sebesar Rp30.896.034.153,00 atau 90,29% dari anggarannya sebesar Rp34.218.424.007,00 dan naik sebesar Rp21.371.822.075,00 (224,39%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp9.524.212.078,00.

Tabel 6A.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai BLUD	34.218.424.007,00	30.896.034.153,00	90,29	9.524.212.078,00
Jumlah	34.218.424.007,00	30.896.034.153,00	90,29	9.524.212.078,00

8. Belanja Pegawai BOS

Realisasi Belanja Pegawai BOS TA 2021 adalah sebesar Rp0,00 dari anggarannya sebesar Rp0,00 dan turun sebesar realisasi TA 2020 Rp20.176.908.400,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 006 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler bahwa alokasi Dana BOS tidak diperbolehkan untuk alokasi Belanja Pegawai.

A.6.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 adalah sebesar Rp570.239.686.649,00 atau 79% dari anggarannya sebesar Rp721.795.055.287,28 dan naik sebesar Rp146.684.676.476,00 (34,63%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp423.557.260.173,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.46 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Barang	132.467.728.218,00	93.612.159.189,00	70,67	79.849.668.859,00
2 Belanja Jasa	262.068.912.974,00	216.534.522.180,00	82,63	85.978.029.690,00
3 Belanja Pemeliharaan	46.230.117.684,00	41.671.532.543,00	90,14	34.166.046.019,00
4 Belanja Perjalanan Dinas	53.258.131.176,00	24.844.364.144,00	46,65	48.927.379.622,00
5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.515.526.153,00	10.762.046.400,00	93,46	11.876.706.582,00
6 Belanja Barang dan Jasa BOS	95.182.780.133,00	89.102.900.285,00	93,61	71.529.093.146,00
7 Belanja Barang dan Jasa BLUD	121.071.858.949,28	93.714.411.908,00	77,40	91.230.336.255,00
Jumlah	721.795.055.287,28	570.241.936.649,00	79,00	423.557.260.173,00

1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2021 adalah sebesar Rp93.612.159.189,00 dari anggarannya sebesar Rp132.467.728.218,00, dan naik sebesar Rp13.762.490.330,00 (17,24%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp79.849.668.859,00 Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 6A.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Barang Pakai Habis	132.321.601.778,00	93.486.850.964,00	70,65	79.849.668.859,00
2 Belanja Barang Tak Habis Pakai	146.126.440,00	125.308.225,00	85,75	-
Jumlah	132.467.728.218,00	93.612.159.189,00	70,67	79.849.668.859,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

a) Belanja Bahan Pakai Habis



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2021 adalah sebesar Rp93.486.850.964,00 atau 70,65% dari anggarannya sebesar Rp132.321.601.778,00, dan naik sebesar Rp13.637.182.105,00 (17,08%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp79.849.668.859,00. Realisasi tersebut meliputi:

Tabel 6A.48 Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2021

	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	979.354.488,00	824.889.326,00	84,23	2.736.601.330,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.204.577.620,00	1.077.985.934,00	89,49	100.484.500,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.251.432.508,00	822.370.009,00	65,71	333.500.956,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	177.464.632,00	110.498.800,00	62,27	0,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	219.581.250,00	203.053.870,00	92,47	601.586.400,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	31.919.500,00	26.051.500,00	81,62	15.161.500,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	59.728.000,00	43.925.000,00	73,54	2.905.086.406,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	88.100.000,00	82.580.000,00	93,73	46.313.784,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	53.735.470,00	48.034.840,00	89,39	1.249.072.059,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	422.334.864,00	415.472.070,00	98,38	0,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	790.000,00	790.000,00	100,00	0,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	28.958.000,00	28.093.000,00	97,01	0,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.065.000,00	1.125.000,00	36,70	0,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	18.015.207.434,50	15.673.278.987,00	87,00	7.423.331.068,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	805.380.602,00	732.826.000,00	90,99	7.187.236.965,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	362.517.936,00	249.892.570,00	68,93	175.322.600,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	4.776.116.692,00	3.249.028.591,00	68,03	2.591.738.226,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.454.808.375,00	1.069.561.275,00	73,52	1.182.259.530,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	8.463.171.630,00	4.337.153.394,00	51,25	0,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	778.547.000,00	563.635.000,00	72,40	0,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	651.679.060,00	596.941.500,00	91,60	2.636.766.852,00
23	Belanja Obat-Obatan-Obat	40.046.912.616,50	23.927.023.049,00	59,75	5.217.433.507,00
24	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	48.422.000,00	150.000,00	0,31	5.368.188.958,00
25	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.513.161.635,00	10.697.482.057,00	92,92	7.379.354.950,00
26	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.124.000.000,00	1.385.655.000,00	65,24	1.132.445.450,00
27	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.045.008.000,00	1.044.027.200,00	99,91	0,00
28	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.235.242.943,00	1.875.098.000,00	57,96	120.347.500,00
29	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	93.249.000,00	90.432.000,00	96,98	0,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.200.067.208,00	19.513.986.722,00	71,74	16.846.171.529,00
31	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.139.996.000,00	2.638.788.000,00	84,04	4.981.962.977,00
32	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.143.350.750,00	1.395.094.800,00	44,38	0,00
33	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	103.670.000,00	47.732.500,00	46,04	0,00
34	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	18.750.000,00
35	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	75.000.000,00	60.000.000,00	80,00	0,00
36	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	109.000.000,00	93.345.000,00	85,64	121.450.000,00
37	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	164.763.456,00	126.870.500,00	77,00	83.012.500,00
38	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	145.680.000,00	141.158.600,00	96,90	1.791.354.600,00
39	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	62.500.000,00	55.447.500,00	88,72	64.725.000,00
40	Belanja Pakaian Penyelamatan	25.700.000,00	25.695.000,00	99,98	0,00
41	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	0,00
42	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	6.480.000,00	6.480.000,00	100,00	0,00
43	Belanja Pakaian KORPRI	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	2.500.000,00
44	Belanja Pakaian Batik Tradisional	147.774.108,00	142.044.370,00	96,12	2.627.060.640,00
45	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	1.397.008.511,00
46	Belanja Pakaian Paskibraka	20.654.000,00	20.654.000,00	100,00	0,00
47	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	15.720.000,00
48	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00
49	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	47.250.000,00
50	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	75.908.000,00
51	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	657.289.000,00
52	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	1.359.246.361,00
53	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00	100.558.000,00
54	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.238.219.200,00
	Jumlah	132.321.601.778,00	93.486.850.964,00	70,65	79.849.668.859,00



b) Belanja Barang Tak Habis Pakai

Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2021 adalah sebesar Rp125.308.225,00 atau 85,75% dari anggarannya sebesar Rp146.126.440,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	68.154.000,00	67.515.725,00	99,06	0,00
2 Belanja Pipa-Pipa Baja	22.199.700,00	22.155.000,00	99,80	0,00
3 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	55.772.740,00	35.637.500,00	63,90	0,00
Jumlah	146.126.440,00	125.308.225,00	85,75	0,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah yang termasuk dalam Komponen Barang Tak Habis Pakai adalah Komponen Rambu dan Pipa.

2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa TA 2021 adalah sebesar Rp216.534.522.180,00 dari anggarannya sebesar Rp262.068.912.974,00 (82,63%), dan naik sebesar Rp130.556.492.490,00 (151,85%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp85.978.029.690,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.50 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Jasa Kantor	200.576.915.813,00	161.234.627.516,00	80,39	54656231934,00
2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.459.056.324,00	34.187.970.728,00	96,42	24.560.572.720,00
3 Belanja Sewa Tanah	1.398.195.000,00	607.350.000,00	43,44	78.750.000,00
4 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.124.374.165,00	1.135.813.000,00	53,47	1.442.920.512,00
5 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	836.461.410,00	481.519.000,00	57,57	857.568.000,00
6 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	85.245.400,00	75.423.000,00	88,48	359.955.000,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.203.802.000,00	4.907.872.100,00	94,31	2.193.658.524,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	11.666.661.110,00	9.978.301.460,00	85,53	412.463.200,00
9 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	120.000.000,00	101.970.000,00	84,98	0,00
10 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.461.040.000,00	3.704.492.000,00	83,04	1.415.909.800,00
11 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	135.126.752,00	119.183.376,00	88,20	0,00
12 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	262.068.912.974,00	216.534.522.180,00	82,63	85.978.029.690,00

a) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2021 adalah sebesar Rp161.234.627.516,00, atau 80,39% dari anggarannya sebesar Rp200.576.915.813,00 dan naik sebesar Rp106.578.395.582,00 (195,00%) dibandingkan realisasi TA 2020 Rp54.657.551.934,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6A.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2021

	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tagihan Telepon	550.269.000,00	351.693.811,00	63,91	371.533.999,00
2	Belanja Tagihan Air	1.488.336.000,00	962.455.250,00	64,67	969.932.930,00
3	Belanja Tagihan Listrik	27.116.276.787,00	24.191.034.160,00	89,21	24.568.033.596,00
4	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	318.380.100,00	251.569.275,00	79,02	338.298.600,00
5	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.647.306.900,00	5.368.488.966,00	95,06	6.033.747.870,00
6	Belanja Paket/Pengiriman	177.799.198,00	50.829.700,00	28,59	25.843.500,00
7	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	171.997.320,00
8	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	0,00	0,00	85.856.471,00
9	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	0,00	69.981.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00	14.340.979.229,00
11	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.591.363.000,00	6.420.535.000,00	55,39	130.950.000,00
12	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.758.390.000,00	8.696.922.500,00	89,12	3.775.104.800,00
13	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	374.400.000,00	249.500.000,00	66,64	0,00
14	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	824.120.152,00	761.720.152,00	92,43	0,00
15	Honorarium Rohaniwan	30.000.000,00	13.600.000,00	45,33	0,00
16	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
17	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	421.700.000,00	257.600.000,00	61,09	0,00
18	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	974.400.000,00	740.400.000,00	75,99	0,00
19	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	31.963.840.000,00	31.636.620.000,00	98,98	0,00
20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	57.895.003.436,00	36.959.783.973,00	63,84	0,00
21	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	7.036.000,00	4.265.000,00	60,62	0,00
22	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	452.508.480,00	452.508.480,00	100,00	0,00
23	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	581.817.044,00	581.813.760,00	100,00	0,00
24	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	192.690.000,00	177.210.000,00	91,97	1.535.825.960,00
25	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	35.050.000,00	30.500.000,00	87,02	40.952.400,00
26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.888.537.548,00	27.892.109.525,00	87,47	0,00
27	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00	1.767.979.419,00
29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.000.367.480,00	806.597.360,00	80,63	0,00
30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.739.955.808,00	2.623.313.012,00	95,74	0,00
31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.702.556.852,00	2.525.181.010,00	93,44	0,00
32	Belanja Jasa Tenaga Supir	228.372.592,00	223.203.920,00	97,74	0,00
33	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	221.561.730,00	196.268.360,00	88,58	0,00
34	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	189.400.000,00	175.900.000,00	92,87	0,00
35	Belanja Jasa Tata Rias	39.500.000,00	39.483.000,00	99,96	0,00
36	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	672.800.000,00	672.330.226,00	99,93	0,00
37	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.000.000,00	4.988.500,00	99,77	0,00
38	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.380.200.000,00	2.219.046.000,00	93,23	0,00
39	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	65.000.000,00	60.000.000,00	92,31	0,00
40	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	28.780.000,00	27.742.660,00	96,40	0,00
41	Belanja Jasa Kalibrasi	96.237.650,00	66.362.000,00	68,96	0,00
42	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	21.400.000,00	3.900.000,00	18,22	0,00
43	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.476.012.000,00	267.294.844,00	18,11	0,00
44	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.764.700.000,00	1.644.754.880,00	93,20	0,00
45	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.176.247.856,00	566.585.697,00	48,17	429.214.840,00
46	Belanja Lembur	3.240.650.200,00	2.874.299.500,00	88,70	0,00
47	Belanja Medical Check Up	150.000.000,00	118.611.995,00	79,07	0,00
48	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	45.150.000,00	31.605.000,00	70,00	0,00
	Jumlah	200.576.915.813,00	161.234.627.516,00	80,39	54.656.231.934,00

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2021 adalah sebesar Rp34.187.970.728,00 atau 96,42% dari anggarannya sebesar Rp35.459.056.324,00 dan naik sebesar Rp9.627.398.008,00 (39,20%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp24.560.572.720,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6A.52 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Premi Asuransi Kesehatan	0,00	0,00	0,00	24.175.788.008,00
b Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	384.784.712,00
c Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	15.220.295.100,00	15.220.295.100,00	100,00	0,00
d Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	15.608.929.900,00	15.169.546.800,00	97,19	0,00
e Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.752.142.400,00	2.752.142.400,00	100,00	0,00
f Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.260.983.923,00	488.635.923,00	38,75	0,00
g Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	100.291.068,00	76.542.312,00	76,32	0,00
h Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	121.763.933,00	91.921.266,00	75,49	0,00
i Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	394.650.000,00	388.886.927,00	98,54	0,00
Jumlah	35.459.056.324,00	34.187.970.728,00	96,42	24.560.572.720,00

c) Belanja Sewa Tanah

Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2021 adalah sebesar Rp607.350.000,00 atau 43,44% dari anggarannya sebesar Rp1.398.195.000,00, dan naik sebesar Rp528.600.000,00 (671,24%) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp78.750.000,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.328.195.000,00	547.350.000,00	41,21	5.250.000,00
2 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	70.000.000,00	60.000.000,00	85,71	0,00
3 Belanja Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00
Jumlah	1.398.195.000,00	607.350.000,00	43,44	78.750.000,00

d) Belanja Sewa Peralatan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp1.135.813.000,00 atau 53,47% dari anggarannya sebesar Rp2.124.374.165,00, dan turun sebesar Rp307.107.512,00 (21,28%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.442.920.512,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.54 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Grader	19.565.700,00	3.000.000,00	15,33	0,00
2	Belanja Sewa Electric Generating Set	23.250.000,00	15.750.000,00	67,74	41.950.000,00
3	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.000.000,00	3.500.000,00	43,75	0,00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	248.955.965,00	114.912.000,00	46,16	220.500.000,00
5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	0,00
9	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	19.400.000,00	13.200.000,00	68,04	331.270.000,00
10	Belanja Sewa Mebel	562.657.500,00	248.521.000,00	44,17	367.665.200,00
11	Belanja Sewa Alat Pendingin	10.180.000,00	6.820.000,00	66,99	0,00
12	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.003.645.000,00	596.680.000,00	59,45	0,00
13	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	600.000,00	250.000,00	41,67	0,00
14	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.750.000,00	2.500.000,00	66,67	0,00
15	Belanja Sewa Personal Computer	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
16	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	167.390.000,00	97.200.000,00	58,07	0,00
18	Belanja Sewa Eskavator	0,00	0,00	0,00	11.356.620,00
19	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00
20	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	454.478.692,00
	Jumlah	2.124.374.165,00	1.135.813.000,00	53,47	1.442.920.512,00



e) Belanja Sewa Gedung Bangunan

Realisasi Belanja Sewa Gedung Bangunan TA 2021 adalah sebesar Rp481.519.000,00 atau 57,57% dari anggarannya sebesar Rp836.461.410,00, dan turun sebesar Rp376.049.000,00 (43,85%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp857.568.000,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.55 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung Bangunan TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	6.000.000,00	2.900.000,00	48,33	673.693.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	3.450.000,00	3.400.000,00	98,55	0,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	819.511.410,00	474.469.000,00	57,90	183.875.000,00
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.500.000,00	750.000,00	10,00	0,00
	Jumlah	836.461.410,00	481.519.000,00	57,57	857.568.000,00

f) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp75.423.000,00 atau 88,48% dari anggarannya sebesar Rp85.245.400,00, dan turun sebesar Rp284.532.000,00 (79,05%) sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.56 Anggaran dan Realisasi Sewa Tetap Lainnya TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Musik	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	6.720.000,00
2	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Sewa Tanaman	73.995.400,00	64.173.000,00	86,73	0,00
4	Belanja Sewa Audio Visual	0,00	0,00	0,00	329.235.000,00
5	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
	Jumlah	85.245.400,00	75.423.000,00	88,48	359.955.000,00

g) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2021 adalah sebesar Rp4.907.872.100,00 atau 94,31% dari anggarannya sebesar Rp5.203.802.000,00, dan naik sebesar Rp2.714.213.576,00 (123,73%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp2.193.658.524,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.57 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	90.000.000,00	50.554.500,00	56,17	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.066.549.000,00	1.014.688.500,00	95,14	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	225.000.000,00	170.359.600,00	75,72	0,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	408.043.000,00	393.378.500,00	96,41	0,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	200.000.000,00	196.151.000,00	98,08	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	256.600.000,00	229.377.400,00	89,39	1.971.055.024,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	750.000.000,00	749.689.600,00	99,96	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	60.000.000,00	58.795.000,00	97,99	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	649.000.000,00	612.841.000,00	94,43	222.603.500,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	158.410.000,00	153.098.000,00	96,65	0,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	340.200.000,00	322.412.000,00	94,77	0,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	1.000.000.000,00	956.527.000,00	95,65	0,00
	Jumlah	5.203.802.000,00	4.907.872.100,00	94,31	2.193.658.524,00

h) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2021 adalah sebesar Rp9.978.301.460,00 atau 85,53% dari anggarannya sebesar Rp11.666.661.110,00, dan



naik sebesar Rp9.565.838.260,00 (2.319,20%) dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp412.463.200,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.58 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	200.000.000,00	182.506.500,00	91,25	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	3.407.500.000,00	3.257.123.000,00	95,59	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	578.041.810,00	414.850.000,00	71,77	0,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	3.386.879.300,00	2.848.966.440,00	84,12	0,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	50.000.000,00	48.000.000,00	96,00	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	850.000.000,00	697.103.000,00	82,01	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	634.500.000,00	520.818.000,00	82,08	120.009.800,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.559.740.000,00	2.008.934.520,00	78,48	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	0,00	0,00	292.453.400,00
Jumlah		11.666.661.110,00	9.978.301.460,00	85,53	412.463.200,00

i) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) TA 2021 adalah sebesar Rp101.970.000,00 atau 84,98% dari anggarannya sebesar Rp120.000.000,00. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan merupakan Belanja Penghapusan Obat Kadaluarsa.

j) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2021 sebesar RP3.704.492.000,00 (83,04 %) dari anggarannya sebesar Rp 4.461.040.000,00 dan naik sebesar Rp2.288.582.200,00 (161,63%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.415.909.800,00. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan Belanja Diklat Pegawai di Tahun 2021. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut.

Tabel 6A.59 Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	4.461.040.000,00	3.704.492.000,00	83,04	1.329.789.800,00
2	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	71.370.000,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	14.750.000,00
Jumlah		4.461.040.000,00	3.704.492.000,00	83,04	1.415.909.800,00

k) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA. 2021 sebesar Rp119.183.376,00 (88,20%) dari anggarannya sebesar Rp135.126.752,00 dan naik sebesar realisasi TA 2021. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :



Tabel 6A.60 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	826.875,00	369.060,00	44,63	0,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	4.025.000,00	4.025.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	42.315.000,00	42.315.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	936.250,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.500.000,00	1.230.189,00	35,15	0,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	36.623.627,00	34.844.127,00	95,14	0,00
10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	28.700.000,00	28.700.000,00	100,00	0,00
Jumlah		135.126.752,00	119.183.376,00	88,20	0,00

1) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA. 2021

Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2021 yang terdapat anggaran tetapi tidak terdapat Realisasi dikarenakan tidak tercapai target atas Pendapatan Pajak Parkir maupun Mineral bukan Logam sehingga atas belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2021 tidak bisa dicairkan.

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 970/386 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2021 adalah sebesar Rp41.671.532.543,00 dari anggarannya sebesar Rp46.230.117.684,00, dan naik sebesar Rp7.505.486.524,00 (21,97%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp34.166.046.019,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.61 Belanja Pemeliharaan TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	153.800.000,00	144.300.000,00	93,82	161.800.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.020.472.519,00	9.762.503.443,00	81,22	3.725.219.477,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.286.187.624,00	15.126.562.900,00	92,88	15.437.070.792,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.768.657.541,00	16.637.166.200,00	93,63	13.374.238.750,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.467.717.000,00
Jumlah		46.230.117.684,00	41.671.532.543,00	90,14	34.166.046.019,00

a) Belanja Pemeliharaan Tanah

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2021 adalah sebesar Rp144.300.000,00 atau 93,82% dari anggaran sebesar Rp153.800.000,00 dan turun sebesar Rp17.500.000,00 (10,82%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp161.800.000,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6A.62 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian	153.800.000,00	144.300.000,00	93,82	151.300.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Kampung	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Jumlah		153.800.000,00	144.300.000,00	93,82	161.800.000,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah pada Tanah Non Persil-Tanah Pertanian merupakan biaya upah Buruh Tani pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk pengolahan sawah pembibitan padi.

b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp9.762.503.443,00 atau 81,22% dari anggaran sebesar Rp12.020.472.519,00 dan naik sebesar Rp6.037.283.966,00 (162,07%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.725.219.477,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	30.520.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	60.120.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	61.636.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	375.210.472,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	41.350.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	32.620.150,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	442.362.767,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.314.100,00
10	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	848.865.500,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	28.908.600,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	79.130.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	390.000.000,00	389.895.285,00	99,97	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	2.965.000,00	350.000,00	11,80	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Unit Pemeliharaan Lapangan	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor	7.000.000,00	3.850.000,00	55,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Intelijen	18.000.000,00	14.000.000,00	77,78	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	251.400.000,00	243.268.898,00	96,77	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.675.283.675,00	6.381.803.109,00	83,15	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.343.762.500,00	682.651.299,00	50,80	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	17.440.000,00	10.509.000,00	60,26	0,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	23.500.000,00	17.000.000,00	72,34	0,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	91.380.000,00	90.580.000,00	99,12	0,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set	149.150.000,00	133.035.500,00	89,20	0,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.300.000,00	400.000,00	30,77	0,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	17.000.000,00	15.872.000,00	93,36	0,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	1.350.000,00	850.000,00	62,96	0,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	37.530.015,00	35.280.000,00	94,00	717.209.845,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	104.798.000,00	92.917.700,00	88,66	0,00
33	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	13.574.985,00	10.418.452,00	76,75	0,00
34	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	478.287.744,00	428.090.900,00	89,50	0,00
35	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.880.000,00	9.910.000,00	76,94	189.634.500,00
36	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	49.700.000,00	48.325.000,00	97,23	0,00
37	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	24.150.000,00	24.000.000,00	99,38	0,00
38	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	29.420.000,00	24.710.000,00	83,99	0,00
39	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	6.435.000,00	5.860.000,00	91,06	0,00
40	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	547.084.500,00	486.107.700,00	88,85	808.337.543,00
41	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	416.909.300,00	354.242.100,00	84,97	0,00
42	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	216.041.800,00	205.610.500,00	95,17	0,00
43	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	39.750.000,00	39.461.000,00	99,27	0,00
44	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	4.380.000,00	3.005.000,00	68,61	0,00
Jumlah		12.020.472.519,00	9.762.503.443,00	81,22	3.725.219.477,00



c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2021 adalah sebesar Rp15.126.562.900,00 atau 92,88% dari anggaran sebesar Rp16.286.187.624,00 dan turun sebesar Rp310.507.892,00 (2,01%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp15.437.070.792,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.64 Anggaran dan Realisasi
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2021**

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.571.533.154,00	8.895.243.500,00	92,93	14.785.577.342,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	50.000.000,00	49.520.000,00	99,04	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	50.000.000,00	49.400.000,00	98,80	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	133.500.000,00	131.290.500,00	98,34	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	100.000.000,00	98.652.000,00	98,65	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.000.053.000,00	1.992.980.000,00	99,65	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.237.956.000,00	1.796.283.000,00	80,26	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	194.291.000,00	190.596.000,00	98,10	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.080.000.000,00	1.074.566.000,00	99,50	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	14.749.540,00	14.483.000,00	98,19	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	50.000.000,00	49.018.000,00	98,04	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	365.693.000,00	355.198.400,00	97,13	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	153.811.930,00	149.602.500,00	97,26	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun	200.000.000,00	198.255.000,00	99,13	635.134.700,00
17	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	45.000.000,00	44.750.000,00	99,44	1.358.750,00
18	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	39.600.000,00	36.725.000,00	92,74	15.000.000,00
Jumlah		16.286.187.624,00	15.126.562.900,00	92,88	15.437.070.792,00

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2021 adalah sebesar Rp16.637.166.200,00 atau 93,63% dari anggaran sebesar Rp17.768.657.541,00 dan naik sebesar Rp3.262.927.450,00 (24,40%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp13.374.238.750,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	104.109.000,00
2 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	186.719.000,00
3 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00
4 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	16.690.000.000,00	15.577.109.200,00	93,33	0,00
5 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa	409.202.541,00	406.315.000,00	99,29	12.699.689.250,00
6 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	273.435.000,00	268.364.000,00	98,15	0,00
7 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	101.000.000,00	100.364.000,00	99,37	112.245.000,00
8 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	295.020.000,00	285.014.000,00	96,61	238.976.500,00
Jumlah	17.768.657.541,00	16.637.166.200,00	93,63	13.374.238.750,00

e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp1.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00 dan turun sebesar



Rp1.466.717.000,00 (99,93%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.467.717.000,00.

4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2021 adalah sebesar Rp24.844.364.144,00 atau 46,65% dari anggarannya sebesar Rp53.258.131.176,00 dan turun sebesar Rp24.083.015.478,00 (49,22%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp48.927.379.622,00. Pada TA 2021 Belanja Perjalanan Dinas Masuk dalam Pos Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang didalamnya memuat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun Luar Daerah.

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2021 sebesar Rp24.844.364.144,00 (46,65%) dari anggarannya sebesar Rp53.258.131.176,00 dan turun sebesar Rp24.083.015.478,00 (49,22%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp48.927.379,622,00 Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.66 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.754.510.847,00	13.896.920.062,00	58,50	0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Tetap	688.600.000,00	92.107.920,00	13,38	0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.475.205.739,00	8.972.375.412,00	38,22	24.000.169.660,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.204.086.590,00	1.406.887.450,00	33,46	0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.135.728.000,00	476.073.300,00	41,92	24.927.209.962,00
Jumlah	53.258.131.176,00	24.844.364.144,00	46,65	48.927.379.622,00

5. Belanja Uang dan Barang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan Barang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA. 2021 adalah sebesar Rp10.762.046.400,00 atau 93,46% dari anggarannya sebesar Rp11.515.526.153,00, dan turun sebesar Rp1.114.660.182,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp11.876.706.582,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan Barang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.067.530.153,00	10.364.855.000,00	0,00	1.385.870.100,00
2 Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	447.996.000,00	397.191.400,00	0,00	10.490.836.482,00
Jumlah	11.515.526.153,00	10.762.046.400,00	93,46	11.876.706.582,00

a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA. 2021 adalah sebesar Rp10.364.855.000,00 atau 93,65% dari anggarannya sebesar Rp11.067.530.153,00, dan naik sebesar Rp8.978.984.900,00 (647,90%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.385.870.100,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :



Tabel 6A.68 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	727.230.000,00	580.105.000,00	79,77	734.370.100,00
2 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	701.300.153,00	205.800.000,00	29,35	0,00
3 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	9.639.000.000,00	9.578.950.000,00	99,38	0,00
4 Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	0,00	0,00	0,00	651.500.000,00
Jumlah	11.067.530.153,00	10.364.855.000,00	93,65	1.385.870.100,00

TKDD adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pada TA 2021 OPD Pengelola TKDD di Kabupaten Klaten adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.620.000.000,00 dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp6.958.950.000,00.

b) Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA. 2021 adalah sebesar Rp397.191.400,00 atau 88,66% dari anggarannya sebesar Rp447.996.000,00, dan turun sebesar Rp10.093.645.082,00 (96,21%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp10.490.836.482,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	436.746.000,00	397.191.400,00	90,94	10.490.836.482,00
2 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	447.996.000,00	397.191.400,00	88,66	10.490.836.482,00

6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2021 adalah sebesar Rp89.102.900.285,00 atau 93,61% dari anggarannya sebesar Rp95.182.780.133,00, dan naik sebesar Rp17.573.807.139,00 (24,57%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp71.529.093.146,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.70 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 SD Negeri	55.516.850.160,00	53.214.803.998,00	95,85	41.995.520.498,00
2 SMP Negeri	39.665.929.973,00	35.888.096.287,00	90,48	29.533.572.648,00
Jumlah	95.182.780.133,00	89.102.900.285,00	186,33	71.529.093.146,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS terdiri dari 660 Sekolah Dasar Negeri dan 65 Sekolah Menengah Pertama Negeri.

7. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2021 adalah sebesar Rp93.230.336.255,00 atau 77,40% dari anggarannya sebesar Rp121.071.858.949,28, dan naik sebesar Rp2.484.075.653,00 (2,72%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp91.230.336.255,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6A.71 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Puskesmas	26.913.500.866,00	17.668.853.157,00	65,65	51.406.233.879,00
2 RSUD Bagas Waras	94.158.358.083,28	76.045.558.751,00	80,76	39.824.102.376,00
Jumlah	121.071.858.949,28	93.714.411.908,00	77,40	91.230.336.255,00

Di Kabupaten Klaten terdapat 35 BLUD yang terdiri dari 34 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras. Dari 34 Puskesmas yang ada di Kabupaten Klaten terdapat 15 Puskesmas yang menyediakan Jasa Layanan Rawat Inap.

A.6.2.1.3 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi TA 2021 sebesar Rp1.940.554.067,00 atau 64,69% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00, dan turun sebesar Rp47.961.281,00 (2,41%), dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp1.988.515.348,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.72 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2021

Uraian	2021	
	Realisasi (Rp)	Jumlah Debitur
PT BPR BKK TULUNG(Perseroda)	483.005.667,00	433
PT BPR BANK KLATEN (Perseroda)	1.457.548.400,00	1743
Jumlah	1.940.554.067,00	2176

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten No. 2 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2021 melalui BUMD. Sasaran program subsidi bunga kepada usaha di Kabupaten Klaten diutamakan desa/kelurahan dengan tingkat kesejahteraan sangat rendah serta debitur usaha mikro terdampak Corona Virus Disease (Covid-19).

Pada TA 2021 Anggaran atas Belanja subsidi sebesar Rp3.000.000.000,00 tetapi hanya dialokasikan ke Bank Penyalur sebesar Rp2.000.000.000,00 dikarenakan tambahan Rp1.000.000.000,00 dianggarkan di APBD perubahan, sehingga mengalami kendala dalam penyaluran realisasinya.

A.6.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp28.410.769.759,00 atau 87,12% dari anggaran sebesar Rp32.611.021.500,00, dan turun sebesar Rp69.136.832.550,00 (70,87%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp97.547.602.309,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.73 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	940.500.000,00	705.312.625,00	74,99	67.342.575.000,00
b Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.574.002.000,00	26.608.937.634,00	87,03	30.205.027.309,00
c Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	100,00	0,00
Jumlah	32.611.021.500,00	28.410.769.759,00	87,12	97.547.602.309,00

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek Belanja Hibah TA 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2021 sebesar Rp705.312.625,00 atau 74,99% dari anggaran sebesar Rp940.500.000,00 atau turun



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

sebesar Rp66.637.262.375,00 (98,95%) dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp67.342.575.000,00.

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2021 merupakan Hibah Barang kepada Polres Klaten berupa 3 Unit Mobil Avanza dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 028/1283/2021 Antara Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Dengan Kepolisian Resor Klaten.

2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA. 2021 sebesar Rp26.608.937.634,00 atau 87,03% dari anggaran sebesar Rp30.574.002.000,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.74 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.939.002.000,00	24.974.076.634,00	86,30	21.853.901.450,00
2 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	-	8.351.125.859,00
3 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.635.000.000,00	1.634.861.000,00	99,99	0,00
Jumlah	30.574.002.000,00	26.608.937.634,00	87,03	30.205.027.309,00

3. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2021 sebesar Rp1.096.519.500,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.096.519.500,00. Adapun rinciannya:

Tabel 6A.75 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2021

Uraian	TA 2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1 Partai Nasdem	39.547.500,00	39.547.500,00	100,00
2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	83.656.500,00	83.656.500,00	100,00
3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	103.095.000,00	103.095.000,00	100,00
4 Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	434.230.500,00	434.230.500,00	100,00
5 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	99.462.000,00	99.462.000,00	100,00
6 Partai Demokrat	65.197.500,00	65.197.500,00	100,00
7 Partai Amat Nasional (PAN)	75.552.000,00	75.552.000,00	100,00
8 Partai Golkar	143.271.000,00	143.271.000,00	100,00
9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	52.507.500,00	52.507.500,00	100,00
Jumlah	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	100,00



Realisasi Belan Hibah Bantuan Keuangan Kepada partai politik tahun anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/172 Tahun 2021 Tentang Nilai Bantuan Keuangan Persuara Kepada Partai Politik di Kabupaten Klaten Tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun 2020 anggaran dan realisasi bantuan keuangan kepada partai politik masuk pada transfer bantuan keuangan lainnya.

A.6.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 adalah sebesar Rp5.540.865.000,00 atau 69,67% dari anggarannya sebesar Rp7.952.650.848,00, dan naik sebesar Rp2.029.140.000,00 (57,78%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.511.725.000,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.76 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021

No	Penerima Hibah	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	7.612.650.848,00	5.248.700.000,00	68,95	3.511.725.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	340.000.000,00	292.165.000,00	85,93	0,00
<i>Jumlah</i>		7.952.650.848,00	5.540.865.000,00	69,67	3.511.725.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 adalah sebesar Rp5.540.865.000,00 terdapat di 2 OPD yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

A.6.2.2 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2021 adalah sebesar Rp189.606.772.936,00 atau 79,44% dari anggarannya sebesar Rp238.674.307.650,00, dan naik sebesar Rp32.480.053.362,00 (20,67%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp157.126.719.574,00. Realisasi tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset daerah, meliputi pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.77 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021

Uraian		TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	87.843.880.861,00	68.901.715.247,00	78,44	70.270.376.590,00
3	Gedung dan Bangunan	73.655.759.427,00	66.197.965.314,00	89,87	49.518.428.837,00
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	70.877.758.078,00	48.969.127.000,00	69,09	30.032.863.863,00
5	Aset Tetap Lainnya	6.296.909.284,00	5.537.965.375,00	87,95	7.305.050.284,00
<i>Jumlah</i>		238.674.307.650,00	189.606.772.936,00	79,44	157.126.719.574,00

Rincian dan penjelasan atas Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020, serta kapitalisasinya ke dalam nilai aset tetap dapat disajikan sebagai berikut:

A.6.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Pada TA 2021 tidak terdapat realisasi maupun anggaran Belanja Modal Tanah

A.6.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp68.901.715.247,00 atau 78,44% dari anggaran sebesar Rp87.843.880.861,00, dan turun sebesar Rp1.368.661.343,00 (1,95%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp70.270.376.590,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6A.78 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	596.750.000,00	579.505.000,00	97,11	175.672.600,00
2 Belanja Modal Alat Angkutan	5.150.834.868,00	3.835.916.303,00	74,47	8.885.488.750,00
3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	331.314.040,00	305.341.000,00	92,16	286.034.000,00
4 Belanja Modal Alat Pertanian	178.370.996,00	165.159.000,00	92,59	194.438.450,00
5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.865.353.146,00	9.119.709.863,00	76,86	5.463.368.275,00
6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.089.660.400,00	1.489.950.300,00	71,30	2.923.452.100,00
7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.810.030.106,00	8.138.362.283,00	58,93	9.241.043.228,00
8 Belanja Modal Alat Laboratorium	4.215.775.000,00	3.851.056.320,00	91,35	2.098.222.265,00
9 Belanja Modal Komputer	16.310.770.058,00	15.493.901.445,00	94,99	8.288.985.910,00
10 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	30.320.000,00	17.020.000,00	56,13	160.292.500,00
11 Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.000.000,00	2.890.000,00	96,33	0,00
12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.402.607.724,00	16.054.898.754,00	92,26	22.719.122.567,00
13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	15.859.094.523,00	9.848.004.979,00	62,10	9.834.255.945,00
Jumlah	87.843.880.861,00	68.901.715.247,00	78,44	70.270.376.590,00

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek belanja modal peralatan dan mesin TA 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

1. *Belanja Modal Alat-Alat Besar*

Realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat TA 2021 adalah sebesar Rp579.505.000,00 atau 97,11% dari anggaran sebesar Rp596.750.000,00, dan naik sebesar Rp403.832.400,00 (229,88) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp175.672.600,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.79 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Pengangkat	470.000.000,00	470.000.000,00	100,00	0,00
2 Belanja Modal Pompa	104.250.000,00	87.230.000,00	83,67	0,00
3 Belanja Modal Mesin Bor	22.500.000,00	22.275.000,00	99,00	0,00
4 Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00	9.570.000,00
5 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	166.102.600,00
Jumlah	596.750.000,00	579.505.000,00	97,11	175.672.600,00

2. *Belanja Modal Alat Angkutan*

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2021 adalah sebesar Rp3.835.916.303,00 (74,47%) dari anggaran sebesar Rp5.150.834.868,00, dan turun sebesar Rp5.049.572.447,00 (56,83%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp8.885.488.750,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.80 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	310.732.000,00	232.990.000,00	74,98	0,00
2 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.306.484.450,00	1.087.088.450,00	83,21	0,00
3 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	389.386.418,00	271.305.853,00	69,68	927.236.250,00
4 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	443.000.000,00	320.700.000,00	72,39	780.600.000,00
5 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.492.168.000,00	1.727.220.000,00	69,31	6.294.886.500,00
6 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	209.064.000,00	196.612.000,00	94,04	882.766.000,00
Jumlah	5.150.834.868,00	3.835.916.303,00	74,47	8.885.488.750,00

3. *Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur*

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2021 adalah sebesar Rp305.341.000,00 (92,16%) dari anggaran sebesar Rp331.314.040,00, dan naik sebesar Rp19.307.000,00 (6,75%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp286.034.000,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6A.81 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	79.702.000,00	78.950.000,00	99,06	0,00
2 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	5.330.000,00	5.000.000,00	93,81	0,00
3 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	150.528.000,00	145.665.000,00	96,77	0,00
4 Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	33.000.000,00	29.304.000,00	88,80	0,00
5 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	4.198.000,00	4.050.000,00	96,47	0,00
6 Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	515.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	136.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	6.923.000,00	4.502.000,00	65,03	0,00
9 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	3.080.000,00	0,00	0,00	226.270.000,00
10 Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	25.955.040,00	24.920.000,00	96,01	0,00
11 Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	8.894.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Belanja Modal Alat Ukur Universal	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	42.500.000,00
13 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	10.803.000,00	10.750.000,00	99,51	9.550.000,00
14 Belanja Modal Specific Set	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.714.000,00
Jumlah	331.314.040,00	305.341.000,00	92,16	286.034.000,00

4. *Belanja Modal Alat Pertanian*

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2021 adalah sebesar Rp165.159.000,00 (92,59%) dari anggaran sebesar Rp178.370.996,00, dan turun sebesar Rp29.279.450,00 (15,06%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp194.438.450,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.82 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.930.448,00	3.720.000,00	94,65	0,00
2 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	24.980.548,00	15.019.000,00	60,12	166.168.450,00
3 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00
4 Belanja Modal Alat Pasca Panen	7.800.000,00	7.500.000,00	96,15	0,00
5 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	141.600.000,00	138.860.000,00	98,06	28.270.000,00
Jumlah	178.370.996,00	165.159.000,00	92,59	194.438.450,00

5. *Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga*

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2021 sebesar Rp 9.119.709.863,00 (76,86%) dari anggaran sebesar Rp. 11.865.353.146,00 naik sebesar Rp3.656.341.588,00 (66,92%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp5.463.368.275,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.83 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah
 Tangga TA 2021**

	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.500.000,00	3.400.000,00	97,14	810.000,00
2	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	46.450.000,00	39.750.000,00	85,58	0,00
3	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	1.844.711.000,00	1.184.101.000,00	64,19	133.586.900,00
4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.013.251.810,00	1.923.510.560,00	95,54	1.379.917.975,00
5	Belanja Modal Mebel	4.105.157.001,00	2.774.483.800,00	67,59	2.499.087.500,00
6	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	8.248.500,00	8.010.000,00	97,11	17.650.000,00
7	Belanja Modal Alat Pembersih	162.737.000,00	155.825.000,00	95,75	140.062.500,00
8	Belanja Modal Alat Pendingin	1.414.550.000,00	1.217.231.800,00	86,05	605.048.000,00
9	Belanja Modal Alat Dapur	22.400.000,00	19.820.000,00	88,48	0,00
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.913.954.835,00	1.641.763.003,00	85,78	665.265.400,00
11	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	24.268.000,00	5.672.000,00	23,37	21.940.000,00
12	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	298.125.000,00	146.142.700,00	49,02	0,00
	Jumlah	11.865.353.146,00	9.119.709.863,00	76,86	5.463.368.275,00

6. *Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar*

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2021 sebesar Rp1.489.950.300,00 (71,30%) dari anggaran sebesar Rp2.089.660.400,00 turun sebesar Rp1.433.501.800,00 (49,03%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp2.923.452.100,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.84 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan
 Pemancar TA 2021**

	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	393.757.300,00	368.027.900,00	93,47	2.536.193.600,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	751.047.150,00	657.921.800,00	87,60	43.000.000,00
3	Belanja Modal Peralatan Cetak	60.001.300,00	49.000.000,00	81,66	0,00
4	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	646.650,00	546.600,00	84,53	0,00
5	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	0,00	0,00	0,00	2.126.000,00
6	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	163.958.000,00	151.684.000,00	92,51	289.632.500,00
7	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	85.000.000,00	84.370.000,00	99,26	0,00
8	Belanja Modal Program Input Equipment	21.000.000,00	20.900.000,00	99,52	52.500.000,00
9	Belanja Modal Sumber Tenaga	602.210.000,00	145.500.000,00	24,16	0,00
10	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	12.040.000,00	12.000.000,00	99,67	0,00
	Jumlah	2.089.660.400,00	1.489.950.300,00	71,30	2.923.452.100,00

7. *Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan*

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2021 adalah sebesar Rp8.138.362.283,00 (58,93%) dari anggarannya sebesar Rp13.810.030.106,00 dan turun sebesar Rp1.102.680.945,00(11,93%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp9.241.043.228,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.85 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2021**

	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.544.234.965,00	3.078.961.631,00	47,05	3.047.298.920,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	148.500,00	0,00	0,00	455.250.000,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	136.041.250,00	114.992.000,00	84,53	0,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.053.803.321,00	1.770.377.559,00	86,20	0,00
5	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.433.878.461,00	735.423.000,00	51,29	123.641.380,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	121.350.000,00	48.472.000,00	39,94	0,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	420.292.100,00	334.673.335,00	79,63	671.925.784,00
9	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	570.331.320,00	500.361.744,00	87,73	0,00
10	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	36.800.000,00	26.570.000,00	72,20	0,00
11	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	930.000.000,00	604.700.000,00	65,02	0,00
12	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	10.017.840,00	4.130.000,00	41,23	0,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.488.000,00	599.500,00	40,29	0,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	321.915.075,00	145.355.514,00	45,15	0,00
15	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	73.560.000,00	61.997.000,00	84,28	1.115.443.600,00
16	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung	142.428.630,00	66.099.000,00	46,41	1.300.000.000,00
17	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	993.000.000,00	638.800.000,00	64,33	2.274.928.429,00
18	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	17.940.644,00	6.850.000,00	38,18	0,00
19	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	0,00	0,00	0,00	126.555.115,00
20	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00
	Jumlah	13.810.030.106,00	8.138.362.283,00	58,93	9.241.043.228,00

8. *Belanja Modal Alat Laboratorium*

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium untuk TA 2021 adalah sebesar Rp3.851.056.320,00 (91,35%) dari anggarannya sebesar Rp4.215.775.000,00 naik sebesar Rp1.752.834.055,00 (83,54%) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp2.098.222.265,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.86 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Alat Laboratorium TA 2021**

	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	124.488.000,00	123.000.000,00	98,80	0,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	18.000.000,00	16.026.000,00	89,03	0,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	264.773.000,00	235.793.016,00	89,05	709.917.664,00
5	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	2.644.500.000,00	2.624.521.500,00	99,24	70.283.376,00
6	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	30.000.000,00	18.645.000,00	62,15	0,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	57.340.000,00	8.800.000,00	15,35	0,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	51.485.000,00	48.335.000,00	93,88	29.051.000,00
10	Belanja Modal Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	500.000.000,00	382.800.000,00	76,56	0,00
11	Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi	179.775.000,00	159.070.000,00	88,48	0,00
12	Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika	27.980.000,00	7.446.304,00	26,61	0,00
13	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	50.400.000,00	36.950.000,00	73,31	0,00
14	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
15	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	37.636.630,00	32.969.636,00	87,60	4.450.000,00
16	Belanja Modal Analytical Instrument	30.642.370,00	30.080.864,00	98,17	0,00
17	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	0,00	0,00	0,00	69.895.950,00
18	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika	0,00	0,00	0,00	39.771.500,00
19	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	135.605.200,00
20	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPS	0,00	0,00	0,00	90.352.325,00
21	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Kesenian	0,00	0,00	0,00	170.995.325,00
22	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	0,00	0,00	0,00	263.509.425,00
23	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	0,00
24	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: PKN	5.075.000,00	5.075.000,00	100,00	0,00
25	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	100.000.000,00	89.894.000,00	89,89	0,00
26	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	0,00	0,00	0,00	431.626.000,00
27	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	0,00	0,00	30.230.000,00
28	Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	52.534.500,00
29	Belanja Modal Measuring/Testing Device	26.590.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	16.940.000,00	16.900.000,00	99,76	0,00
	Jumlah	4.215.775.000,00	3.851.056.320,00	91,35	2.098.222.265,00



9. *Belanja Modal Komputer*

Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2021 sebesar Rp15.493.901.445,00 (94,99%) dari anggaran sebesar Rp16.310.770.058,00 naik sebesar Rp7.204.915.535,00 (86,92%) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp8.288.985.910,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.87 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Komputer Jaringan	153.650.000,00	150.095.000,00	97,69	1.224.732.600,00
2 Belanja Modal Personal Computer	13.318.365.158,00	12.705.730.120,00	95,40	4.684.652.955,00
3 Belanja Modal Peralatan Mainframe	45.000.000,00	20.000.000,00	44,44	0,00
4 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.243.560.100,00	2.111.883.475,00	94,13	2.364.600.355,00
5 Belanja Modal Peralatan Jaringan	541.794.800,00	498.967.850,00	92,10	15.000.000,00
6 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.400.000,00	7.225.000,00	86,01	0,00
Jumlah	16.310.770.058,00	15.493.901.445,00	94,99	8.288.985.910,00

10. *Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja*

Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2021 adalah sebesar Rp17.020.000,00 (56,13%) dari anggaran sebesar Rp30.320.000,00 turun sebesar Rp143.272.500,00 (89,38%) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp160.292.500,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.88 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	160.292.500,00
2 Belanja Modal Alat Penolong	8.600.000,00	8.500.000,00	98,84	0,00
3 Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	19.470.000,00	6.270.000,00	32,20	0,00
Jumlah	30.320.000,00	17.020.000,00	56,13	160.292.500,00

11. *Belanja Modal Peralatan Olahraga*

Realisasi Belanja Peralatan Olahraga TA 2021 adalah sebesar Rp2.890.000,00 (96,33%) dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00. Realisasi Belanja Peralatan Olahraga TA 2021 merupakan kegiatan di Kelurahan Kabupaten untuk belanja meja tenis meja.

12. *Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2021 adalah sebesar Rp16.054.898.754,00 (92,26%) dibanding anggaran sebesar Rp17.402.607.724,00 turun sebesar Rp6.664.223.813,00 (29,33%) dibanding realisasi TA 2020 Sebesar Rp22.719.122.567,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS diantaranya untuk belanja pengadaan komputer, laptop, printer, pompa air, dan proyektor pada sekolah.

13. *Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2021 adalah sebesar Rp9.848.004.979,00 (62,10%) dari anggarannya sebesar Rp15.859.094.523,00 naik sebesar Rp13.749.034,00 (0,14%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp9.834.255.945,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD diantaranya untuk belanja pengadaan peralatan kedokteran, laptop, kursi tunggu, dan alat kesehatan pada 34 Puskesmas dan RSUD Bagas Waras.



6.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 adalah sebesar Rp66.197.965.314,00 atau 89,87% dari anggaran sebesar Rp73.655.759.427,00 dan naik sebesar Rp16.679.536.477,00 (33,68%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp49.518.428.837,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6A.89 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Bangunan Gedung	72.421.413.082,00	65.427.892.114,00	90,34	47.854.270.770,00
2 Belanja Modal Monumen	200.000.000,00	186.500.000,00	93,25	237.644.200,00
3 Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.426.513.867,00
4 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	151.146.345,00	148.935.700,00	98,54	0,00
5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	883.200.000,00	434.637.500,00	49,21	0,00
Jumlah	73.655.759.427,00	66.197.965.314,00	89,87	49.518.428.837,00

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Bangunan Gedung

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2021 adalah sebesar Rp65.427.892.114,00 (90,34%) dari anggarannya sebesar Rp72.421.413.082,00, dan naik sebesar Rp17.573.621.344,00 (36,72%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp47.854.270.770,00.

2. Belanja Modal Monumen

Realisasi Belanja Modal Monumen TA 2021 sebesar Rp186.500.000,00 (93,25%) dari anggarannya sebesar Rp200.000.000,00 turun sebesar Rp51.144.200,00 (21,52%) sedangkan TA 2020 terdapat realisasi sebesar Rp237.644.200,00.

3. Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya

Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya TA 2021 tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi, sedangkan TA 2020 terdapat realisasi sebesar Rp1.426.513.867,00.

4. Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Realisasi Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp148.935.700,00 dari anggarannya sebesar Rp151.146.345,00.

5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD untuk TA 2021 sebesar Rp434.637.500,00 dari anggarannya sebesar Rp883.200.000,00.

A.6.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 seluruhnya sebesar Rp48.969.127.000,00 atau 69,09% dari anggaran sebesar Rp70.877.758.078,00 dan naik sebesar Rp18.936.263.137,00 (63,05%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp30.032.863.863,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.90 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pengadaan Jalan	56.325.301.598,00	35.793.047.100,00	63,55	23.310.848.844,00
2 Pengadaan Jembatan	0,00	0,00	0,00	3.268.000,00
3 Pengadaan Bangunan Air Irigasi	11.233.981.000,00	10.013.726.100,00	89,14	4.722.557.199,00
4 Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	0,00	0,00	0,00	193.734.220,00
5 Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	789.097.150,00
6 Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
7 Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	158.554.000,00
8 Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	104.701.500,00
9 Pengadaan Jaringan Listrik	3.048.725.000,00	2.953.303.800,00	96,87	748.302.950,00
10 Belanja Modal Instalasi	204.750.000,00	199.100.000,00	97,24	0,00
11 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	65.000.480,00	9.950.000,00	15,31	0,00
Jumlah	70.877.758.078,00	48.969.127.000,00	69,09	30.032.863.863,00

A.6.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah belanja yang menimbulkan aset tetap selain yang telah diklasifikasi pada bagian sebelumnya. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp5.537.965.375,00 (87,95%) dari anggarannya sebesar Rp6.296.909.284,00, dan turun sebesar Rp1.767.084.909,00 (24,19%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp7.305.050.284,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.91 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	191.870.000,00	157.607.275,00	82,14	359.933.600,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	749.103.000,00
3	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	0,00	48.510.000,00
4	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita	0,00	0,00	0,00	14.150.000,00
5	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	36.000.000,00	34.600.000,00	96,11	848.395.525,00
6	Belanja Modal Tanaman	19.043.000,00	10.500.000,00	55,14	49.020.000,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	190.000.000,00	184.098.000,00	96,89	120.900.000,00
8	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	182.000.000,00	128.350.000,00	70,52	0,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.220.496.284,00	4.781.849.300,00	91,60	5.115.038.159,00
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	457.500.000,00	240.960.800,00	52,67	0,00
	Jumlah	6.296.909.284,00	5.537.965.375,00	87,95	7.305.050.284,00

Rincian atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak merupakan kegiatan pengadaan buku laporan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pengadaan belanja modal buku umum pada Dinas Arsip dan Perpustakaan.

A.6.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga TA 2021 realisasi sebesar Rp18.618.661.003,00 (25,66%) dari anggaran sebesar Rp72.557.615.273,00 turun sebesar Rp71.972.093.078,00 (79,45%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp90.590.754.081,00. Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mendasari pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional sehingga Gubernur,



Bupati dan Walikota tidak perlu lagi menetapkan keadaan darurat bencana. Adapun realisasi Belanja Tak Terduga terdapat pada Lampiran A.3 Realisasi BTT 2021.

A.6.3 Transfer

Realisasi Transfer TA 2021 adalah sebesar Rp672.768.458.757,00 atau 99,59% dari anggarannya sebesar Rp675.562.515.700,00, dan turun sebesar Rp52.053.136.536,00 atau 7,18% dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp724.821.595.293,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.92 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	19.055.869.600,00	16.428.812.657,00	86,21	13.255.263.593,00
2. Transfer Bantuan Keuangan	656.506.646.100,00	656.339.646.100,00	99,97	711.566.331.700,00
Jumlah	675.562.515.700,00	672.768.458.757,00	99,59	724.821.595.293,00

A.6.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer bagi hasil pendapatan merupakan sebagian hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dibagikan kepada Desa dengan didasarkan atas penerimaan pajak dan retribusi pada masing-masing Desa. Dasar pengelolaan mengacu pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa di Kabupaten Klaten. Untuk selanjutnya penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa diatur dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 971.1/1 Tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Sementara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa Di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Transfer Bagi Hasil TA 2021 sebesar Rp16.428.812.657,00 (86,21%) dari anggaran sebesar Rp19.055.869.600,00, naik sebesar Rp3.173.549.064,00 (23,94%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp13.255.263.593,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.93 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	1.734.202.949,00
2. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	16.833.654.367,00	14.417.776.871,00	85,65	11.521.060.644,00
3. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	2.222.215.233,00	2.011.035.786,00	90,50	0,00
Jumlah	19.055.869.600,00	16.428.812.657,00	86,21	13.255.263.593,00

A.6.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Transfer bantuan keuangan merupakan bantuan yang peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dasar pengelolaan mengacu pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa.

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar Rp656.339.646.100,00 (99,97%) dari anggarannya sebesar Rp656.506.646.100,00 turun sebesar Rp55.226.685.600,00 (7,76%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp711.566.331.700,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6A.94 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	514.402.196.100,00	514.402.196.100,00	100,00	122.830.629.700
2. Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	142.104.450.000,00	141.937.450.000,00	99,88	588.735.702.000,00
Jumlah	656.506.646.100,00	656.339.646.100,00	99,97	711.566.331.700,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Transfer Bantuan Keuangan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp514.402.196.100,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp514.402.196.100,00. atau naik sebesar Rp391.571.566.400,00 (418,79%) dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp 122.830.629.700,00
2. Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp141.937.450.000,00 (99,88%) dari anggarannya sebesar Rp142.104.450.000,00 atau turun sebesar Rp446.798.252.000,00 (24,11%) dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp588.735.702.000,00. Realisasi bantuan keuangan khusus Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan anggarannya dikarenakan oleh adanya beberapa desa yang tidak merealisasikan bantuan keuangan tersebut, diantaranya Desa Taji Kec. Prambanan, Desa Kalangan Kec. Pedan, Desa Wanglu Kec. Trucuk, Desa Burikan Kec. Cawas dan Desa Jiwan Kec. Karangnongko.

A.6.4 Surplus (Defisit) Anggaran

Surplus (defisit) anggaran adalah selisih antara pendapatan dengan belanja daerah, dimana surplus merupakan selisih lebih (positif) pendapatan diatas belanja dan defisit adalah selisih kurang (negatif) pendapatan dibawah belanja. Pendapatan dan belanja daerah adalah seluruh pendapatan dan belanja yang telah diungkapkan pada sub bagian sebelumnya. Selisih antara Realisasi Pendapatan dengan Belanja Daerah TA 2021 menunjukkan surplus sebesar Rp76.630.895.831,00 dari anggaran defisit sebesar Rp417.159.044.325,28, dan naik sebesar Rp43.659.554.054,00 atau 132,42% dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp32.971.341.777,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A. 95 Surplus (Defisit) Anggaran TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pendapatan Daerah	2.532.484.633.385,00	2.570.037.777.373,00	101,48	2.578.135.836.354,00
b. Belanja dan Transfer Daerah	2.949.643.677.710,28	2.493.406.881.542,00	84,53	2.545.164.494.577,00
Surplus (Defisit) Anggaran :				
a – b	(417.159.044.325,28)	76.630.895.831,00	(18,37)	32.971.341.777,00

A.6.5 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih kurang (defisit) atau memanfaatkan selisih lebih (surplus) antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dimana penerimaan pembiayaan adalah penerimaan daerah yang harus dibayar kembali di kemudian



hari dan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali di kemudian hari. Pembiayaan bersih (netto) adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama tahun anggaran berkenaan. Selisih antara Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (Pembiayaan Netto) TA 2021 menunjukkan nilai sebesar Rp417.089.642.510,28 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp417.159.044.325,28, dan naik sebesar Rp9.401.939.962,00 atau 2,31% dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp407.687.702.548,28, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.96 Anggaran dan Pembiayaan Daerah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Penerimaan Pembiayaan	440.659.044.325,28	440.589.642.510,28	99,98	408.687.702.548,28
2. Pengeluaran Pembiayaan	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Pembiayaan Netto : a – b	417.159.044.325,28	417.089.642.510,28	99,98	407.687.702.548,28

Adapun realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

A.6.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Kembali Piutang Daerah, dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2021 sebesar Rp440.589.680.010,28 atau sebesar 99,98% dari anggaran sebesar Rp440.659.044.325,28 dan mengalami kenaikan sebesar Rp31.901.977.462,00 atau 7,81% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp408.687.702.548,28. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.97 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Penggunaan SiLPA	0,00	0,00	0,00	382.909.001.110,28
b. Koreksi SiLPA	0,00	(69.364.315,00)	0,00	(221.298.562,00)
c. Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	26.000.000.000,00
e. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	68.602.633.667,00	0,00	0,00	0,00
h. Penghematan Belanja	317.938.704.151,00	440.659.044.325,28	138,60	0,00
i. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	6.578.995.781,00	0,00	0,00	0,00
j. Sisa Belanja Lainnya	47.538.710.726,28	0,00	0,00	0,00
Jumlah	440.659.044.325,28	440.589.680.010,28	99,98	408.687.702.548,28

A.6.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2021 sebesar Rp23.500.000.000,00 atau sebesar 100% dari anggarannya sebesar Rp23.500.000.000,00 dan naik sebesar Rp22.500.000.000,00 dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00.

Realisasi tersebut meliputi pengeluaran untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD), sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6A.98 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1) Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00
2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Jumlah	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00

Adapun anggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp8.500.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp8.500.000.000,00 atau sebesar 100%, dan naik sebesar Rp7.500.000.000,00 dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00, terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A. 99 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. PDAM Tirta Merapi	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	0,00
2. Bank Jateng	0,00	0,00	0,00	0,00
3. BPR Bank Klaten	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
4. BKK Tulung	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00

A.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) menunjukkan kelebihan atau kekurangan pembiayaan netto dalam menutup surplus (defisit) anggaran. SiLPA merupakan hak Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai penambah ekuitas dana lancar daerah, yang diwujudkan dalam bentuk sisa uang daerah (Kas dan Setara Kas) di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Bendahara Pengeluaran.

Realisasi APBD TA 2021 menunjukkan SiLPA sebesar Rp493.720.575.841,28 dari anggaran nihil, mengalami kenaikan sebesar Rp53.061.531.516,00 atau sebesar 12,04% dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp440.659.044.325,28, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A. 100 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Surplus (Defisit) Anggaran	(417.159.044.325,28)	76.630.895.831,00	(18,37)	32.971.341.777,00
b. Pembiayaan Neto	417.159.044.325,28	417.089.680.010,28	99,98	407.687.702.548,28
SiLPA (SiKPA) : a + b	0,00	493.720.575.841,28	0,00	440.659.044.325,28

Adapun rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) - Tunai & Giro Bank adalah sebagai berikut:

**Tabel 6A.101 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Tunai & Giro Bank TA 2021**

Rincian SiLPA :	2021
1) Kas di Kasda	440.420.393.555,00
2) Kas di BLUD	47.050.337.659,28
3) Kas di Bendahara BOS	6.249.844.627,00
JUMLAH:	493.720.575.841,28



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

SiLPA sebesar Rp493.720.575.841,28 tersebut naik sebesar Rp53.061.531.516,00 atau sebesar 12,04% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp440.659.044.325,28. SiLPA yang menunjukkan kekayaan daerah tersebut disajikan dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp493.720.575.841,28.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2021 ini dapat dijelaskan dan dirinci lebih lanjut dalam tabel berikut:

Tabel 6A.102 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2021

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PENDAPATAN DAERAH	37.553.143.988,00	37.553.143.988,00
2.	PENGHEMATAN BELANJA	456.236.796.168,28	456.236.796.168,28
a.	Belanja Operasi	350.434.695.695,28	
1)	Belanja Pegawai	191.337.724.870,00	
	- Penyediaan Gaji untuk PPPK	74.491.689.300,00	
	- Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik)	223.527.500,00	Terikat
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik)	16.783.483.248,00	
	- Tunjangan Khusus Guru PNSD (DAK Non Fisik)	77.686.000,00	
	- Belanja Pegawai Lainnya	99.761.338.822,00	Bebas
2)	Belanja Barang dan Jasa	151.427.737.303,28	Bebas
3)	Belanja Subsidi	1.059.445.933,00	Bebas
4)	Belanja Hibah	4.266.001.741,00	
	- Belanja Hibah BOP PAUD (DAK Non Fisik)	3.156.000.000,00	Terikat
	- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	375.700.000,00	
	- Belanja Hibah Lainnya	734.301.741,00	Bebas
5)	Belanja Bantuan Sosial	2.343.785.848,00	Bebas
b.	Belanja Modal	49.069.089.260,00	
	- Bij Modal sbr dana khusus	0,00	Terikat
	- Belanja Modal Lainnya	49.069.089.260,00	Bebas
c.	Belanja Tidak Terduga	53.938.954.270,00	
	- BTT	0,00	Terikat
	- Sisa Silpa BTT	53.938.954.270,00	Bebas
d.	Belanja Transfer	2.794.056.943,00	
1)	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.627.056.943,00	Terikat
2)	Belanja Bantuan Keuangan	167.000.000,00	
	- Dana Desa/ADD	80.000.000,00	Terikat
	- BKK	87.000.000,00	Bebas
*)	Belanja Terikat Lain	68.001.488.939,28	
1)	DAK Fisik	1.960.594.900,00	
	1 Bid. Pendidikan	1.018.953.441,00	
	2 Bid. Kesehatan + KB	98.554.590,00	
	3 Bid. Infrastruktur Jalan	17.029.000,00	
	4 Bid. Infrastruktur Irigasi	45.591.500,00	
	5 Bid. Infrastruktur Air Minum	433.575.000,00	
	6 Bid. Kelautan dan Perikanan	(542.123,00)	
	7 Bid. Pertanian	98.303.133,00	
	8 Bid. Lingkungan Hidup	5.437.722,00	
	9 Bid. Keluarga Berencana	-	
	10 Bid. Pariwisata	4.603.200,00	
	11 Bid. Perumahan dan Permukiman	238.497.437,00	
	12 Bid. Pasar	-	
	13 Bid. Industri Kecil dan Menengah	592.000,00	
	14 Bid. Sanitasi	-	
	2) Dak Non Fisik	24.467.190.941,00	
	1 Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik)	-	
	2 Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik)	-	
	3 Tunjangan Khusus Guru PNSD (DAK Non Fisik)	-	
	4 Perediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	-	
	5 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	-	
	6 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	18.876.977.462,00	
	- Insentif Nakes (BOK Tambahan)	-	Terikat
	- Akreditasi Puskesmas (DAK-NON FISIK)	-	
	- Jaminan Persalinan (DAK-NON FISIK)	-	
	7 Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK-NON FISIK)	4.853.524.324,00	
	8 Pelayanan Administrasi	201.347.255,00	
	9 Pelayanan Kepariwisata	60.403.100,00	
	10 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	36.656.100,00	
	11 Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	149.693.500,00	
	12 Fasilitas Penanaman Modal	165.929.000,00	
	13 Ketahanan Pangan dan Pertanian	122.660.200,00	
3)	Banque Provinsi	37.977.000,00	
4)	DBHCHT	5.612.209.855,00	
6)	BOS SDN	1.993.696.224,00	
	- Bos Reguler	-	
	- Bos Afirmasi	-	
	- Bos Kinerja	-	
7)	BOS SMP	4.235.310.903,00	
	- Bos Reguler	-	
	- Bos Afirmasi	-	
	- Bos Kinerja	-	
8)	BLUD RSUD	23.648.708.514,28	Dikembalikan ke BLUD
	- Silpa BLUD RSUD TA 2021	38.648.708.514,28	
	- Silpa BLUD RSUD (sudah dianggarkan di 2022 Murni)	15.000.000.000,00	
9)	BLUD PUSKESMAS	2.017.573.088,00	Dikembalikan ke BLUD
	- Silpa BLUD Puskesmas TA 2021	8.401.629.145,00	
	- Silpa BLUD Puskesmas (sudah dianggarkan di 2022 Murni)	6.384.056.057,00	
11)	DID	4.028.227.514,00	
3.	PENCAPAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	(69.364.315)	-69.364.315,00
4.	PENGHEMATAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00
	JUMLAH	493.720.575.841,28	493.720.575.841,28



SiLPA sebesar Rp191.337.724.870,00 dari Belanja Operasi yang terdiri dari Rekening Belanja Pegawai terdiri dari Penyedia Gaji untuk PPPK sebesar Rp74.491.689.300,00, Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik) sebesar Rp223.527.500,00, Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik) sebesar Rp16.783.483.248,00, Tunjangan Khusus Guru PNSD (DAK Non Fisik) sebesar Rp77.686.000,00 dan Belanja Pegawai Lainnya sebesar Rp99.761.338.822,00.

SiLPA sebesar Rp151.427.737.303,28 dari Belanja Barang dan Jasa

SiLPA sebesar Rp1.059.445.933,00 dari Belanja Subsidi

SiLPA sebesar Rp4.266.001.741,00 dari Belanja Hibah terdiri dari Belanja Hibah BOP PAUD (DAK Non Fisik) sebesar Rp3.156.000.000,00, Belanja Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) sebesar Rp375.700.000,00 dan Belanja Hibah Lainnya sebesar Rp734.301.741,00.

SiLPA sebesar Rp2.343.785.848,00 dari Belanja Bantuan Sosial.

SiLPA sebesar Rp49.069.089.260,00 dari Belanja Modal

SiLPA sebesar Rp53.938.954.270,00 dari Belanja Tidak Terduga.

SiLPA sebesar Rp2.794.056.943,00 dari Belanja Transfer

SiLPA sebesar Rp68.001.488.939,28 merupakan SiLPA dari belanja terikat lain yang terdiri dari :

1. DAK Fisik sebesar Rp1.960.594.900,00 yang terdiri dari :
 - a) Bidang Pendidikan sebesar Rp1.018.953.441,00
 - b) Bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp98.554.590,00
 - c) Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp17.029.000,00
 - d) Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp45.591.500,00
 - e) Bidang Infrastruktur Air Minum sebesar Rp433.575.000,00
 - f) Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar – Rp542.123,00
 - g) Bidang Pertanian sebesar Rp98.303.133,00
 - h) Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp5.437.722,00
 - i) Bidang Pariwisata sebesar Rp4.603.200,00
 - j) Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp238.497.437,00
 - k) Bidang Industri kecil dan Menengah sebesar Rp592.000,00
2. DAK Non Fisik sebesar Rp24.467.190.941,00 yang terdiri dari :
 - a) Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) sebesar Rp 18.876.977.462,00
 - b) Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) sebesar Rp4.853.524.324,00
 - c) Pelayanan Adminduk sebesar Rp201.347.255,00
 - d) Pelayanan Kepariwisata Rp60.403.100,00
 - e) Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sebesar Rp36.656.100,00
 - f) Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp149.693.500,00
 - g) Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp165.929.000,00



h) Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp122.660.200,00

SiLPA sebesar Rp37.977.000,00 dari Bankeu Provinsi

SiLPA sebesar Rp5.612.209.855,00 dari DBHCHT

SiLPA sebesar Rp1.993.696.224,00 dari BOS SD

SiLPA sebesar Rp4.235.310.903,00 dari BOS SMP

SiLPA sebesar Rp23.648.708.514,28 dari BLUD RSUD

SiLPA sebesar Rp2.017.573.088,00 dari BLUD Puskesmas

SiLPA sebesar Rp4.028.227.514,00 dari Dana Insentif Daerah.



B. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tidak terdapat perbandingan LPSAL per 31 Desember 2020 dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

B.6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit Tahun 2021 yaitu sebesar Rp440.659.044.325,28.

B.6.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2021 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp440.589.680.010,28.

B.6.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2021 adalah sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus Anggaran	Rp 76.630.895.831,00	
- Pembiayaan Netto	Rp 417.089.680.010,28	+
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp 493.720.575.841,28	

B.6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp69.364.315,00) merupakan koreksi saldo awal Dana BOS sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 6B.1 Rincian Penjelasan Selisih pada LPSAL

No	Sekolah	Koreksi Saldo BOS		
		Bertambah	Berkurang	Saldo
1	Koreksi saldo awal bos karena adanya regroup sekolah SDN Karangpaku 2, SDN Mireng 2, SDN Wanglu 1 dan koreksi belanja SDN Ngawonggo	0,00	69.364.315,00	(69.364.315,00)

B.6.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp493.720.575.841,28.



C. Penjelasan Akun-Akun Neraca

Akun-Akun neraca ini menguraikan posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

C.6.1 Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Klaten terdiri dari: Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Saldo Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.515.210.592.463,72 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.1 Rincian Aset TA 2021

No	Uraian	31-Des 21	31-Des-20	Kenaikan (penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	Aset Lancar	684.293.787.924,32	667.032.607.795,67	17.261.180.128,65	2,59
2	Investasi Jangka Panjang	187.445.272.695,00	178.945.272.695,00	8.500.000.000,00	4,75
3	Aset Tetap	2.476.188.153.215,51	2.556.910.271.392,16	-80.722.118.176,65	-3,16
4	Dana Cadangan	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	0
5	Aset Lainnya	152.283.378.628,89	163.889.719.155,51	(11.606.340.526,62)	(7,08)
Jumlah		3.515.210.592.463,72	3.566.777.871.038,34	-51.567.278.574,62	-1,45

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2020 naik sebesar Rp36.488.166.217,56 atau sebesar 1,02%. Rincian atas perubahan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

C.6.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah berupa kas dan setara kas serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS, Kas Lainnya, Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp684.293.787.924,32 naik sebesar Rp17.261.180.128,65 (2,59%) dibanding Saldo per 31 Desember 2020 yang sebesar Rp667.032.607.795,67 dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 6C.2 Rincian Aset Lancar TA 2021

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Pengurangan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Kas di Kasda	440.420.393.555,00	384.810.735.418,00	55.609.658.137,00	14,45
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	39.988.400,00	(39.988.400,00)	(100,00)
3	Kas di BLUD	47.050.337.659,28	47.538.710.726,28	(488.373.067,00)	(1,03)
4	Kas di Bendahara BOS	6.249.844.627,00	8.269.609.781,00	(2.019.765.154,00)	(24,42)
5	Kas lainnya	47.125.000,00	8.419.076.995,00	(8.371.951.995,00)	(99,44)
6	Piutang Pajak (Netto)	14.944.677.542,00	14.628.389.951,21	316.287.590,79	2,16
7	Piutang Retribusi (Netto)	353.464.054,00	43.219.380,00	310.244.674,00	717,84
8	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	19.990.555.249,70	0,00	19.990.555.249,70	0
9	Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Netto)	55.952.872.233,31	6.179.142.457,35	49.773.729.775,96	805,51
10	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	11.984.477.171,00	8.927.774.691,00	3.056.702.480,00	34,24
11	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.776.175.889,00	21.805.978.475,00	(19.029.802.586,00)	(87,27)
12	Beban Biaya di Muka	340.702.216,00	321.505.058,17	19.197.157,83	5,97
13	Persediaan	84.183.162.728,03	166.048.476.462,66	-81.865.313.734,63	-49,30
Jumlah		684.293.787.924,32	667.032.607.795,67	17.261.180.128,65	2,59

C.6.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah yang



sangat likuid yaitu siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Realisasi Kas Daerah per 31 Desember 2021 yang terdapat dalam rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 100900003 sebesar Rp440.420.393.555,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp55.609.658.137,00 atau sebesar 14,45% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp384.810.735.418,00. Kas Daerah merupakan hak penuh dari Pemerintah Kabupaten Klaten yang berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Saldo Kas per 31 Desember 2021 di Kasda sebesar Rp440.420.393.555,00 di rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 1009000003 a.n. Rek Kas Umum Daerah Kab Klaten setelah dikurangi Saldo Kas Lainnya sebesar Rp47.125.000,00 yang merupakan uang titipan dari Jaminan Rusunawa.

Selain RKUD tersebut, dalam pengelolaan Bendahara Umum Daerah juga mengelola rekening pada Bank Jateng untuk penampungan PBB-P2 dengan nomor rekening 1-009-00425-1 dan rekening penampungan pajak daerah dengan nomor rekening 1-009-00864-7. Rekening penampungan tersebut untuk menampungan penerimaan pajak daerah yang setiap akhir hari kerja langsung disetorkan ke RKUD sehingga saldo per 31 Desember 2021 nihil. Jadi pada Akhir tahun 2021, saldo akhir kas di RKUD sebesar Rp440.420.393.555,00 seluruhnya merupakan SILPA milik Pemkab Klaten dan tidak terdapat saldo kas yang dibatasi penggunaannya.

C.6.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang masih dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dalam rangka penerimaan pendapatan daerah selain pajak daerah yang belum disetorkan ke RKUD per 31 Desember 2021. Dalam pengelolaan penerimaan daerah, Bendahara Penerimaan tidak memiliki rekening penampungan.

Per 31 Desember 2021 tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan. Sedangkan ditahun anggaran 2020 terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp39.988.400,00 yang merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah yang belum disetorkan ke RKUD di tahun 2020. Rincian Saldo kas bendahara penerimaan, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6C.3 Saldo Kas Daerah di Bendahara Penerimaan TA 2021

No	Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Kenaikan/Penurunan	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	Dinas Perhubungan	0,00	1.549.000,00	(1.549.000,00)	0
2	Disparbudpora	0,00	200.000,00	(200.000,00)	0
3	Disdagkop UKM	0,00	8.074.400,00	(8.074.400,00)	0
4	BPKD	0,00	30.165.000,00	(30.165.000,00)	0
Jumlah		0,00	39.988.400,00	(39.988.400,00)	0

C.6.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengeluaran belanja daerah yang belum disetorkan ke RKUD per 31 Desember 2021. Dalam pengelolaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Bupati.

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 tidak terdapat sisa uang direkening bendahara pengeluaran.



C.6.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas yang dikuasai oleh Bendahara BLUD dalam rangka pengelolaan keuangan BLUD. Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD, Bendahara BLUD memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Bupati.

Kas di BLUD terdiri dari Kas di BLUD Puskesmas sebanyak 34 puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bagas Waras Klaten. Saldo Kas di Bendahara BLUD per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp47.050.337.659,28 mengalami penurunan sebesar Rp488.373.067,00 atau 1,03% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp47.538.710.726,28 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6C.4 Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) TA 2021

No	BLUD	Saldo Per 31-Des-21	Saldo Per 31-Des-20	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Puskesmas	8.401.629.145,00	10.830.070.479,00	(2.428.441.334,00)	(22,42)
2	Rumah Sakit Umum Daerah	38.648.708.514,28	36.708.640.247,28	1.940.068.267,00	5,29
JUMLAH		47.050.337.659,28	47.538.710.726,28	(488.373.067,00)	(1,03)

Rincian Laporan Saldo Kas di Bendahara BLUD sebagaimana disajikan dalam tabel yang terlampir pada Lampiran C.1 : Neraca.

C.6.1.1.5 Kas Di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas yang dikuasai oleh Bendahara BOS dalam rangka pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja BOS, Bendahara BOS memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Bupati.

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.249.844.627,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.019.765.154,00 atau 24,42% dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.269.609.781,00. Kas di Bendahara BOS terdiri dari Kas di Bendahara BOS SD sebesar Rp1.993.696.224,00 dan Kas di Bendahara BOS SMP sebesar Rp.4.256.148.403,00 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6C.5 Saldo Kas di Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2021

No	BOS	Saldo Per 31-Des-21	Saldo Per 31-Des-20	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	BOS SD	1.993.696.224,00	3.763.030.001,00	(1.769.333.777,00)	(47,02)
2	BOS SMP	4.256.148.403,00	4.506.579.780,00	(250.431.377,00)	(5,56)
Jumlah		6.249.844.627,00	8.269.609.781,00	(2.019.765.154,00)	(24,42)

Rincian Laporan Saldo BOS Kabupaten Klaten dapat dilihat di Lampiran C.2 : Neraca Saldo BOS

C.6.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan kas selain Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD dan Kas di Bendahara BOS, yang pengelolaannya termasuk bagian dari SILPA terikat.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.125.000,00 merupakan uang jaminan/titipan sewa atas rumah susun yang di kelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang disimpan di rekening kas daerah dengan nomor rekening 1009 000003. sebagaimana pada tabel berikut :



Tabel 6C.6 Kas Lainnya TA 2021

No	Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Kas Lainnya Uang Jaminan Rusunawa	47.125.000,00	29.775.000,00	17.350.000,00	58,27
2	Kas Lainnya atas Belanja Hibah kepada KPU	-	6.988.223.615,00	(6.988.223.615,00)	(100,00)
3	Kas Lainnya atas Belanja Hibah kepada Bawaslu	-	1.401.078.380,00	(1.401.078.380,00)	(100,00)
Jumlah		47.125.000,00	8.419.076.995,00	(8.371.951.995,00)	(99,44)

C.6.1.1.7 Setara Kas

Tidak terdapat saldo Setara Kas Per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

C.6.1.1.8 Investasi Jangka Pendek

Tidak terdapat saldo Investasi Jangka Pendek Per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

C.6.1.1.9 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.494.367.965,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.273.301.732,00 atau sebesar 2,56% dibandingkan Piutang Pajak TA 2020 sebesar Rp49.767.669.697,00, sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 6C.7 Piutang Pajak TA 2021

No	Jenis Piutang>Nama Debitur	Saldo awal 31-12-20	Penambahan Tahun 2021	Pengurangan Tahun 2021	Saldo Akhir 31-12-21	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Piutang Pajak Hotel	1.427.406,00	890.257.875,00	889.869.463,00	1.815.818,00	388.412,00	27,21
2	Piutang Pajak Restoran	38.689.274,00	6.773.494.228,00	6.796.612.356,00	15.571.146,00	(23.118.128,00)	(59,75)
3	Piutang Pajak Hiburan	21.793.000,00	281.241.850,00	290.498.850,00	12.536.000,00	(9.257.000,00)	(42,48)
4	Piutang Pajak Reklame	18.729.560,00	4.033.700.771,00	4.052.430.331,00	0,00	(18.729.560,00)	(100,00)
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	3.371.046.431,00	44.672.632.498,00	48.043.678.929,00	0,00	(3.371.046.431,00)	(100,00)
7	Piutang Pajak Parkir	14.103.000,00	330.303.425,00	331.419.425,00	12.987.000,00	(1.116.000,00)	(7,91)
8	Piutang Pajak Air Tanah	67.450.175,00	2.982.522.945,00	3.031.638.820,00	18.334.300,00	(49.115.875,00)	(72,82)
9	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	122.250,00	656.278.000,00	651.230.250,00	5.170.000,00	5.047.750,00	4.129,04
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	46.234.308.601,00	38.127.652.657,00	35.934.007.557,00	48.427.953.701,00	2.193.645.100,00	4,74
Jumlah		49.767.669.697,00	98.748.084.249,00	100.021.385.981,00	48.494.367.965,00	(1.273.301.732,00)	(2,56)

Selama Tahun 2021 terdapat penyelesaian Piutang Pajak Daerah sebesar Rp100.021.385.981,00 dan dari penyelesaian piutang pajak daerah tersebut terdapat penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan berdasarkan SK Bupati Nomor 971.11/331 Tahun 2021 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Bersyarat/Hapus Buku dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun 2021 sebesar Rp 3.385.721.931,00 dan penghapusan sanksi administrasi berupa denda piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Klaten tahun pajak 2009 sampai dengan 2010 sesuai Keputusan Bupati Nomor 971.11/35 Tahun 2022. Sedangkan penambahan piutang di tahun 2021 sebesar Rp98.748.084.249,00.

Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak tahun 2021 menggunakan perhitungan sebagaimana pada tabel berikut:



Tabel 6C.8 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak TA 2021

No	Jenis piutang				Jumlah	Tgl SKPD	Penyisihan Piutang				Total (Rp)	
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
							0-1 Tahun	>1-2 Tahun	>2-5 Tahun	>5 Tahun		
							0,50%	10%	50%	100%		
1	2	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8
1	Pajak Hotel	1.815.818,00				1.815.818,00	Tertampir	9.079,09	0,00	0,00	0,00	9.079,00
2	Pajak Restoran	2.344.348,00	6.032.588,00	6.367.210,00	827.000,00	15.571.146,00	Tertampir	11.721,74	603.258,80	3.183.605,00	827.000,00	4.625.586,00
3	Pajak Hiburan	668.000,00	6.556.000,00	4.757.000,00	555.000,00	12.536.000,00	Tertampir	3.340,00	655.600,00	2.378.500,00	555.000,00	3.592.440,00
4	Pajak Reklame	0,00			0,00	0,00	Tertampir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PPJU	0,00				0,00	Tertampir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.122.250,00	47.750,00			5.170.000,00	Tertampir	25.611,25	4.775,00	0,00	0,00	30.386,00
7	Pajak Parkir	2.712.500,00	7.074.500,00	2.600.000,00	600.000,00	12.987.000,00	Tertampir	13.562,50	707.450,00	1.300.000,00	600.000,00	2.621.013,00
8	Pajak Air Tanah	12.864.700,00	5.469.600,00		0,00	18.334.300,00	Tertampir	64.323,50	546.960,00	0,00	0,00	611.284,00
9	PBB	9.126.826.587,00	11.852.121.514,00	11.940.934.388,00	15.321.344.391,00	48.241.226.880,00	Tertampir	2.738.047.976,10	5.926.060.757,00	9.552.747.510,40	15.321.344.391,00	33.538.200.635,00
	Jumlah	9.152.354.203,00	11.877.301.952,00	11.954.658.598,00	15.323.326.391,00	48.307.641.144,00		2.738.175.614,18	5.928.578.800,80	9.559.609.615,40	15.323.326.391,00	33.549.690.423,00

Realisasi Piutang Pajak berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp14.944.677.542,00 dan Rp14.628.389.951,21 angka atas Penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp33.549.690.423,00) merupakan angka Penyisihan Piutang setelah dikurangi Penghapusan Piutang Pajak ditahun 2021 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6C.9 Nilai Bersih Piutang Pajak yang Dapat Direalisasikan TA 2021

No	Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020
		Rp	Rp
1	Piutang Pajak	48.494.367.965,00	49.767.669.697,00
2	Penyisihan Piutang Pajak	(33.549.690.423,00)	(35.139.279.745,79)
	Net Realizable Value (NRV)	14.944.677.542,00	14.628.389.951,21

C.6.1.1.10 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp586.814.359,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp344.513.160,00 atau sebesar 142,18% dibandingkan TA 2020 sebesar Rp242.301.199,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6C.10 Piutang Retribusi TA 2021

No	Piutang Retribusi	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan / Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	11.865.000,00	5.020.000,00	6.845.000,00	136,35
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	162.198.000,00	162.198.000,00	-	0,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.720.000,00	1.620.000,00	100.000,00	6,17
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	14.154.000,00	(14.154.000,00)	(100,00)
5	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	386.125.210,00	33.826.150,00	352.299.060,00	1.041,50
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	11.000.000,00	11.000.000,00	-	0,00
7	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	13.906.149,00	14.483.049,00	(576.900,00)	(3,98)
	Jumlah	586.814.359,00	242.301.199,00	344.513.160,00	142,18

Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2021 menggunakan perhitungan sebagai berikut :



Tabel 6C.11 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi TA 2021

Jenis piutang					Jumlah	Penyisihan Piutang				Total (Rp)
						Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
						0-1 Tahun	> 1 - 2 Tahun	> 2-5 Tahun	>5 Tahun	
						0,50%	10%	50%	100%	
2	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	3	5	6	7	8	9=5+7+8
Retribusi Pelayanan Parkir				162.198.000,00	162.198.000,00	0,00	0,00	0,00	162.198.000,00	162.198.000,00
Retribusi Pasar Grosir		368.925.060,00	5.176.500,00	12.023.650,00	386.125.210,00	0,00	36.892.506,00	2.588.250,00	12.023.650,00	51.504.406,00
Retribusi Pelayanan Persampahan	11.865.000,00				11.865.000,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00
Retribusi Pelayanan Pasar		1.720.000,00			1.720.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga			11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				13.906.149,00	13.906.149,00	0,00	0,00	0,00	13.906.149,00	13.906.149,00
Jumlah	11.865.000,00	370.645.060,00	16.176.500,00	188.127.799,00	586.814.359,00	69.750,00	37.064.506,00	8.088.250,00	188.127.799,00	233.350.305,00

Piutang Retribusi berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp353.464.054,00 dan Rp43.219.380,00 seperti pada tabel berikut:

Tabel 6C.12 Piutang Retribusi Berdasarkan Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan TA 2021

No	Uraian	31 Des 2021	32 Des 2020
		Rp	Rp
1	Piutang retribusi	586.814.359,00	242.301.199,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(233.350.305,00)	(199.081.819,00)
	Net Realizable Value (NRV)	353.464.054,00	43.219.380,00

C.6.1.1.11 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp19.990.555.249,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.13 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021

No	Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020
		Rp	Rp
1	Bank Jateng	11.341.811.839,00	0,00
2	BKK Tulung	1.371.186.959,45	0,00
3	Bank Klaten	3.369.181.500,00	0,00
4	PDAM	3.572.062.127,15	0,00
5	Perseroda Aneka Usaha	336.312.824,10	0,00
	Jumlah	19.990.555.249,70	0,00

C.6.1.1.12 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp63.845.037.797,46 terdiri dari piutang BLUD sebesar Rp51.396.804.908,00 dan Piutang Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp12.448.232.889,46. Piutang BLUD tersebut merupakan Piutang BPJS pada 34 Puskesmas sebesar Rp30.619.300,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras sebesar Rp51.366.185.608,00 yang terdiri dari Piutang Pihak Ketiga sebesar Rp47.241.078,00 dan Piutang BPJS sebesar Rp5.019.700,00, Piutang Covid-19 sebesar Rp51.313.924.830,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6C. 14 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah TA 2021

No	Uraian	31 Des 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penuruna n	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak (BPKD)	12.448.232.889,46	11.774.757.020,46	673.475.869,00	5,72
2	Piutang Pendapatan BLUD	51.396.804.908,00	4.367.726.669,00	47.029.078.239,00	1076,74
	- Puskesmas Klaten Utara	757.100,00	1.417.000,00	(659.900,00)	(46,57)
	- Puskesmas Klaten Tengah	930.200,00	405.000,00	525.200,00	129,68
	- Puskesmas Klaten Selatan	857.100,00	2.390.000,00	(1.532.900,00)	(64,14)
	- Puskesmas Kalikotes	1.538.200,00	1.790.000,00	(251.800,00)	(14,07)
	- Puskesmas Ngawen	12.100,00	90.000,00	(77.900,00)	(86,56)
	- Puskesmas Kebonarum	1.397.100,00	2.190.000,00	(792.900,00)	(36,21)
	- Puskesmas Wedi	2.599.200,00	2.862.000,00	(262.800,00)	(9,18)
	- Puskesmas Jogonalan 1	0,00	11.542.350,00	(11.542.350,00)	(100,00)
	- Puskesmas Jogonalan 2	0,00	2.622.000,00	(2.622.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Gantiwarno	0,00	6.833.190,00	(6.833.190,00)	(100,00)
	- Puskesmas Prambanan	0,00	4.446.000,00	(4.446.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Kebondalem Lor	957.100,00	2.147.000,00	(1.189.900,00)	(55,42)
	- Puskesmas Manisrenggo	2.780.400,00	16.280.000,00	(13.499.600,00)	(82,92)
	- Puskesmas Kemalang	3.150.200,00	3.595.000,00	(444.800,00)	(12,37)
	- Puskesmas Karangnongko	0,00	910.000,00	(910.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Jatinom	0,00	6.313.000,00	(6.313.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Kayumas	917.100,00	1.885.000,00	(967.900,00)	(51,35)
	- Puskesmas Karanganom	802.100,00	1.235.000,00	(432.900,00)	(35,05)
	- Puskesmas Tulung	0,00	870.000,00	(870.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Majegan	0,00	1.425.000,00	(1.425.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Polanharjo	3.008.400,00	4.604.000,00	(1.595.600,00)	(34,66)
	- Puskesmas Delanggu	0,00	4.580.000,00	(4.580.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Juwiring	965.100,00	6.459.000,00	(5.493.900,00)	(85,06)
	- Puskesmas Wonosari I	0,00	120.000,00	(120.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Wonosari II	1.477.100,00	1.040.000,00	437.100,00	42,03
	- Puskesmas Cepher	42.100,00	1.560.000,00	(1.517.900,00)	(97,30)
	- Puskesmas Jambu Kulon	142.100,00	1.468.000,00	(1.325.900,00)	(90,32)
	- Puskesmas Pedan	0,00	26.970.000,00	(26.970.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Karangdowo	861.100,00	42.746.200,00	(41.885.100,00)	(97,99)
	- Puskesmas Cawas I	0,00	2.685.000,00	(2.685.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Cawas II	0,00	235.000,00	(235.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Trucuk I	2.044.200,00	3.781.000,00	(1.736.800,00)	(45,93)
	- Puskesmas Trucuk II	127.100,00	1.386.000,00	(1.258.900,00)	(90,83)
	- Puskesmas Bayat	5.254.200,00	1.770.625,00	3.483.575,00	196,74
	- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	51.366.185.608,00	4.197.074.304,00	47.169.111.304,00	1123,86
Jumlah Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah		63.845.037.797,46	16.142.483.689,46	47.702.554.108,00	295,51

Pengakuan Piutang Lain-lain PAD yang Sah telah mempedomani pengakuan piutang dalam kebijakan akuntansi Nomor 40 Tahun 2021 beserta perubahannya, poin 2 yaitu Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, dengan kriteria:

- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- Jumlah piutang dapat diukur



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021 terdiri dari BPKD, Puskesmas, dan RSUD menggunakan perhitungan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6C.15 Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2021

NO	URAIAN	PERHITUNGAN PIUTANG				Jumlah	PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Puskesmas Klaten Utara	757.100,00	-			757.100,00	(3.785,50)				(3.785,50)
2	Puskesmas Klaten Tengah	930.200,00	-			930.200,00	(4.651,00)				(4.651,00)
3	Puskesmas Klaten Selatan	857.100,00	-			857.100,00	(4.285,50)				(4.285,50)
4	Puskesmas Kalikotes	1.538.200,00	-			1.538.200,00	(7.691,00)				(7.691,00)
5	Puskesmas Ngawen	12.100,00	-			12.100,00	(60,50)				(60,50)
6	Puskesmas Kebonarum	1.397.100,00	-			1.397.100,00	(6.985,50)				(6.985,50)
7	Puskesmas Wedi	2.599.200,00	-			2.599.200,00	(12.996,00)				(12.996,00)
8	Puskesmas Jogonalan 1	0,00	-			-	-				-
9	Puskesmas Jogonalan 2	0,00	-			-	-				-
10	Puskesmas Gantiwamo	0,00	-			-	-				-
11	Puskesmas Prambanan	0,00	-			-	-				-
12	Puskesmas Kebondalem Lor	957.100,00	-			957.100,00	(4.785,50)				(4.785,50)
13	Puskesmas Manisrenggo	2.780.400,00	-			2.780.400,00	(13.902,00)				(13.902,00)
14	Puskesmas Kemalang	3.150.200,00	-			3.150.200,00	(15.751,00)				(15.751,00)
15	Puskesmas Karangongko	0,00	-			-	-				-
16	Puskesmas Jatimom	0,00	-			-	-				-
17	Puskesmas Kayumas	917.100,00	-			917.100,00	(4.585,50)				(4.585,50)
18	Puskesmas Karanganom	802.100,00	-			802.100,00	(4.010,50)				(4.010,50)
19	Puskesmas Tulung	0,00	-			-	-				-
20	Puskesmas Majegan	0,00	-			-	-				-
21	Puskesmas Polanharjo	3.008.400,00	-			3.008.400,00	(15.042,00)				(15.042,00)
22	Puskesmas Delanggu	0,00	-			-	-				-
23	Puskesmas Juwiring	965.100,00	-			965.100,00	(4.825,50)				(4.825,50)
24	Puskesmas Wonosari I	0,00	-			-	-				-
25	Puskesmas Wonosari II	1.477.100,00	-			1.477.100,00	(7.385,50)				(7.385,50)
26	Puskesmas Cepher	42.100,00	-			42.100,00	(210,50)				(210,50)
27	Puskesmas Jambu Kulon	142.100,00	-			142.100,00	(710,50)				(710,50)
28	Puskesmas Pedan	0,00	-			-	-				-
29	Puskesmas Karangdowo	861.100,00	-			861.100,00	(4.305,50)				(4.305,50)
30	Puskesmas Cawas I	0,00	-			-	-				-
31	Puskesmas Cawas II	0,00	-			-	-				-
32	Puskesmas Trucuk I	2.044.200,00	-			2.044.200,00	(10.221,00)				(10.221,00)
33	Puskesmas Trucuk II	127.100,00	-			127.100,00	(635,50)				(635,50)
34	Puskesmas Bayat	5.254.200,00	-			5.254.200,00	(26.271,00)				(26.271,00)
35	RSUD	51.318.944.530,00		14.934.940,00	32.306.138,00	51.366.185.608,00	(256.594.722,65)	0	(7.467.470,00)	(32.306.138,00)	(296.368.330,65)
36	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.852.406.317,46	4.046.384.495,00	4.163.560.415,00	1.385.881.662,00	12.448.232.889,46	(855.721.895,10)	(2.023.192.247,50)	(3.330.848.332,00)	(1.385.881.662,40)	(7.595.644.137,00)
	Jumlah	54.201.970.147,46	4.046.384.495,00	4.178.495.355,00	1.418.187.800,00	63.845.037.797,46	(1.112.469.714,25)	(2.023.192.247,50)	(3.338.315.802,00)	(1.418.187.800,40)	(7.892.165.564,15)

Piutang Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp55.952.872.233,31 dan Rp6.179.142.457,35 seperti pada tabel berikut:

Tabel 6C.16 Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2021

No	Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020
		Rp	Rp
1	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	63.845.037.797,46	16.142.483.689,46
2	Penyisihan Piutang	(7.892.165.564,15)	(9.963.341.232,11)
	Net Realizable Value (NRV)	55.952.872.233,31	6.179.142.457,35



C.6.1.1.13 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Klaten mengakui Piutang transfer bagi hasil dana perimbangan sebesar Rp11.984.477.171,00. Piutang tersebut merupakan kurang bayar dana bagi hasil dari pemerintah pusat mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang telah dilakukan penyesuaian pada tahun 2021 dengan menihilkan karena tidak dapat ditagihkan kembali. Sedangkan per 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Klaten mengakui piutang transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp11.984.477.171,00. Piutang tersebut merupakan kurang bayar atas transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan tanggal Neraca atas kurang bayar Piutang Transfer Pemerintah Pusat baik yang berasal dari Bagi Hasil Pajak maupun Bagi Hasil Bukan Pajak belum masuk Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten dengan rincian seperti tabel dibawah ini:

Tabel 6C.17 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2021

No	Nama	PMK.Nomor 129/2021	JUMLAH TOTAL
		Rp	Rp
1	Piutang bagi Hasil Pajak	11.657.622.121,00	11.657.622.121,00
2	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak	326.855.050,00	326.855.050,00
Jumlah		11.984.477.171,00	11.984.477.171,00

C.6.1.1.14 Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Piutang lancar bagi hasil pajak daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp2.776.175.889,00, atau mengalami penurunan sebesar Rp19.029.802.586,00 atau 87,27% dibanding piutang pajak transfer bagi hasil pajak daerah tahun 2020 sebesar Rp21.805.978.475,00. Piutang tersebut merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2020 yang terdiri dari Piutang bagi Hasil PKB sebesar Rp1.704.214.652,00, BBNKB sebesar Rp1.056.142.989,00, PBBKB sebesar Rp421.085,00, dan PAP sebesar Rp15.397.163,00.

C.6.1.1.15 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.251.514.114,00 atau sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Penyisihan Bagian Lancar Jangka Panjang adalah sebesar (Rp3.251.514.114,00), Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang ini keseluruhan merupakan reklasifikasi dana bergulir yang timbul dari pinjaman yang sebelumnya dipersepsikan sebagai dana bergulir.

Memperhatikan Huruf B Bab I Buletin Teknis No. 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir, dinyatakan bahwa dana yang digulirkan oleh OPD biasa tidak memenuhi karakteristik dana bergulir sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Dana tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai Piutang. Menurut Buletin Teknis No.07 tentang Akuntansi Dana Bergulir. Satker biasa merupakan satker di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola keuangan negara/daerah sesuai dengan ketentuan APBN/APBD. Karakteristik satker biasa antara lain adalah satker tersebut harus menyetor pendapatan yang diterima oleh satker secepatnya ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah dan tidak boleh mengelola kas. Jika dana dikelola oleh satker biasa, satker menarik dana dari rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah, dengan atau tanpa lembaga perantara untuk diteruskan kepada masyarakat. Satker menagih kembali dana tersebut dari masyarakat untuk langsung disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Pada akhir tahun anggaran, satker



biasa tidak boleh mempunyai saldo kas. Jika dana tersebut hendak digulirkan kembali kepada masyarakat, satker harus mencantumkanannya dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Dana bergulir yang dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM di reklasifikasi menjadi piutang lancar dalam akun Bagian lancar tagihan jangka panjang pada tahun 2021 ini bersaldo sebesar Rp3.251.514.114,00 per 31 Desember 2021.

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6C.18 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Netto TA 2021

No	Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020
		Rp	Rp
1	Bagian lancar tagihan Jangka Panjang	3.251.514.114,00	3.251.514.114,00
2	Penyisihan Piutang	(3.251.514.114,00)	(3.251.514.114,00)
Net Realizable Value (NRV)		0,00	0,00

C.6.1.1.16 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebelum dikurangi penyisihan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp326.910.909,00 berkurang sebesar Rp2.500.003,00 koreksi karena setoran pada piutang macet Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah sebesar Rp0,00.

Keseluruhan jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan reklasifikasi dari Tagihan Jangka Panjang. Tagihan jangka panjang per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp0,00 sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 6C.19 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2021

No	Uraian	31/12/2021	31/12/2020
		Rp	Rp
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	326.910.909,00	329.410.912,00
2	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(326.910.909,00)	(329.410.912,00)
Net Realizable Value (NRV)		0,00	0,00

Terdapat Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang macet dan menyebabkan kerugian daerah Kabupaten Klaten yang telah memperoleh penetapan pembebanan sampai dengan tahun 2020. Kasus tersebut terbagi dalam dua jenis kerugian yaitu pada PNS bukan bendahara/Pejabat Lainnya dan Pihak Ketiga yang mencapai total kerugian Rp326.910.909,00. Selain itu juga terdapat tujuh kasus pada PNS bukan bendahara/Pejabat Lainnya yaitu Dana Penunjang Kegiatan, reses, fraksi dan tambahan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Klaten periode 1999-2004 dengan total kerugian Rp326.910.909,00 dan satu kasus Jaminan Kesehatan Daerah oleh pihak ketiga dengan kerugian Rp53.524.550,00. Untuk tahun anggaran 2021 terdapat pengurangan atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah sebesar Rp2.500.003,00.

Realisasi dari Pendapatan Lain-Lain Daerah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp2.500.003,00 merupakan Setoran Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) an. MS.



C.6.1.1.17 Beban Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka TA 2021 terdiri atas, Beban Asuransi Kendaraan Dinas dan Gedung sebesar Rp340.702.216,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6C.20 Beban Dibayar Dimuka TA 2021

No	Nama OPD	Uraian	Jangka Waktu	Nilai (Rp)
1	BPKD	Asuransi Gedung dan Bangunan	November 2021 - November 2022	159.419.603,00
2	BPKD	Asuransi Kendaraan Dinas	Desember 2021 - Desember 2022	181.282.613,00
Jumlah				340.702.216,00

C.6.1.1.18 Persediaan

Rekening Persediaan menggambarkan nilai persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/ harga pokok produksi terakhir/ nilai wajar. Sistem pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual untuk persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan metode periodik untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD. Sistem penilaian persediaan yang digunakan dalam pengukuran persediaan menggunakan metode FIFO. Nilai persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp84.183.162.728,03 dan Rp166.048.476.462,66, dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.3A – C.3ZG sebagaimana terinci pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6C.21 Rincian Persediaan Barang Habis Pakai TA 2021

No	Uraian	2021	2020
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.653.682.657,20	2.672.785.494,12
2	Bahan Kimia	1.343.893.451,56	3.584.251.315,37
3	Bahan Bakar dan Pelumas	10.696.350,00	6.745.200,00
4	Bahan Baku	108.370.250,00	3.902.295.140,29
5	Bahan/Bibit Tanaman	88.573.000,00	43.495.000,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.927.960,00	7.091.960,00
7	Isi Tabung Gas	3.963.800,00	1.445.000,00
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	80.000,00	44.200.000,00
9	Bahan Lainnya	0,00	3.016.981.790,35
10	Suku Cadang Alat Angkutan	24.790.800,00	168.579.300,00
11	Suku Cadang Alat Besar	11.000.000,00	0,00
12	Suku Cadang Alat Pertanian	40.241.000,00	0,00
13	Suku Cadang Alat Bengkel	782.000,00	0,00
14	Suku Cadang Lainnya	0,00	4.500.000,00
15	Alat Tulis Kantor	4.894.829.270,03	4.142.324.669,30
16	Kertas dan Cover	640.671.503,00	0,00
17	Bahan Cetak	29.000,00	11.984.250,00
18	Benda Pos	57.159.000,00	16.744.000,00
19	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	40.887.880,00
20	Bahan Komputer	1.851.214.768,00	0,00
21	Perabot Kantor	1.936.988.488,10	0,00
22	Alat Listrik	388.647.830,00	385.129.463,00
23	Perlengkapan Dinas	907.685.891,09	76.878.735,00
24	Perlengkapan Pendukung Olahraga	24.285.000,00	0,00
25	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	41.332.065,00	3.122.543.992,49
26	Obat	61.533.828.522,65	33.123.329.367,74
27	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	4.195.578.849,00	110.959.561.466,00
28	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	181.400.439,00
29	Natura	1.101.432.825,80	0,00
30	Pakan	287.814.000,00	535.322.000,00
31	Komponen Rambu-Rambu	8.750.000,00	0,00
32	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	9.711.000,00	0,00
33	Pipa Plastik PVC (UPVC)	6.203.446,60	0,00
	Jumlah	84.183.162.728,03	166.048.476.462,66

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp84.183.162.728,03 tersebut di dalamnya terdapat beberapa jenis barang di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil diantaranya berupa Blangko KK, Blangko Akta, dan Buku Register sebesar Rp1.379.104.180,00, yang secara fisik barangnya masih bagus dan layak di gunakan sebagai bahan operasional pendukung kegiatan kantor, namun dalam pemanfaatan barang tersebut sudah tidak bisa di gunakan karena sudah tidak relevan lagi dengan syarat dan ketentuan Peraturan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, serta baru akan di usulkan Penghapusan pada tahun anggaran yang akan datang, sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor : 031.3.3/498/16. Pada data persediaan diatas tidak termasuk di dalamnya saldo persediaan kedaluwarsa dan/ atau usang yang pencatatannya dipisahkan dari Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.476.295.624,59 terdiri dari persediaan bahan kimia sebesar Rp2.623.600,00, persediaan obat sebesar Rp1.473.672.024,59. Adapun rincian saldo persediaan yang kadaluarsa dan/atau usang yang pencatatannya dipisahkan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6C.22 Persediaan yang Kedaluwarsa dan/atau Usang yang Pencatatannya TA 2021
Angka pada persediaan obat-obatan di atas termasuk di dalamnya adalah sisa persediaan vaksin

NO	UNIT KERJA	BAHAN KIMIA	OBAT	TOTAL
		Baru	Baru	Baru
1	2	4	7	19
1	Dinas Kesehatan	-	539.813.869,18	539.813.869,18
2	Puskesmas Klaten Utara	-	30.037.545,70	30.037.545,70
3	Puskesmas Klaten Tengah	-	34.669.978,77	34.669.978,77
4	Puskesmas Klaten Selatan	-	11.448.428,00	11.448.428,00
5	Puskesmas Kalikotes	-	1.816.245,22	1.816.245,22
6	Puskesmas Ngawen	-	37.357.127,93	37.357.127,93
7	Puskesmas Kebonarum	-	21.573.007,41	21.573.007,41
8	Puskesmas Wedi	-	17.526.820,08	17.526.820,08
9	Puskesmas Jogonalan 1	-	28.596.647,44	28.596.647,44
10	Puskesmas Jogonalan 2	-	9.326.532,00	9.326.532,00
11	Puskesmas Gantiwarno	-	73.010.730,62	73.010.730,62
12	Puskesmas Prambanan	-	51.744.948,40	51.744.948,40
13	Puskesmas Kebondalem Lor	-	10.082.827,00	10.082.827,00
14	Puskesmas Manisrengo	-	24.121.899,45	24.121.899,45
15	Puskesmas Kemalang	-	13.270.531,00	13.270.531,00
16	Puskesmas Karangongko	-	42.351.379,00	42.351.379,00
17	Puskesmas Jatinom	-	9.953.195,70	9.953.195,70
18	Puskesmas Kayumas	-	15.948.539,50	15.948.539,50
19	Puskesmas Karanganom	-	13.714.909,58	13.714.909,58
20	Puskesmas Tulung	-	34.135.198,33	34.135.198,33
21	Puskesmas Majegan	2.623.600,00	25.565.365,80	28.188.965,80
22	Puskesmas Polanharjo	-	16.013.869,00	16.013.869,00
23	Puskesmas Delanggu	-	22.145.916,00	22.145.916,00
24	Puskesmas Juwiring	-	22.149.659,60	22.149.659,60
25	Puskesmas Wonosari I	-	14.494.111,00	14.494.111,00
26	Puskesmas Wonosari II	-	35.713.027,30	35.713.027,30
27	Puskesmas Ceper	-	33.912.699,00	33.912.699,00
28	Puskesmas Jambu Kulon	-	35.164.391,60	35.164.391,60
29	Puskesmas Pedan	-	31.739.032,00	31.739.032,00
30	Puskesmas Karangdowo	-	37.804.012,61	37.804.012,61
31	Puskesmas Cawas I	-	56.166.676,00	56.166.676,00
32	Puskesmas Cawas II	-	24.952.043,60	24.952.043,60
33	Puskesmas Trucuk I	-	42.489.195,42	42.489.195,42
34	Puskesmas Trucuk II	-	21.256.822,05	21.256.822,05
35	Puskesmas Bayat	-	7.187.323,30	7.187.323,30
36	RSUD Klaten	-	0,00	0,00
37	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.	-	26.417.520,00	26.417.520,00
Total		2.623.600,00	1.473.672.024,59	1.476.295.624,59

covid 19 pada kabupaten klaten, baik yang berasal dari droping dari pemerintah provinsi maupun dari kementerian kesehatan. Pelaksanaan vaksin covid 19 di klaten pada Tahun Anggaran 2021 di lakukan pada beberapa tahap dan program vaksinasi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menerima distribusi vaksin Covid-19 beserta perlengkapan pelaksanaan vaksinasi berupa Bahan Habis Pakai (BHP) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), sebagai berikut.

a. Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2021 masing-masing sebanyak 562.800 dosis yang berasal dari kementerian Kesehatan dosis dan sudah digunakan 1.186.276 dosis yang berasal dari Pemprov Jateng, dengan uraian sebagai berikut.

1) Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Kemenkes. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Klaten menerima vaksin Covid-19 jenis Sinovac dari Kemenkes sebanyak 562.800 dosis dan telah digunakan sebanyak 562.800 dosis tidak ada pengembalian vaksin Covid-19 jenis Sinovac ini dan tidak ada yang diserahkan ke Kabupaten lain, tidak ada pemusnahan vaksin. Pada posisi per 31 Desember 2021 tidak terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Kemenkes atau sisa vaksin Covid-19 sebanyak 0 dosis.



2) Vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Klaten menerima vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng sebanyak 1.186.276 dosis, telah digunakan sebanyak 271.036 dosis, dikembalikan sebanyak 14.740 dosis, tidak ada yang diserahkan ke Kabupaten lain, dan dimusnahkan (rusak dan/atau kedaluarsa) sebanyak 21 dosis. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Pemprov Jateng sebanyak 900.479 dosis.

b. BHP dalam Rangka Kegiatan Vaksinasi Covid-19

BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes dan Pemprov Jateng per 31 Desember 2021 masing-masing terdiri dari 1.816.384 item yang berasal dari Pemprov Jateng, dengan uraian sebagai berikut.

1) BHP dari Kemenkes

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan BHP dan tidak ada penerimaan BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes.

2) BHP dari Pemprov Jateng Pada awal Tahun 2021 terdapat saldo awal persediaan BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Pemprov Jateng sebanyak 80.000 item barang. Pada Tahun 2021 Kabupaten Klaten menerima BHP dari Pemprov Jateng sebanyak 1.816.384 item, telah digunakan sebanyak 1.805.263 item, tidak ada yang diserahkan ke Kabupaten lain dan pemusnahan BHP. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 yang berasal dari Pemprov Jateng terdiri dari 91.121 item.

C.6.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang terbagi menjadi dua, yaitu Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali. Metode penilaian investasi jangka panjang yang diterapkan di Kabupaten Klaten ada dua, yaitu metode Ekuitas untuk investasi jangka panjang permanen di Bank Klaten, Perusda Aneka Usaha dan PDAM Tirta Merapi dan Metode Biaya untuk investasi jangka panjang permanen di BKK Tulung, BKK Klaten, Bank Jateng dan PT. PRPP. Nilai investasi jangka Panjang permanen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2020 sebesar Rp 187.445.272.695,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.500.000.000,00 atau 4,75% dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp178.945.272.695,00, sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.23 Saldo Investasi Jangka Panjang TA 2021

No	Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Investasi Nonpermanen	0,00	0,00	0,00	0
2	Investasi Permanen	187.445.272.695,00	178.945.272.695,00	8.500.000.000,00	4,75
	Jumlah	187.445.272.695,00	178.945.272.695,00	8.500.000.000,00	4,75

C.6.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya. Bentuk investasi ini meliputi dana bergulir berupa penggaduhan ternak sapi/kambing yang disalurkan melalui Dinas Pertanian. Pada tahun 2016 akun dana bergulir berupa gaduhan hewan ternak telah direklasifikasi menjadi piutang jangka pendek berupa akun Bagian Lancar Tagihan Jangka Pendek. sehingga saldo investasi nonpermanen per 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2021 nihil.



C.6.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Permanen adalah investasi Pemerintah Kabupaten Klaten yang dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD). PMPD ditetapkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada Perusahaan Daerah yang pelaksanaannya dianggarkan melalui pembiayaan daerah dalam APBD tahun berkenaan. Besaran penambahan penyertaan modal dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan likuiditas BUMD yang bersangkutan.

PMPD Kabupaten Klaten dilakukan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), lembaga keuangan bank, lembaga keuangan nonbank, dan perusahaan swasta/pihak ketiga lainnya dengan nilai investasi per 31 Desember 2021 dan 2020 seperti pada tabel berikut :

Tabel 6C.24 Investasi Permanen TA 2021

No	Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Perusahaan Daerah / BUMD	187.145.272.695,00	178.645.272.695,00	8.500.000.000,00	4,76
2	Lembaga Keuangan - Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lembaga Keuangan - Non Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Perusahaan Swasta / Pihak III	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100
Jumlah		187.445.272.695,00	178.945.272.695,00	8.500.000.000,00	4,75

Perhitungan Investasi Permanen dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6C.25 Perhitungan Investasi Permanen TA 2021

Metode	BUMD	Penyertaan Modal S/D TAHUN LALU 2020	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (2021)	PENYESUAIAN PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (2021)	PENYERTAAN MODAL S/D TAHUN INI (2021)
Ekuitas	PDAM Tirta Merapi	71.926.740.535,00	4.500.000.000,00	0,00	76.426.740.535,00
Ekuitas	PT. BPR Bank Klaten	39.391.216.108,00	4.000.000.000,00	0,00	43.391.216.108,00
Cost	PD. BKK Klaten	3.820.000.000,00	0,00	0,00	3.820.000.000,00
Cost	PT. BPR BKK Tulung	2.960.000.000,00	0,00	0,00	2.960.000.000,00
Cost	PT. Bank Jateng	50.799.000.000,00	0,00	0,00	50.799.000.000,00
Ekuitas	PT. Aneka Usaha (Perseroda)	9.748.316.052,00	0,00	0,00	9.748.316.052,00
Cost	Swasta/Pihak III	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Jumlah		178.945.272.695,00	8.500.000.000,00	0,00	187.445.272.695,00

PD/BUMD tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) PDAM Tirta Merapi telah diaudit oleh KAP Mahsun Nurdiono Kukuh dan Rekan. Diterbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00001/3.0411/AU.2/05/1419-3/0/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp76.426.740.535,00.
- 2) PT. BPR Bank Klaten perseroda telah diaudit oleh KAP Ganung AB dan diterbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00004/2.1125/AU.2/07/1370-2/1/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp43.391.216.108,00.
- 3) PD. BKK Klaten yang telah diaudit oleh KAP TARMIZI ACHMAD Nomor 00034/2.0604/AU:/07/0430-1/1/II/2022 per tanggal 22 Febuari 2022 dan telah memiliki Laporan Keuangan Audited yang sebagaimana yang telah mereka laporkan ke Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Opini Wajar dengan Pengecualian perihal laporan ikhtisar kinerja dan LK Audited dan Unaudited Tahun 2021. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp3.820.000.000,00. Namun demikian sampai dengan tanggal Pelaporan saat ini PD. BKK Klaten masih dalam proses Likuidasi.
- 4) PT. BPR BKK Tulung yang telah diaudit oleh KAP Arnestesa yang diterbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00008/2.1180/AU.2/07/1460-1/1/II/2022 tanggal 15 Februari



2022 dengan Opini Wajar. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp2.960.000.000,00.

- 5) PT. Bank Jateng telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan. Diterbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00012/2.1133/AU.1/07/0354-2/1/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 dengan opini Wajar. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp50.799.000.000,00.
- 6) PT. Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten telah diaudit oleh KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi, dan Rekan. Diterbitkan Laporan Auditor Independen No 00021/2.1065/AU.2/05/1217-2/1/I/2022 Tanggal 24 Januari 2022 Dengan Opini Wajar. Dalam semua hal material, posisi keuangan PT. Aneka Usaha Kabupaten Klaten tanggal 31 Desember 2021, serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp9.748.316.052,00.
- 7) PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah Sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 masih dilakukan audit oleh KAP Sarastanto dan Rekan. Dengan Nomor KAP: 062/KAP.SNR/SPA/I/2022 dan belum dikeluarkan opini atas audit Laporan keuangan PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp300.000.000,00.
Seperti dijelaskan terinci pada Lampiran 4 BUMD

C.6.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap menggambarkan nilai aset tetap atau Barang/Kekayaan Milik Daerah (BMD) Kabupaten. yang telah dilakukan inventarisasi terakhir pada Tahun 2003 dan disajikan dalam Neraca Daerah untuk pertama kalinya per 31 Desember 2003. Sampai dengan tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Klaten belum memiliki neraca awal OPD. Dalam rangka penyusunan Neraca Awal OPD yang akan digabung/dikonsolidasikan ke dalam Neraca Daerah. maka Pemerintah Kabupaten Klaten dalam TA 2008 telah menunjuk PT Indoprofita Konsultama untuk melakukan inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) aset tetap/barang milik Pemerintah Daerah.

Pekerjaan meliputi inventarisasi aset tetap sesuai data Tahun 2003 dan mutasi Tahun 2004–2007 serta revaluasi nilai aset tetap per 31 Desember 2007. Pelaksanaan pekerjaan diikat dengan perjanjian Nomor 256/PPK-PPTK/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Kontrak Kerja Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah Kabupaten Klaten. Nilai pekerjaan sebesar Rp1.314.960.000,00 bersifat lump-sum. dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 1 Agustus 2008 atau berakhir tanggal 28 Desember 2008.

Laporan akhir pihak konsultan telah diterima Pemerintah Kabupaten Klaten tanggal 15 Desember 2008. dan telah beberapa kali diperbaiki (revisi) terakhir dengan surat PT Indoprofita Konsultama Nomor 0161303009 tanggal 13 Maret 2009. Berdasarkan laporan akhir tersebut nilai aset Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2007 sebesar Rp3.036.414.766.000,00 atau turun sebesar Rp1.954.175.669.499,00 dari nilai yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp4.990.590.435.499,00. Nilai aset per 31 Desember 2007 hasil revaluasi tersebut belum ditetapkan Bupati Klaten sampai dengan tahun 2012.

Untuk menindaklanjuti permasalahan aset tersebut pada tahun 2012 Kabupaten Klaten melakukan kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap dengan pendampingan dari tim BPKP dan diproses menggunakan bantuan aplikasi dari BPKP. yaitu aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7.5 Tahapan inventarisasi aset dijelaskan dengan gambar berikut:





Gambar 6.1 Tahapan Inventarisasi Aset
Flowchart Inventarisasi Aset Daerah



Dari gambar bagan alur di atas dapat dijelaskan bahwa proses awal adalah dilakukan dengan melakukan verifikasi terhadap data aset yang hasilnya dituangkan dalam Data Aset Terverifikasi (DAT). Berdasarkan DAT tersebut tim inventarisasi melakukan inventarisasi ke lapangan di semua OPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Hasil inventarisasi kemudian divalidasi sebelum dimasukkan ke aplikasi Simda BMD. Terhadap aset tetap yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi Simda BMD dan ternyata tidak memiliki nilai atau bernilai 1 rupiah diberikan nilai menggunakan metode yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Aset Tetap yang ditetapkan dengan SK Bupati.

Proses inventarisasi telah selesai pada tahun 2016 berdasarkan SK Bupati Nomor 030/48 tahun 2016. Hasil inventarisasi setelah dilakukan proses penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah aset tetap setelah dilakukan inventarisasi adalah sebesar Rp2.828.741.519.158,73 atau turun sebesar Rp3.247.459.665.962,36 (53,45%) dibandingkan saldo akhir per 31 Desember 2014 sebelum dilakukan inventarisasi sebesar Rp6.076.201.185.121,09. Penurunan terutama terjadi pada aset Tanah dengan proporsi sebesar 6,29%. Gedung dan Bangunan sebesar 77,29%. Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar 23,66% serta Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar 5,11% dibandingkan dengan total penurunan aset tetap. Penurunan Aset Tanah dan Gedung dan bangunan terutama disebabkan metode pemberian nilai aset yang digunakan dalam inventarisasi ini yaitu menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003. Sedangkan Penurunan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan terutama disebabkan karena banyak infrastruktur Jaringan irigasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Setelah hasil proses inventarisasi selesai ternyata masih ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan terutama aset tetap pada Dinas Pendidikan dan aset tanah berupa tanah jalan yang sebelumnya belum tercatat. Tabel Berikut adalah tambahan (pengurangan) aset tetap hasil perolehan Tahun anggaran 2015 serta rangkuman data hasil inventarisasi dan perbaikannya :

Tabel 6C.26 Tambahan (Pengurangan) Aset Tetap Hasil Perolehan Tahun Anggaran 2015

No	Uraian	Saldo Hasil Inventarisasi	Mutasi aset 2015	Perbaikan Inventarisasi dan Rekon 2015	Saldo 31-12-2015	Kenaikan / (penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	Tanah	582.730.784.923,00	5.063.432.000,00	698.789.675.000,00	1.286.583.891.923,00	703.853.107.000,00	120,79
2	Peralatan dan Mesin	557.546.176.362,00	78.144.157.317,00	-3.651.140.247,00	632.039.193.432,44	74.493.017.070,44	13,36
3	Gedung dan bangunan	524.580.307.951,00	198.281.355.519,00	1.669.291.008,00	724.530.954.478,00	199.950.646.527,00	38,12
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	775.504.724.877,00	88.452.216.549,00	8.911.995,00	863.965.853.421,00	88.461.128.544,00	11,41
5	Aset tetap lainnya	236.028.941.256,63	17.250.219.573,00	(10.740.593.232,00)	242.538.567.597,62	6.509.626.340,99	2,76
6	Konstruksi dalam pengerjaan	152.350.583.789,00	(72.322.694.378,00)		80.027.889.411,00	(72.322.694.378,00)	-47,47
7	Akaumulasi penyusutan	(1.043.376.122.755,10)	(81.369.943.635,00)	(423.300.263.749,00)	(1.548.046.330.138,64)	(504.670.207.383,54)	48,37
	Jumlah setelah disusutkan	1.785.365.396.403,53	233.498.742.945,00	262.775.880.775,00	2.281.640.020.124,42	496.274.623.720,89	27,80
	Jumlah sebelum penyusutan	2.828.741.519.158,63	314.868.686.580,00	686.076.144.524,00	3.829.686.350.263,06	1.000.944.831.104,43	35,38



Setelah ditambahkan mutasi aset dari Tahun Anggaran 2015 serta hasil perbaikan inventarisasi Saldo aset tetap per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp3.829.686.350.263,06 atau naik sebesar Rp1.000.944.831.104,43 (35,38%).

Khusus untuk Aset Tanah hanya dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM yaitu tambahan berupa tanah di bawah jalan raya milik Kabupaten Klaten yang sebelumnya belum tercatat. Selain Tanah, perbaikan data inventarisasi dilakukan hanya pada Dinas Pendidikan untuk aset Peralatan dan Mesin. Gedung dan Bangunan. Jalan. Jaringan. dan Irigasi. serta Aset Tetap Lainnya. Keterangan diatas adalah sekelumit sejarah perjalanan awal penataan aset di Kabupaten Klaten.

A. Rekonsiliasi atas Barang Milik Daerah (Aset Tetap)

Rekonsiliasi dilakukan atas seluruh aset tetap yang didapat dari kegiatan pengadaan barang yang dilakukan pada TA 2021. Penambahan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari Belanja Modal, kapitalisasi, reklasifikasi, mutasi, hibah/donasi, koreksi pencatatan dan/atau perolehan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. Pengurangan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari reklasifikasi, extracomtable (nilai dibawah batas kapitalisasi), mutasi, koreksi pencatatan, dan/atau pengurangan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Penambahan dan pengurangan pada masing-masing komponen Aset Tetap dari hasil rekon berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap

Tabel 6C.27 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap TA 2021

URAIAN	Tanah	Peralatan Dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
SALDO AWAL	832.215.833.323,00	781.817.876.877,00	955.733.620.648,00	1.563.883.565.527,06	268.305.695.189,98	57.293.192.856,00	4.459.249.784.421,04
Penambahan							
1 Belanja Modal	0,00	68.901.715.247,00	66.197.965.314,00	48.969.127.000,00	5.169.969.375,00	0,00	189.238.776.936,00
2 Mutasi Masuk	8.676.082.100,00	20.270.074.963,00	78.975.114.285,00	16.715.911.965,00	0,00	1.138.560.200,00	125.775.743.513,00
3 Kapitalisasi	0,00	1.918.452.127,00	4.571.335.275,00	520.656.451,00	62.740.500,00	1.050.620.600,00	8.123.804.953,00
4 Hibah	33.364.305.033,00	4.283.156.904,00	615.000.000,00	0,00	16.778.000,00	0,00	38.279.239.937,00
5 Koreksi	7.265.280.000,00	480.095.646,00	1.006.266.175,00	1.802.808.250,00	3.209.036.761,00	307.779.275,00	14.071.266.107,00
6 Reklas Masuk	0,00	1.998.067.860,00	2.188.234.000,00	10.784.629.363,00	8.892.635.200,00	13.133.876.250,00	36.997.442.673,00
Jumlah	49.305.667.133,00	97.851.562.747,00	153.553.915.049,00	78.793.133.029,00	17.351.159.836,00	15.630.836.325,00	412.486.274.119,00
Pengurangan							
1 Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Ekstrakom	0,00	2.470.299.595,00	378.818.183,00	0,00	7.524.000,00	0,00	2.856.641.778,00
3 Mutasi Keluar	8.676.082.100,00	20.270.074.963,00	78.975.114.285,00	16.715.911.965,00	0,00	1.138.560.200,00	125.775.743.513,00
4 Koreksi	86.102.000,00	0,00	3.011.754.880,00	1.720.413.764,00	0,00	1.229.931.491,00	6.048.202.135,00
5 Non Aset	0,00	2.381.461.240,00	378.955.213,00	358.133.500,00	221.259.130,00	0,00	3.339.809.083,00
6 Reklas Keluar	0,00	67.048.000,00	25.370.479.573,00	9.082.583.100,00	197.639.000,00	2.040.047.000,00	36.757.796.673,00
Jumlah	8.762.184.100,00	25.188.883.798,00	108.115.122.134,00	27.877.042.329,00	426.422.130,00	4.408.538.691,00	174.778.193.182,00
SALDO AKHIR	872.759.316.356,00	854.480.555.825,00	1.001.172.413.563,00	1.614.799.656.227,07	285.230.432.895,92	68.515.490.490,00	4.696.957.865.356,99

a. Belanja Modal

Keseluruhan Belanja Modal sebesar Rp189.238.776.936,00 merupakan belanja modal pada masing-masing rekening sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6C.28 Belanja Modal Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Belanja Modal Tanah	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.901.715.247,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.197.965.314,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.969.127.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.169.969.375,00
6	Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	Total	189.238.776.936,00



b. Mutasi Masuk

Mutasi sebesar Rp125.775.743.513,00 merupakan mutasi aset tetap pengelola dan antar OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.29 Mutasi Masuk Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	8.676.082.100,00
2	Peralatan dan Mesin	20.270.074.963,00
3	Gedung dan Bangunan	78.975.114.285,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.715.911.965,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.138.560.200,00
Total		125.775.743.513,00

c. Kapitalisasi

Kapitalisasi Belanja Barang Jasa dan Belanja Pegawai menjadi Aset Tetap senilai Rp8.123.804.953,00 merupakan aset tetap yang diperoleh dari Belanja Barang Jasa dan Belanja Pegawai pada OPD sebagai berikut:

Tabel 6C.30 Kapitalisasi Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.918.452.127,00
3	Gedung dan Bangunan	4.571.335.275,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	520.656.451,00
5	Aset Tetap Lainnya	62.740.500,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.050.620.600,00
Total		8.123.804.953,00

d. Hibah/Donasi Masuk

Donasi/Hibah senilai Rp38.279.239.937,00 merupakan penambahan aset tetap dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Komite Sekolah dan pihak lain yang telah dilengkapi berita acara serah terima pada OPD seperti terinci sebagai berikut:

Tabel 6C.31 Hibah/Donasi Masuk Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	33.364.305.033,00
2	Peralatan dan Mesin	4.283.156.904,00
3	Gedung dan Bangunan	615.000.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	16.778.000,00
Total		38.279.239.937,00

Hibah atau Donasi Tanah pada TA 2021 sebesar Rp33.364.305.033,00 yang terdiri dari Hibah Tanah dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp32.809.787.805,00 sesuai dengan berita acara terima Nomor 611/642.1/30 tentang Penyerahan Saran Prasarana dan Dokumen Daerah Irigasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten Klaten dan Hibah Tanah untuk Jalan Kabupaten dari RSUP Suradji Tirtonegoro sebesar Rp554.517.228,00. Hibah pada peralatan mesin diantaranya terdiri dari hibah peralatan pendukung kesehatan oleh masyarakat pada penanganan covid, hibah gedung dan bangunan diantaranya berupa hibah bangunan masjid pada beberapa puskesmas dan pasar dan pada hibah aset tetap lainnya adalah hibah peralatan musik drum band pada sekolahan.



e. Koreksi Masuk

Koreksi aset pada tahun 2021 senilai Rp14.071.266.107,00 merupakan koreksi atas perubahan status barang dari intra ke ekstra dan sebaliknya serta kesalahan catat karena update perubahan data atas rekon yang belum terselesaikan.

Tabel 6C.32 Koreksi Masuk Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	7.265.280.000,00
2	Peralatan dan Mesin	480.095.646,00
3	Gedung dan Bangunan	1.006.266.175,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.802.808.250,00
5	Aset Tetap Lainnya	3.209.036.761,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	307.779.275,00
Total		14.071.266.107,00

Koreksi Masuk Tanah merupakan hasil inventarisasi sebesar Rp7.265.280.000,00 berupa Tanah Pekarangan di Desa Krakitan dan Reklas Atas Tanah Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

f. Reklasifikasi Masuk

Reklas masuk mempengaruhi jumlah Aset yang berasal dari pergeseran atau perubahan akun ke akun. Penambahan aset dari reklasifikasi sebesar Rp36.997.442.673,00 pada rincian masing-masing rekening sebagai berikut ini:

Tabel 6C.33 Reklasifikasi Masuk Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Peralatan dan Mesin	1.998.067.860,00
2	Gedung dan Bangunan	2.188.234.000,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.784.629.363,00
4	Aset Tetap Lainnya	8.892.635.200,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.133.876.250,00
Total		36.997.442.673,00

2. Pengurangan Aset

a. Penghapusan Aset

Tidak ada penghapusan pada aset tetap, karena barang-barang yang di hapuskan sudah di pindahkan terlebih dahulu ke aset lainnya pada saat diusulkan penghapusan.

b. Ekstrakomptabel

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat pengurangan Aset Tetap dari barang-barang inventaris yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap (barang ekstrakomptabel) senilai (Rp2.856.641.778,00) seperti terinci sesuai jenis asetnya pada masing-masing rekening dibawah ini:

Tabel 6C.34 Ekstrakomptabel Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Peralatan dan Mesin	(2.470.299.595,00)
2	Gedung dan Bangunan	(378.818.183,00)
3	Aset Tetap Lainnya	(7.524.000,00)
Total		(2.856.641.778,00)



c. Mutasi Keluar

Mutasi sebesar (Rp125.775.743.513,00) merupakan mutasi aset tetap pengelola dan antar OPD berdasar asas kebutuhan dan kemanfaatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.35 Mutasi Keluar Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	(8.676.082.100,00)
2	Peralatan dan Mesin	(20.270.074.963,00)
3	Gedung dan Bangunan	(78.975.114.285,00)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(16.715.911.965,00)
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(1.138.560.200,00)
Total		(125.775.743.513,00)

Mutasi Keluar sebesar (Rp125.775.743.513,00) merupakan keluar dan masuk antar OPD, Perbedaan/ selisih antara mutasi keluar dan mutasi masuk aset tetap berada pada mutasi keluar dan mutasi masuk pada aset lainnya.

d. Koreksi Keluar

Koreksi aset tetap sebesar (Rp6.048.202.135,00) paling besar di pengaruhi oleh koreksi atas perubahan kelas dan kepemilikan jalan, dengan masing-masing rincian per rekeningnya tersajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6C.36 Koreksi Keluar Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	(86.102.000,00)
2	Gedung dan Bangunan	(3.011.754.880,00)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.720.413.764,00)
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(1.229.931.491,00)
Total		(6.048.202.135,00)

Koreksi atas aset diatas terdapat di beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.37 Koreksi Pengurang Per-OPD TA 2021

No	SKPD	Tanah	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
1	SEKRETARIAT DEWAN	0,00	0,00	0,00	96.707.200,00	96.707.200,00
2	BAGIAN ORGANISASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	128.440.616,00	128.440.616,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0,00	2.651.978.049,00	1.718.813.764,00	412.815.075,00	4.783.606.888,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0,00	0,00	0,00	45.500.000,00	45.500.000,00
7	PUSKESMAS BAYAT	24.852.000,00	0,00	0,00	0,00	24.852.000,00
8	SD Negeri	0,00	251.450.000,00	1.600.000,00	0,00	253.050.000,00
9	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHAKECIL, DAN MENENGAH	0,00	0,00	0,00	546.468.600,00	546.468.600,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PPKD	61.250.000,00	0,00	0,00	0,00	61.250.000,00
12	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	108.326.831,00	0,00	0,00	108.326.831,00
JUMLAH		86.102.000,00	3.011.754.880,00	1.720.413.764,00	1.229.931.491,00	6.048.202.135,00



e. Non Aset

Non Aset sebesar (Rp3.339.809.083,00) merupakan belanja modal yang tidak masuk dalam kriteria aset tetap karena sifat dan unsurnya tidak memenuhi kriteria pada kebijakan akuntansi untuk di kelompokkan pada kriteria aset, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.38 Non Aset Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Peralatan dan Mesin	(2.381.461.240,00)
2	Gedung dan Bangunan	(378.955.213,00)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(358.133.500,00)
4	Aset Tetap Lainnya	(221.259.130,00)
Total		(3.339.809.083,00)

Non Aset pada Gedung dan Bangunan merupakan Pemeliharaan yang tidak masuk dalam Kriteria Penambahan Nilai Aset, Jalan Irigasi yang masuk dalam Non Aset adalah kegiatan Jasa Konsultan Survei Kondisi Jalan, sedangkan Aset Tetap Lainnya diantaranya adalah Tanaman yang ukurannya belum masuk dalam Kriteria Aset Tetap.

f. Reklas Keluar

Reklas keluar senilai (Rp36.757.796.673,00) merupakan pengurangan dari pengadaan aset yang waktu perencanaan/penganggarannya di Belanja/Modal KIB yang lain, sehingga harus direklas keluar.

Tabel 6C.39 Reklas Keluar Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(67.048.000,00)
3	Gedung dan Bangunan	(25.370.479.573,00)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(9.082.583.100,00)
5	Aset Tetap Lainnya	(197.639.000,00)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(2.040.047.000,00)
Total		(36.757.796.673,00)

B. Saldo Aset Tetap

Aset tetap tahun 2021 pada saldo 31 Desember 2021 senilai Rp4.696.957.865.356,99 mengalami penambahan sebesar Rp237.708.080.935,94 atau 5,33% dibandingkan aset tetap pada saldo 31 Desember 2020 yang senilai Rp4.459.249.784.421,05. Berikut ini adalah rincian untuk tiap akun aset tetap, yaitu:

Tabel 6C.40 Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Tetap TA 2021

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020	Penambahan/ Pengurangan	Tren
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	Tanah	872.759.316.356,00	832.215.833.323,00	40.543.483.033,00	4,87%
2	Peralatan dan Mesin	854.480.555.825,00	781.817.876.877,00	72.662.678.948,00	9,29%
3	Gedung dan Bangunan	1.001.172.413.563,00	955.733.620.648,00	45.438.792.915,00	4,75%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.614.799.656.227,07	1.563.883.565.527,07	50.916.090.700,00	3,26%
5	Aset Tetap Lainnya	285.230.432.895,92	268.305.695.189,98	16.924.737.705,94	6,31%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	68.515.490.490,00	57.293.192.856,00	11.222.297.634,00	19,59%
Total		4.696.957.865.356,99	4.459.249.784.421,05	237.708.080.935,94	5,33%



C.6.1.3.1 Tanah

Tanah Aset Tetap berupa Tanah, terdiri dari Tanah Persil, Tanah Non Persil dan Lapangan. Penambahan dan pengurangan aset tetap Tanah pada saldo 31 Desember 2021 senilai Rp872.759.316.356,00 atau naik sebesar Rp40.543.483.033,00 atau 4,87% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2020 yang senilai Rp832.215.835.343,00. Atas nilai saldo akhir tanah sebesar Rp872.759.316.356,00. Karena adanya Hibah dari Provinsi dan atas proses Inventarisasi Tanah milik Pemerintah Kabupaten Klaten yang belum dicatat dalam daftar inventaris barang. Seperti terinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 6C.41 Rincian Objek Aset Tetap: Tanah TA 2021

NO	KODE REKENING	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.1.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	6.808.994.907,00	6.808.994.907,00	0,00	0,00%
2	1.3.1.01.02	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	47.100.785.677,00	47.100.785.677,00	0,00	0,00%
3	1.3.1.01.03	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	88.853.061.281,00	88.939.163.281,00	(86.102.000,00)	0,00%
4	1.3.1.01.04	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	24.031.768.380,00	24.031.768.380,00	0,00	0,00%
5	1.3.1.01.05	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	8.287.680.000,00	8.287.680.000,00	0,00	0,00%
6	1.3.1.01.06	Tanah Basah	11.154.345.685,00	11.154.345.685,00	0,00	0,00%
7	1.3.1.02.01	Tanah Kering	883.438.281,00	883.438.281,00	0,00	0,00%
8	1.3.1.02.02	Tanah Perkebunan	534.271.000,00	534.271.000,00	0,00	0,00%
9	1.3.1.02.03	Tanah Hutan	2.003.096.000,00	2.003.096.000,00	0,00	0,00%
10	1.3.1.02.04	Tanah Pertanian	3.950.254.522,00	3.950.254.522,00	0,00	0,00%
11	1.3.1.02.07	Tanah Lapangan Olahraga	7.379.358.000,00	7.379.358.000,00	0,00	0,00%
12	1.3.1.03.01	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	1.486.647.670,00	1.486.647.670,00	0,00	0,00%
13	1.3.1.03.03	Tanah untuk Jalan	615.204.606.977,00	613.702.569.749,00	1.502.037.228,00	0,24%
14	1.3.1.03.07	Tanah untuk Bangunan Air	33.258.079.805,00	448.292.000,00	32.809.787.805,00	7318,84%
15	1.3.1.03.08	Tanah untuk Bangunan Instalasi	9.802.444.750,00	9.802.444.750,00	0,00	0,00%
16	1.3.1.03.09	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	792.818.421,00	792.818.421,00	0,00	0,00%
17	1.3.1.03.11	Tanah untuk Makam	4.909.905.000,00	4.909.905.000,00	0,00	0,00%
18	1.3.1.03.12	Tanah Kampung	6.317.760.000,00	0,00	6.317.760.000,00	0,00%
TOTAL			872.759.316.356,00	832.215.835.343,00	40.543.483.033,00	4,87%

C.6.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp854.480.555.825,00 mengalami kenaikan sebesar Rp72.662.678.948,00 atau 9,29% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2020 yang senilai Rp781.817.876.877,00. Diantaranya dikarenakan adanya Penambahan Belanja Modal dan Hibah seperti terinci di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6C.42 Rincian Objek Aset Tetap: Peralatan dan Mesin TA 2021

NO	KODE REKENING	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.2.01	Alat Besar Darat	26.038.968.679,00	24.440.088.679,00	1.598.880.000,00	6,54%
2	1.3.2.02	Alat Besar Apung	4.714.600,00	4.714.600,00	0,00	0,00%
3	1.3.2.03	Alat Bantu	1.652.008.635,00	1.299.668.757,00	352.339.878,00	27,11%
4	1.3.2.04	Alat Angkutan Darat Bermotor	146.297.666.585,00	142.593.682.782,00	3.703.983.803,00	2,60%
5	1.3.2.05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.029.772.782,00	1.835.997.983,00	193.774.799,00	10,55%
6	1.3.2.06	Alat Angkutan Apung Bermotor	241.320.000,00	241.320.000,00	0,00	0,00%
7	1.3.2.07	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	131.100.000,00	131.100.000,00	0,00	0,00%
8	1.3.2.08	Alat Bengkel Bermesin	1.480.078.594,00	1.242.146.844,00	237.931.750,00	19,15%
9	1.3.2.09	Alat Bengkel Tak Bermesin	796.191.241,00	787.692.241,00	8.499.000,00	1,08%
10	1.3.2.10	Alat Ukur	3.638.426.009,00	3.508.846.009,00	129.580.000,00	3,69%
11	1.3.2.11	Alat Pengolahan	3.123.198.158,00	2.829.809.708,40	293.388.449,60	10,37%
12	1.3.2.12	Alat Kantor	97.551.014.331,00	89.242.160.634,40	8.308.853.696,60	9,31%
13	1.3.2.13	Alat Rumah Tangga	188.857.254.319,00	177.258.277.386,00	11.598.976.933,00	6,54%
14	1.3.2.14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.105.922.476,00	1.067.888.477,00	38.033.999,00	3,56%
15	1.3.2.15	Alat Studio	11.441.448.045,00	8.705.017.015,00	2.736.431.030,00	31,44%
16	1.3.2.16	Alat Komunikasi	10.567.543.752,00	10.077.792.285,00	489.751.467,00	4,86%
17	1.3.2.17	Peralatan Pemanancar	8.302.674.975,00	7.351.672.264,00	951.002.711,00	12,94%
18	1.3.2.18	Alat Kedokteran	133.052.247.962,00	121.979.806.660,20	11.072.441.301,80	9,08%
19	1.3.2.19	Alat Kesehatan Umum	101.419.271,00	90.469.271,00	10.950.000,00	12,10%
20	1.3.2.20	Unit Alat Laboratorium	47.892.790.900,00	42.950.323.785,00	4.942.467.115,00	11,51%
21	1.3.2.21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	168.448.364,00	120.333.364,00	48.115.000,00	39,98%
22	1.3.2.22	Alat Peraga Praktik Sekolah	16.252.738.203,00	16.143.429.253,00	109.308.950,00	0,68%
23	1.3.2.23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	209.893.200,00	5.646.000,00	204.247.200,00	3617,56%
24	1.3.2.24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	158.228.154,00	9.234.654,00	148.993.500,00	1613,42%
25	1.3.2.25	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	72.730.000,00	72.730.000,00	0,00	0,00%
26	1.3.2.26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.748.604.612,00	3.500.022.612,00	248.582.000,00	7,10%
27	1.3.2.27	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	4.221.401,00	4.221.401,00	0,00	0,00%
28	1.3.2.28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.241.502.069,00	1.241.502.069,00	0,00	0,00%
29	1.3.2.29	Komputer Unit	109.414.984.550,00	88.223.662.848,00	21.191.321.702,00	24,02%
30	1.3.2.30	Peralatan Komputer	23.515.373.590,00	20.017.592.173,00	3.497.781.417,00	17,47%
31	1.3.2.31	Alat Eksplorasi Topografi	72.268.895,00	47.348.895,00	24.920.000,00	52,63%
32	1.3.2.32	Alat Pelindung	91.514.641,00	91.514.641,00	0,00	0,00%
33	1.3.2.34	Alat SAR	236.811.900,00	210.933.000,00	25.878.900,00	12,27%
34	1.3.2.35	Alat Kerja Penerbangan	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00%
35	1.3.2.36	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	16.011.000,00	16.011.000,00	0,00	0,00%
36	1.3.2.47	Unit Peralatan Proses/Produksi	9.774.600,00	0,00	9.774.600,00	0,00%
37	1.3.2.48	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	10.732.791.675,00	10.262.181.929,00	470.609.746,00	0,00%
38	1.3.2.49	Peralatan Olahraga	4.221.797.657,00	4.205.937.657,00	15.860.000,00	0,00%
TOTAL			854.480.555.825,00	781.817.876.877,00	72.662.678.948,00	9,29%

C.6.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.001.172.413.563,00 Diantaranya dikarenakan adanya Pemeliharaan yang dikapitalisasi dan Penambahan Belanja Modal.

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan terdiri dari : Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Bangunan Menara, Bangunan Bersejarah, Tugu Peringatan, Monumen/Bangunan Bersejarah, Tugu Peringatan, Tugu Titik Kontrol/Pasti, dan Rambu-Rambu. Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp1.001.172.431.563,00 mengalami kenaikan senilai Rp45.438.792.915,00 atau 4,75% dari Tahun 2020 senilai Rp955.733.620.648,00, banyak di pengaruhi oleh Belanja Modal, dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6C.43 Rincian Objek Aset Tetap: Gedung dan Bangunan TA 2021

NO	KODE REKENING	URAIAN	2021	2020	kenaikan / Penuruna	Tren
1	1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	911.061.985.819,00	869.164.691.849,00	41.897.293.970,00	4,82%
2	1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	48.830.198.216,00	47.032.481.393,00	1.797.716.823,00	3,82%
3	1.3.3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	7.535.358.523,00	7.535.358.523,00	0,00	0,00%
4	1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	33.744.871.005,00	32.001.088.883,00	1.743.782.122,00	94,832453
TOTAL			1.001.172.413.563,00	955.733.620.648,00	45.438.792.915,00	4,75%



C.6.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 31 Desember 2021 senilai Rp1.614.799.656.227,07 mengalami kenaikan sebesar Rp50.916.090.699,99 atau 3,26% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2020 yang senilai Rp1.563.883.565.527,07. Diantaranya dikarenakan adanya Penambahan Belanja Modal dan Pemeliharaan yang dikapitalisasi. Dengan rincian sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 6C.44 Rincian Objek Aset Tetap: Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021

NO	KODE REKENING	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.4.01.01	Jalan	1.298.471.879.206,07	1.258.340.587.390,07	40.131.291.816,00	3,19%
2	1.3.4.01.02	Jembatan	174.705.134.411,00	174.705.134.411,00	0,00	0,00%
3	1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	4.800.945.453,00	4.800.945.453,00	0,00	0,00%
4	1.3.4.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	5.305.461.024,00	4.374.318.024,00	931.143.000,00	21,29%
5	1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Ak	12.834.479.942,00	12.834.479.942,00	0,00	0,00%
6	1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	904.353.405,00	904.353.405,00	0,00	0,00%
7	1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	10.548.642.861,00	11.105.491.563,00	(556.848.702,00)	-5,01%
8	1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	5.107.827.465,00	5.061.592.673,00	46.234.792,00	0,91%
9	1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.440.539.015,00	1.575.042.123,00	(134.503.108,00)	-8,54%
10	1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	1.558.050.487,00	262.530.720,00	1.295.519.767,00	493,47%
11	1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	11.776.577.065,00	5.644.410.006,00	6.132.167.059,00	108,64%
12	1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	100.199.373,00	100.199.373,00	0,00	0,00%
13	1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	11.229.383.549,00	11.229.383.549,00	0,00	0,00%
14	1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	76.016.182.971,00	729.450.689,00	3.071.086.076,00	0,00%
TOTAL			1.614.799.656.227,07	1.563.883.565.527,07	50.916.090.700,00	3,26%

C.6.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap lainnya pada 31 Desember 2021 senilai Rp285.230.432.895,92 mengalami kenaikan sebesar Rp16.924.737.705,94 atau 6,31% dari Tahun 2020 senilai Rp268.305.695.189,98 pada penambahan aset ini banyak di pengaruhi oleh pengadaan pada belanja Buku di belanja Bantuan Operasional Sekolah, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6C.45 Rincian Objek Aset Tetap: Aset Tetap Lainnya TA 2021

NO	KODE REKENING	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.5.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	140.840.957.459,94	136.183.769.714,98	4.657.187.744,96	3,42%
2	1.3.5.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	83.503.319,00	83.503.319,00	0,00	0,00%
3	1.3.5.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	1.229.921.896,00	1.182.986.396,00	46.935.500,00	3,97%
4	1.3.5.01.04	Musik	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	1.3.5.01.05	Karya Grafika (Graphic Material)	13.595.000,00	13.595.000,00	0,00	0,00%
6	1.3.5.01.06	Three Dimensional Artifacts and Realita	27.893.500,00	27.893.500,00	0,00	0,00%
7	1.3.5.02.01	Barang Bercorak Kesenian	5.763.962.301,98	5.688.858.302,00	75.103.999,98	98,697007
8	1.3.5.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	255.073.426,00	252.073.426,00	3.000.000,00	1,19%
9	1.3.5.02.03	Tanda Penghargaan	91.413.200,00	91.413.200,00	0,00	0,00%
10	1.3.5.03.01	Hewan Piaraan	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	1.3.5.04.01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	331.790.000,00	331.790.000,00	0,00	0,00%
12	1.3.5.05.01	Tanaman	1.895.980.718,00	1.895.980.718,00	0,00	0,00%
13	1.3.5.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	134.696.342.075,00	122.553.831.614,00	12.142.510.461,00	0,00%
TOTAL			285.230.432.895,92	268.305.695.189,98	16.924.737.705,94	6,31%



C.6.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saldo 31 Desember 2021 senilai Rp68.515.490.490,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.222.297.634,00 atau 19,59% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2020 yang senilai Rp57.293.192.856,00. Diantaranya dipengaruhi oleh Penambahan Belanja Modal Gedung Bangunan yang belum siap digunakan, pada pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Gedung Pertemuan Megawati dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 6C.46 Rincian Objek Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2021

NO	KODE REKENING	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	1.3.6.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	66.815.344.396,00	55.538.899.001,00	11.276.445.395,00	20,30%
3	1.3.6.49	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.700.146.094,00	1.754.293.855,00	(54.147.761,00)	-3,09%
TOTAL			68.515.490.490,00	57.293.192.856,00	11.222.297.634,00	19,59%

Dengan rincian konstruksi dalam pengerjaan per OPD disajikan dalam tabel rinci dibawah ini:

Tabel 6C.47 Rincian Per OPD Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2021

No	SKPD	31-Des-21	31-Des-20	Kenaikan/ Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp.	%
1	DINAS PENDIDIKAN	0,00	1.098.611.000,00	-1.098.611.000,00	-100%
2	DINAS KESEHATAN	197.451.500,00	197.451.500,00	0,00	0%
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	239.646.000,00	45.500.000,00	194.146.000,00	427%
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.142.217.994,00	2.063.210.710,00	79.007.284,00	4%
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	65.163.441.764,00	52.669.634.814,00	12.493.806.950,00	24%
6	DINAS PERHUBUNGAN	73.393.240,00	73.393.240,00	0,00	0%
7	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	339.634.692,00	886.103.292,00	-546.468.600,00	-62%
8	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	48.990.000,00	48.990.000,00	0,00	0%
9	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	128.019.300,00	128.019.300,00	0,00	0%
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	42.294.000,00	42.294.000,00	0,00	0%
11	SEKRETARIAT DPRD	140.402.000,00	39.985.000,00	100.417.000,00	251%
JUMLAH		68.515.490.490,00	57.293.192.856,00	11.222.297.634,00	19,59%

C.6.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Perhitungan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan bahwa metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan pendekatan berdasarkan bulan penggunaan aset tetap.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.220.769.712.141,48) mengalami kenaikan sebesar Rp224.576.559.208,30 dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Rincian Rekening 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.902.339.513.028,89). Sedangkan Saldo Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6C.48 Rincian Objek Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2021

NO	Uraian	Harga perolehan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
2	Peralatan dan Mesin	854.480.555.825,00	71.012.620.143,57	(627.319.370.854,85)	227.161.184.970,15
3	Gedung dan Bangunan	1.001.172.413.563,00	19.624.299.219,07	(210.024.326.890,40)	791.148.086.672,60
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.614.799.656.227,07	136.724.026.653,31	(1.312.990.645.509,56)	301.809.010.717,51
5	Aset Tetap Lainnya	285.230.432.895,92	12.911.406.716,36	(70.435.368.886,67)	214.795.064.009,25
Jumlah		3.755.683.058.510,99	240.272.352.732,31	(2.220.769.712.141,48)	1.534.913.346.369,51



Rincian data perincian aset diatas adalah proses penyusutan aset tetap sesuai dengan umur efektivitas barang dari harga perolehan sampai dengan terbentuk Nilai Buku.

C.6.1.4 Dana Cadangan

Pada tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki Dana Cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00 . Sesuai dengan pembentukan Dana Cadangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, Tujuan Pembentukan Dana Cadangan untuk menyediakan biaya guna mendukung kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adapun sumber dari pemenuhan dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah selain DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk deposito berjangka 1 bulan pada Bank Jateng dengan nomor Bilyet A31977.

C.6.1.4.1 Rekonsiliasi atas Barang Milik Daerah (Aset Lainnya)

Rekonsiliasi dilakukan atas seluruh Aset Lainnya yang didapat dari kegiatan pengadaan barang yang dilakukan pada TA 2021. Penambahan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari Belanja Modal, kapitalisasi, reklasifikasi, mutasi, hibah/donasi, koreksi pencatatan dan/atau perolehan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. Pengurangan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari reklasifikasi, extracomptable (nilai dibawah batas kapitalisasi), mutasi, koreksi pencatatan, dan/atau pengurangan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Penambahan dan pengurangan pada masing-masing komponen aset lainnya dari hasil rekonsiliasi berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6C.49 Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya TA 2021

URAIAN	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tidak Berwujud	Aset Lain-lain	Jumlah
SALDO AWAL	9.532.430.760,00	14.623.881.573,00	337.649.859.547,22	361.806.171.880,22
Penambahan				
1 Belanja Modal	0,00	367.996.000,00	0,00	367.996.000,00
2 Mutasi Masuk	0,00	0,00	1.233.800.000,00	1.233.800.000,00
3 Kapitalisasi	0,00	166.253.000,00	0,00	166.253.000,00
4 Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Koreksi	0,00	0,00	7.651.197.744,16	7.651.197.744,16
6 Reklas Masuk	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	534.249.000,00	8.884.997.744,16	9.419.246.744,16
Pengurangan				
1 Penghapusan	0,00	0,00	37.588.254.526,00	37.588.254.526,00
2 Ekstrakom	0,00	31.460.000,00	0,00	31.460.000,00
3 Mutasi Keluar	0,00	0,00	1.233.800.000,00	1.233.800.000,00
4 Koreksi	0,00	2.971.188.820,00	0,00	2.971.188.820,00
5 Non Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Reklas Keluar	0,00	239.646.000,00	0,00	239.646.000,00
Jumlah	0,00	3.242.294.820,00	38.822.054.526,00	42.064.349.346,00
SALDO AKHIR	9.532.430.760,00	11.915.835.753,00	307.712.802.765,38	329.161.069.278,38

1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada saldo 31 Desember 2021 senilai Rp9.532.430.760,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan pada saldo 31



Desember 2020 yang senilai Rp9.532.430.760,00. Ini terdiri dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga kepada pasar Delanggu dan pasar Pedan.

2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud pada saldo 31 Desember 2021 senilai Rp11.915.835.753,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.708.045.820,00 atau (18,52%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2020 yang senilai Rp14.623.881.573,00. Diantaranya dikarenakan adanya penambahan pada belanja modal soft ware dan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa serta pengurangan pada barang yang nilainya di bawah kapitalisasi serta koreksi kondisi barang yang sudah tidak digunakan lagi dalam operasional kantor.

3. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain pada saldo 31 Desember 2021 senilai Rp307.712.802.765,38 mengalami penurunan sebesar Rp29.937.056.782,00 atau (8,87%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2020 yang senilai Rp337.649.859.547,22. Diantaranya dikarenakan adanya koreksi masuk dari aset lain yang diberhentikan penggunaannya dalam operasional kantor dan pengurangan pada proses penghapusan aset di Tahun Anggaran 2021.

C.6.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya menggambarkan nilai perolehan atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki atau dikuasai dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2020 dan 2021 yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka pajang, aset tetap dan dana cadangan, adapun aset lainnya sebesar Rp152.283.378.628,89 mengalami penurunan senilai Rp11.606.340.526,62 atau (1,41%) dibandingkan per 31 Desember 2020 senilai Rp163.889.719.155,51. Ini dipengaruhi oleh aktivitas rekonsiliasi aset seperti terinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 6C.50 Aset Lainnya TA 2021

NO	Uraian	31/12/2021	31/12/2020
		Rp	Rp
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	9.532.430.760,00	9.532.430.760,00
2	Aset tidak berwujud	11.915.835.753,00	14.623.881.573,00
3	Aset lain-lain	307.712.802.765,38	337.649.859.547,22
4	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(166.390.981.433,16)	(187.982.591.350,00)
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.549.827.058,33)	(9.933.861.374,71)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(936.882.158,00)	0,00
Jumlah		152.283.378.628,89	163.889.719.155,51

C.6.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp9.532.430.760,00 merupakan bentuk kerjasama dan nilai-nilai yang tersaji mulai Tahun 2016 dalam Neraca Kabupaten Klaten tidak ada perubahan sampai per 31 Desember 2021 dan 2020 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6C.51 Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2021

Uraian	31/12/2021	31/12/2020
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	9.532.430.760,00	9.532.430.760,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(936.882.158,00)	0,00
Jumlah	8.595.548.602,00	9.532.430.760,00



Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.532.430.760,00 sama dengan Tahun lalu berupa kerjasama atas Pembangunan Pasar. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga) sebesar (Rp936.882.158,00) baru tercatat di rekening ini pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan klasifikasi dan kodefikasi yang baru sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019.

Adapun rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 6C.52 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2021

NO	Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Ket
1	Pembangunan Plasa Klaten	-	-	
2	Pembangunan Pasar Delanggu	6.314.340.760,00	6.314.340.760,00	
3	Pembangunan Pasar Pedan	3.218.090.000,00	3.218.090.000,00	
Jumlah		9.532.430.760,00	9.532.430.760,00	

Penjelasan dari masing-masing rincian pada tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Plasa Klaten

Pembangunan Plasa Klaten dikerjasamakan dengan PT. Inti Griya Prima Sakti (PT. IGPS) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 051/1481/1991 dan Nomor 159/SK/IGPS/VIII/91 tanggal 22 Agustus 1991 tentang Kerjasama Bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pelataran Serba Ada (Plasa) Klaten telah berakhir dengan terbitnya berita acara serah terima tanah dan seluruh bangunan ruko, kios, dan los serta fasilitas penunjang plasa klaten yang terletak diatas tanah hak pengelolaan (HPL) nomor: 1/Kelurahan Kabupaten Atas Nama Pemerintah Kabupaten Klaten Yang Terletak Di Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten dan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Klaten pada hari rabu tanggal lima belas Juli tahun 2020 sesuai dengan BAST nomor: 510.17 / 419/19 / 2020 sehingga bersamaan dengan itu ini juga di keluarkan dari aset yang di kerjasamakan.

Pada Tahun 2020 telah dilakukan serah terima antara PT Inti Griya Prima Sakti dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berupa tanah dan seluruh bangunan ruko, kios dan los serta fasilitas penunjang plaza klaten yang terletak di atas tanah hak pengelolaan (HPL) nomor: 1/Kelurahan Kabupaten atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten yang terletak di Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 510.17/419/19/2020 tanggal 15 Juli 2020.

Sampai saat ini Bangunan Plasa Klaten masih dalam proses negosiasi harga dan belum ada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT Inti Griya Sakti.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu

Kerjasama pembangunan Pasar Delanggu dilakukan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa (PT. KBBP) sesuai perjanjian Nomor 2 Tahun 2007 dan Nomor 11/ADM-SPK/KBBP/111/2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Delanggu Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 34 seluas 5.870 m² di Pasar Delanggu Barat dan tanah HP Nomor 36 seluas 1.895 m² di Pasar Delanggu Timur atau seluruhnya seluas 7.765 m². Tanah tersebut diserahkan kepada pihak PT. KBBP dalam rangka kerjasama. Berdasarkan NJOP tanah per m² pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp702.000,00 per m² maka nilai tanah Pasar Delanggu adalah sebesar Rp 6.314.340.760,00. Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Delanggu dalam Neraca Kabupaten Klaten per 31 Desember 2013. Sedangkan PT. KBBP menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 288 kios dan 1.010 los beserta fasilitasnya di Pasar Delanggu sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp17.074.948.000,00.

3. Kemitraan Pihak Ketiga Pasar Pedan



Kerjasama pembangunan Pasar Pedan dilakukan dengan PT. Dewata Solusi Bangunan (PT. DSB) sesuai perjanjian Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 077/DSB-KLT/IX/08 tanggal 18 September 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Pedan Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 4 seluas 4.230 m² dan HP Nomor 6 seluas 7.990 m² keduanya terletak di Desa Keden Kecamatan Pedan. Tanah seluruhnya seluas 12.220 m² (4.230 m² + 7.990 m²). Tanah tersebut diserahkan kepada PT. DSB dalam rangka kerjasama selama 25 tahun. Perhitungan nilai atas tanah yang dikerjasamakan tersebut didasarkan atas NJOP tanah per m² pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp285.000,00. Sehingga nilai atas tanah Pasar Pedan adalah sebesar Rp 3.218.090.000,00. Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Pedan dalam Neraca Kabupaten Klaten per 31 Desember 2013. Sedangkan PT. DSB menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 377 kios seluas 5.273,72 m² dan 785 los seluas 2.622,91 m² beserta fasilitasnya di Pasar Pedan sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp36.965.910.000,00.

C.6.1.5.3 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset tak berwujud dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 senilai Rp11.915.835.753,00 mengalami penurunan senilai Rp2.708.045.820,00 dari Tahun 2020 senilai Rp14.623.881.573,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.53 Aset Tak Berwujud TA 2021

NO	Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikkan/Penurunan
1	Software	1.905.289.647,00	2.171.375.792,00	-266.086.145,00
2	Kajian	9.009.921.106,00	11.257.063.531,00	(2.247.142.425,00)
3	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.000.625.000,00	1.195.442.250,00	-194.817.250,00
4	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.549.827.058,33)	(9.933.861.374,71)	384.034.316,38
Jumlah Aset Tak Berwujud (Bruto)		11.915.835.753,00	14.623.881.573,00	(2.708.045.820,00)
Jumlah Aset Tak Berwujud (Netto)		2.366.008.694,67	4.690.020.198,29	(2.324.011.503,62)

Penjelasan atas masing-masing Aset Tak Berwujud diuraikan sebagai berikut :

1. Software

Software per 31 Desember 2021 senilai Rp1.905.289.647,00 mengalami penurunan sebesar (Rp266.086.145,00) dibandingkan per 31 Desember 2020 Rp2.171.375.792,00.

2. Kajian

Kajian per 31 Desember 2021 senilai Rp9.009.921.106,00 mengalami Penurunan sebesar (Rp2.247.142.425,00) dibandingkan per 31 Desember 2020 Rp11.257.063.531,00 dengan Penjelasan adanya Penambahan Belanja Kajian Rp90.354.000,00 dan Pengurangan karena Koreksi Kode Barang menjadi Kontruksi Dalam Pengerjaan Rp307.779.275,00.

3. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp1.000.625.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp194.817.250,00) sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.195.442.250,00.

Aset Tidak Berwujud Lainnya adalah ongkos produksi film untuk digunakan sebagai promosi dan ditempatkan di website Klaten sebesar Rp950.000.000,00 pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta di Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp140.122.250,00 merupakan DED E-government, di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp54.695.000,00 berupa Master Plan Wisata Air pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp50.625.000,00 merupakan software pendukung Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).



4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 senilai (Rp9.549.827.058,33) mengalami kenaikan sebesar Rp384.034.316,38 dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp9.933.861.374,71).

C.6.1.5.4 Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kejadian atau transaksi yang menyebabkan timbulnya saldo aset lain-lain. Saldo Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 senilai Rp141.321.821.332,22. Berikut ini adalah rincian aset lain-lain :

Tabel 6C.54 Aset Lain-lain TA 2021

No	Uraian	31/12/2021	31/12/2020	Tren
		Rp	Rp	%
1	Aset Barang Rusak Berat/Usang	202.782.264.751,95	234.681.498.709,79	(15,73)
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	104.930.538.013,43	102.968.360.837,43	1,87
3	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(166.390.981.433,16)	(187.982.591.350,00)	-12,98
Jumlah		141.321.821.332,22	149.667.268.197,22	(5,91)

Penjelasan atas Aset Lain-lain diuraikan sebagai berikut :

1. Aset Barang Rusak Berat/Usang

Aset Lain-lain Rusak Berat menunjukkan bahwa per 31 Desember 2021 terdapat Barang Rusak Berat senilai Rp202.782.264.751,95 dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.5.

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan restatement saldo awal permendagri 108 ditahun 2020 yang dimappingkan pada rekening ini di tahun 2021 menunjukkan bahwa per 31 Desember 2021 senilai Rp104.930.538.013,43. Yang terdiri dari non aset yang diusulkan penghapusan dan barang hilang yang masih dalam proses review Inspektorat.

3. Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat

Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat merupakan akumulasi penyusutan barang rusak berat per 31 Desember 2021 senilai (Rp166.390.981.443,16) dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.6.

C.6.2 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2021 merupakan Kewajiban Jangka Pendek, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6C.55 Kewajiban TA 2021

No	Uraian	31/12/2021	31/12/2020	Tren
		Rp	Rp	%
1	Kewajiban jangka Pendek	8.335.992.845,00	20.876.092.289,00	(150,43)
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	-
Jumlah Kewajiban		8.335.992.845,00	20.876.092.289,00	(150,43)

C.6.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.335.992.845,00 sebagaimana terinci pada tabel berikut :



Tabel 6C.56 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	2021	2020
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	47.125.000,00	29.775.000,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	1.010.639.032,00	1.036.228.404,00
3	Utang Beban	7.273.021.055,00	13.502.079.212,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.207.758,00	6.308.009.673,00
Jumlah		8.335.992.845,00	20.876.092.289,00

C.6.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp47.125.000,00 merupakan utang pemerintah Kabupaten Klaten kepada pihak ketiga yang disebabkan karena adanya uang jaminan Rusunawa yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

C.6.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang yang merupakan utang jangka panjang pemerintah Kabupaten Klaten kepada pihak lain yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan adalah sebesar Rp.0,00.

C.6.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.010.639.032,00 merupakan catatan atas Pendapatan Diterima Dimuka Atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron dan Pajak Reklame Kain, Sewa Tanah dan Bangunan BPKD.

C.6.2.1.5 Utang Belanja

Utang Belanja TA 2021 terdiri dari Utang Beban Pegawai, Utang Belanja barang dan Jasa dan Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp7.273.021.055,00 timbul karena Pemerintah Kabupaten Klaten menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6C.57 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2021

NO	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Pegawai	127.152.577,00
2	Utang Belanja Barang	113.165.500,00
3	Utang Belanja Jasa	7.024.732.978,00
4	Utang Belanja Pemeliharaan	7.970.000,00
Jumlah		7.273.021.055,00

Rincian Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang , Utang Belanja Jasa, dan Utang Belanja Pemeliharaan per OPD/ Bagian terinci pada tabel berikut :



Tabel 6C.58 Rincian Utang Belanja Pegawai TA 2021

No	Nama SKPD / Bagian	Utang Belanja Pegawai 2021
1	Dinas Pendidikan	66.826.193,00
2	Dinas Kesehatan	13.981.480,00
3	PUSKESMAS	17.878.516,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras	3.216.222,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	810.226,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	989.865,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.284.089,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.997.700,00
9	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.173.452,00
10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	1.400.039,00
11	Bagian Umum	3.485.372,00
12	Inspektorat Kabupaten	2.340.000,00
13	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	467.289,00
14	Kecamatan Kalikotes	1.201.399,00
15	Kecamatan Manisrenggo	187.200,00
16	Kecamatan Karangnom	142.011,00
17	Kecamatan Tulung	561.600,00
18	Kecamatan Delanggu	326.529,00
19	Kecamatan Wonosari	1.656.324,00
20	Kecamatan Trucuk	1.254.099,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.972.972,00
Jumlah		127.152.577,00

Adapun Rincian Utang Belanja Barang terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.59 Rincian Utang Belanja Barang TA 2021

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Puksesmas	51.515.500,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras	61.650.000,00
JUMLAH		113.165.500,00



Adapun Rincian Utang Belanja Jasa terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.60 Rincian Utang Belanja Jasa TA 2021

No	Nama SKPD / Bagian	Utang Belanja Jasa 2021
1	Dinas Pendidikan	16.099.660,00
2	Dinas Kesehatan	463.097.118,00
3	Puskesmas	1.069.245.315,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras	3.360.509.360,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.918.801,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.567.067,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	4.597.868,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.	5.672.609,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.069.964,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.269.809,00
11	Dinas Perhubungan	1.798.347.404,00
12	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.145.150,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.998.306,00
14	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	12.778.781,00
15	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	11.803.300,00
16	Bagian Umum	153.856.462,00
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.107.221,00
18	Inspektorat Kabupaten	13.420.723,00
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	98.998,00
20	Sekretariat DPRD	9.229.039,00
21	Kecamatan Klaten Utara	1.542.000,00
22	Kecamatan Klaten Tengah	2.258.334,00
23	Kecamatan Klaten Selatan	1.161.507,00
24	Kecamatan Kalikotes	1.383.848,00
25	Kecamatan Ngawen	534.001,00
26	Kecamatan Kebonarum	1.270.140,00
27	Kecamatan Wedi	1.187.526,00
28	Kecamatan Jogonalan	855.396,00
29	Kecamatan gantiwarno	914.270,00
30	Kecamatan Prambanan	1.232.021,00
31	Kecamatan Manisrenggo	1.280.212,00
32	Kecamatan Kemalang	1.055.141,00
33	Kecamatan Karangnongko	1.847.893,00
34	Kecamatan Jatinom	1.399.292,00
35	Kelurahan Jatinom	1.625.459,00
36	Kecamatan Karangnom	1.344.329,00
37	Kecamatan Polanharjo	2.317.491,00
38	Kecamatan Delanggu	1.563.519,00
39	Kecamatan Wonosari	1.675.675,00
40	Kecamatan Karangdowo	1.288.308,00
41	Kecamatan Cawas	514.050,00
42	Kecamatan Trucuk	1.660.425,00
43	Kecamatan Bayat	1.167.464,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.821.722,00
Jumlah		7.024.732.978,00

Utang Belanja Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2021 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras sebesar Rp7.970.000,00 yang merupakan Utang Beban Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional.

C.6.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Sisa Utang Jangka Pendek tahun 2021 sebesar Rp.5.207.758,00 merupakan sisa dari Saldo utang jangka pendek lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp6.308.009.673,00 yang sudah terbayarkan di tahun 2021 sebesar Rp6.302.801.915,00.



C.6.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tidak terdapat Kewajiban jangka Panjang pada Tahun Anggaran 2021.

C.6.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.506.874.599.618,72 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6C.61 Ekuitas TA 2021

No	Uraian	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	3.545.901.778.749,34	4.143.042.591.152,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	57.169.891.562,47	(58.595.187.691,61)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
	-Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	-Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	-Koreksi Ekuitas Lainnya	(96.197.070.693,09)	(538.545.624.711,05)
4	EKUITAS AKHIR	3.506.874.599.618,72	3.545.901.778.749,34

Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.



D. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang menyajikan pos-pos yang meliputi pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus defisit dari kegiatan non operasional, pos Luar Biasa dan surplus/defisit-LO, dengan rincian TA 2021 sebagai berikut:

D.6.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, Realisasi di TA 2021 sebesar Rp2.326.297.103.222,70 naik sebesar Rp118.339.916.747,05 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp2.207.957.186.475,65 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6D.1 Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	390.384.965.910,70	318.205.762.330,65	72.179.203.580,05
2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	1.734.297.818.985,00	1.771.404.880.342,00	(37.107.061.357,00)
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	201.614.318.327,00	118.346.543.803,00	83.267.774.524,00
	Jumlah	2.326.297.103.222,70	2.207.957.186.475,65	118.339.916.747,05

D.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah– LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yang Dipisahkan berupa Pajak Daerah-LO, Restribusi Daerah-LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, Lain-lain PAD yang Sah-LO, sebesar Rp390.384.965.910,70 naik sebesar Rp72.179.203.580,05 dibanding TA 2020 Rp318.205.762.330,65 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6D.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
	Pendapatan Asli Daerah	390.384.965.910,70	318.205.762.330,65	72.179.203.580,05
1	Pajak Daerah - LO	132.137.822.530,00	125.756.589.585,00	6.381.232.945,00
2	Retribusi Daerah – LO	14.793.426.383,00	15.161.095.196,00	(367.668.813)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	36.399.630.516,70	10.434.543.951,65	25.965.086.565,05
4	Lain Lain PAD yang Sah – LO	207.054.086.481,00	166.853.533.598,00	40.200.552.883,00

Adapun rincian realisasi PAD – LO disajikan dalam Lampiran D.1 LO : Realisasi Pendapatan Pajak Daerah.

D.6.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer–LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yang Dipisahkan berupa Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO, Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya-LO, Bantuan Keuangan-LO, sebesar Rp1.734.297.818.985,00 turun sebesar (Rp37.107.061.357,00) dibandingkan TA 2020 Rp1.771.404.880.342,00 Nilai saldo Pendapatan Transfer Pusat sebesar Rp1.734.297.818.985,00 tersebut telah mengakomodir penambahan DBH atas kurang salur DBH Pajak sebesar Rp.11.802.230,00 dan DBH Bukan Pajak sebesar Rp.182.183.941,00 berdasarkan PMK 129 Tahun 2021. dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 6D.3 Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
	Pendapatan Transfer - LO	1.734.297.818.985,00	1.771.404.880.342,00	(37.107.061.357,00)
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.545.624.272.463,00	1.518.948.954.811,00	26.675.317.652,00
	1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	52.488.369.716,00	42.887.494.857,00	9.600.874.859,00
	2. Bagi Hasil Bukan Pajak	1.656.275.397,00	1.545.747.681,00	110.527.716,00
	3. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.149.421.184.000,00	1.167.212.792.000,00	(17.791.608.000,00)
	4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	60.725.376.316,00	31.595.623.254,00	29.129.753.062,00
	5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	270.603.173.034,00	275.707.297.019,00	(5.104.123.985,00)
	6. DID-LO	10.729.894.000,00	0,00	10.729.894.000,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	57.067.155.000,00	(57.067.155.000,00)
	1. Dana Penyesuaian	0,00	57.067.155.000,00	(57.067.155.000,00)
3	Transfer Transfer Daerah	187.920.546.522,00	180.584.457.531,00	7.336.088.991,00
	1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	187.920.546.522,00	180.584.457.531,00	7.336.088.991,00
4	Bantuan Keuangan	753.000.000,00	14.804.313.000,00	(14.051.313.000,00)
	1. Bantuan Keuangan dari Pemprov Jateng	753.000.000,00	14.804.313.000,00	(14.051.313.000,00)

1. Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 sebesar Rp1.545.624.272.463,00 naik sebesar Rp26.675.317.652,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp1.518.948.954.811,00 dengan rincian yang disajikan sebagai berikut :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021 sebesar Rp52.488.369.716,00 naik sebesar Rp9.600.874.859,00 dibanding TA 2020 Rp42.887.494.857,00.
 - b. Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2021 sebesar Rp1.656.275.397,00 naik sebesar Rp110.527.716,00 dibanding TA 2020 Rp1.545.747.681,00.
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 sebesar Rp1.149.421.184.000,00 turun sebesar (Rp17.791.608.000,00) dibanding TA 2020 Rp1.167.212.792.000,00.
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2021 sebesar Rp60.725.376.316,00 naik sebesar Rp29.129.753.062,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp31.595.623.254,00.
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2021 sebesar Rp270.603.173.034,00 turun sebesar (Rp5.104.123.985,00) dibanding TA 2020 sebesar Rp275.707.297.019,00
 - f. Dana Insentif Daerah (DID)-LO TA 2021 sebesar Rp10.729.894.000,00.
2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 sebesar Rp0,00 turun sebesar (Rp57.067.155.000,00) dibanding TA 2020 sebesar Rp57.067.155.000,00.
3. Transfer Transfer Daerah TA 2021 sebesar Rp188.673.546.522,00 naik sebesar Rp8.089.088.991,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp180.584.457.531,00.
4. Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar Rp753.000.000,00 turun sebesar (Rp14.051.313.000,00) dibanding TA 2020 sebesar Rp14.804.313.000,00.

D.6.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp161.895.487.437,00 naik sebesar Rp43.548.943.634,00 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp118.346.543.803,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 6D.4 Realisasi Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
	Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO	201.614.318.327,00	118.346.543.803,00	83.267.774.524,00
1	Pendapatan Hibah – LO	93.625.070.827,00	118.346.543.803,00	(24.721.472.976,00)
	1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	3.793.281.626,00	117.766.601.303,00	(113.973.319.677,00)
	2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	32.934.138.977,00	0,00	32.934.138.977,00
	3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/perorangan Dalam Negeri	4.166.205.334,00	579.942.500,00	3.586.262.834,00
	4. Pendapatan Sumbangan dari Pihak ketiga/ sejenisnya	13.012.614.000,00	0,00	13.012.614.000,00
	5. Penerimaan Hibah penanganan Covid dari Provinsi	39.718.830.890,00	0,00	39.718.830.890,00
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	107.989.247.500,00	0,00	107.989.247.500,00

1. Pendapatan Hibah-LO TA 2021 sebesar Rp53.906.239.937,00 dengan rincian yang disajikan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO TA 2021 sebesar Rp3.793.281.626,00 turun sebesar (Rp113.973.319.677,00) dibanding TA 2020 sebesar Rp117.766.601.303,00
 - b. Pada tahun 2021 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp32.934.138.977,00.
 - c. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO TA 2021 sebesar Rp4.166.205.334,00 naik sebesar Rp3.586.262.834,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp579.942.500,00.
 - d. Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga/sejenisnya – LO TA 2021 sebesar Rp13.012.614.000,00.
 - e. Penerimaan Hibah Penanganan Covid dari Provinsi – LO TA 2021 sebesar Rp39.718.830.890,00
2. Pada tahun 2021 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan-undangan sebesar Rp107.989.247.500,00.

D.6.2 Beban

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terdiri dari Beban Pegawai-LO, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain, Beban Transfer bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp2.246.773.802.142,32 naik sebesar Rp36.814.010.912,06 dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp2.209.959.791.230,26. Berdasarkan contoh format dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 beban dapat dirinci dalam tabel berikut ini:



Tabel 6D.5 Realisasi Beban Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
1	Beban Pegawai - LO	1.004.600.514.884,00	1.046.522.937.578,00	(41.922.422.694,00)
2	Beban Persediaan	293.008.612.243,72	199.691.340.501,59	93.317.271.742,13
3	Beban Jasa	310.579.657.992,17	114.896.805.156,00	195.682.852.836,17
4	Beban Pemeliharaan	51.153.254.279,00	32.709.542.502,00	18.443.711.777,00
5	Beban Perjalanan Dinas	25.270.595.323,00	49.281.573.072,00	(24.010.977.749,00)
6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	1.940.554.067,00	1.988.515.348,00	(47.961.281,00)
8	Beban Hibah	28.410.769.759,00	186.729.697.533,56	(158.318.927.774,56)
9	Beban Bantuan Sosial	5.540.865.000,00	3.511.725.000,00	2.029.140.000,00
10	Beban Penyusutan	241.367.068.664,18	225.808.219.072,51	15.558.849.591,67
11	Beban Penyisihan Piutang	(3.626.496.504,75)	5.014.687.331,60	(8.641.183.836,35)
12	Beban Lain-lain	2.909.350.593,00	0,00	2.909.350.593,00
13	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	8.114.974.956,00	11.521.060.644,00	(3.406.085.688,00)
14	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.011.035.786,00	0,00	2.011.035.786,00
15	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	(170.246.658,00)	170.246.658,00
16	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.734.202.949,00	(1.734.202.949,00)
17	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	207.889.101.500,00	(207.889.101.500,00)
18	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DBH)	133.555.595.100,00	4.177.020.048,00	129.378.575.052,00
19	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DAU)	141.937.450.000,00	117.557.090.152,00	24.380.359.848,00
20	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (Banparpol)	0,00	1.096.519.500,00	(1.096.519.500,00)
Jumlah		2.246.773.802.142,32	2.209.959.791.230,26	36.814.010.912,06

D.6.2.1 Beban Pegawai-LO

Realisasi beban pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.004.600.514.884,00 turun sebesar (Rp41.922.422.694,00) dari Tahun 2020 sebesar Rp1.046.522.937.578,00 dengan rincian disajikan dalam tabel seperti terlihat dalam Lampiran D.2 LO : Realisasi Beban Pegawai Tahun 2021.

D.6.2.2 Beban Persediaan

Realisasi beban persediaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp293.008.612.243,72 naik sebesar Rp93.317.271.742,13 dari Tahun 2020 sebesar Rp199.691.340.501,59 dengan rincian disajikan dalam tabel seperti terlihat dalam Lampiran D.3 LO : Realisasi Beban Persediaan Tahun 2021.

D.6.2.3 Beban Jasa

Realisasi beban jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp310.579.657.992,17 naik sebesar Rp195.682.852.836,17 dari tahun 2020 yang sebesar Rp114.896.805.156,00 dengan rincian disajikan dalam Lampiran D.4 LO : Realisasi Beban Jasa tahun 2021.

D.6.2.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi beban pemeliharaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp51.153.254.279,00 naik sebesar Rp18.443.711.777,00 dari tahun 2020 yang sebesar Rp32.709.542.502,00 dengan rincian disajikan dalam Lampiran D.5 LO : Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2021.

D.6.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi beban perjalanan dinas periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp25.270.595.323,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6D.6 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	13.937.190.453,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	168.272.157,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.282.456.963,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.408.122.450,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	474.553.300,00
Jumlah		25.270.595.323,00



D.6.2.6 Beban Bunga

Tidak terdapat Realisasi Beban Bunga pada Tahun Anggaran 2021.

D.6.2.7 Beban Subsidi

Realisasi beban subsidi bunga kepada UMKM dari Bank Klaten dan BPR BKK Tulung periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.940.554.067,00 turun sebesar (Rp47.961.281,00) dari tahun 2020 sebesar Rp1.988.515.348,00. Realisasi Beban Subsidi Bunga pada Tahun Anggaran 2021 disalurkan kepada 2176 Debitur yang terbagi dalam 2 BUMD yaitu PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) Sejumlah 433 Debitur dan PT. BPR BANK Klaten (Perseroda) Sejumlah 1743 Debitur.

D.6.2.8 Beban Hibah

Realisasi beban hibah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp28.410.769.759,00 turun sebesar (Rp158.318.927.774,56) dari tahun 2020 sebesar Rp186.729.697.533,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6D.7 Realisasi Beban Hibah Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
1	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	21.853.901.450,00	(21.853.901.450,00)
2	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	97.571.397.219,56	(97.571.397.219,56)
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	54.931.628.005,00	(53.835.108.505,00)
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	825.200.634,00	0,00	825.200.634,00
5	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	705.312.625,00	4.021.645.000,00	(3.316.332.375,00)
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.655.516.000,00	0,00	1.655.516.000,00
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	24.128.221.000,00	0,00	24.128.221.000,00
8	Hibah kepada Organisasi Masyarakat	0,00	8.351.125.859,00	(8.351.125.859,00)
Jumlah		28.410.769.759,00	186.729.697.533,56	(158.318.927.774,56)

Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain TA 2021 masuk dalam Rekening Beban Persediaan.

1. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 sebesar Rp0,00 turun sebesar (Rp21.853.901.450,00) dibanding TA 2020 sebesar Rp21.853.901.450,00.
2. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain TA 2021 Rp0,00 turun sebesar (Rp97.571.397.219,56) dibanding TA 2020 Rp97.571.397.219,56.
3. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2021 Rp1.096.519.500,00 turun sebesar (Rp53.835.108.505,00) dibanding TA 2020 Rp54.931.628.005,00. Penurunan Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2020 terdapat Hibah Bantuan Keuangan Kepada Bawaslu dan KPU.

Tabel 6D.8 Realisasi Beban Transfer Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2021

	Uraian	TA 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Partai Nasdem	39.547.500,00	39.547.500,00	100,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	83.656.500,00	83.656.500,00	100,00
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	103.095.000,00	103.095.000,00	100,00
4	Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	434.230.500,00	434.230.500,00	100,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	99.462.000,00	99.462.000,00	100,00
6	Partai Demokrat	65.197.500,00	65.197.500,00	100,00
7	Partai Amat Nasional (PAN)	75.552.000,00	75.552.000,00	100,00
8	Partai Golkar	143.271.000,00	143.271.000,00	100,00
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	52.507.500,00	52.507.500,00	100,00
Jumlah		1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

4. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2021 sebesar Rp825.200.634,00 naik sebesar Rp825.200.634,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp0,00.
5. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat TA 2021 sebesar Rp705.312.625,00 turun sebesar (Rp3.316.332.375,00) dibanding TA 2020 sebesar Rp4.021.645.000,00.
6. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2021 sebesar Rp1.655.516.000,00 naik sebesar Rp1.655.516.000,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp0,00.
7. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2021 sebesar Rp24.128.221.000,00 naik sebesar Rp Rp24.128.221.000,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp0,00.
8. Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan TA 2021 sebesar Rp0,00 turun sebesar (Rp8.351.125.859,00) dibanding TA 2020 sebesar Rp8.351.125.859,00.

D.6.2.9 Beban Bantuan Sosial

Realisasi beban bantuan sosial periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.540.865.000,00 naik sebesar Rp2.029.140.000,00 dibanding tahun 2020 sebesar Rp3.511.725.000,00 seperti dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6D.9 Rincian Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2021

No.	Uraian	2021	2020	Selisih
1	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	292.165.000,00	0,00	292.165.000,00
2	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	5.248.700.000,00	3.511.725.000,00	1.736.975.000,00
Jumlah		5.540.865.000,00	3.511.725.000,00	2.029.140.000,00

1. Beban Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat TA 2021 sebesar Rp292.165.000,00 naik sebesar Rp292.165.000,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp0,00.
2. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu TA 2021 sebesar Rp5.248.700.000,00 naik sebesar Rp1.736.975.000,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp3.511.725.000,00.

D.6.2.10 Beban Penyusutan

Realisasi beban penyusutan dan amortisasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp241.367.068.664,18 naik sebesar Rp15.558.849.591,67 dari tahun 2020 sebesar Rp225.808.219.072,51.

Tabel 6D.10 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021

No.	Uraian	2021	2020	Selisih
1	Penyusutan Peralatan dan Mesin	71.012.620.143,57	67.859.390.829,81	3.153.229.313,76
2	Gedung dan Bangunan	19.624.299.219,07	19.842.739.361,95	(218.440.142,88)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	136.724.026.635,31	125.403.173.128,77	11.320.853.506,54
4	Aset Tetap Lainnya	12.911.406.716,36	12.152.428.250,14	758.978.466,22
5	Aset Tak Berwujud	1.094.715.931,87	550.487.501,84	544.228.430,03
Jumlah		241.367.068.646,18	225.808.219.072,51	15.558.849.573,67

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp71.012.620.143,57 naik sebesar Rp3.153.229.313,76 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp67.859.390.829,81.
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp19.624.299.219,07 turun sebesar (Rp218.440.142,88) dibandingkan TA 2020 sebesar Rp19.842.739.361,95.



3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp136.724.026.635,31 naik sebesar Rp11.320.853.506,54 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp125.403.173.128,77.
4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp12.911.406.716,36 naik sebesar Rp758.978.466,22 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp12.152.428.250,14.
5. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2021 sebesar Rp1.094.715.931,87 naik sebesar Rp544.228.430,03 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp550.487.501,84.

D.6.2.11 Beban Penyisihan Piutang

Realisasi beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar (Rp3.626.496.504,75) turun sebesar Rp8.641.183.836,35 dibandingkan dari tahun 2020 sebesar Rp5.014.687.331,60 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6D.11 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
1	Penyisihan Piutang Pajak	(1.589.589.322,79)	5.823.276.899,79	(7.412.866.222,58)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	34.268.486,00	4.735.770,00	29.532.716,00
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(2.071.175.667,96)	(813.325.338,19)	(1.257.850.329,77)
Jumlah		(3.626.496.504,75)	5.014.687.331,60	(8.641.183.836,35)

1. Selisih nilai penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp7.412.866.222,58) dengan beban penyisihan piutang pajak sebesar (Rp1.589.589.322,79).
2. Selisih nilai penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp29.532.716,00 dengan beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp34.268.486,00.
3. Selisih nilai penyisihan piutang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp1.257.850.329,77) dengan beban penyisihan piutang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar (Rp2.071.175.667,96).

D.6.2.12 Beban Transfer

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp285.619.055.842,00 turun sebesar (Rp58.185.692.293,00) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp343.804.748.135,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6D.12 Realisasi Beban Transfer Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	8.114.974.956,00	11.521.060.644,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.011.035.786,00	0,00
3	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	(170.246.658,00)
4	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lain	0,00	1.734.202.949,00
5	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	207.889.101.500,00
6	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DBH)	133.555.595.100,00	4.177.020.048,00
7	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DAU)	141.937.450.000,00	117.557.090.152,00
8	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (Banparpol)	0,00	1.096.519.500,00
Jumlah		285.619.055.842,00	343.804.748.135,00

D.6.2.12.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer bagi hasil pajak daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp8.114.974.956,00 turun sebesar (Rp3.406.085.688,00) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp11.521.060.644,00.



D.6.2.12.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Tidak terdapat Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya pada Tahun 2021.

D.6.2.12.3 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Desa

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.011.035.786,00 dan tahun 2020 sebesar Rp209.623.304.449,00.

Tabel 6D.13 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Desa Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
1	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.011.035.786,00	0,00	2.011.035.786,00
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lain	0,00	1.734.202.949,00	(1.734.202.949,00)
3	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	207.889.101.500,00	(207.889.101.500,00)
Jumlah		2.011.035.786,00	209.623.304.449,00	(207.612.268.663,00)

D.6.2.12.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer bantuan keuangan ke desa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp275.493.045.100,00 naik sebesar Rp153.758.934.900,00 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp121.734.110.200,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6D.14 Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
1	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DBH)	133.555.595.100,00	4.177.020.048,00	129.378.575.052,00
2	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa(DAU)	141.937.450.000,00	117.557.090.152,00	24.380.359.848,00
Jumlah		275.493.045.100,00	121.734.110.200,00	153.758.934.900,00

D.6.2.12.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer bantuan keuangan lainnya periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 turun sebesar (Rp1.096.519.500,00) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1.096.519.500,00. Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang pada Tahun Anggaran 2021 dicatat di Beban Hibah.

D.6.2.13 Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain merupakan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.909.350.593,00 naik sebesar Rp2.909.350.593 dibanding dari tahun 2020 sebesar Rp0,00. Realisasi beban lain-lain pada Tahun Anggaran 2021 merupakan perolehan atas barang-barang ekstrakom.

D.6.3 Surplus Defisit Non Operasional

Surplus defisit Non Operasional Pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.306.291.836,00 turun sebesar (Rp49.279.226.701,00) dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp56.585.518.537,00.

D.6.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO

Surplus penyelesaian penjualan aset non lancar periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.



D.6.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan Tahun 2020.

D.6.3.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Surplus kegiatan non operasional lainnya periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

D.6.3.4 Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO

Defisit penjualan aset non lancar periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

D.6.3.5 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

D.6.3.6 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Defisit kegiatan non operasional lainnya periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp7.306.291.836,00. Realisasi Defisit dari kegiatan Operasional Lainnya merupakan proses penghapusan atas Aset Lain-lain dari beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6D.15 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2021

NO	OPD	NILAI
1	KECAMATAN KARANGNONGKO	150.000.000,00
2	KELURAHAN GAYAMPRIIT	4.011.000,00
3	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	147.377.000,00
4	INSPEKTORAT KABUPATEN	59.361.400,00
5	KECAMATAN PRAMBANAN	42.768.000,00
6	KECAMATAN TRUCUK	208.100.000,00
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	61.250.000,00
8	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	55.080.000,00
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	108.326.831,00
10	PUSKESMAS BAYAT	24.852.000,00
11	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	174.311.900,00
12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	539.545.600,00
13	DINAS KESEHATAN	74.650.000,00
14	RSUD BAGAS WARAS	192.455.000,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	510.959.445,00
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	74.292.855,00
17	SD NEGERI	253.550.000,00
18	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.625.400.805,00
	JUMLAH	7.306.291.836,00

D.6.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2021 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Tidak Terjadi defisit pada Pos Luar Biasa TA 2021 maupun TA 2020 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.6.4.1 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa TA 2021 sebesar Rp0,00.

D.6.4.2 Beban Tak Terduga

Beban Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.064.400,00 merupakan pengembalian Dana Desa Tahun 2015-2019 dari RKUD ke RKUN berdasarkan hasil rekon antara Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Desa serta KPPN di Tahun 2020, Sedangkan Beban Tak Terduga di Tahun 2021 sebesar Rp15.047.117.681,91 yang terdiri dari penyeteroran sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana



Kabupaten Klaten ke RKUN sebesar Rp2.006.080.123,00, Beban BTT Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp597.225.000,00, Gunung Meletus Rp77.600.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp12.366.212.558,91 merupakan Beban Penanganan Covid-19 dan Bencana Alam Merapi.

D.6.5 Surplus/Defisit-LO

Tabel 6D.16 Surplus/Defisit Tahun 2021

Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
Surplus/Defisit LO	57.169.891.562,47	(58.595.187.691,61)

Saldo Surplus/Defisit-LO pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp57.169.891.562,47 tersebut merupakan saldo dari surplus/defisit realisasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 naik sebesar Rp115.765.079.254,08 dibandingkan dengan Surplus/Defisit-LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp58.595.187.691,61).



E. Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2021 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi/investasi aset non anggaran, pendanaan/pembiayaan, dan transitoris/non anggaran.

E.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp265.674.705.767,00 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.569.474.814.373,00 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.570.037.777.373,00 setelah dikurangi Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp562.963.000,00 karena masuk di aktivitas Investasi/investasi aset non anggaran.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.303.800.108.606,00 merupakan Laporan Realisasi Anggaran dari Belanja Operasi sebesar Rp1.612.412.988.846,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp18.618.661.003,00 dan Transfer sebesar Rp672.768.458.757,00.

E.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi/investasi aset non anggaran per 31 Desember 2021 defisit sebesar (Rp212.543.809.936,00) Arus kas dari aktivitas Investasi/investasi aset non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran berupa:

- Arus kas masuk sebesar Rp562.963.000, merupakan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang dikelompokkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp562.963.000,00 dan pencairan dana cadangan sebesar Rp0,00 pada Laporan Realisasi Anggaran.
- Arus kas keluar sebesar Rp213.106.772.936,00 terdiri dari:
 - Belanja Modal Rp 189.606.772.936,00
 - Pembentukan Dana Cadangan Rp 15.000.000.000,00
 - Penyertaan Modal Rp 8.500.000.000,00Jumlah Rp 213.106.772.936,00 pada Laporan Realisasi Anggaran.

E.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat Arus Kas dari aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran 2021.

E.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris berasal dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp141.615.394.107,00 dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris berasal dari pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp141.667.408.422,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 6E.1 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2021

No	Uraian PFK	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Iuran Wajib Pegawai 8%	35.134.284.228,00	35.134.284.228,00	0,00
2	Iuran BPJS 4%	31.317.889.915,00	31.317.889.915,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	36.365.518.929,00	36.365.518.929,00	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	930.497.281,00	930.497.281,00	0,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	238.525.147,00	238.525.147,00	0,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.425.859.915,00	3.425.859.915,00	0,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	21.532.133.158,00	21.532.133.158,00	0,00
8	Lainnya	408.750,00	408.750,00	0,00
9	Jaminan Kecelakaan Kerja	979.632.304,00	979.632.304,00	0,00
10	Jaminan Kematian	2.938.899.851,00	2.938.899.851,00	0,00
11	IWP 1%	8.602.410.604,00	8.602.410.604,00	0,00
12	Pajak Restoran 10%	131.984.025,00	131.984.025,00	0,00
13	PFK - Lainnya	17.350.000,00	69.364.315,00	(52.014.315,00)
	Jumlah	141.615.394.107,00	141.667.408.422,00	(52.014.315,00)

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2021 sebesar (Rp52.014.315,00) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2021 sebesar (Rp52.014.315,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Arus Kas Masuk	
• Utang PFK - Lainnya	Rp 17.350.000,00
- Arus Kas Keluar	
• Koreksi Saldo Awal Bos	Rp 69.364.315,00
Jumlah	(Rp 52.014.315,00)

Arus kas keluar terdiri dari Koreksi saldo awal BOS sebesar Rp69.364.315,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 6E.2 Rincian Penjelasan Koreksi Saldo Awal BOS TA 2021

No	Sekolah	Koreksi Saldo BOS
		Saldo
1	Koreksi saldo awal BOS :	69.401.815,00
	SDN Karangpakel 2	8.350.137,00
	SDN Mireng 2	1.026.038,00
	SDN Planggu 1	60.025.640,00
2	Koreksi Belanja	(37.500,00)
	SDN Ngawonggo	(37.500,00)
	Jumlah	69.364.315,00

Penjumlahan arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris, kemudian ditambahkan dengan saldo awal kas di BUD/SiLPA LRA dan Kas Di Bendahara Pengeluaran menjadi sebesar Rp493.767.700.841,28.

Saldo akhir kas di BUD Sebesar Rp493.767.700.841,28 terdiri dari Kenaikan/Penurunan Kas sebesar Rp53.078.881.516,00 dan Saldo Awal Kas di BUD Rp440.688.819.325,28. Saldo akhir kas di neraca sebesar Rp.493.767.700.841,28.



Saldo SiLPA di LRA per 31 Desember 2021 sebesar Rp493.720.575.841,28 selisih dengan saldo akhir kas di LAK sebesar Rp47.125.000,00 . Selisih ini dikarenakan adanya uang jaminan/titipan sewa atas rumah susun yang di kelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten.



F. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6F.01 Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Ekuitas Awal	3.545.901.778.749,34	4.143.042.591.152,00
2	Surplus Defisit – Lo	57.169.891.562,47	(58.595.187.691,61)
3	Koreksi ekuitas lainnya	(96.197.070.693,09)	(538.545.624.711,05)
4	Ekuitas Akhir	3.506.874.599.618,72	3.545.901.778.749,34

1. Saldo awal ekuitas tahun 2021 senilai Rp3.545.901.778.749,34 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020, sesuai dengan neraca *audited* per 31 Desember 2020.
2. Surplus/defisit – LO senilai Rp57.169.891.562,47 merupakan surplus atas kegiatan operasional Tahun 2021 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021.
3. Disamping adanya penambahan ekuitas dari surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Daerah tahun 2021, terdapat pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi ekuitas lainnya senilai (Rp96.197.070.693,09) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021.

F.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal pada TA 2021 Sebesar Rp3.545.901.778.749,34, terdapat penurunan Ekuitas Awal sebesar Rp597.140.812.402,66 atau (14,41%) dibandingkan Ekuitas Awal TA 2020 sebesar Rp4.143.042.591.152,00.

F.6.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO TA 2021 sebesar Rp57.169.891.562,47 naik sebesar Rp115.765.079.254,08 dibandingkan dengan TA 2020 sebesar (Rp58.595.187.691,61). Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat kenaikan ekuitas surplus defisit-LO yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2021 dibandingkan dengan surplus defisit-LO tahun 2020 sebesar (Rp58.595.187.691,61) (197,57%).

F.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

F.6.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya terdiri dari koreksi atas saldo awal Dana BOS, Utang Beban Lain-lain, Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain, Aset Tetap, Beban tak Terduga, Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor, Obat-obatan, Aset Lain-lain, Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan, Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah, Kas Lainnya, Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, Piutang PBBP2. Sesuai klasifikasi Akun Permendagri nomor 90 Tahun 2019, semua koreksi ekuitas dicatat pada akun Koreksi Ekuitas Lainnya. Penurunan akumulatif ekuitas karena adanya koreksi ekuitas tahun 2021 sebesar (Rp96.197.070.693,09). Koreksi tersebut terdiri dari koreksi aset akibat rekonsiliasi aset yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten serta koreksi lainnya yang dirinci sebagai berikut:



Tabel 6F.2 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya TA 2021

No	URAIAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO
1	Koreksi Saldo awal Bos	108.058.611.815,00	107.989.247.500,00	(69.364.315,00)
2	Utang Beban Lain-lain	0,00	7.436.175,00	7.436.175,00
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.371.046.431,00	0,00	(3.371.046.431,00)
4	Aset Tetap	107.616.171.463,11	114.711.207.939,05	7.095.036.475,94
5	Aset Lain-lain	7.031.268.300,00	1.240.300.000,16	(5.790.968.299,84)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.388.560.200,00	1.138.560.200,00	(250.000.000,00)
7	Kas Lainnya	8.389.301.995,00	0,00	(8.389.301.995,00)
8	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000,00	0,00	(100.000,00)
9	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.534.177.609,00	0,00	(1.534.177.609,00)
10	Piutang PBBP2	3.572.448.752,00	186.726.821,00	(3.385.721.931,00)
11	Akumulasi Penyusutan	1.979.665.952.696,46	1.897.678.339.685,02	(81.987.613.011,44)
12	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.957.712.829,81	11.436.463.078,06	1.478.750.248,25
	Jumlah	2.230.585.352.091,39	2.134.388.281.398,30	(96.197.070.693,09)

Penjelasan Koreksi Ekuitas Lainnya yaitu :

1. Koreksi Saldo Awal BOS
Koreksi Saldo Awal BOS pada TA 2021 sebesar (Rp69.364.315,00) ini untuk mengoreksi double catat saldo kas awal tahun 2021 pada sekolah yang sudah regroup SDN Karangpakel 2, SDN Mireng 2, SDN Wanglu 1.
2. Koreksi Utang Beban Lain-lain
Koreksi Utang Beban Lain-lain pada TA 2021 sebesar Rp7.436.175,00.
Utang Beban Lain-lain pada Tahun Anggaran 2021 merupakan utang pajak kendaraan bermotor Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.774.675,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp189.000,00, dan Puskesmas Karanganom sebesar Rp472.500,00 yang sudah terbayarkan di Tahun Anggaran 2021. Pencatatan awal utang beban lain lain tersebut di tahun 2020 dengan jurnal utang beban lain lain pada koreksi ekuitas lainnya sehingga ketika terjadi pelunasan di tahun 2021 dikoreksi kembali dengan jurnal koreksi ekuitas lainnya pada utang beban lain lain.
3. Koreksi Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
Koreksi Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar (Rp3.371.046.431,00) untuk mengoreksi penerbitan SKRD ganda pada tahun anggaran 2021. SKRD ganda tersebut terjadi karena pada saat pelunasan piutang diterbitkan SKRD baru yang seharusnya tidak melalui penerbitan SKRD.
4. Aset Tetap
Koreksi Aset Tetap Sebesar Rp7.095.036.475,94 merupakan Koreksi aset yang belum tercatat sebagai aset tetap antara lain tanah Sebesar Rp6.317.760.000,00 , peralatan mesin sebesar Rp480.245.645,00. Gedung dan Bangunan sebesar Rp294.030.831,00 Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.999.999,94.
5. Aset Lain-lain
Aset Lain-lain pada TA 2021 sebesar (Rp5.790.968.299,84) merupakan koreksi atas angka penyusutan pada saat penghapusan aset lainnya.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar (Rp250.000.000,00) merupakan angka koreksi kesalahan pencatatan Kontruksi Dalam Pengerjaan ditahun sebelumnya.
7. Kas Lainnya
Kas Lainnya sebesar (Rp8.389.301.995,00) merupakan koreksi lebih catat atas saldo kas lainnya tahun anggaran 2020 yang uangnya telah diterima di kasda tahun 2021.
8. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah



Koreksi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar (Rp100.000,00) merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun 2020.

9. Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Koreksi Piutang Denda PBB sebesar (Rp1.534.177.609,00) merupakan penghapusan atas Piutang Denda PBB tahun-tahun sebelumnya.

10. Piutang PBBP2

Koreksi Piutang PBB sebesar (Rp3.385.721.931,00) merupakan penghapusan atas piutang PBB tahun-tahun sebelumnya.

11. Akumulasi Penyusutan

Koreksi Akumulasi Penyusutan Sebesar (Rp81.987.613.011,44) antara lain merupakan koreksi atas akumulasi penyusutan tahun-tahun yang lalu sehubungan dengan adanya penilaian luasan jalan dari kegiatan pengukuran ulang ruas jalan kabupaten.

12. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pada TA 2021 sebesar Rp1.478.750.248,25. Merupakan penghapusan aset tidak berwujud tahun 2021.

F.6.4 Ekuitas Akhir

Berdasarkan data di atas ekuitas akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sebesar Rp3.506.874.599.618,72 dibandingkan dengan ekuitas akhir tahun 2020 sebesar Rp3.545.901.778.749,34 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp39.027.179.130,62 (1,10%).



BAB VII PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

7.1 Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen adalah kesanggupan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan kegiatan Pemerintahan, baik karena ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah maupun ikatan perjanjian tertulis (kontrak) dengan pihak ketiga. Sedangkan kontinjensi adalah suatu kemungkinan besar (*probable*) terjadinya kewajiban, terkait dengan masalah hukum dan/atau perikatan (kontrak). Komitmen dan kontinjensi dapat menyebabkan pengeluaran uang daerah yang membebani APBD Kabupaten Klaten di masa yang akan datang.

7.1.1 Komitmen Pemerintah Daerah

1. *Kerjasama antar Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Surakarta*

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi anggota forum “Subosukawonosraten” yang dibentuk bersama dengan Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Surakarta, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten.

Sebagai tambahan informasi, forum dimaksud telah mendirikan usaha bersama yang diberi nama PT Solo Raya Promosi sesuai Akta Notaris Sri Hartini, SH Nomor 45 tanggal 12 Juli 2006. Berkenaan dengan pendirian perusahaan ini Pemerintah Kabupaten Klaten telah menempatkan dan menyetorkan modal sebanyak 70 lembar saham biasa senilai Rp35.000.000,00 atau 14,00% dari seluruh modal disetor. Selain itu untuk operasi awal Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan bantuan keuangan sebesar Rp100.000.000,00 yang dialokasikan dalam Perubahan APBD TA 2005 dan telah disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Klaten tanggal 25 Mei 2005.

Usaha pokok PT Solo Raya Promosi adalah memberikan jasa promosi bagi Pemerintah Daerah yang menjadi anggotanya, dalam rangka memperkenalkan daerah dan produk-produk daerah termasuk lokasi wisata. Namun demikian sampai dengan Tahun 2014 PT Solo Raya Promosi tidak memberikan laporan kegiatan dan hasil usahanya.

PT Solo Raya Promosi sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-0000285 tanggal 25 Januari 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT SOLO RAYA PROMOSI (dalam likuidasi) dan penetapan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 20/Pdt.P/2016/PN.Skt

2. *Keanggotaan dalam APKASI/BKCSI dan ADKASI*

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi salah satu anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI/BKCSI). Berkenaan dengan keanggotaan ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dibebani iuran tahunan yang besarnya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Selain itu DPRD Kabupaten Klaten menjadi anggota Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Asosiasi ini mewajibkan anggotanya membayar iuran sebesar Rp10.000.000,00 per tahun yang dibebankan pada APBD Kabupaten Klaten.

Beban iuran ini akan tetap ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dan dibebankan dalam APBD, sepanjang masih menjadi Anggota APKASI/BKCSI dan ADKASI.



7.1.2 Kontinjensi

1. *Kerjasama Kemitraan Pembangunan Plasa Klaten*

Pembangunan Plasa Klaten dikerjasamakan dengan PT. Inti Griya Prima Sakti (PT. IGPS) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 051/1481/1991 dan Nomor 159/SK/IGPS/VIII/91 tanggal 22 Agustus 1991 tentang Kerjasama Bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pelataran Serba Ada (Plasa) Klaten, yang kemudian telah dilakukan perubahan sesuai dengan Adendum Nomor 051/1892/1995 dan Nomor 028/SK/IGPS/XI/1995 tanggal 30 Nopember 1995. Perjanjian dimaksud mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga, serta peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut.

Dalam rangka kerjasama tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten menyerahkan tanah seluas 14.102 m² beserta bangunan bekas Pasar Klaten yang terletak di Jalan Pemuda Klaten. Sedangkan PT. IGPS melaksanakan pembangunan dan menanggung seluruh biayanya, yang meliputi pembuatan kios/los sementara untuk menampung pedagang; terminal angkutan dan bongkar muat barang; lapangan parkir dan jalan lingkungan; gardu retribusi; bangunan ruko (rumah toko); bangunan kios dan los pasar; bangunan plasa; Kantor Pengelola Plasa; serta fasilitas bangunan berupa: air bersih, kamar mandi, WC, Musholla, tempat penitipan sepeda, fire hydrant, pos satpam, instalasi listrik, eskalator, bak sampah, dan pertamanan.

Nilai saham Pemerintah Kabupaten Klaten dihitung berdasarkan nilai tanah dan bangunan bekas pasar. Tanah tersebut ditaksir seharga Rp75.000,00 per m² atau senilai Rp1.057.650.000,00 (14.102 m² x Rp75.000,00/m²) dan bangunan bekas pasar ditaksir senilai Rp147.285.074,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.204.935.074.000,00 (Rp1.057.650.000,00 + Rp147.285.074,00). Sedangkan nilai saham PT. IGPS dihitung berdasarkan besarnya biaya untuk membangun bangunan dan kelengkapannya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu sebesar Rp12.366.700.000,00.

Pembagian tempat usaha menetapkan Pemerintah Kabupaten Klaten berhak untuk memanfaatkan dan mengelola terminal angkutan seluas ±2.100 m²; bongkar muat barang seluas ±1.050 m²; lapangan parkir dan jalan lingkungan seluas ±3.180 m²; gardu retribusi sebanyak 5 buah; kamar mandi dan WC sebanyak 7 unit; Kantor Pengelola Plasa seluas ±32 m²; Los di lantai dasar (basement) seluas ±150 m²; tempat penitipan sepeda seluas ±70 m²; dan pertamanan. Sedangkan PT. IGPS menerima bagian dengan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun, meliputi : seluruh bangunan ruko; seluruh bangunan kios-kios dan los pasar kecuali los pasar di lantai dasar seluas 150 m²; seluruh bangunan plasa 3 (tiga) lantai. Selain itu PT. IGPS berhak untuk memanfaatkan dan mengelola pemasangan reklame/iklan di seluruh bagian bangunan Plasa Klaten.

Sesuai addendum perjanjian tanggal 30 Nopember 1995 tersebut di atas, jangka waktu perjanjian disepakati selama 25 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian 22 Agustus 1991 atau berakhir pada tanggal 22 Agustus 2016. Sedangkan sesuai sertifikat atas tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Nomor 163 tanggal 23 April 1993, PT. IGPS diberikan HGB atas tanah seluas 14.102 m² selama 30 tahun terhitung sejak tanggal 3 Pebruari 1993 dan berakhir pada tanggal 3 Pebruari 2023. Dengan demikian terjadi selisih jangka waktu pelaksanaan perjanjian dengan masa HGB selama 7 (tujuh) tahun. Atas selisih jangka waktu ini kedua belah pihak belum membuat kesepakatan untuk penyelesaiannya.

Namun Pasal 4 mengatur bahwa PT. IGPS diberikan hak guna bangunan (HGB) selama 25 (dua puluh lima) tahun diatas HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten, terhitung sejak dikeluarkannya keputusan tentang Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut tanggal 23 April 1993 no. 163. Waktu 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak dikeluarkannya keputusan tentang Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut tanggal 23 April 1993 no. 163 akan berakhir pada tanggal 23 April 2018. Pada saat perjanjian berakhir PT.



IGPS wajib menyerahkan tanah (HGB) dan bangunan yang dibangun kepada Pemerintah Kabupaten Klaten.

Nilai saham Pemerintah Kabupaten Klaten dihitung berdasarkan nilai tanah dan bangunan bekas pasar. Tanah tersebut ditaksir seharga Rp75.000,00 per m² atau seluruhnya senilai Rp1.057.650.000,00 (14.102 m² x Rp75.000,00/m²) dan bangunan bekas pasar ditaksir senilai Rp147.285.074,00. Dengan demikian nilai saham Pemerintah Kabupaten Klaten seluruhnya sebesar Rp1.204.935.074,00 (Rp1.057.650.000,00 + Rp147.285.074,00). Sedangkan nilai saham PT IGPS dihitung berdasarkan jumlah biaya untuk membangun bangunan dan kelengkapannya tersebut, yang ditaksir sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) seluruhnya sebesar Rp12.366.700.000,00 yang kemudian diubah sesuai adendum tanggal 30 Nopember 1995 menjadi sebesar Rp13.610.259.000,00.

Pada Tahun 2020 telah dilakukan serah terima antara PT Inti Griya Prima Sakti dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berupa tanah dan seluruh bangunan ruko, kios dan los serta fasilitas penunjang plaza klaten yang terletak di atas tanah hak pengelolaan (HPL) nomor: 1/Kelurahan Kabupaten atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten yang terletak di Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 510.17/419/19/2020 tanggal 15 Juli 2020.

Sampai saat ini Bangunan Plasa Klaten masih dalam proses negosiasi harga dan belum ada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT Inti Griya Sakti.

2. Kerjasama Kemitraan Pembangunan Pasar Delanggu

Kerjasama pembangunan Pasar Delanggu dilakukan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa (PT KBBP) sesuai perjanjian Nomor 2 Tahun 2008 dan Nomor 11/ADM-SPK/KBBP/111/2008 tanggal 7 Maret 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Delanggu Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 34 seluas 5.870 m² di Pasar Delanggu Barat dan tanah HP Nomor 36 seluas 1.895 m² di Pasar Delanggu Timur atau seluruhnya seluas 7.765 m². Tanah tersebut diserahkan kepada pihak PT. KBBP dalam rangka kerjasama. Berdasarkan NJOP tanah per m² pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp702.000,00 per m² maka nilai tanah Pasar Delanggu adalah sebesar Rp5.451.030.000,00 (7.765 m²xRp702.000,00). Nilai ini kemudian dijadikan dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dalam Neraca Kabupaten Klaten per 31 Desember 2014.

PT. KBBP menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 288 kios dan 1.010 los beserta fasilitasnya di Pasar Delanggu sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp17.074.948.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan pembangunan selama 202 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Maret 2008 atau berakhir pada tanggal 25 September 2008. Atas bangunan kios dan los yang telah dibangun tersebut telah dipasarkan kepada para pedagang di Pasar Delanggu.

Sesuai keputusan Bupati Nomor 900/2146/2008 tanggal 14 Nopember 2008 Pemerintah Kabupaten Klaten memberikan bantuan kepada 889 pedagang lama untuk membeli kios/los Pasar Delanggu senilai Rp6.240.243.950,00. Bantuan dibedakan menurut kelompok pedagang, yaitu bagi pedagang lama yang sebelumnya telah memiliki kios/los diberikan bantuan sebesar 50% dari harga kios/los baru; dan bagi pedagang lama yang tidak memiliki atau sewa kios/los diberikan bantuan sebesar 20% dari harga kios/los baru. Sampai dengan 31 Desember 2014 seluruh bantuan kios untuk para pedagang telah terealisasi.

3. Kerjasama Kemitraan Pembangunan Pasar Pedan

Kerjasama pembangunan Pasar Pedan dilakukan dengan PT. Dewata Solusi Bangunan



(PT. DSB) sesuai perjanjian Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 077/DSB-KLT/IX/08 tanggal 18 September 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Pedan Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 4 seluas 4.230 m² dan HP Nomor 6 seluas 7.990 m² keduanya terletak di Desa Keden Kecamatan Pedan. Tanah seluruhnya seluas 12.220 m² (4.230 m² + 7.990 m²). Tanah tersebut diserahkan kepada PT. DSB dalam rangka kerjasama selama 25 tahun. Perhitungan nilai atas tanah yang dikerjasamakan tersebut didasarkan atas NJOP tanah per m² pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp285.000,00. Sehingga nilai atas tanah Pasar Pedan adalah sebesar Rp3.482.700.000,00 (12.220 m² x Rp285.000,00). Nilai ini kemudian Sedangkan PT. DSB menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 377 kios seluas 5.273,72 m² dan 785 los seluas 2.622,91 M² beserta fasilitasnya di Pasar Pedan sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp36.965.910.000,00.

Kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga dapat menimbulkan kontijensi, khususnya terkait dengan permasalahan berikut:

1. Sebagian bangunan Plasa Klaten yang dibangun oleh PT. IGPS di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Klaten telah dijual kepada masyarakat dan/atau pedagang, berikut dan beserta tanahnya dengan pengalihan/pemecahan HGB induk. Pembeli tidak diikat perjanjian dan/atau tidak mengetahui isi perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT. IGPS, yang mewajibkan penyerahan bangunan berikut tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Klaten setelah jangka waktu perjanjian berakhir yaitu tanggal 22 Agustus 2016. Selain itu selisih waktu antara berakhirnya perjanjian (22 Agustus 2016) dengan jangka waktu HGB Nomor 163 yaitu tanggal 3 Pebruari 2023 dapat menimbulkan sengketa, baik antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT. IGPS maupun dengan masyarakat yang telah membeli bangunan dari PT. IGPS tersebut;
2. Meskipun Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan bantuan kepada para pedagang lama Pasar Delanggu untuk membayar uang muka bangunan kios/los baru yang dibangun oleh PT. KBBP, namun sebagian besar pedagang lama belum bersedia menempati kios/los baru dimaksud. Alasan mereka tidak mau pindah selain karena harganya mahal, kualitas bangunannya dinilai tidak memenuhi standar. Permasalahan ini pernah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Klaten, namun belum memuaskan para pedagang. Selain itu Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah memberikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai surat Nomor LBHJT.08.11/323 tanggal 3 Nopember 2008 tentang Dugaan Tipikor, yang ditembuskan kepada Ketua BPK-RI.
3. Pada saat ini Pasar Pedan telah selesai dibangun. Meskipun pembangunan Pasar Pedan telah selesai dilaksanakan, namun para pedagang belum bisa menempati los/kios dimaksud.
4. Kondisi tersebut menimbulkan kemungkinan adanya biaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat/pedagang dan/atau mitra kerjasama, yang mungkin tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Kontijensi ini dapat membebani APBD Kabupaten Klaten di tahun-tahun mendatang. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Klaten akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak sosial dan menekan biaya yang membebani APBD tersebut.

7.2 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Pemerintah Kabupaten Klaten menjamin tidak terdapat kejadian setelah tanggal Neraca per 31 Desember 2021 yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kewajiban LKPD Kabupaten Klaten TA 2021 kecuali atas dampak dari kejadian sebagai berikut:

7.2.1 Kas Lainnya

Terkait dengan saldo Kas lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.125.000,00 yang merupakan uang jaminan rusunawa.



7.2.2 Restrukturisasi

Pada Tahun 2018 pemerintah Kabupaten Klaten telah membentuk OPD baru sesuai dengan Perda No 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Berdasarkan pada peraturan tersebut Kabupaten Klaten memiliki 51 OPD sebagai entitas akuntansi. Adapun Daftar OPD di Kabupaten Klaten yang baru sesuai dengan Perda No 7 Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 7.2 Daftar OPD

No.	Nama OPD	Ket
1	Dinas Pendidikan	
2	Dinas Kesehatan	
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
5	Satuan Polisi Pamong Praja	
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb	
7	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
10	Dinas Perhubungan	
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
12	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Ukm	
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
14	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga	
16	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
17	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	
18	Sekretariat Daerah	
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
20	Inspektorat Kabupaten	
21	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
23	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	
24	Sekretariat DPRD	
25	Kecamatan Klaten Utara	
26	Kecamatan Klaten Tengah	
27	Kecamatan Klaten Selatan	
28	Kecamatan Kalikotes	
29	Kecamatan Ngawen	
30	Kecamatan Kebonarum	
31	Kecamatan Wedi	
32	Kecamatan Jogonalan	
33	Kecamatan Gantiwarno	
34	Kecamatan Prambanan	
35	Kecamatan Manisrenggo	
36	Kecamatan Kemalang	
37	Kecamatan Karangnongko	
38	Kecamatan Jatinom	
39	Kecamatan Karanganyam	
40	Kecamatan Tulung	
41	Kecamatan Polanharjo	
42	Kecamatan Delanggu	
43	Kecamatan Juwiring	
44	Kecamatan Wonosari	
45	Kecamatan Ceper	
46	Kecamatan Pedan	
47	Kecamatan Karangdowo	
48	Kecamatan Cawas	
49	Kecamatan Trucuk	
50	Kecamatan Bayat	
51	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

Sumber :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten, Tahun 2021

7.2.3 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Per 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Klaten mengakui piutang bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat sebesar Rp11.657.622.121,00. Piutang tersebut merupakan kurang bayar atas transfer bagi hasil pajak dari Pemerintah pusat berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021.

Sedangkan untuk Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Klaten mengakui Piutang tahun 2021 sebesar Rp326.855.050,00 berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

VIII. PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih(LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK). Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021.

BUPATI KLATEN,

cap ttd

SRI MULYANI



KABUPATEN KLATEN
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	SKPD	Jenis Piutang	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR TAHUN
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Piutang Pajak Daerah	49.767.669.697,00	0,00	1.273.301.732,00	48.494.367.965,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Piutang Retribusi Daerah	5.824.000,00	6.041.000,00	0,00	11.865.000,00
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Piutang Retribusi Daerah	14.483.049,00	0,00	576.900,00	13.906.149,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	Piutang Retribusi Daerah	162.198.000,00	0,00	0,00	162.198.000,00
5	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Piutang Retribusi Daerah	35.446.150,00	352.399.060,00	0,00	387.845.210,00
6	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Piutang Retribusi Daerah	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Piutang Retribusi Daerah	13.350.000,00	0,00	13.350.000,00	-
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Piutang hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	19.990.555.249,70	0,00	19.990.555.249,70
9	PUSKESMAS	Piutang Lain-lain PAD yang SAH	170.652.365,00	0,00	140.033.065,00	30.619.300,00
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Piutang Lain-lain PAD yang SAH	4.197.074.304,00	47.169.111.304,00	0,00	51.366.185.608,00
11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Piutang Lain-lain PAD yang SAH	11.774.757.020,46	673.475.869,00	0,00	12.448.232.889,46
12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	8.927.774.691,00	3.056.702.480,00	0,00	11.984.477.171,00
13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Piutang Transfer Antar Daerah	21.805.978.475,00	0,00	19.029.802.586,00	2.776.175.889,00
14	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Piutang Lainnya	3.251.514.114,00	0,00	0,00	3.251.514.114,00
15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Piutang Lainnya	329.410.912,00	0,00	2.500.003,00	326.910.909,00
JUMLAH			100.467.132.777,46	71.248.284.962,70	20.459.564.286,00	151.255.853.454,16

BUPATI KLATEN,

cap ttd

SRI MULYANI



KABUPATEN KLATEN
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN					JUMLAH PIUTANG BERSIH
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total	
1	Piutang Pajak Daerah	48.494.367.965,00	2.738.175.614,18	5.928.578.800,80	9.559.609.615,40	15.323.326.391,00	33.549.690.422,00	14.944.677.543,00
2	Piutang Retribusi	242.301.199,00	69.750,00	37.064.506,00	8.088.250,00	188.127.799,00	233.350.305,00	8.950.894,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	63.845.037.797,46	1.112.469.714,25	2.023.192.247,50	3.338.315.802,00	1.418.187.800,40	7.892.165.564,15	55.952.872.233,31
4	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	3.251.514.114,00	-	-	-	3.251.514.114,00	3.251.514.114,00	-
5	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian	326.910.912,00	-	-	-	326.910.912,00	326.910.912,00	-
	TOTAL	116.160.131.987,46	3.850.715.078,43	7.988.835.554,30	12.906.013.667,40	20.508.067.016,40	45.253.631.317,15	70.906.500.670,31

BUPATI KLATEN

cap ttd

SRI MULYANI



KABUPATEN KLATEN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU (2020)	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI (2021)	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI (2021)	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI (2021)	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	10 = 7 + 8 + 9	11 = 6 - 10	12	13	14 = 10 - 13
1.	1951	PT. BPR Bank Klaten (Perseroda)	Perda No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No 4 th 2018 ttg	Saham	40.000.000.000	14.442.682.816	4.000.000.000	18.442.682.816	21.557.317.184	1.721.517.444,00	-	18.442.682.816
2.	1979	Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirta Merapi	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada Badan Usaha Milik Daerah	Saham	75.000.000.000	40.567.797.682	4.500.000.000	45.067.797.682	29.932.202.318	4.904.103.956,00	-	45.067.797.682
3.	1997	PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) PD BKK Klaten		Saham Saham	18.130.000.000 9.969.775.000	2.960.000.000 3.817.821.327	-	2.960.000.000 3.817.821.327	15.170.000.000 6.151.953.673	0,00	-	2.960.000.000 3.817.821.327
4.	1975/1976 2008	Bank Jateng Bank Jateng	Perda no 2 Tahun 2015 Koreksi BPK 2007 & Koreksi BPK 2008	Saham Resipis Saham	28.800.000.000 366.028.009	50.799.000.000 34.000.000	-	50.799.000.000 34.000.000	- 332.028.009	0,00	-	50.799.000.000 34.000.000
5.		PT. Aneka Usaha (Perseroda)		Saham	40.000.000.000	9.669.876.795	-	9.669.876.795	30.330.123.205	16.587.922.116,00	-	9.669.876.795
6.	2006	PT Pusat Rekreasi Promosi Pemanfaatan (PRPP)			-	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-
J U M L A H					212.265.803.009	122.591.178.620	8.500.000.000	131.091.178.620	103.473.624.389	23.213.543.516,00	-	130.791.178.620

Keterangan:

Catatan : Penyertaan modal menggunakan metode ekuitas dan cost

METODE	BUMD	PENYERTAAN MODAL S/D TAHUN LALU (2020)	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (2021)	PENYESUAIAN PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (2021)	PENYERTAAN MODAL S/D TAHUN INI (2021)
Ekuitas	PT. BPR Bank Klaten (Perseroda)	39.391.216.108,00	4.000.000.000	1.721.517.444,00	45.112.733.552,00
Ekuitas	Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirta Merapi	71.926.740.535,00	4.500.000.000	4.904.103.956,00	81.330.844.491,00
Ekuitas	PT. Aneka Usaha (Perseroda)	9.748.316.052,00	-	16.587.922.116,00	26.336.238.168,00
Cost	PD. BKK KLATEN	3.282.000.000,00	-	-	3.282.000.000,00
Cost	PT. BPR BKK TULUNG	2.960.000.000,00	-	-	2.960.000.000,00
Cost	Bank Jateng	50.799.000.000,00	-	-	50.799.000.000,00
Cost	PT PRPP	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
	JUMLAH	178.407.272.695,00	8.500.000.000	23.213.543.516,00	210.120.816.211,00

BUPATI KLATEN,

cap ttd

SRI MULYANI

KABUPATEN KLATEN
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan	28.219.214.344,00	110.832.900,00		28.330.047.244,00
2	TK Negeri Pembina Klaten	449.848.462,00	0,00		449.848.462,00
3	SD Negeri	446.321.452.147,19	24.567.348.602,93		470.888.800.750,12
4	SMP Negeri	252.203.680.549,80	11.559.586.394,01		263.763.266.943,81
5	SPNF SKB Cawas	1.886.318.124,00	164.325.700,00		2.050.643.824,00
6	Dinas Kesehatan	24.277.480.086,00	2.412.787.840,00		26.690.267.926,00
7	Puskesmas Klaten Utara	3.468.189.310,00	133.620.000,00		3.601.809.310,00
8	Puskesmas Klaten Tengah	4.451.251.728,00	325.850.000,00		4.777.101.728,00
9	Puskesmas Klaten Selatan	4.917.180.253,00	657.116.700,00		5.574.296.953,00
10	Puskesmas Kalikotes	4.229.003.704,00	210.708.084,00		4.439.711.788,00
11	Puskesmas Ngawen	5.257.330.428,00	229.552.913,00		5.486.883.341,00
12	Puskesmas Kebonarum	4.629.899.128,00	263.963.700,00		4.893.862.828,00
13	Puskesmas Wedi	6.093.737.620,00	612.773.000,00		6.706.510.620,00
14	Puskesmas Jogonalan 1	5.931.412.589,00	115.072.666,67		6.046.485.255,67
15	Puskesmas Jogonalan 2	3.889.838.479,00	141.272.150,00		4.031.110.629,00
16	Puskesmas Gantiwarno	6.681.312.089,00	512.699.542,00		7.194.011.631,00
17	Puskesmas Prambanan	5.581.592.985,00	467.959.618,00		6.049.552.603,00
18	Puskesmas Kebondalem Lor	4.177.029.825,00	180.767.855,00		4.357.797.680,00
19	Puskesmas Manisrenggo	7.462.976.074,00	456.937.341,00		7.919.913.415,00
20	Puskesmas Kemalang	8.827.165.997,00	256.197.664,00		9.083.363.661,00
21	Puskesmas Karangnongko	3.820.512.417,00	392.206.900,00		4.212.719.317,00
22	Puskesmas Jatinom	6.956.726.225,00	129.063.300,00		7.085.789.525,00
23	Puskesmas Kayumas	4.784.004.176,00	474.205.530,00		5.258.209.706,00
24	Puskesmas Karanganom	7.026.423.218,00	442.253.868,00		7.468.677.086,00
25	Puskesmas Tulung	4.772.993.328,00	282.841.200,00		5.055.834.528,00
26	Puskesmas Majegan	5.718.407.128,00	147.615.209,00		5.866.022.337,00
27	Puskesmas Polanharjo	4.729.921.316,00	168.599.513,00		4.898.520.829,00
28	Puskesmas Delanggu	11.388.228.874,00	618.847.967,00		12.007.076.841,00
29	Puskesmas Juwiring	7.941.577.593,00	731.445.793,66		8.673.023.386,66
30	Puskesmas Wonosari I	6.231.220.847,00	345.425.542,00		6.576.646.389,00
31	Puskesmas Wonosari II	3.999.916.944,00	178.998.000,00		4.178.914.944,00
32	Puskesmas Ceper	4.982.536.418,00	336.784.901,00		5.319.321.319,00
33	Puskesmas Jambu Kulon	3.333.499.070,00	3.113.043.876,00		6.446.542.946,00
34	Puskesmas Pedan	7.724.083.531,00	362.229.655,00		8.086.313.186,00
35	Puskesmas Karangdowo	8.692.475.278,00	606.915.839,00		9.299.391.117,00

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
36	Puskesmas Cawas I	5.817.090.408,00	275.194.912,00		6.092.285.320,00
37	Puskesmas Cawas II	4.697.881.504,00	150.482.000,00		4.848.363.504,00
38	Puskesmas Trucuk I	6.223.002.670,00	234.486.313,00		6.457.488.983,00
39	Puskesmas Trucuk II	4.279.168.574,00	462.138.597,00		4.741.307.171,00
40	Puskesmas Bayat	12.715.184.370,00	704.888.239,67		13.420.072.609,67
41	Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras	213.418.741.439,00	12.236.153.083,00		225.654.894.522,00
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.281.091.070.431,07	113.737.122.586,00		2.394.828.193.017,07
43	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	141.848.842.609,00		859.157.857,00	140.989.684.752,00
44	Satuan Polisi Pamong Praja	12.448.273.159,00	660.742.335,00		13.109.015.494,00
45	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	19.086.313.912,00	1.313.529.764,00		20.399.843.676,00
46	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.590.504.736,00	1.815.897.570,00		20.406.402.306,00
47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.794.954.759,00	1.187.485.000,00		13.982.439.759,00
48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.666.689.719,00	0,00		3.666.689.719,00
49	Dinas Perhubungan	55.299.585.439,00	4.996.679.046,00		60.296.264.485,00
50	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.953.779.563,00	1.667.110.146,00		19.620.889.709,00
51	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	128.848.706.929,00	20.525.956.427,00		149.374.663.356,00
52	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.782.622.068,00	14.645.400,00		3.797.267.468,00
53	Dinas Arsip dan Perpustakaan	15.311.078.112,00		68.782.200,00	15.242.295.912,00
54	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	28.624.921.683,00	11.408.980.243,00		40.033.901.926,00
55	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	40.497.268.198,00	1.967.601.100,00		42.464.869.298,00
56	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.039.146.903,00	614.860.000,00		3.654.006.903,00
57	Sekretariat Daerah	-	0,00		-
58	Bagian Pemerintahan	630.729.823,00	15.750.000,00		646.479.823,00
59	Bagian Administrasi Pembangunan	967.139.998,00	0,00		967.139.998,00
60	Bagian Hukum	1.453.462.335,00	55.650.000,00		1.509.112.335,00
61	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	800.951.793,00	25.035.000,00		825.986.793,00
62	Bagian Organisasi	685.839.897,00	87.091.010,00		772.930.907,00
63	Bagian Kesejahteraan Rakyat	83.731.261.311,00	29.125.739.920,00		112.857.001.231,00
64	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	10.495.419.386,00	1.596.893.500,00		12.092.312.886,00
65	Bagian Umum	40.881.795.547,00	2.176.124.784,00		43.057.920.331,00
66	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	873.326.539,00	148.292.500,00		1.021.619.039,00
67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.681.917.083,00		7.268.989.833,00	16.412.927.250,00
68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (COVID19)	-	0,00		-
69	Inspektorat Kabupaten	10.973.584.122,00	683.070.000,00		11.656.654.122,00
70	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.623.133.933,00	694.883.447,00		6.318.017.380,00
71	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	70.901.917.197,00		42.008.036.447,00	28.893.880.750,00
72	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD	30.379.506.083,00	1.231.904.893,00		31.611.410.976,00
73	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	2.540.032.455,00	0,00		2.540.032.455,00
74	Sekretariat DPRD	14.265.951.854,00	11.676.196.038,00		25.942.147.892,00
75	Kecamatan Klaten Utara	1.670.651.884,00	3.403.019.070,00		5.073.670.954,00
76	Kelurahan Barenglor	22.009.909.623,00		244.179.846,00	21.765.729.777,00
77	Kelurahan Gergunung	29.103.302.021,00		3.056.354.245,00	26.046.947.776,00
78	Kecamatan Klaten Tengah	2.137.120.835,00	3.603.281.641,00		5.740.402.476,00
79	Kelurahan Kabupaten	6.784.770.275,00		224.235.300,00	6.560.534.975,00
80	Kelurahan Klaten	7.034.832.429,00		128.701.376,00	6.906.131.053,00
81	Kelurahan Tonggalan	12.992.278.573,00	969.528.296,00		13.961.806.869,00

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
82	Kelurahan Mojayan	21.241.876.546,00		1.222.347.567,00	20.019.528.979,00
83	Kelurahan Buntalan	12.571.565.394,00	560.171.748,00		13.131.737.142,00
84	Kelurahan Bareng	6.151.680.630,00	1.612.360.919,00		7.764.041.549,00
85	Kecamatan Klaten Selatan	3.156.126.349,00		1.707.089.512,00	1.449.036.837,00
86	Kelurahan Gayamprit	11.708.859.272,00	600.036.669,00		12.308.895.941,00
87	Kecamatan Kalikotes	2.147.020.671,00	469.237.128,00		2.616.257.799,00
88	Kecamatan Ngawen	2.450.768.164,00		11.139.385,00	2.439.628.779,00
89	Kecamatan Kebonarum	2.218.251.312,00	486.255.787,00		2.704.507.099,00
90	Kecamatan Wedi	2.634.269.586,00	31.632.305,00		2.665.901.891,00
91	Kecamatan Jogonalan	2.337.509.196,00	704.360.036,00		3.041.869.232,00
92	Kecamatan Gantiwarno	3.075.963.496,00		560.555.834,00	2.515.407.662,00
93	Kecamatan Prambanan	3.467.347.706,00	629.365.045,00		4.096.712.751,00
94	Kecamatan Manisrenggo	5.687.023.998,00		2.440.344.380,00	3.246.679.618,00
95	Kecamatan Kemalang	5.943.987.383,00		58.142.604,00	5.885.844.779,00
96	Kecamatan Karangnongko	1.685.744.630,00	3.798.242.847,00		5.483.987.477,00
97	Kecamatan Jatinom	4.083.386.793,00		1.660.033.260,00	2.423.353.533,00
98	Kelurahan Jatinom	4.910.134.236,00	2.488.292.966,00		7.398.427.202,00
99	Kecamatan Karangnongko	1.869.003.019,00	151.015.500,00		2.020.018.519,00
100	Kecamatan Tulung	5.980.263.698,00		4.170.843.149,00	1.809.420.549,00
101	Kecamatan Polanharjo	2.593.218.647,00	3.492.224.680,00		6.085.443.327,00
102	Kecamatan Delanggu	2.720.975.060,00	892.104.969,00		3.613.080.029,00
103	Kecamatan Juwiring	2.827.457.010,00		425.571.822,00	2.401.885.188,00
104	Kecamatan Wonosari	1.916.219.280,00	456.841.600,00		2.373.060.880,00
105	Kecamatan Ceper	1.561.066.374,00	326.292.880,00		1.887.359.254,00
106	Kecamatan Pedan	2.027.579.717,00		150.593.100,00	1.876.986.617,00
107	Kecamatan Karangdowo	2.309.669.324,00		140.792.540,00	2.168.876.784,00
108	Kecamatan Cawas	2.604.937.373,00	5.222.428.733,00		7.827.366.106,00
109	Kecamatan Trucuk	2.886.391.904,00	331.953.894,00		3.218.345.798,00
110	Kecamatan Bayat	1.701.318.336,00	546.323.712,00		2.247.642.048,00
111	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.068.066.851,00	138.567.150,00		1.206.634.001,00
	JUMLAH	4.459.249.784.421,05	304.113.971.192,94	66.405.890.257,00	4.696.957.865.356,99

BUPATI KLATEN,

cap ttd

SRI MULYANI



LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	URAIAN	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	832.215.833.323,00	40.543.483.033,00		872.759.316.356,00
2	Peralatan dan Mesin	781.817.876.877,00	72.662.678.948,00		854.480.555.825,00
3	Gedung dan Bangunan	955.733.620.648,00	45.438.792.915,00		1.001.172.413.563,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.563.883.565.527,07	50.916.090.700,00		1.614.799.656.227,07
5	Aset Tetap Lainnya	268.305.695.189,98	16.924.737.705,94		285.230.432.895,92
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	57.293.192.856,00	11.222.297.634,00		68.515.490.490,00
Total		4.459.249.784.421,05	237.708.080.935,94		4.696.957.865.356,99

BUPATI KLATEN,

cap ttd

SRI MULYANI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2021

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD	SALDO AWAL	M U T A S I								SALDO AKHIR 6=3+4-5
		BERTAMBAH				BERKURANG				
		ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.063.210.710,00		52.206.466.800,00				52.127.459.516,00			2.142.217.994,00
Dinas Kesehatan	197.451.500,00		2.801.161.000,00				2.801.161.000,00			197.451.500,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	52.669.634.814,00		51.289.889.225,00				38.796.082.275,00			65.163.441.764,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	886.103.292,00		2.879.921.000,00				3.426.389.600,00			339.634.692,00
Dinas Perhubungan	73.393.240,00		-				-			73.393.240,00
Dinas Arsip dan Perpustakaan	48.990.000,00		-				-			48.990.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	128.019.300,00		-				-			128.019.300,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42.294.000,00		-				-			42.294.000,00
RSUD Klaten	45.500.000,00		479.292.000,00				285.146.000,00			239.646.000,00
SMP Negeri	1.098.611.000,00		941.436.000,00				2.040.047.000,00			-
Sekretariat DPRD	39.985.000,00		197.124.200,00				96.707.200,00			140.402.000,00
TOTAL	57.293.192.856,00									68.515.490.490,00

BUPATI KLATEN,
cap ttd
SRI MULYANI



KABUPATEN KLATEN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2021

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Dinas Pendidikan	- 18.699.108.352,78	19.802.336.835,78		1.103.228.483,00
2	TK Negeri Pembina Klaten	292.623,00		-	292.623,00
3	SD Negeri	104.222.350.156,00		19.802.336.835,62	84.420.013.320,38
4	SMP Negeri	37.896.036.411,00		4.084.347.773,00	33.811.688.638,00
5	SPNF SKB Cawas	72.500,00		-	72.500,00
6	Dinas Kesehatan	187.746.428,00		85.963.210,00	101.783.218,00
7	Puskesmas Klaten Utara	9.532.160,00		4.453.875,00	5.078.285,00
8	Puskesmas Klaten Tengah	2.252.466,00		1.312.956,00	939.510,00
9	Puskesmas Klaten Selatan	9.190.014,00		9.062.505,00	127.509,00
10	Puskesmas Kalikotes	14.276.896,00		13.357.415,00	919.481,00
11	Puskesmas Ngawen	26.546.615,00		22.188.264,00	4.358.351,00
12	Puskesmas Kebonarum	9.408.647,00		-	9.408.647,00
13	Puskesmas Wedi	12.855.835,00		2.569.151,00	10.286.684,00
14	Puskesmas Jogonalan 1	9.767.924,00		6.845.674,00	2.922.250,00
15	Puskesmas Jogonalan 2	4.839.130,00		2.565.994,00	2.273.136,00
16	Puskesmas Gantiwarno	7.421.722,00		1.487.722,00	5.934.000,00
17	Puskesmas Prambanan	22.583.225,00		18.792.632,00	3.790.593,00
18	Puskesmas Kebondalem Lor	1.588.967,00		554.263,00	1.034.704,00
19	Puskesmas Manisrenggo	12.453.739,00		922.500,00	11.531.239,00
20	Puskesmas Kemalang	28.947.676,00		7.434.994,00	21.512.682,00
21	Puskesmas Karangnongko	2.060.570,00		-	2.060.570,00
22	Puskesmas Jatinom	1.019.227,00		-	1.019.227,00
23	Puskesmas Kayumas	27.143.751,00		3.667.970,00	23.475.781,00
24	Puskesmas Karanganyam	18.030.337,00		4.986.283,00	13.044.054,00
25	Puskesmas Tulung	30.105.901,00		29.986.508,00	119.393,00
26	Puskesmas Majegan	79.833.187,00		31.219.254,00	48.613.933,00
27	Puskesmas Polanharjo	24.318.520,00		7.182.301,00	17.136.219,00
28	Puskesmas Delanggu	122.426.232,00		-	122.426.232,00
29	Puskesmas Juwiring	54.582.928,00		-	54.582.928,00
30	Puskesmas Wonosari I	24.294.781,00		2.126.665,00	22.168.116,00
31	Puskesmas Wonosari II	6.801.253,00		4.165.700,00	2.635.553,00
32	Puskesmas Ceper	36.117.643,00		-	36.117.643,00
33	Puskesmas Jambu Kulon	7.907.022,00		770.125,00	7.136.897,00
34	Puskesmas Pedan	242.526.184,00		-	242.526.184,00
35	Puskesmas Karangdowo	25.441.148,00		4.306.035,00	21.135.113,00
36	Puskesmas Cawas I	6.444.005,00		5.316.113,00	1.127.892,00
37	Puskesmas Cawas II	7.417.614,00		5.924.531,00	1.493.083,00
38	Puskesmas Trucuk I	36.925.353,00		14.655.603,00	22.269.750,00
39	Puskesmas Trucuk II	26.383.090,00		16.370.962,00	10.012.128,00
40	Puskesmas Bayat	101.327.453,00		20.527.098,00	80.800.355,00
41	Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras	992.773.554,00		800.483.681,00	192.289.873,00
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.279.366.959,00		511.771.366,00	1.767.595.593,00
43	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.657.456.500,00		562.388.267,00	4.095.068.233,00
44	Satuan Polisi Pamong Praja	316.816.439,00		2.419.316,00	314.397.123,00
45	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Per	60.927.278,00		-	60.927.278,00
46	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.254.059.500,00		116.076.450,00	1.137.983.050,00
47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	141.920.695,00		15.373.195,00	126.547.500,00
48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.853.624,00		-	4.853.624,00
49	Dinas Perhubungan	876.147.685,00		460.384.335,00	415.763.350,00
50	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.343.570.685,00		-	1.343.570.685,00
51	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	9.569.846.949,00	435.615.363,00		10.005.462.312,00
52	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	212.764.360,00	79.729.423,34		292.493.783,34
53	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1.499.052.766,00		1.322.495.568,00	176.557.198,00
54	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	337.624.048,00		173.501.229,00	164.122.819,00
55	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.194.547.478,00		52.913.677,00	2.141.633.801,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
56	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.668.646,00		308.338,00	9.360.308,00
57	Sekretariat Daerah	-		-	-
58	Bagian Pemerintahan	103.056,00		30.556,00	72.500,00
59	Bagian Administrasi Pembangunan	1.602.083,00		50.000,00	1.552.083,00
60	Bagian Hukum	764.922,00		692.422,00	72.500,00
61	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	11.957.778,00		200.965,00	11.756.813,00
62	Bagian Organisasi	156.475.233,00		155.828.995,00	646.238,00
63	Bagian Kesejahteraan Rakyat	39.216.608,00		977.045,00	38.239.563,00
64	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	24.385.600,00		19.295.165,00	5.090.435,00
65	Bagian Umum	125.684.325,00		-	125.684.325,00
66	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-		-	-
67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	131.140.672,00		103.662.582,00	27.478.090,00
68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (CC	-		-	-
69	Inspektorat Kabupaten	174.598.265,00		174.525.765,00	72.500,00
70	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengemb	8.615.164.850,00		1.088.673.205,50	7.526.491.644,50
71	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.536.004.777,00		1.143.084.285,00	392.920.492,00
72	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD	11.661.263.983,00	1.937.500,00		11.663.201.483,00
73	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiba	86.361.865,00		85.192.307,00	1.169.558,00
74	Sekretariat DPRD	11.965.120,00		2.951.493,00	9.013.627,00
75	Kecamatan Klaten Utara	4.918.142,00		4.845.642,00	72.500,00
76	Kelurahan Borenglor	1.851.323,00		-	1.851.323,00
77	Kelurahan Gergunung	83.510.450,00		-	83.510.450,00
78	Kecamatan Klaten Tengah	7.880.813,00		7.597.688,00	283.125,00
79	Kelurahan Kabupaten	20.238.330,00		20.202.080,00	36.250,00
80	Kelurahan Klaten	6.334.400,00		6.334.400,00	-
81	Kelurahan Tonggalan	2.067.339,00		-	2.067.339,00
82	Kelurahan Mojayan	6.121.190,00		3.180.000,00	2.941.190,00
83	Kelurahan Buntalan	152.656.880,00		-	152.656.880,00
84	Kelurahan Boreng	5.456.382,00		-	5.456.382,00
85	Kecamatan Klaten Selatan	3.125.150,00		-	3.125.150,00
86	Kelurahan Gayampri	72.500,00		-	72.500,00
87	Kecamatan Kalikotes	5.639.356,00		5.163.642,00	475.714,00
88	Kecamatan Ngawen	31.183.171,00		1.328.543,00	29.854.628,00
89	Kecamatan Kebonarum	513.750,00		-	513.750,00
90	Kecamatan Wedi	3.262.644,00		2.835.144,00	427.500,00
91	Kecamatan Jogonalan	11.613.188,00		-	11.613.188,00
92	Kecamatan Gantiwarno	877.222,00		-	877.222,00
93	Kecamatan Prambanan	29.835.170,00		29.762.670,00	72.500,00
94	Kecamatan Manisrenggo	4.931.273,00		2.076.059,00	2.855.214,00
95	Kecamatan Kemalang	72.500,00		-	72.500,00
96	Kecamatan Karangnongko	120.210.902,00		105.794.952,00	14.415.950,00
97	Kecamatan Jatinom	720.458,00		464.625,00	255.833,00
98	Kelurahan Jatinom	-		-	-
99	Kecamatan Karangnom	222.980,00		-	222.980,00
100	Kecamatan Tulung	2.229.976,00		-	2.229.976,00
101	Kecamatan Polanharjo	15.991.414,00		344.028,00	15.647.386,00
102	Kecamatan Delanggu	49.073.572,00		24.164.139,00	24.909.433,00
103	Kecamatan Juwiring	1.490.840,00		-	1.490.840,00
104	Kecamatan Wonosari	86.047.213,00		-	86.047.213,00
105	Kecamatan Ceper	72.500,00		-	72.500,00
106	Kecamatan Pedan	14.966.926,00		1.181.949,00	13.784.977,00
107	Kecamatan Karangdowo	6.991.829,00		-	6.991.829,00
108	Kecamatan Cawas	3.002.224,00		3.002.224,00	-
109	Kecamatan Trucuk	145.465.655,00		145.465.655,00	-
110	Kecamatan Bayat	4.076.050,00		-	4.076.050,00
111	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.609.535,00		687.248,00	1.922.287,00
	Jumlah	173.823.580.530,22	20.319.619.122,12	31.373.111.807,12	162.770.087.845,22

BUPATI KLATEN,

cap ttd

SRI MULYANI



KABUPATEN KLATEN
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2021

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2020 - 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024	Rp 45.000.000.000,00	Rp -	Rp 15.000.000.000,00	Rp -	Rp 15.000.000.000,00	Rp 30.000.000.000,00
2.	Jasa	Bunga dana Cadangan		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
J U M L A H			Rp 45.000.000.000,00	Rp -	Rp 15.000.000.000,00	Rp -	Rp 15.000.000.000,00	Rp 30.000.000.000,00

BUPATI KLATEN,

cap ttd

SRI MULYANI



KABUPATEN KLATEN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2021

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang PPh 21	Rp 306.840,00			Rp 306.840,00
2	Utang PPh 22	Rp (662.796,00)	Rp -		Rp (662.796,00)
3	Utang PPh 23	Rp (178.182,00)	Rp -		Rp (178.182,00)
4	Utang PPh 25	Rp 30.000,00	Rp -		Rp 30.000,00
5	Utang PPN	Rp 2.070.497,00	Rp -		Rp 2.070.497,00
6	Utang Iuran Wajib Pegawai	Rp -	Rp 3.432.373,00		Rp 3.432.373,00
7	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	Rp -		Rp 4.998.732,00	Rp (4.998.732,00)
8	Utang Jaminan	Rp 29.775.000,00	Rp 17.350.000,00		Rp 47.125.000,00
9	PAD	Rp (1.566.359,00)	Rp 1.566.359,00		Rp -
10	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	Rp 1.036.228.404,00		Rp 25.589.372,00	Rp 1.010.639.032,00
11	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp -	Rp 127.152.577,00		Rp 127.152.577,00
12	Utang Belanja Barang	Rp -	Rp 113.165.500,00		Rp 113.165.500,00
13	Utang Belanja Jasa	Rp -	Rp 7.024.732.978,00		Rp 7.024.732.978,00
14	Utang Belanja Pemeliharaan	Rp -	Rp 7.970.000,00		Rp 7.970.000,00
15	Utang Beban Pegawai	Rp 1.783.501.239,00		Rp 1.783.501.239,00	Rp -
16	Utang Beban Barang dan Jasa	Rp 11.718.577.973,00		Rp 11.718.577.973,00	Rp -
17	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp 6.308.009.673,00		Rp 6.302.801.915,00	Rp 5.207.758,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		Rp 20.876.092.289,00	Rp 7.295.369.787,00	Rp 19.835.469.231,00	Rp 8.335.992.845,00

BUPATI KLATEN,

cap ttd

SRI MULYANI



KABUPATEN KLATEN
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN 2021 DAN DIANGGARKAN KEMBALI
DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO.	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN**)	REALISASI	TAMBAH /KURAN	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		NIHIL	NIHIL
		Jumlah	-	-	-		-	-

BUPATI KLATEN,

cap ttd

SRI MULYANI



KABUPATEN KLATEN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun 2021	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8	10	11	12 = 10+11	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18x19	
1	Bidang Perbankan																			
	1. PT. BPR Bank Klaten (Penseroda)			402.749.626.294,00	1.648.599.518,00	0,00	744.424.238,00	405.142.650.050,00	360.029.916.498,00	0,00	360.029.916.498,00	14.442.682.816,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.112.733.552,00	100%	45.112.733.552,00	
	2. PT BPR BKK TULLUNG			109.623.363.552,00	3.042.081.310,00	0,00	0,00	226.194.773.127,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29%	0,00
	3. PD. BKK KLATEN			83.223.214.519,00	3.520.036.542,00	4.667.560.466,00	0,00	91.410.810.527,00	121.979.861.632,00	0,00	121.979.861.632,00	3.817.821.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.569.051.105,00)	49%	(14.978.835.041.45)	
	Sub Total (1)			595.596.144.365,00	8.210.716.370,00	118.196.948.731,00	744.424.238,00	722.748.233.704,00	482.009.778.130,00	0,00	482.009.778.130,00	21.220.504.143,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.543.682.447,00		30.133.898.510,55	
2	Bidang Aneka Usaha																			
	1. PT. Aneka Usaha (Penseroda)			6.478.757.128,00	0,00	20.455.616.555,00	0,00	26.934.373.683,00	598.135.516,00	0,00	598.135.516,00	9.669.876.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.336.238.168,00	100%	26.336.238.168,00	
	Sub Total (2)			6.478.757.128,00	0,00	20.455.616.555,00	0,00	26.934.373.683,00	598.135.516,00	0,00	598.135.516,00	9.669.876.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.336.238.168,00		26.336.238.168,00	
3	Bidang Air Minum																			
	1. Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirta Merapi			36.060.462.655,00	0,00	51.839.858.798,00	0,00	87.900.321.453,00	2.969.724.912,00	0,00	2.969.724.912,00	40.567.797.682,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	81.330.844.491,00	100%	81.330.844.491,00	
	Sub Total (3)			36.060.462.655,00	0,00	51.839.858.798,00	0,00	87.900.321.453,00	2.969.724.912,00	0,00	2.969.724.912,00	40.567.797.682,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	81.330.844.491,00		81.330.844.491,00	
	Total Seluruh Bidang Industri			638.135.364.148,00	8.210.716.370,00	190.492.424.084,00	744.424.238,00	837.582.928.840,00	485.577.638.558,00	0,00	485.577.638.558,00	71.458.178.620,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	122.210.765.106,00		137.800.981.169,55	

BUPATI KLATEN,
 cap ttd
SRI MULYANI



**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

LAMPIRAN XX.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2021

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Lab a (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar Usaha	Lab a (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7 =5-6	8	9	10 =7+8-9
1	Bidang Perbankan								
	1. PT. BPR Bank Klaten (Perseroda)			16.399.766.710,00	13.772.995.515,00	2.626.771.195,00	42.385.432,00	150.645.228,00	2.518.511.399,00
	2. PT BPR BKK TULUNG			38.875.455.565,00	30.226.490.746,00	8.648.964.819,00	13.312.000,00	320.992.806,00	8.341.284.013,00
	3. PD. BKK KLATEN			12.047.532.596,00	12.513.069.236,00	(465.536.640,00)	1.026.415.037,00	66.198.107,00	494.680.290,00
	Sub Total (1)			67.322.754.871,00	56.512.555.497,00	10.810.199.374,00	1.082.112.469,00	537.836.141,00	11.354.475.702,00
2	Bidang Aneka Usaha								
	1. PT. Aneka Usaha (Perseroda)			14.163.951.564,00	13.693.537.314,00	470.414.250,00	215.131.123,00	14.433.101,00	671.112.272,00
	Sub Total (2)			14.163.951.564,00	13.693.537.314,00	470.414.250,00	215.131.123,00	14.433.101,00	671.112.272,00
3	Bidang Air Minum								
	1. Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirta Merapi			48.282.843.393,00	40.865.924.100,00	7.416.919.293,00	780.983.562,00	2.002.300,00	8.195.900.555,00
	Sub Total (3)			48.282.843.393,00	40.865.924.100,00	7.416.919.293,00	780.983.562,00	2.002.300,00	8.195.900.555,00
Total Seluruh Bidang Industri				129.769.549.828,00	111.072.016.911,00	18.697.532.917,00	2.078.227.154,00	554.271.542,00	20.221.488.529,00

BUPATI KLATEN,

cap ttd

SRI MULYANI



**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
 FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE	URAIAN	KELOMPOK BELANJA									
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER			
		Anggaran**)	Realisasi	Anggaran**)	Realisasi	Anggaran**)	Realisasi	Anggaran**)	Realisasi		
1	Pelayanan Umum										
1 1 2 20	Statistik	57.996.000,00	50.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 2 2 24	Kearsipan	573.234.500,00	545.667.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 3 2 26	Komunikasi & Informatika	11.926.029.353,00	11.106.595.028,00	1.392.489.700,00	1.322.979.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 4 2 21	Persandian	88.040.000,00	86.395.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 5 5 1	Perencanaan Pembangunan	7.842.261.516,00	6.775.778.769,00	301.180.250,00	251.180.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 6 5 5	Penelitian dan Pengembangan	458.350.000,00	422.409.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 7 5 4	Pendidikan dan Pelatihan	1.301.900.490,00	1.293.303.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 8 5 2	Keuangan	31.450.768.108,00	26.208.688.962,00	914.103.200,00	850.173.800,00	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	675.562.515.700,00	672.768.458.757,00		
1 9 5 3	Kepegawaian	7.196.291.010,00	6.391.454.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 10 4 1	Sekretariat Daerah	55.836.100.653,00	41.986.116.119,00	1.435.628.340,00	1.379.573.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 11 4 2	Sekretariat DPRD	57.019.654.000,00	47.171.067.226,00	491.606.000,00	472.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 12 6 1	Inspektorat	13.591.384.950,00	10.398.178.247,00	726.025.895,00	726.025.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 13 7 1	Kecamatan	89.274.476.857,00	73.477.661.595,00	3.211.988.250,00	2.465.674.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 14 9 1	Kekhususan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Ketertiban Umum										
2 1 8 1	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.797.583.481,00	3.762.721.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 2 1 5	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	14.142.362.085,00	12.887.737.378,00	397.149.000,00	368.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 3 5 7	Pengelolaan Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Ekonomi										
3 1 2 15	Perhubungan	10.393.070.037,00	8.088.936.389	3.787.314.000,00	595.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 2 2 7	Tenaga Kerja	1.756.953.200,00	1.301.029.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 3 2 17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	19.987.533.575,00	12.322.589.094,00	1.740.450.000,00	1.531.621.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 4 2 18	Penanaman Modal	4.572.420.962,00	3.758.707.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 5 2 13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.884.558.755,00	8.024.411.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 6 3 27	Pertanian	44.775.555.327,00	37.427.383.536,00	1.386.824.000,00	1.294.266.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 7 3 28	Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 8 3 29	Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 9 3 25	Kelautan dan Perikanan	1.610.173.000,00	1.486.120.734,00	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 10 3 30	Perdagangan	1.536.757.000,00	1.516.065.000	1.494.704.000,00	760.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 11 3 31	Perindustrian	6.177.811.210,00	5.967.106.910,00	760.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 12 3 32	Transmigrasi	105.000.000,00	67.317.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Perlindungan Lingkungan Hidup										
4 1 1 3	Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 2 11	Lingkungan Hidup	13.666.067.646,00	11.498.406.671,00	7.662.179.588,00	2.296.919.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 3 2 10	Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN	KELOMPOK BELANJA									
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER			
		Anggaran**)	Realisasi	Anggaran**)	Realisasi	Anggaran**)	Realisasi	Anggaran**)	Realisasi		
5	Perumahan dan Fasilitas Umum										
5	1 1 3 Pekerjaan Umum	105.761.240.622,00	83.291.762.127,00	118.437.812.450,00	103.617.399.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2 1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	13.164.488.500,00	10.396.459.552,00	1.017.368.500,00	964.934.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kesehatan										
6	1 1 2 Kesehatan	483.355.727.038,28	391.811.535.281,00	49.781.630.609,00	30.356.647.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	2 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.542.369.506,00	4.343.477.889,00	1.063.471.000,00	293.187.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Pariwisata										
7	1 2 22 Kebudayaan	1.007.478.848,00	992.735.437,00	18.419.152,00	17.419.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	2 3 26 Pariwisata	7.881.371.782,00	5.492.710.435,00	1.892.474.000,00	1.737.844.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Pendidikan										
8	1 1 1 Pendidikan	907.655.686.439,00	760.306.384.624,00	39.314.343.558,00	36.861.315.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	2 2 19 Kepemudaan dan Olahraga	1.599.678.000,00	1.580.983.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	3 2 23 Perpustakaan	3.739.885.500,00	3.265.570.901,00	10.500.000,00	8.845.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Perlindungan Sosial										
9	1 2 12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.776.437.201,00	7.150.102.610,00	982.071.400,00	982.071.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	2 2 28 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	681.903.000,00	328.433.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	3 Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	4 1 6 Sosial	10.177.536.800,00	8.337.084.686,00	440.490.758,00	439.848.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	5 2 9 Pangan	1.483.102.136,00	1.093.633.640,00	11.849.000,00	10.085.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	6 Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH		1.962.849.239.087,28	1.612.412.988.846,00	238.674.307.650,00	189.606.772.936,00	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	675.562.515.700,00	672.768.458.757,00		

BUPATI KLATEN

cap ttd

SRI MULYANI



KABUPATEN KLATEN
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN B.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran**) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
A	SPM Bidang Pendidikan			
1	Pendidikan Dasar			
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	87.053.787.361,00	82.071.616.887,00
		Jumlah Pendidikan Dasar	87.053.787.361,00	82.071.616.887,00
2	Pendidikan Kesetaraan			
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.692.000.000,00	1.508.212.910,00
		Jumlah Pendidikan Kesetaraan	1.692.000.000,00	1.508.212.910,00
3	Pendidikan Anak Usia Dini			
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini	21.225.600.000,00	17.644.999.386,00
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan	109.971.387.361,00	101.224.829.183,00
B	SPM Bidang Kesehatan			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.350.000,00	64.229.800,00
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.350.000,00	64.229.800,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	484.789.891,00	435.459.340,00
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	484.789.891,00	435.459.340,00
3	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	211.093.000,00	202.065.896,00
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	211.093.000,00	202.065.896,00
4	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.559.160.500,00	2.316.398.790,00
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	2.559.160.500,00	2.316.398.790,00
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			

		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	107.176.000,00	41.450.000,00
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	107.176.000,00	41.450.000,00
6	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.420.000,00	40.158.250,00
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	43.420.000,00	40.158.250,00
7	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	636.790.800,00	80.296.875,00
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	636.790.800,00	80.296.875,00
8	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.084.000,00	76.860.600,00
		Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	86.084.000,00	76.860.600,00
9	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.761.000,00	24.118.900,00
		Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	25.761.000,00	24.118.900,00
10	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.500.000,00
		Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	7.500.000,00	7.500.000,00
11	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.630.000,00	18.560.000,00
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	18.630.000,00	18.560.000,00
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan	1.650.174.691,00	950.541.411,00
C	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.971.969.254,00	1.812.037.300,00
		Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.971.969.254,00	1.812.037.300,00
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	662.500.000,00	546.870.500,00
		Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	662.500.000,00	546.870.500,00
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.634.469.254,00	2.358.907.800,00
D	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota			
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	942.900.000,00	147.685.921,00

	Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	942.900.000,00	147.685.921,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	942.900.000,00	147.685.921,00
E	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.629.865.000,00	1.602.378.752,00
	Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	1.629.865.000,00	1.602.378.752,00
2	Pelayanan informasi rawan bencana		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	804.800,00	774.800,00
	Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana	804.800,00	774.800,00
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	867.586.800,00	758.221.806,00
	Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	867.586.800,00	758.221.806,00
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.753.747.800,00	1.657.497.250,00
	Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.753.747.800,00	1.657.497.250,00
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	840.917.000,00	836.022.676,00
	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	840.917.000,00	836.022.676,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.092.921.400,00	4.854.895.284,00
F	SPM Bidang Sosial		
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.999.825.128,00	1.728.889.138,00
	Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	1.999.825.128,00	1.728.889.138,00
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	740.590.000,00	701.295.350,00
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	740.590.000,00	701.295.350,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Sosial	2.740.415.128,00	2.430.184.488,00

BUPATI KLATEN

cap ttd

SRI MULYANI



KABUPATEN KLATEN
RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, RINCIAN OBJEK,
SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.532.484.633.385,00	2.570.037.777.373,00	37.553.143.988,00	101,48
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	277.915.340.915,00	315.304.009.782,00	37.388.668.867,00	113,45
4.1.1	Pajak Daerah	115.200.000.000,00	126.672.231.091,00	11.472.231.091,00	109,96
4.1.1.06	Pajak Hotel	800.000.000,00	889.869.463,00	89.869.463,00	111,23
4.1.1.06.01	Pajak Hotel	600.000.000,00	762.651.635,00	162.651.635,00	127,11
4.1.1.06.01.0001	Pajak Hotel	600.000.000,00	762.651.635,00	162.651.635,00	127,11
4.1.1.06.02	Pajak Motel	200.000.000,00	127.217.828,00	-72.782.172,00	63,609
4.1.1.06.02.0001	Pajak Motel	200.000.000,00	127.217.828,00	-72.782.172,00	63,609
4.1.1.07	Pajak Restoran	6.000.000.000,00	6.792.280.356,00	792.280.356,00	113,2
4.1.1.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.008.867.000,00	2.777.678.048,00	768.811.048,00	138,27
4.1.1.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.008.867.000,00	2.777.678.048,00	768.811.048,00	138,27
4.1.1.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	1.133.000,00	1.133.000,00	0,00	100
4.1.1.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	1.133.000,00	1.133.000,00	0,00	100
4.1.1.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.990.000.000,00	4.013.469.308,00	23.469.308,00	100,59
4.1.1.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.990.000.000,00	4.013.469.308,00	23.469.308,00	100,59
4.1.1.08	Pajak Hiburan	600.000.000,00	290.498.850,00	-309.501.150,00	48,416
4.1.1.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	86.000.000,00	5.408.035,00	-80.591.965,00	6,2884
4.1.1.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	86.000.000,00	5.408.035,00	-80.591.965,00	6,2884
4.1.1.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	228.000.000,00	164.230.315,00	-63.769.685,00	72,031
4.1.1.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	228.000.000,00	164.230.315,00	-63.769.685,00	72,031
4.1.1.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	100.000.000,00	12.070.000,00	-87.930.000,00	12,07
4.1.1.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	100.000.000,00	12.070.000,00	-87.930.000,00	12,07
4.1.1.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	186.000.000,00	108.790.500,00	-77.209.500,00	58,49
4.1.1.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	186.000.000,00	108.790.500,00	-77.209.500,00	58,49
4.1.1.09	Pajak Reklame	3.700.000.000,00	4.052.430.331,00	352.430.331,00	109,53
4.1.1.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.300.000.000,00	1.785.813.805,00	-514.186.195,00	77,644
4.1.1.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.300.000.000,00	1.785.813.805,00	-514.186.195,00	77,644
4.1.1.09.02	Pajak Reklame Kain	1.400.000.000,00	2.266.616.526,00	866.616.526,00	161,9
4.1.1.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	1.400.000.000,00	2.266.616.526,00	866.616.526,00	161,9
4.1.1.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00	0,00	0
4.1.1.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00	0,00	0
4.1.1.09.04	Pajak Reklame Selebaran	0,00	0,00	0,00	0
4.1.1.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	0,00	0,00	0,00	0
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	40.500.000.000,00	44.672.632.498,00	4.172.632.498,00	110,3
4.1.1.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	40.500.000.000,00	44.672.632.498,00	4.172.632.498,00	110,3
4.1.1.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	40.500.000.000,00	44.672.632.498,00	4.172.632.498,00	110,3
4.1.1.11	Pajak Parkir	700.000.000,00	331.419.425,00	-368.580.575,00	47,346
4.1.1.11.01	Pajak Parkir	700.000.000,00	331.419.425,00	-368.580.575,00	47,346
4.1.1.11.01.0001	Pajak Parkir	700.000.000,00	331.419.425,00	-368.580.575,00	47,346
4.1.1.12	Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.031.638.820,00	31.638.820,00	101,05
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.031.638.820,00	31.638.820,00	101,05
4.1.1.12.01.0001	Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.031.638.820,00	31.638.820,00	101,05
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000.000,00	651.230.250,00	-5.348.769.750,00	10,854
4.1.1.14.04	Pajak Batu Kapur	1.000.000,00	1.119.250,00	119.250,00	111,93
4.1.1.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	1.000.000,00	1.119.250,00	119.250,00	111,93
4.1.1.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	5.999.000.000,00	650.111.000,00	-5.348.889.000,00	10,837
4.1.1.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	5.999.000.000,00	650.111.000,00	-5.348.889.000,00	10,837
4.1.1.14.30	Pajak Tanah Liat	0,00	0,00	0,00	0
4.1.1.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	0,00	0,00	0,00	0
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	29.500.000.000,00	32.548.285.626,00	3.048.285.626,00	110,33
4.1.1.15.01	PBBP2	29.500.000.000,00	32.548.285.626,00	3.048.285.626,00	110,33
4.1.1.15.01.0001	PBBP2	29.500.000.000,00	32.548.285.626,00	3.048.285.626,00	110,33
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24.400.000.000,00	33.411.945.472,00	9.011.945.472,00	136,93
4.1.1.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	24.400.000.000,00	33.411.945.472,00	9.011.945.472,00	136,93
4.1.1.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	24.400.000.000,00	33.411.945.472,00	9.011.945.472,00	136,93
4.1.2	Retribusi Daerah	12.352.582.000,00	14.405.348.660,00	2.052.766.660,00	116,62
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	6.171.639.849,00	8.155.242.638,00	1.983.602.789,00	132,14
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	196.950.000,00	343.010.000,00	146.060.000,00	174,16
4.1.2.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	196.950.000,00	343.010.000,00	146.060.000,00	174,16

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	452.000.000,00	824.440.000,00	372.440.000,00	182,4
4.1.2.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	452.000.000,00	824.440.000,00	372.440.000,00	182,4
4.1.2.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	5.785.000,00	42.970.000,00	37.185.000,00	742,78
4.1.2.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Penguburan Mayat	5.785.000,00	42.970.000,00	37.185.000,00	742,78
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	956.387.000,00	997.503.500,00	41.116.500,00	104,3
4.1.2.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	956.387.000,00	997.503.500,00	41.116.500,00	104,3
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.588.987.849,00	3.906.527.328,00	1.317.539.479,00	150,89
4.1.2.01.05.0001	Retribusi Pelataran	453.420.000,00	397.418.000,00	-56.002.000,00	87,649
4.1.2.01.05.0002	Retribusi Los	2.050.235.849,00	3.423.877.328,00	1.373.641.479,00	167
4.1.2.01.05.0003	Retribusi Kios	85.332.000,00	85.232.000,00	-100.000,00	99,883
4.1.2.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	953.804.000,00	761.172.310,00	-192.631.690,00	79,804
4.1.2.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	953.804.000,00	761.172.310,00	-192.631.690,00	79,804
4.1.2.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12.726.000,00	612.000,00	-12.114.000,00	4,8091
4.1.2.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	12.726.000,00	612.000,00	-12.114.000,00	4,8091
4.1.2.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.000.000,00	92.500.000,00	47.500.000,00	205,56
4.1.2.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.000.000,00	92.500.000,00	47.500.000,00	205,56
4.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	60.000.000,00	106.873.500,00	46.873.500,00	178,12
4.1.2.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	60.000.000,00	106.873.500,00	46.873.500,00	178,12
4.1.2.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	900.000.000,00	1.079.634.000,00	179.634.000,00	119,96
4.1.2.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	900.000.000,00	1.079.634.000,00	179.634.000,00	119,96
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3.830.942.151,00	3.989.288.310,00	158.346.159,00	104,13
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	952.749.000,00	937.184.895,00	-15.564.105,00	98,366
4.1.2.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	743.986.000,00	647.494.945,00	-96.491.055,00	87,031
4.1.2.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	45.000.000,00	51.154.950,00	6.154.950,00	113,68
4.1.2.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	80.863.000,00	46.235.000,00	-34.628.000,00	57,177
4.1.2.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	82.900.000,00	192.300.000,00	109.400.000,00	231,97
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.093.012.151,00	2.047.346.415,00	-45.665.736,00	97,818
4.1.2.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	2.093.012.151,00	2.047.346.415,00	-45.665.736,00	97,818
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	47.985.000,00	50.472.000,00	2.487.000,00	105,18
4.1.2.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	47.985.000,00	50.472.000,00	2.487.000,00	105,18
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	70
4.1.2.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	70
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	39.996.000,00	43.560.000,00	3.564.000,00	108,91
4.1.2.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	39.996.000,00	43.560.000,00	3.564.000,00	108,91
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	575.600.000,00	770.970.000,00	195.370.000,00	133,94
4.1.2.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	575.600.000,00	770.970.000,00	195.370.000,00	133,94
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	111.600.000,00	132.755.000,00	21.155.000,00	118,96
4.1.2.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	54.000.000,00	75.132.500,00	21.132.500,00	139,13
4.1.2.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	57.600.000,00	57.622.500,00	22.500,00	100,04
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.350.000.000,00	2.260.817.712,00	-89.182.288,00	96,205
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	1.874.681.912,00	-125.318.088,00	93,734
4.1.2.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	1.874.681.912,00	-125.318.088,00	93,734
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0
4.1.2.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0
4.1.2.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	350.000.000,00	386.135.800,00	36.135.800,00	110,32
4.1.2.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	350.000.000,00	386.135.800,00	36.135.800,00	110,32
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.974.459.182,00	16.409.075.267,00	3.434.616.085,00	126,47
4.1.3.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.974.459.182,00	16.409.075.267,00	3.434.616.085,00	126,47
4.1.3.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.027.933.300,00	13.462.477.203,00	3.434.543.903,00	134,25
4.1.3.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.027.933.300,00	13.462.477.203,00	3.434.543.903,00	134,25
4.1.3.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	321.161.082,00	321.233.282,00	72.200,00	100,02
4.1.3.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	321.161.082,00	321.233.282,00	72.200,00	100,02
4.1.3.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	2.625.364.800,00	2.625.364.782,00	-18,00	100
4.1.3.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	2.625.364.800,00	2.625.364.782,00	-18,00	100
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	137.388.299.733,00	157.817.354.764,00	20.429.055.031,00	114,87
4.1.4.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	130.000.000,00	562.963.000,00	432.963.000,00	433,05
4.1.4.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	39.200.000,00	29.200.000,00	392
4.1.4.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	10.000.000,00	39.200.000,00	29.200.000,00	392
4.1.4.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	120.000.000,00	523.763.000,00	403.763.000,00	436,47
4.1.4.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	120.000.000,00	523.763.000,00	403.763.000,00	436,47
4.1.4.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000.000,00	174.987.892,00	24.987.892,00	116,66
4.1.4.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	150.000.000,00	174.987.892,00	24.987.892,00	116,66
4.1.4.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	150.000.000,00	174.987.892,00	24.987.892,00	116,66
4.1.4.04	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	53.762.759,00	53.762.759,00	0
4.1.4.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	53.762.759,00	53.762.759,00	0
4.1.4.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	53.762.759,00	53.762.759,00	0
4.1.4.05	Jasa Giro	12.000.000.000,00	11.400.351.701,00	-599.648.299,00	95,003
4.1.4.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	12.000.000.000,00	11.100.202.631,00	-899.797.369,00	92,502
4.1.4.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	12.000.000.000,00	11.100.202.631,00	-899.797.369,00	92,502
4.1.4.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	300.149.070,00	300.149.070,00	0

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
4.1.4.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	300.149.070,00	300.149.070,00	0
4.1.4.08	Penerimaan atas Tuntutan Daerah Kerugian Keuangan Daerah	0,00	2.500.003,00	2.500.003,00	0
4.1.4.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	2.500.003,00	2.500.003,00	0
4.1.4.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	2.500.003,00	2.500.003,00	0
4.1.4.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	545.040.946,00	545.040.946,00	0
4.1.4.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	545.040.946,00	545.040.946,00	0
4.1.4.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	545.040.946,00	545.040.946,00	0
4.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	205.338.178,00	205.338.178,00	0
4.1.4.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	205.338.178,00	205.338.178,00	0
4.1.4.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	205.338.178,00	205.338.178,00	0
4.1.4.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	10.129.629.012,00	10.129.629.012,00	0
4.1.4.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	10.129.629.012,00	10.129.629.012,00	0
4.1.4.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	10.129.629.012,00	10.129.629.012,00	0
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	125.108.299.733,00	134.742.781.273,00	9.634.481.540,00	107,7
4.1.4.16.01	Pendapatan BLUD	125.108.299.733,00	134.742.781.273,00	9.634.481.540,00	107,7
4.1.4.16.01.0001	Pendapatan BLUD	125.108.299.733,00	134.742.781.273,00	9.634.481.540,00	107,7
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.130.432.992.470,00	2.131.117.520.091,00	684.527.621,00	100,03
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.919.548.317.470,00	1.923.414.170.983,00	3.865.853.513,00	100,2
4.2.1.01	Dana Perimbangan	1.527.971.822.470,00	1.531.837.675.983,00	3.865.853.513,00	100,25
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	38.345.857.000,00	51.087.942.633,00	12.742.085.633,00	133,23
4.2.1.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.085.639.000,00	8.325.153.464,00	3.239.514.464,00	163,7
4.2.1.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	17.134.276.000,00	20.115.200.378,00	2.980.924.378,00	117,4
4.2.1.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	3.722.456.600,00	3.722.456.600,00	0
4.2.1.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	14.620.464.000,00	16.806.947.344,00	2.186.483.344,00	114,95
4.2.1.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	70.404.000,00	12.048.900,00	-58.355.100,00	17,114
4.2.1.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	60.022.500,00	60.022.500,00	0
4.2.1.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	53.648.000,00	108.913.482,00	55.265.482,00	203,01
4.2.1.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	1.204.491,00	1.204.491,00	0
4.2.1.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.863.000,00	1.271.925,00	-591.075,00	68,273
4.2.1.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	251.244.000,00	577.104.399,00	325.860.399,00	229,7
4.2.1.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.357.619.150,00	229.300.150,00	120,32
4.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.149.421.184.000,00	1.149.421.184.000,00	0,00	100
4.2.1.01.02.0001	DAU	1.137.278.796.000,00	1.149.421.184.000,00	12.142.388.000,00	101,07
4.2.1.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.660.000.000,00	0,00	-3.660.000.000,00	0
4.2.1.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	8.482.388.000,00	0,00	-8.482.388.000,00	0
4.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.287.830.000,00	60.725.376.316,00	-8.562.453.684,00	87,642
4.2.1.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	11.660.183.000,00	11.196.005.250,00	-464.177.750,00	96,019
4.2.1.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.134.888.000,00	1.106.280.200,00	-28.607.800,00	97,479
4.2.1.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	240.455.000,00	224.539.500,00	-15.915.500,00	93,381
4.2.1.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	4.691.000.000,00	394.314.800,00	-4.296.685.200,00	8,4058
4.2.1.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.084.356.000,00	4.474.943.876,00	-609.412.124,00	88,014
4.2.1.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	6.358.658.000,00	5.559.304.026,00	-799.353.974,00	87,429
4.2.1.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	1.856.872.000,00	1.077.128.364,00	-779.743.636,00	58,008
4.2.1.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	230.000.000,00	216.975.000,00	-13.025.000,00	94,337
4.2.1.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	2.809.017.000,00	0,00	-2.809.017.000,00	0
4.2.1.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1.373.333.000,00	1.213.036.000,00	-160.297.000,00	88,328
4.2.1.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	8.170.000.000,00	7.932.882.010,00	-237.117.990,00	97,098
4.2.1.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	700.400.000,00	633.401.000,00	-66.999.000,00	90,434
4.2.1.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.751.716.000,00	1.696.360.000,00	-55.356.000,00	96,84
4.2.1.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.894.271.000,00	10.076.414.500,00	-817.856.500,00	92,493
4.2.1.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	2.489.125.000,00	1.965.322.000,00	-523.803.000,00	78,956
4.2.1.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	5.127.139.000,00	4.286.049.537,00	-841.089.463,00	83,595
4.2.1.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.865.417.000,00	1.751.257.000,00	-114.160.000,00	93,88
4.2.1.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	2.851.000.000,00	2.610.744.000,00	-240.256.000,00	91,573
4.2.1.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	0,00	814.847.900,00	814.847.900,00	0
4.2.1.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	686.554.353,00	686.554.353,00	0
4.2.1.01.03.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	2.809.017.000,00	2.809.017.000,00	0
4.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	270.916.951.470,00	270.603.173.034,00	-313.778.436,00	99,884
4.2.1.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	217.369.395.000,00	217.369.395.000,00	0,00	100
4.2.1.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	993.000.000,00	993.000.000,00	0,00	100
4.2.1.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	18.332.520.590,00	18.322.320.590,00	-10.200.000,00	99,944
4.2.1.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.184.600.000,00	1.184.600.000,00	0,00	100
4.2.1.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17.780.477.015,00	23.014.806.748,00	5.234.329.733,00	129,44
4.2.1.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	1.262.283.000,00	0,00	-1.262.283.000,00	0
4.2.1.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	2.394.215.000,00	0,00	-2.394.215.000,00	0
4.2.1.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	2.338.452.000,00	0,00	-2.338.452.000,00	0
4.2.1.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.831.308.273,00	5.531.850.104,00	-299.458.169,00	94,865
4.2.1.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	762.766.000,00	390.304.000,00	-372.462.000,00	51,17
4.2.1.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.808.148.192,00	1.808.148.192,00	0,00	100
4.2.1.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	859.786.400,00	859.786.400,00	0,00	100

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
4.2.1.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	372.462.000,00	372.462.000,00	0
4.2.1.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	0
4.2.1.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	756.500.000,00	756.500.000,00	0
4.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.729.894.000,00	10.729.894.000,00	0,00	100
4.2.1.02.01	DID	10.729.894.000,00	10.729.894.000,00	0,00	100
4.2.1.02.01.0001	DID	10.729.894.000,00	10.729.894.000,00	0,00	100
4.2.1.05	Dana Desa	380.846.601.000,00	380.846.601.000,00	0,00	100
4.2.1.05.01	Dana Desa	380.846.601.000,00	380.846.601.000,00	0,00	100
4.2.1.05.01.0001	Dana Desa	380.846.601.000,00	380.846.601.000,00	0,00	100
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	210.884.675.000,00	207.703.349.108,00	-3.181.325.892,00	98,491
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	193.321.675.000,00	206.950.349.108,00	13.628.674.108,00	107,05
4.2.2.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	193.321.675.000,00	206.950.349.108,00	13.628.674.108,00	107,05
4.2.2.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	56.979.340.000,00	60.148.813.461,00	3.169.473.461,00	105,56
4.2.2.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	34.116.477.000,00	32.194.666.710,00	-1.921.810.290,00	94,367
4.2.2.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	48.982.594.000,00	55.959.505.835,00	6.976.911.835,00	114,24
4.2.2.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	270.862.000,00	317.502.872,00	46.640.872,00	117,22
4.2.2.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	52.972.402.000,00	58.329.860.230,00	5.357.458.230,00	110,11
4.2.2.02	Bantuan Keuangan	17.563.000.000,00	753.000.000,00	-16.810.000.000,00	4,2874
4.2.2.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	17.563.000.000,00	753.000.000,00	-16.810.000.000,00	4,2874
4.2.2.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	17.563.000.000,00	753.000.000,00	-16.810.000.000,00	4,2874
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	124.136.300.000,00	123.616.247.500,00	-520.052.500,00	99,581
4.3.1	Pendapatan Hibah	14.540.000.000,00	15.627.000.000,00	1.087.000.000,00	107,48
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.500.000.000,00	2.652.000.000,00	1.152.000.000,00	176,8
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.500.000.000,00	2.652.000.000,00	1.152.000.000,00	176,8
4.3.1.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.500.000.000,00	2.652.000.000,00	1.152.000.000,00	176,8
4.3.1.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	13.040.000.000,00	12.975.000.000,00	-65.000.000,00	99,502
4.3.1.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	13.040.000.000,00	12.975.000.000,00	-65.000.000,00	99,502
4.3.1.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	13.040.000.000,00	12.975.000.000,00	-65.000.000,00	99,502
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	109.596.300.000,00	107.989.247.500,00	-1.607.052.500,00	98,534
4.3.3.01	Lain-lain Pendapatan	109.596.300.000,00	107.989.247.500,00	-1.607.052.500,00	98,534
4.3.3.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	109.596.300.000,00	107.989.247.500,00	-1.607.052.500,00	98,534
4.3.3.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	109.596.300.000,00	107.989.247.500,00	-1.607.052.500,00	98,534
5	BELANJA DAERAH	2.949.643.677.710,28	2.493.406.881.542,00	-456.236.796.168,28	84,532
5.1	BELANJA OPERASI	1.962.849.239.087,28	1.612.412.988.846,00	-350.436.250.241,28	82,147
5.1.1	Belanja Pegawai	1.197.490.511.452,00	1.006.278.863.371,00	-191.211.648.081,00	84,032
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	773.645.128.530,00	624.193.567.521,00	-149.451.561.009,00	80,682
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	573.256.639.400,00	477.357.791.639,00	-95.898.847.761,00	83,271
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	569.922.480.400,00	474.163.824.956,00	-95.758.655.444,00	83,198
5.1.1.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.334.159.000,00	3.193.966.683,00	-140.192.317,00	95,795
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	48.860.454.720,00	40.906.550.848,00	-7.953.903.872,00	83,721
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	48.503.307.720,00	40.557.056.482,00	-7.946.251.238,00	83,617
5.1.1.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	357.147.000,00	349.494.366,00	-7.652.634,00	97,857
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.445.438.000,00	5.987.848.000,00	-457.590.000,00	92,901
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.445.438.000,00	5.987.848.000,00	-457.590.000,00	92,901
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	37.663.045.000,00	30.713.984.000,00	-6.949.061.000,00	81,549
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	37.357.797.000,00	30.713.984.000,00	-6.643.813.000,00	82,216
5.1.1.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	305.248.000,00	0,00	-305.248.000,00	0
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.297.684.000,00	8.062.765.500,00	-3.234.918.500,00	71,367
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	11.194.654.000,00	8.062.765.500,00	-3.131.888.500,00	72,023
5.1.1.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	103.030.000,00	0,00	-103.030.000,00	0
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	29.465.693.160,00	24.122.414.010,00	-5.343.279.150,00	81,866
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	29.187.205.160,00	23.850.259.650,00	-5.336.945.510,00	81,715
5.1.1.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	278.488.000,00	272.154.360,00	-6.333.640,00	97,726
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.866.034.400,00	1.915.304.893,00	-2.950.729.507,00	39,361
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.853.745.400,00	1.915.304.893,00	-2.938.440.507,00	39,46
5.1.1.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	12.289.000,00	0,00	-12.289.000,00	0
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.253.528,00	6.469.574,00	-5.783.954,00	52,798
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.106.528,00	6.440.162,00	-5.666.366,00	53,196
5.1.1.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	147.000,00	29.412,00	-117.588,00	20,008
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	56.102.634.771,00	31.210.814.764,00	-24.891.820.007,00	55,632
5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	55.788.733.019,00	31.066.822.101,00	-24.721.910.918,00	55,687
5.1.1.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	313.901.752,00	143.992.663,00	-169.909.089,00	45,872
5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.128.494.075,00	976.152.979,00	-152.341.096,00	86,5
5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.121.860.075,00	969.666.829,00	-152.193.246,00	86,434
5.1.1.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	6.634.000,00	6.486.150,00	-147.850,00	97,771
5.1.1.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.390.327.226,00	2.933.471.314,00	-456.855.912,00	86,525
5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.370.427.226,00	2.914.012.864,00	-456.414.362,00	86,458
5.1.1.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	19.900.000,00	19.458.450,00	-441.550,00	97,781
5.1.1.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.156.430.250,00	0,00	-1.156.430.250,00	0
5.1.1.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.156.430.250,00	0,00	-1.156.430.250,00	0

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	129.369.915.047,00	110.271.699.588,00	-19.098.215.459,00	85,238
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	49.195.457.837,00	43.312.603.192,00	-5.882.854.645,00	88,042
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	49.195.457.837,00	43.312.603.192,00	-5.882.854.645,00	88,042
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.935.146.484,00	1.664.658.139,94	-270.488.344,06	86,022
5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.935.146.484,00	1.664.658.139,94	-270.488.344,06	86,022
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.024.629.770,00	1.741.780.402,00	-282.849.368,00	86,03
5.1.1.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.024.629.770,00	1.741.780.402,00	-282.849.368,00	86,03
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	76.214.680.956,00	63.552.657.854,06	-12.662.023.101,94	83,386
5.1.1.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	75.204.412.166,00	62.951.088.579,06	-12.253.323.586,94	83,707
5.1.1.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.010.268.790,00	601.569.275,00	-408.699.515,00	59,545
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	228.492.185.230,00	211.155.495.899,00	-17.336.689.331,00	92,413
5.1.1.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.720.943.248,00	4.360.432.629,00	-360.510.619,00	92,364
5.1.1.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100
5.1.1.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	245.750.000,00	182.562.500,00	-63.187.500,00	74,288
5.1.1.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	24.448.125,00	9.740.939,00	-14.707.186,00	39,843
5.1.1.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	151.837.500,00	151.837.500,00	0,00	100
5.1.1.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.663.747.500,00	1.663.747.500,00	0,00	100
5.1.1.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	28.551.250,00	6.950.625,00	-21.600.625,00	24,344
5.1.1.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	122.875.000,00	93.551.061,00	-29.323.939,00	76,135
5.1.1.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	242.250.000,00	10.558.631,00	-231.691.369,00	4,3586
5.1.1.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.209.333.873,00	1.209.333.873,00	0,00	100
5.1.1.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	999.150.000,00	999.150.000,00	0,00	100
5.1.1.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	540.425.462,00	444.317.211,00	-96.108.251,00	82,216
5.1.1.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	8.616.562,00	8.616.562,00	0,00	100
5.1.1.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	19.775.000,00	19.774.999,00	-1,00	100
5.1.1.03.02.0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat bagi ASN	253.093,00	253.093,00	0,00	100
5.1.1.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	41.841.931,00	31.381.448,00	-10.460.483,00	75
5.1.1.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	113.268.218,00	113.268.218,00	0,00	100
5.1.1.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	41.728.925,00	16.691.570,00	-25.037.355,00	40
5.1.1.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	556.762,00	0,00	-556.762,00	0
5.1.1.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1.968.750,00	1.968.750,00	0,00	100
5.1.1.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100
5.1.1.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	39.375.000,00	39.375.000,00	0,00	100
5.1.1.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	41.682.771,00	27.586.234,00	-14.096.537,00	66,181
5.1.1.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	91.569.282,00	68.676.961,00	-22.892.321,00	75
5.1.1.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	2.099.343,00	1.574.508,00	-524.835,00	75
5.1.1.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	437.500,00	210.000,00	-227.500,00	48
5.1.1.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.749.825,00	1.312.368,00	-437.457,00	75
5.1.1.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	25.182.500,00	25.182.500,00	0,00	100
5.1.1.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.882.500,00	4.882.500,00	0,00	100
5.1.1.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	87.500.000,00	65.625.000,00	-21.875.000,00	75
5.1.1.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	15.312.500,00	15.312.500,00	0,00	100
5.1.1.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	218.661.109.930,00	202.575.243.160,00	-16.085.866.770,00	92,643
5.1.1.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	218.661.109.930,00	202.575.243.160,00	-16.085.866.770,00	92,643
5.1.1.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	77.686.000,00	0,00	-77.686.000,00	0
5.1.1.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	77.686.000,00	0,00	-77.686.000,00	0
5.1.1.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.335.200.000,00	1.152.470.000,00	-182.730.000,00	86,314
5.1.1.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.335.200.000,00	1.152.470.000,00	-182.730.000,00	86,314
5.1.1.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	90.028.590,00	79.262.899,00	-10.765.691,00	88,042
5.1.1.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	90.028.590,00	79.262.899,00	-10.765.691,00	88,042
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	2.006.392.000,00	1.732.120.000,00	-274.272.000,00	86,33
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.641.420.000,00	1.499.720.000,00	-141.700.000,00	91,367
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	364.972.000,00	232.400.000,00	-132.572.000,00	63,676
5.1.1.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.060.400.000,00	811.650.000,00	-248.750.000,00	76,542
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.060.400.000,00	811.650.000,00	-248.750.000,00	76,542
5.1.1.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.518.759.000,00	27.767.340.110,00	-1.751.418.890,00	94,067
5.1.1.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	0,00	100
5.1.1.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	0,00	100
5.1.1.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.409.000,00	131.544.000,00	-23.865.000,00	84,644
5.1.1.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.409.000,00	131.544.000,00	-23.865.000,00	84,644
5.1.1.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	240.000.000,00	147.229.860,00	-92.770.140,00	61,346
5.1.1.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	240.000.000,00	147.229.860,00	-92.770.140,00	61,346
5.1.1.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	0,00	100
5.1.1.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	0,00	100
5.1.1.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	0,00	100
5.1.1.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	0,00	100
5.1.1.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	154.202.000,00	148.352.400,00	-5.849.600,00	96,207

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	154.202.000,00	148.352.400,00	-5.849.600,00	96,207
5.1.1.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	65.772.000,00	0,00	-65.772.000,00	0
5.1.1.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	65.772.000,00	0,00	-65.772.000,00	0
5.1.1.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00	100
5.1.1.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00	100
5.1.1.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.190.300.000,00	-14.700.000,00	99,333
5.1.1.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.190.300.000,00	-14.700.000,00	99,333
5.1.1.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	39.000.000,00	67.642,00	-38.932.358,00	0,1734
5.1.1.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	39.000.000,00	67.642,00	-38.932.358,00	0,1734
5.1.1.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.883.351.000,00	7.111.137.208,00	-772.213.792,00	90,204
5.1.1.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	624.400.000,00	98.104.440,00	-526.295.560,00	15,712
5.1.1.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	8.000.000,00	2.292.192,00	-5.707.808,00	28,652
5.1.1.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.000.000,00	6.876.576,00	-3.123.424,00	68,766
5.1.1.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.240.951.000,00	7.003.864.000,00	-237.087.000,00	96,726
5.1.1.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.084.800.000,00	6.393.264.000,00	-691.536.000,00	90,239
5.1.1.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.084.800.000,00	6.393.264.000,00	-691.536.000,00	90,239
5.1.1.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	45.780.000,00	0,00	-45.780.000,00	0
5.1.1.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	45.780.000,00	0,00	-45.780.000,00	0
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.252.979.638,00	1.001.606.100,00	-251.373.538,00	79,938
5.1.1.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	85.237.000,00	51.000.000,00	-34.237.000,00	59,833
5.1.1.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	85.237.000,00	51.000.000,00	-34.237.000,00	59,833
5.1.1.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.248.000,00	3.024.000,00	-8.224.000,00	26,885
5.1.1.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.248.000,00	3.024.000,00	-8.224.000,00	26,885
5.1.1.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	124.980.000,00	91.800.000,00	-33.180.000,00	73,452
5.1.1.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	124.980.000,00	91.800.000,00	-33.180.000,00	73,452
5.1.1.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.881.000,00	4.490.040,00	-4.390.960,00	50,558
5.1.1.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.881.000,00	4.490.040,00	-4.390.960,00	50,558
5.1.1.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.807.000,00	988.113,00	-5.818.887,00	14,516
5.1.1.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.807.000,00	988.113,00	-5.818.887,00	14,516
5.1.1.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.111.000,00	1.160,00	-1.109.840,00	0,1044
5.1.1.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.111.000,00	1.160,00	-1.109.840,00	0,1044
5.1.1.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	29.289.000,00	4.939.200,00	-24.349.800,00	16,864
5.1.1.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	29.289.000,00	4.939.200,00	-24.349.800,00	16,864
5.1.1.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	205.000,00	103.680,00	-101.320,00	50,576
5.1.1.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	205.000,00	103.680,00	-101.320,00	50,576
5.1.1.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	818.000,00	311.040,00	-506.960,00	38,024
5.1.1.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	818.000,00	311.040,00	-506.960,00	38,024
5.1.1.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	907.200.000,00	781.474.981,00	-125.725.019,00	86,141
5.1.1.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	6.300.000,00	5.638.812,00	-661.188,00	89,505
5.1.1.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	47.250.000,00	31.305.074,00	-15.944.926,00	66,254
5.1.1.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	4.725.000,00	1.704.042,00	-3.020.958,00	36,064
5.1.1.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	29.137.500,00	27.360.557,00	-1.776.943,00	93,902
5.1.1.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	318.937.500,00	302.573.091,00	-16.364.409,00	94,869
5.1.1.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	5.512.500,00	1.299.375,00	-4.213.125,00	23,571
5.1.1.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	23.625.000,00	17.098.886,00	-6.526.114,00	72,376
5.1.1.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.250.000,00	1.973.869,00	-45.276.131,00	4,1775
5.1.1.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	232.312.500,00	215.909.199,00	-16.403.301,00	92,939
5.1.1.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	192.150.000,00	176.612.076,00	-15.537.924,00	91,914
5.1.1.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	77.203.638,00	63.473.886,00	-13.729.752,00	82,216
5.1.1.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	1.230.938,00	1.230.938,00	0,00	100
5.1.1.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	100
5.1.1.05.11.0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	36.157,00	36.156,00	-1,00	99,997
5.1.1.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.977.419,00	4.483.064,00	-1.494.355,00	75
5.1.1.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	16.181.174,00	16.181.172,00	-2,00	100
5.1.1.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	5.961.275,00	2.384.511,00	-3.576.764,00	40
5.1.1.05.11.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	79.538,00	0,00	-79.538,00	0
5.1.1.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	281.250,00	281.250,00	0,00	100
5.1.1.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang	375.000,00	375.000,00	0,00	100
5.1.1.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	100
5.1.1.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	3.954.679,00	3.940.887,00	-2.013.792,00	66,181
5.1.1.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	13.081.326,00	9.810.995,00	-3.270.331,00	75
5.1.1.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	299.907,00	224.930,00	-74.977,00	75
5.1.1.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	62.500,00	30.000,00	-32.500,00	48
5.1.1.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	249.975,00	187.483,00	-62.492,00	75,001
5.1.1.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.597.500,00	3.597.500,00	0,00	100
5.1.1.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	697.500,00	697.500,00	0,00	100
5.1.1.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	12.500.000,00	9.375.000,00	-3.125.000,00	75
5.1.1.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.05.11.0030	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pem	2.187.500,00	2.187.500,00	0,00	100
5.1.1.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.120.000,00	0,00	100

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	100
5.1.1.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	100
5.1.1.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100
5.1.1.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100
5.1.1.99	Belanja Pegawai BLUD	34.218.424.007,00	30.896.034.153,00	-3.322.389.854,00	90,291
5.1.1.99.99	Belanja Pegawai BLUD	34.218.424.007,00	30.896.034.153,00	-3.322.389.854,00	90,291
5.1.1.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	34.218.424.007,00	30.896.034.153,00	-3.322.389.854,00	90,291
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	721.795.055.287,28	570.241.936.649,00	-151.553.118.638,28	79,003
5.1.2.01	Belanja Barang	132.467.728.218,00	93.612.159.189,00	-38.855.569.029,00	70,668
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	132.321.601.778,00	93.486.850.964,00	-38.834.750.814,00	70,651
5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	979.354.488,00	824.889.326,00	-154.465.162,00	84,228
5.1.2.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.204.577.620,00	1.077.985.934,00	-126.591.686,00	89,491
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.251.432.508,00	822.370.009,00	-429.062.499,00	65,714
5.1.2.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	177.464.632,00	110.498.800,00	-66.965.832,00	62,265
5.1.2.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	219.581.250,00	203.053.870,00	-16.527.380,00	92,473
5.1.2.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	31.919.500,00	26.051.500,00	-5.868.000,00	81,616
5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	59.728.000,00	43.925.000,00	-15.803.000,00	73,542
5.1.2.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	88.100.000,00	82.580.000,00	-5.520.000,00	93,734
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	53.735.470,00	48.034.840,00	-5.700.630,00	89,391
5.1.2.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	422.334.864,00	415.472.070,00	-6.862.794,00	98,375
5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	790.000,00	790.000,00	0,00	100
5.1.2.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	28.958.000,00	28.093.000,00	-865.000,00	97,013
5.1.2.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.065.000,00	1.125.000,00	-1.940.000,00	36,705
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	18.015.207.434,50	15.673.278.987,00	-2.341.928.447,50	87
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	805.380.602,00	732.826.000,00	-72.554.602,00	90,991
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	362.517.936,00	249.892.570,00	-112.625.366,00	68,932
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	4.776.116.692,00	3.249.028.591,00	-1.527.088.101,00	68,027
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.454.808.375,00	1.069.561.275,00	-385.247.100,00	73,519
5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	8.463.171.630,00	4.337.153.394,00	-4.126.018.236,00	51,247
5.1.2.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100
5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	778.547.000,00	563.635.000,00	-214.912.000,00	72,396
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	651.679.060,00	596.941.500,00	-54.737.560,00	91,601
5.1.2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	40.046.912.616,50	23.927.023.049,00	-16.119.889.567,50	59,747
5.1.2.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	48.422.000,00	150.000,00	-48.272.000,00	0,3098
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.513.161.635,00	10.697.482.057,00	-815.679.578,00	92,915
5.1.2.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.124.000.000,00	1.385.655.000,00	-738.345.000,00	65,238
5.1.2.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Beriaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Beriaga-jaga	1.045.008.000,00	1.044.027.200,00	-980.800,00	99,906
5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.235.242.943,00	1.875.098.000,00	-1.360.144.943,00	57,958
5.1.2.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	93.249.000,00	90.432.000,00	-2.817.000,00	96,979
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.200.067.208,00	19.513.986.722,00	-7.686.080.486,00	71,742
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.139.996.000,00	2.638.788.000,00	-501.208.000,00	84,038
5.1.2.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	0
5.1.2.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.143.350.750,00	1.395.094.800,00	-1.748.255.950,00	44,382
5.1.2.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	103.670.000,00	47.732.500,00	-55.937.500,00	46,043
5.1.2.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100
5.1.2.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	75.000.000,00	60.000.000,00	-15.000.000,00	80
5.1.2.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	109.000.000,00	93.345.000,00	-15.655.000,00	85,638
5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	164.763.456,00	126.870.500,00	-37.892.956,00	77,002
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	145.680.000,00	141.158.600,00	-4.521.400,00	96,896
5.1.2.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	62.500.000,00	55.447.500,00	-7.052.500,00	88,716
5.1.2.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	25.700.000,00	25.695.000,00	-5.000,00	99,981
5.1.2.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100
5.1.2.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	100
5.1.2.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100
5.1.2.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	0
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	147.774.108,00	142.044.370,00	-5.729.738,00	96,123
5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100
5.1.2.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	20.654.000,00	20.654.000,00	0,00	100
5.1.2.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	146.126.440,00	125.308.225,00	-20.818.215,00	85,753
5.1.2.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	68.154.000,00	67.515.725,00	-638.275,00	99,063
5.1.2.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	22.199.700,00	22.155.000,00	-44.700,00	99,799
5.1.2.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	55.772.740,00	35.637.500,00	-20.135.240,00	63,898
5.1.2.02	Belanja Jasa	262.068.912.974,00	216.534.522.180,00	-45.534.390.794,00	82,625
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	200.576.915.813,00	161.234.627.516,00	-39.342.288.297,00	80,385
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.591.363.000,00	6.420.535.000,00	-5.170.828.000,00	55,391
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.758.390.000,00	8.696.922.500,00	-1.061.467.500,00	89,123
5.1.2.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	374.400.000,00	249.500.000,00	-124.900.000,00	66,64
5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	824.120.152,00	761.720.152,00	-62.400.000,00	92,428
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	30.000.000,00	13.600.000,00	-16.400.000,00	45,333
5.1.2.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
5.1.2.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	421.700.000,00	257.600.000,00	-164.100.000,00	61,086
5.1.2.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	974.400.000,00	740.400.000,00	-234.000.000,00	75,985
5.1.2.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	31.963.840.000,00	31.636.620.000,00	-327.220.000,00	98,976
5.1.2.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	57.895.003.436,00	36.959.783.973,00	-20.935.219.463,00	63,839
5.1.2.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	7.036.000,00	4.265.000,00	-2.771.000,00	60,617
5.1.2.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	452.508.480,00	452.508.480,00	0,00	100
5.1.2.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	581.817.044,00	581.813.760,00	-3.284,00	99,999
5.1.2.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	192.690.000,00	177.210.000,00	-15.480.000,00	91,966
5.1.2.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	35.050.000,00	30.500.000,00	-4.550.000,00	87,019
5.1.2.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.888.537.548,00	27.892.109.525,00	-3.996.428.023,00	87,468
5.1.2.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.800.000,00	0,00	-7.800.000,00	0
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.000.367.480,00	806.597.360,00	-193.770.120,00	80,63
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.739.955.808,00	2.623.313.012,00	-116.642.796,00	95,743
5.1.2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.702.556.852,00	2.525.181.010,00	-177.375.842,00	93,437
5.1.2.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	228.372.592,00	223.203.920,00	-5.168.672,00	97,737
5.1.2.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	221.561.730,00	196.268.360,00	-25.293.370,00	88,584
5.1.2.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	189.400.000,00	175.900.000,00	-13.500.000,00	92,872
5.1.2.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	39.500.000,00	39.483.000,00	-17.000,00	99,957
5.1.2.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	672.800.000,00	672.330.226,00	-469.774,00	99,93
5.1.2.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.000.000,00	4.988.500,00	-11.500,00	99,77
5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.380.200.000,00	2.219.046.000,00	-161.154.000,00	93,229
5.1.2.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	65.000.000,00	60.000.000,00	-5.000.000,00	92,308
5.1.2.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	28.780.000,00	27.742.660,00	-1.037.340,00	96,396
5.1.2.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	96.237.650,00	66.362.000,00	-29.875.650,00	68,956
5.1.2.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	21.400.000,00	3.900.000,00	-17.500.000,00	18,224
5.1.2.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.476.012.000,00	267.294.844,00	-1.208.717.156,00	18,109
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.764.700.000,00	1.644.754.880,00	-119.945.120,00	93,203
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	550.269.000,00	351.693.811,00	-198.575.189,00	63,913
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.488.336.000,00	962.455.250,00	-525.880.750,00	64,667
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	27.116.276.787,00	24.191.034.160,00	-2.925.242.627,00	89,212
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	318.380.100,00	251.569.275,00	-66.810.825,00	79,015
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.647.306.900,00	5.368.488.966,00	-278.817.934,00	95,063
5.1.2.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	177.799.198,00	50.829.700,00	-126.969.498,00	28,588
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.176.247.856,00	566.585.697,00	-609.662.159,00	48,169
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	3.240.650.200,00	2.874.299.500,00	-366.350.700,00	88,695
5.1.2.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	150.000.000,00	118.611.995,00	-31.388.005,00	79,075
5.1.2.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	45.150.000,00	31.605.000,00	-13.545.000,00	70
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.459.056.324,00	34.187.970.728,00	-1.271.085.596,00	96,415
5.1.2.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	15.220.295.100,00	15.220.295.100,00	0,00	100
5.1.2.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	15.608.929.900,00	15.169.546.800,00	-439.383.100,00	97,185
5.1.2.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	2.752.142.400,00	2.752.142.400,00	0,00	100
5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.260.983.923,00	488.635.923,00	-772.348.000,00	38,75
5.1.2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	100.291.068,00	76.542.312,00	-23.748.756,00	76,32
5.1.2.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	121.763.933,00	91.921.266,00	-29.842.667,00	75,491
5.1.2.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	394.650.000,00	388.886.927,00	-5.763.073,00	98,54
5.1.2.02.03	Belanja Sewa Tanah	1.398.195.000,00	607.350.000,00	-790.845.000,00	43,438
5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.328.195.000,00	547.350.000,00	-780.845.000,00	41,21
5.1.2.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	70.000.000,00	60.000.000,00	-10.000.000,00	85,714
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.124.374.165,00	1.135.813.000,00	-988.561.165,00	53,466
5.1.2.02.04.0002	Belanja Sewa Grader	19.565.700,00	3.000.000,00	-16.565.700,00	15,333
5.1.2.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	23.250.000,00	15.750.000,00	-7.500.000,00	67,742
5.1.2.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	0
5.1.2.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.000.000,00	3.500.000,00	-4.500.000,00	43,75
5.1.2.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	248.955.965,00	114.912.000,00	-134.043.965,00	46,158
5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0
5.1.2.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0
5.1.2.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100
5.1.2.02.04.0044	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100
5.1.2.02.04.0104	Belanja Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	0
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	19.400.000,00	13.200.000,00	-6.200.000,00	68,041
5.1.2.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	562.657.500,00	248.521.000,00	-314.136.500,00	44,169
5.1.2.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	10.180.000,00	6.820.000,00	-3.360.000,00	66,994
5.1.2.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	0
5.1.2.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.003.645.000,00	596.680.000,00	-406.965.000,00	59,451
5.1.2.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	600.000,00	250.000,00	-350.000,00	41,667
5.1.2.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.750.000,00	2.500.000,00	-1.250.000,00	66,667
5.1.2.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100
5.1.2.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0
5.1.2.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	167.390.000,00	97.200.000,00	-70.190.000,00	58,068

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	836.461.410,00	481.519.000,00	-354.942.410,00	57,566
5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	6.000.000,00	2.900.000,00	-3.100.000,00	48,333
5.1.2.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	3.450.000,00	3.400.000,00	-50.000,00	98,551
5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	819.511.410,00	474.469.000,00	-345.042.410,00	57,897
5.1.2.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.500.000,00	750.000,00	-6.750.000,00	10
5.1.2.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	85.245.400,00	75.423.000,00	-9.822.400,00	88,478
5.1.2.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100
5.1.2.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100
5.1.2.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	73.995.400,00	64.173.000,00	-9.822.400,00	86,726
5.1.2.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.203.802.000,00	4.907.872.100,00	-295.929.900,00	94,313
5.1.2.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	90.000.000,00	50.554.500,00	-39.445.500,00	56,172
5.1.2.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.066.549.000,00	1.014.688.500,00	-51.860.500,00	95,138
5.1.2.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	225.000.000,00	170.359.600,00	-54.640.400,00	75,715
5.1.2.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	408.043.000,00	393.378.500,00	-14.664.500,00	96,406
5.1.2.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	0
5.1.2.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	200.000.000,00	196.151.000,00	-3.849.000,00	98,076
5.1.2.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	256.600.000,00	229.377.400,00	-27.222.600,00	89,391
5.1.2.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	750.000.000,00	749.689.600,00	-310.400,00	99,959
5.1.2.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	60.000.000,00	58.795.000,00	-1.205.000,00	97,992
5.1.2.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	0,00	0
5.1.2.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	649.000.000,00	612.841.000,00	-36.159.000,00	94,429
5.1.2.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	158.410.000,00	153.098.000,00	-5.312.000,00	96,647
5.1.2.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	340.200.000,00	322.412.000,00	-17.788.000,00	94,771
5.1.2.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	1.000.000.000,00	956.527.000,00	-43.473.000,00	95,653
5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	11.666.661.110,00	9.978.301.460,00	-1.688.359.650,00	85,528
5.1.2.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	200.000.000,00	182.506.500,00	-17.493.500,00	91,253
5.1.2.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	3.407.500.000,00	3.257.123.000,00	-150.377.000,00	95,587
5.1.2.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	578.041.810,00	414.850.000,00	-163.191.810,00	71,768
5.1.2.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	3.386.879.300,00	2.848.966.440,00	-537.912.860,00	84,118
5.1.2.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	50.000.000,00	48.000.000,00	-2.000.000,00	96
5.1.2.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	850.000.000,00	697.103.000,00	-152.897.000,00	82,012
5.1.2.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	634.500.000,00	520.818.000,00	-113.682.000,00	82,083
5.1.2.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.559.740.000,00	2.008.934.520,00	-550.805.480,00	78,482
5.1.2.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	120.000.000,00	101.970.000,00	-18.030.000,00	84,975
5.1.2.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	120.000.000,00	101.970.000,00	-18.030.000,00	84,975
5.1.2.02.10.0019	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.461.040.000,00	3.704.492.000,00	-756.548.000,00	83,041
5.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.461.040.000,00	3.704.492.000,00	-756.548.000,00	83,041
5.1.2.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	135.126.752,00	119.183.376,00	-15.943.376,00	88,201
5.1.2.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	700.000,00	700.000,00	0,00	100
5.1.2.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100
5.1.2.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	826.875,00	369.060,00	-457.815,00	44,633
5.1.2.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	100
5.1.2.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	42.315.000,00	42.315.000,00	0,00	100
5.1.2.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	936.250,00	0,00	-936.250,00	0
5.1.2.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.500.000,00	1.230.189,00	-2.269.811,00	35,148
5.1.2.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.500.000,00	0,00	-10.500.000,00	0
5.1.2.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	36.623.627,00	34.844.127,00	-1.779.500,00	95,141
5.1.2.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	100
5.1.2.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.035.000,00	0,00	-2.035.000,00	0
5.1.2.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	35.000,00	0,00	-35.000,00	0
5.1.2.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	46.230.117.684,00	41.671.532.543,00	-4.558.585.141,00	90,139
5.1.2.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	153.800.000,00	144.300.000,00	-9.500.000,00	93,823
5.1.2.03.01.0014	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian	153.800.000,00	144.300.000,00	-9.500.000,00	93,823
5.1.2.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0
5.1.2.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	0,00	0,00	0,00	0
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.020.472.519,00	9.762.503.443,00	-2.257.969.076,00	81,216
5.1.2.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	390.000.000,00	389.895.285,00	-104.715,00	99,973
5.1.2.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100
5.1.2.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	2.965.000,00	350.000,00	-2.615.000,00	11,804
5.1.2.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Unit Pemeliharaan Lapangan	2.500.000,00	2.000.000,00	-500.000,00	80
5.1.2.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor	7.000.000,00	3.850.000,00	-3.150.000,00	55
5.1.2.03.02.0033	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Intelijen	18.000.000,00	14.000.000,00	-4.000.000,00	77,778
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	251.400.000,00	243.268.898,00	-8.131.102,00	96,766
5.1.2.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.675.283.675,00	6.381.803.109,00	-1.293.480.566,00	83,147
5.1.2.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.343.762.500,00	682.651.299,00	-661.111.201,00	50,801
5.1.2.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	17.440.000,00	10.509.000,00	-6.931.000,00	60,258
5.1.2.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	39.000.000,00	0,00	-39.000.000,00	0
5.1.2.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	500.000,00	500.000,00	0,00	100

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
5.1.2.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	23.500.000,00	17.000.000,00	-6.500.000,00	72,34
5.1.2.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penjual Kendaraan Bermotor	91.380.000,00	90.580.000,00	-800.000,00	99,125
5.1.2.03.02.0097	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set	149.150.000,00	133.035.500,00	-16.114.500,00	89,196
5.1.2.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.300.000,00	400.000,00	-900.000,00	30,769
5.1.2.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	0
5.1.2.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	17.000.000,00	15.872.000,00	-1.128.000,00	93,365
5.1.2.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	1.350.000,00	850.000,00	-500.000,00	62,963
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	37.530.015,00	35.280.000,00	-2.250.015,00	94,005
5.1.2.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	104.798.000,00	92.917.700,00	-11.880.300,00	88,664
5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	13.574.985,00	10.418.452,00	-3.156.533,00	76,747
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	478.287.744,00	428.090.900,00	-50.196.844,00	89,505
5.1.2.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.880.000,00	9.910.000,00	-2.970.000,00	76,941
5.1.2.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0
5.1.2.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	49.700.000,00	48.325.000,00	-1.375.000,00	97,233
5.1.2.03.02.0146	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	24.150.000,00	24.000.000,00	-150.000,00	99,379
5.1.2.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	29.420.000,00	24.710.000,00	-4.710.000,00	83,99
5.1.2.03.02.0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	6.435.000,00	5.860.000,00	-575.000,00	91,064
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	547.084.500,00	486.107.700,00	-60.976.800,00	88,854
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	416.909.300,00	354.242.100,00	-62.667.200,00	84,969
5.1.2.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	216.041.800,00	205.610.500,00	-10.431.300,00	95,172
5.1.2.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas-Darat-Rambu Tidak Bersuar	39.750.000,00	39.461.000,00	-289.000,00	99,273
5.1.2.03.02.0505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	4.380.000,00	3.005.000,00	-1.375.000,00	68,607
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.286.187.624,00	15.126.562.900,00	-1.159.624.724,00	92,88
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.571.533.154,00	8.895.243.500,00	-676.289.654,00	92,934
5.1.2.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	50.000.000,00	49.520.000,00	-480.000,00	99,04
5.1.2.03.03.0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	50.000.000,00	49.400.000,00	-600.000,00	98,8
5.1.2.03.03.0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	133.500.000,00	131.290.500,00	-2.209.500,00	98,345
5.1.2.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	100.000.000,00	98.652.000,00	-1.348.000,00	98,652
5.1.2.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.000.053.000,00	1.992.980.000,00	-7.073.000,00	99,646
5.1.2.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0
5.1.2.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.237.956.000,00	1.796.283.000,00	-441.673.000,00	80,264
5.1.2.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	194.291.000,00	190.596.000,00	-3.695.000,00	98,098
5.1.2.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.080.000.000,00	1.074.566.000,00	-5.434.000,00	99,497
5.1.2.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	0
5.1.2.03.03.0026	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	14.749.540,00	14.483.000,00	-266.540,00	98,193
5.1.2.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	50.000.000,00	49.018.000,00	-982.000,00	98,036
5.1.2.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	365.693.000,00	355.198.400,00	-10.494.600,00	97,13
5.1.2.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	153.811.930,00	149.602.500,00	-4.209.430,00	97,263
5.1.2.03.03.0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun	200.000.000,00	198.255.000,00	-1.745.000,00	99,128
5.1.2.03.03.0052	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	45.000.000,00	44.750.000,00	-250.000,00	99,444
5.1.2.03.03.0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	39.600.000,00	36.725.000,00	-2.875.000,00	92,74
5.1.2.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.768.657.541,00	16.637.166.200,00	-1.131.491.341,00	93,632
5.1.2.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	16.690.000.000,00	15.577.109.200,00	-1.112.890.800,00	93,332
5.1.2.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa	409.202.541,00	406.315.000,00	-2.887.541,00	99,294
5.1.2.03.04.0015	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	273.435.000,00	268.364.000,00	-5.071.000,00	98,145
5.1.2.03.04.0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	101.000.000,00	100.364.000,00	-636.000,00	99,37
5.1.2.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	295.020.000,00	285.014.000,00	-10.006.000,00	96,608
5.1.2.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100
5.1.2.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	53.258.131.176,00	24.844.364.144,00	-28.413.767.032,00	46,649
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.258.131.176,00	24.844.364.144,00	-28.413.767.032,00	46,649
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.754.510.847,00	13.896.920.062,00	-9.857.590.785,00	58,502
5.1.2.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	688.600.000,00	92.107.920,00	-596.492.080,00	13,376
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.475.205.739,00	8.972.375.412,00	-14.502.830.327,00	38,221
5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.204.086.590,00	1.406.887.450,00	-2.797.199.140,00	33,465
5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.135.728.000,00	476.073.300,00	-659.654.700,00	41,918
5.1.2.04.02	Belanja Perjalanan Dinas BiasaLuar Negeri	0,00	0,00	0,00	0
5.1.2.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas BiasaLuar Negeri	0,00	0,00	0,00	0
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.515.526.153,00	10.762.046.400,00	-753.479.753,00	93,457
5.1.2.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.067.530.153,00	10.364.855.000,00	-702.675.153,00	93,651
5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	727.230.000,00	580.105.000,00	-147.125.000,00	79,769
5.1.2.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	701.300.153,00	205.800.000,00	-495.500.153,00	29,345
5.1.2.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	9.639.000.000,00	9.578.950.000,00	-60.050.000,00	99,377
5.1.2.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	447.996.000,00	397.191.400,00	-50.804.600,00	88,66
5.1.2.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	436.746.000,00	397.191.400,00	-39.554.600,00	90,943
5.1.2.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	11.250.000,00	0,00	-11.250.000,00	0
5.1.2.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	95.182.780.133,00	89.102.900.285,00	-6.079.879.848,00	93,612
5.1.2.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	95.182.780.133,00	89.102.900.285,00	-6.079.879.848,00	93,612
5.1.2.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	95.182.780.133,00	89.102.900.285,00	-6.079.879.848,00	93,612
5.1.2.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	121.071.858.949,28	93.714.411.908,00	-27.357.447.041,28	77,404

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
5.1.2.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	121.071.858.949,28	93.714.411.908,00	-27.357.447.041,28	77,404
5.1.2.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	121.071.858.949,28	93.714.411.908,00	-27.357.447.041,28	77,404
5.1.4	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	1.940.554.067,00	-1.059.445.933,00	64,685
5.1.4.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	3.000.000.000,00	1.940.554.067,00	-1.059.445.933,00	64,685
5.1.4.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	3.000.000.000,00	1.940.554.067,00	-1.059.445.933,00	64,685
5.1.4.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	3.000.000.000,00	1.940.554.067,00	-1.059.445.933,00	64,685
5.1.5	Belanja Hibah	32.611.021.500,00	28.410.769.759,00	-4.200.251.741,00	87,12
5.1.5.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	940.500.000,00	705.312.625,00	-235.187.375,00	74,993
5.1.5.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	940.500.000,00	705.312.625,00	-235.187.375,00	74,993
5.1.5.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	940.500.000,00	705.312.625,00	-235.187.375,00	74,993
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.574.002.000,00	26.608.937.634,00	-3.965.064.366,00	87,031
5.1.5.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.939.002.000,00	24.974.076.634,00	-3.964.925.366,00	86,299
5.1.5.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.041.600.000,00	24.148.876.000,00	-3.892.724.000,00	86,118
5.1.5.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	897.402.000,00	825.200.634,00	-72.201.366,00	91,954
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.635.000.000,00	1.634.861.000,00	-139.000,00	99,991
5.1.5.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.635.000.000,00	1.634.861.000,00	-139.000,00	99,991
5.1.5.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	0,00	100
5.1.5.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	0,00	100
5.1.5.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	0,00	100
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.952.650.848,00	5.540.865.000,00	-2.411.785.848,00	69,673
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7.612.650.848,00	5.248.700.000,00	-2.363.950.848,00	68,947
5.1.6.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	7.612.650.848,00	5.248.700.000,00	-2.363.950.848,00	68,947
5.1.6.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	7.612.650.848,00	5.248.700.000,00	-2.363.950.848,00	68,947
5.1.6.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0
5.1.6.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0
5.1.6.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	340.000.000,00	292.165.000,00	-47.835.000,00	85,931
5.1.6.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	340.000.000,00	292.165.000,00	-47.835.000,00	85,931
5.1.6.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	340.000.000,00	292.165.000,00	-47.835.000,00	85,931
5.2	BELANJA MODAL	238.674.307.650,00	189.606.772.936,00	-49.067.534.714,00	79,442
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.843.880.861,00	68.901.715.247,00	-18.942.165.614,00	78,437
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Besar	596.750.000,00	579.505.000,00	-17.245.000,00	97,11
5.2.2.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	100
5.2.2.01.01.0005	Belanja Modal Hauler	0,00	0,00	0,00	0
5.2.2.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	0,00	0,00	0,00	0
5.2.2.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	100
5.2.2.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	126.750.000,00	109.505.000,00	-17.245.000,00	86,394
5.2.2.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	104.250.000,00	87.230.000,00	-17.020.000,00	83,674
5.2.2.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	22.500.000,00	22.275.000,00	-225.000,00	99
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.150.834.868,00	3.835.916.303,00	-1.314.918.565,00	74,472
5.2.2.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.941.770.868,00	3.639.304.303,00	-1.302.466.565,00	73,644
5.2.2.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	0
5.2.2.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	310.732.000,00	232.990.000,00	-77.742.000,00	74,981
5.2.2.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.306.484.450,00	1.087.088.450,00	-219.396.000,00	83,207
5.2.2.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	389.386.418,00	271.305.853,00	-118.080.565,00	69,675
5.2.2.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	443.000.000,00	320.700.000,00	-122.300.000,00	72,393
5.2.2.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.492.168.000,00	1.727.220.000,00	-764.948.000,00	69,306
5.2.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	209.064.000,00	196.612.000,00	-12.452.000,00	94,044
5.2.2.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	209.064.000,00	196.612.000,00	-12.452.000,00	94,044
5.2.2.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	331.314.040,00	305.341.000,00	-25.973.040,00	92,161
5.2.2.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	268.560.000,00	258.919.000,00	-9.641.000,00	96,41
5.2.2.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	79.702.000,00	78.950.000,00	-752.000,00	99,056
5.2.2.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	5.330.000,00	5.000.000,00	-330.000,00	93,809
5.2.2.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	150.528.000,00	145.665.000,00	-4.863.000,00	96,769
5.2.2.03.01.0009	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	33.000.000,00	29.304.000,00	-3.696.000,00	88,8
5.2.2.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	49.701.040,00	33.472.000,00	-16.229.040,00	67,347
5.2.2.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	4.198.000,00	4.050.000,00	-148.000,00	96,475
5.2.2.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	515.000,00	0,00	-515.000,00	0
5.2.2.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	136.000,00	0,00	-136.000,00	0
5.2.2.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	6.923.000,00	4.502.000,00	-2.421.000,00	65,03
5.2.2.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	3.080.000,00	0,00	-3.080.000,00	0
5.2.2.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	25.955.040,00	24.920.000,00	-1.035.040,00	96,012
5.2.2.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	8.894.000,00	0,00	-8.894.000,00	0
5.2.2.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	13.053.000,00	12.950.000,00	-103.000,00	99,211
5.2.2.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100
5.2.2.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	10.803.000,00	10.750.000,00	-53.000,00	99,509
5.2.2.03.03.0016	Belanja Modal Specific Set	50.000,00	0,00	-50.000,00	0
5.2.2.04	Belanja Modal Alat Pertanian	178.370.996,00	165.159.000,00	-13.211.996,00	92,593
5.2.2.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	178.370.996,00	165.159.000,00	-13.211.996,00	92,593
5.2.2.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.930.448,00	3.720.000,00	-210.448,00	94,646
5.2.2.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	24.980.548,00	15.019.000,00	-9.961.548,00	60,123

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.04.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0
5.2.2.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	60.000,00	60.000,00	0,00	100
5.2.2.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	7.800.000,00	7.500.000,00	-300.000,00	96,154
5.2.2.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	141.600.000,00	138.860.000,00	-2.740.000,00	98,065
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.865.353.146,00	9.119.709.863,00	-2.745.643.283,00	76,86
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.907.912.810,00	3.150.761.560,00	-757.151.250,00	80,625
5.2.2.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.500.000,00	3.400.000,00	-100.000,00	97,143
5.2.2.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	46.450.000,00	39.750.000,00	-6.700.000,00	85,576
5.2.2.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.844.711.000,00	1.184.101.000,00	-660.610.000,00	64,189
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.013.251.810,00	1.923.510.560,00	-89.741.250,00	95,542
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.651.315.336,00	5.822.805.603,00	-1.828.509.733,00	76,102
5.2.2.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.105.157.001,00	2.774.483.800,00	-1.330.673.201,00	67,585
5.2.2.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	8.248.500,00	8.010.000,00	-238.500,00	97,109
5.2.2.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	162.737.000,00	155.825.000,00	-6.912.000,00	95,753
5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.414.550.000,00	1.217.231.800,00	-197.318.200,00	86,051
5.2.2.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	22.400.000,00	19.820.000,00	-2.580.000,00	88,482
5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.913.954.835,00	1.641.763.003,00	-272.191.832,00	85,779
5.2.2.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	24.268.000,00	5.672.000,00	-18.596.000,00	23,372
5.2.2.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	306.125.000,00	146.142.700,00	-159.982.300,00	47,74
5.2.2.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	0
5.2.2.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	298.125.000,00	146.142.700,00	-151.982.300,00	49,021
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.089.660.400,00	1.489.950.300,00	-599.710.100,00	71,301
5.2.2.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.205.452.400,00	1.075.496.300,00	-129.956.100,00	89,219
5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	393.757.300,00	368.027.900,00	-25.729.400,00	93,466
5.2.2.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	751.047.150,00	657.921.800,00	-93.125.350,00	87,601
5.2.2.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	60.001.300,00	49.000.000,00	-11.001.300,00	81,665
5.2.2.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	646.650,00	546.600,00	-100.050,00	84,528
5.2.2.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	248.958.000,00	236.054.000,00	-12.904.000,00	94,817
5.2.2.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	163.958.000,00	151.684.000,00	-12.274.000,00	92,514
5.2.2.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	85.000.000,00	84.370.000,00	-630.000,00	99,259
5.2.2.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	635.250.000,00	178.400.000,00	-456.850.000,00	28,083
5.2.2.06.03.0023	Belanja Modal Program Input Equipment	21.000.000,00	20.900.000,00	-100.000,00	99,524
5.2.2.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	602.210.000,00	145.500.000,00	-456.710.000,00	24,161
5.2.2.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	12.040.000,00	12.000.000,00	-40.000,00	99,668
5.2.2.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.810.030.106,00	8.138.362.283,00	-5.671.667.823,00	58,931
5.2.2.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	13.792.089.462,00	8.131.512.283,00	-5.660.577.179,00	58,958
5.2.2.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.544.234.965,00	3.078.961.631,00	-3.465.273.334,00	47,048
5.2.2.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	148.500,00	0,00	-148.500,00	0
5.2.2.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	136.041.250,00	114.992.000,00	-21.049.250,00	84,527
5.2.2.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.053.803.321,00	1.770.377.559,00	-283.425.762,00	86,2
5.2.2.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.433.878.461,00	735.423.000,00	-698.455.461,00	51,289
5.2.2.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	121.350.000,00	48.472.000,00	-72.878.000,00	39,944
5.2.2.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	0
5.2.2.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	420.292.100,00	334.673.335,00	-85.618.765,00	79,629
5.2.2.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	570.331.320,00	500.361.744,00	-69.969.576,00	87,732
5.2.2.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	36.800.000,00	26.570.000,00	-10.230.000,00	72,201
5.2.2.07.01.0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	930.000.000,00	604.700.000,00	-325.300.000,00	65,022
5.2.2.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	10.017.840,00	4.130.000,00	-5.887.840,00	41,226
5.2.2.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.488.000,00	599.500,00	-888.500,00	40,289
5.2.2.07.01.0019	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	321.915.075,00	145.355.514,00	-176.559.561,00	45,153
5.2.2.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	73.560.000,00	61.997.000,00	-11.563.000,00	84,281
5.2.2.07.01.0026	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung	142.428.630,00	66.099.000,00	-76.329.630,00	46,409
5.2.2.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	993.000.000,00	638.800.000,00	-354.200.000,00	64,33
5.2.2.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	17.940.644,00	6.850.000,00	-11.090.644,00	38,181
5.2.2.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	17.940.644,00	6.850.000,00	-11.090.644,00	38,181
5.2.2.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.215.775.000,00	3.851.056.320,00	-364.718.680,00	91,349
5.2.2.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.026.777.630,00	3.699.356.456,00	-327.421.174,00	91,869
5.2.2.08.01.0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0
5.2.2.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	124.488.000,00	123.000.000,00	-1.488.000,00	98,805
5.2.2.08.01.0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	18.000.000,00	16.026.000,00	-1.974.000,00	89,033
5.2.2.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	264.773.000,00	235.793.016,00	-28.979.984,00	89,055
5.2.2.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	2.644.500.000,00	2.624.521.500,00	-19.978.500,00	99,245
5.2.2.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	0
5.2.2.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	30.000.000,00	18.645.000,00	-11.355.000,00	62,15
5.2.2.08.01.0018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	57.340.000,00	8.800.000,00	-48.540.000,00	15,347
5.2.2.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	5.400.000,00	0,00	-5.400.000,00	0
5.2.2.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	51.485.000,00	48.335.000,00	-3.150.000,00	93,882
5.2.2.08.01.0044	Belanja Modal Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa	500.000.000,00	382.800.000,00	-117.200.000,00	76,56
5.2.2.08.01.0045	Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi	179.775.000,00	159.070.000,00	-20.705.000,00	88,483
5.2.2.08.01.0049	Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika	27.980.000,00	7.446.304,00	-20.533.696,00	26,613

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.08.01.0053	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	50.400.000,00	36.950.000,00	-13.450.000,00	73,313
5.2.2.08.01.0054	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100
5.2.2.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	37.636.630,00	32.969.636,00	-4.666.994,00	87,6
5.2.2.08.02	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	30.642.370,00	30.080.864,00	-561.506,00	98,168
5.2.2.08.02.0001	Belanja Modal Analytical Instrument	30.642.370,00	30.080.864,00	-561.506,00	98,168
5.2.2.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	114.825.000,00	104.719.000,00	-10.106.000,00	91,199
5.2.2.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100
5.2.2.08.03.0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	100
5.2.2.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	100.000.000,00	89.894.000,00	-10.106.000,00	89,894
5.2.2.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	26.590.000,00	0,00	-26.590.000,00	0
5.2.2.08.04.0006	Belanja Modal Measuring/Testing Device	26.590.000,00	0,00	-26.590.000,00	0
5.2.2.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	16.940.000,00	16.900.000,00	-40.000,00	99,764
5.2.2.08.07.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	16.940.000,00	16.900.000,00	-40.000,00	99,764
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	16.310.770.058,00	15.493.901.445,00	-816.868.613,00	94,992
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	13.472.015.158,00	12.855.825.120,00	-616.190.038,00	95,426
5.2.2.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	153.650.000,00	150.095.000,00	-3.555.000,00	97,686
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	13.318.365.158,00	12.705.730.120,00	-612.635.038,00	95,4
5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	0
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.838.754.900,00	2.638.076.325,00	-200.678.575,00	92,931
5.2.2.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	45.000.000,00	20.000.000,00	-25.000.000,00	44,444
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.243.560.100,00	2.111.883.475,00	-131.676.625,00	94,131
5.2.2.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	541.794.800,00	498.967.850,00	-42.826.950,00	92,095
5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.400.000,00	7.225.000,00	-1.175.000,00	86,012
5.2.2.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0
5.2.2.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	0
5.2.2.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00	0
5.2.2.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	30.320.000,00	17.020.000,00	-13.300.000,00	56,135
5.2.2.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100
5.2.2.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100
5.2.2.15.03	Belanja Modal Alat SAR	28.070.000,00	14.770.000,00	-13.300.000,00	52,618
5.2.2.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	8.600.000,00	8.500.000,00	-100.000,00	98,837
5.2.2.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	19.470.000,00	6.270.000,00	-13.200.000,00	32,203
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.000.000,00	2.890.000,00	-110.000,00	96,333
5.2.2.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.000.000,00	2.890.000,00	-110.000,00	96,333
5.2.2.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	3.000.000,00	2.890.000,00	-110.000,00	96,333
5.2.2.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.402.607.724,00	16.054.898.754,00	-1.347.708.970,00	92,256
5.2.2.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.402.607.724,00	16.054.898.754,00	-1.347.708.970,00	92,256
5.2.2.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.402.607.724,00	16.054.898.754,00	-1.347.708.970,00	92,256
5.2.2.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	15.859.094.523,00	9.848.004.979,00	-6.011.089.544,00	62,097
5.2.2.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	15.859.094.523,00	9.848.004.979,00	-6.011.089.544,00	62,097
5.2.2.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	15.859.094.523,00	9.848.004.979,00	-6.011.089.544,00	62,097
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.655.759.427,00	66.197.965.314,00	-7.457.794.113,00	89,875
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	72.421.413.082,00	65.427.892.114,00	-6.993.520.968,00	90,343
5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	71.274.333.082,00	64.312.947.114,00	-6.961.385.968,00	90,233
5.2.3.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	31.310.862.000,00	25.765.810.750,00	-5.545.051.250,00	82,29
5.2.3.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	1.300.000.000,00	1.286.780.000,00	-13.220.000,00	98,983
5.2.3.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	820.283.582,00	792.319.564,00	-27.964.018,00	96,591
5.2.3.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	6.950.000.000,00	6.882.766.000,00	-67.234.000,00	99,033
5.2.3.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.706.199.000,00	8.561.016.000,00	-145.183.000,00	98,332
5.2.3.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.495.333.700,00	5.305.961.200,00	-189.372.500,00	96,554
5.2.3.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.394.704.000,00	5.059.377.000,00	-335.327.000,00	93,784
5.2.3.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	20.000.000,00	19.568.000,00	-432.000,00	97,84
5.2.3.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	0
5.2.3.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.811.820.000,00	6.396.708.500,00	-415.111.500,00	93,906
5.2.3.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	15.000.000,00	14.000.000,00	-1.000.000,00	93,333
5.2.3.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	702.440.000,00	674.712.000,00	-27.728.000,00	96,053
5.2.3.01.01.0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	0,00	0,00	0,00	0
5.2.3.01.01.0036	Belanja Modal Taman	3.522.690.800,00	3.357.328.100,00	-165.362.700,00	95,306
5.2.3.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	225.000.000,00	196.600.000,00	-28.400.000,00	87,378
5.2.3.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.147.080.000,00	1.114.945.000,00	-32.135.000,00	97,199
5.2.3.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	1.147.080.000,00	1.114.945.000,00	-32.135.000,00	97,199
5.2.3.02	Belanja Modal Monumen	200.000.000,00	186.500.000,00	-13.500.000,00	93,25
5.2.3.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	200.000.000,00	186.500.000,00	-13.500.000,00	93,25
5.2.3.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	200.000.000,00	186.500.000,00	-13.500.000,00	93,25
5.2.3.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	151.146.345,00	148.935.700,00	-2.210.645,00	98,537
5.2.3.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	151.146.345,00	148.935.700,00	-2.210.645,00	98,537
5.2.3.04.01.0004	Belanja Modal Pagur	151.146.345,00	148.935.700,00	-2.210.645,00	98,537
5.2.3.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	883.200.000,00	434.637.500,00	-448.562.500,00	49,212
5.2.3.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	883.200.000,00	434.637.500,00	-448.562.500,00	49,212
5.2.3.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	883.200.000,00	434.637.500,00	-448.562.500,00	49,212

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.877.758.078,00	48.969.127.000,00	-21.908.631.078,00	69,09
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	56.325.301.598,00	35.793.047.100,00	-20.532.254.498,00	63,547
5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	56.325.301.598,00	35.793.047.100,00	-20.532.254.498,00	63,547
5.2.4.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	55.094.271.000,00	34.663.819.100,00	-20.430.451.900,00	62,917
5.2.4.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	1.228.030.598,00	1.129.228.000,00	-98.802.598,00	91,954
5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0
5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	11.233.981.000,00	10.013.726.100,00	-1.220.254.900,00	89,138
5.2.4.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	11.233.981.000,00	10.013.726.100,00	-1.220.254.900,00	89,138
5.2.4.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	1.000.000.000,00	931.143.000,00	-68.857.000,00	93,114
5.2.4.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	10.233.981.000,00	9.082.583.100,00	-1.151.397.900,00	88,749
5.2.4.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0
5.2.4.02.05.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	0,00	0
5.2.4.02.05.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	0,00	0
5.2.4.02.05.0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0
5.2.4.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0
5.2.4.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0
5.2.4.03	Belanja Modal Instalasi	204.750.000,00	199.100.000,00	-5.650.000,00	97,241
5.2.4.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	204.750.000,00	199.100.000,00	-5.650.000,00	97,241
5.2.4.03.03.0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	204.750.000,00	199.100.000,00	-5.650.000,00	97,241
5.2.4.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	0
5.2.4.03.09.0001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	0,00	0,00	0,00	0
5.2.4.04	Belanja Modal Jaringan	3.048.725.000,00	2.953.303.800,00	-95.421.200,00	96,87
5.2.4.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.048.725.000,00	2.953.303.800,00	-95.421.200,00	96,87
5.2.4.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	3.048.725.000,00	2.953.303.800,00	-95.421.200,00	96,87
5.2.4.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	65.000.480,00	9.950.000,00	-55.050.480,00	15,308
5.2.4.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	65.000.480,00	9.950.000,00	-55.050.480,00	15,308
5.2.4.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	65.000.480,00	9.950.000,00	-55.050.480,00	15,308
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.296.909.284,00	5.537.965.375,00	-758.943.909,00	87,947
5.2.5.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	191.870.000,00	157.607.275,00	-34.262.725,00	82,143
5.2.5.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	191.870.000,00	157.607.275,00	-34.262.725,00	82,143
5.2.5.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	10.500.000,00	8.845.100,00	-1.654.900,00	84,239
5.2.5.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	27.370.000,00	2.335.925,00	-25.034.075,00	8,5346
5.2.5.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan	154.000.000,00	146.426.250,00	-7.573.750,00	95,082
5.2.5.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	36.000.000,00	34.600.000,00	-1.400.000,00	96,111
5.2.5.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	0
5.2.5.02.01.0002	Belanja Modal Lukisan	0,00	0,00	0,00	0
5.2.5.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	36.000.000,00	34.600.000,00	-1.400.000,00	96,111
5.2.5.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	34.200.000,00	32.900.000,00	-1.300.000,00	96,199
5.2.5.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	1.800.000,00	1.700.000,00	-100.000,00	94,444
5.2.5.04	Belanja Modal Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0
5.2.5.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	0,00	0,00	0,00	0
5.2.5.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	0,00	0,00	0,00	0
5.2.5.05	Belanja Modal Tanaman	19.043.000,00	10.500.000,00	-8.543.000,00	55,138
5.2.5.05.01	Belanja Modal Tanaman	19.043.000,00	10.500.000,00	-8.543.000,00	55,138
5.2.5.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	19.043.000,00	10.500.000,00	-8.543.000,00	55,138
5.2.5.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	190.000.000,00	184.098.000,00	-5.902.000,00	96,894
5.2.5.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	190.000.000,00	184.098.000,00	-5.902.000,00	96,894
5.2.5.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	190.000.000,00	184.098.000,00	-5.902.000,00	96,894
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	182.000.000,00	128.350.000,00	-53.650.000,00	70,522
5.2.5.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	182.000.000,00	128.350.000,00	-53.650.000,00	70,522
5.2.5.08.01.0001	Belanja Modal Goodwill	0,00	31.460.000,00	31.460.000,00	0
5.2.5.08.01.0004	Belanja Modal Hak Paten	0,00	0,00	0,00	0
5.2.5.08.01.0005	Belanja Modal Software	182.000.000,00	96.890.000,00	-85.110.000,00	53,236
5.2.5.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.220.496.284,00	4.781.849.300,00	-438.646.984,00	91,598
5.2.5.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.220.496.284,00	4.781.849.300,00	-438.646.984,00	91,598
5.2.5.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.220.496.284,00	4.781.849.300,00	-438.646.984,00	91,598
5.2.5.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	457.500.000,00	240.960.800,00	-216.539.200,00	52,669
5.2.5.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	457.500.000,00	240.960.800,00	-216.539.200,00	52,669
5.2.5.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	457.500.000,00	240.960.800,00	-216.539.200,00	52,669
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0
5.2.6.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0
5.2.6.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0
5.2.6.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	-53.938.954.270,00	25,661
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	-53.938.954.270,00	25,661
5.3.1.01	Belanja Tidak Terduga	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	-53.938.954.270,00	25,661
5.3.1.01.01	Belanja Tidak Terduga	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	-53.938.954.270,00	25,661
5.3.1.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	-53.938.954.270,00	25,661
5.4	BELANJA TRANSFER	675.562.515.700,00	672.768.458.757,00	-2.794.056.943,00	99,586
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	19.055.869.600,00	16.428.812.657,00	-2.627.056.943,00	86,214

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
5.4.1.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	16.833.654.367,00	14.417.776.871,00	-2.415.877.496,00	85,649
5.4.1.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	16.833.654.367,00	14.417.776.871,00	-2.415.877.496,00	85,649
5.4.1.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	16.833.654.367,00	14.417.776.871,00	-2.415.877.496,00	85,649
5.4.1.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.222.215.233,00	2.011.035.786,00	-211.179.447,00	90,497
5.4.1.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.222.215.233,00	2.011.035.786,00	-211.179.447,00	90,497
5.4.1.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.222.215.233,00	2.011.035.786,00	-211.179.447,00	90,497
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	656.506.646.100,00	656.339.646.100,00	-167.000.000,00	99,975
5.4.2.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	656.506.646.100,00	656.339.646.100,00	-167.000.000,00	99,975
5.4.2.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	514.402.196.100,00	514.402.196.100,00	0,00	100
5.4.2.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	514.402.196.100,00	514.402.196.100,00	0,00	100
5.4.2.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	142.104.450.000,00	141.937.450.000,00	-167.000.000,00	99,882
5.4.2.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	142.104.450.000,00	141.937.450.000,00	-167.000.000,00	99,882
	SURPLUS / DEFISIT	-417.159.044.325,28	76.630.895.831,00	493.789.940.156,28	-18,37
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	440.659.044.325,28	440.589.680.010,28	-69.364.315,00	99,984
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	440.659.044.325,28	440.589.680.010,28	-69.364.315,00	99,984
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	68.602.633.667,00	0,00	-68.602.633.667,00	0
6.1.1.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	68.602.633.667,00	0,00	-68.602.633.667,00	0
6.1.1.02.01.0094	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa	68.602.633.667,00	0,00	-68.602.633.667,00	0
6.1.1.05	Penghematan Belanja	317.938.704.151,00	440.659.044.325,28	122.720.340.174,28	138,6
6.1.1.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	146.238.149.671,00	440.659.044.325,28	294.420.894.654,28	301,33
6.1.1.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	113.630.523.235,56	0,00	-113.630.523.235,56	0
6.1.1.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang	32.607.626.435,44	0,00	-32.607.626.435,44	0
6.1.1.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	0,00	440.659.044.325,28	440.659.044.325,28	0
6.1.1.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	38.999.396.403,00	0,00	-38.999.396.403,00	0
6.1.1.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	38.999.396.403,00	0,00	-38.999.396.403,00	0
6.1.1.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	130.176.150.389,00	0,00	-130.176.150.389,00	0
6.1.1.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	130.176.150.389,00	0,00	-130.176.150.389,00	0
6.1.1.05.04	Sisa Belanja Transfer	2.525.007.688,00	0,00	-2.525.007.688,00	0
6.1.1.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0
6.1.1.05.04.0007	Sisa Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	2.525.007.688,00	0,00	-2.525.007.688,00	0
6.1.1.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	6.578.995.781,00	0,00	-6.578.995.781,00	0
6.1.1.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	6.578.995.781,00	0,00	-6.578.995.781,00	0
6.1.1.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	6.578.995.781,00	0,00	-6.578.995.781,00	0
6.1.1.08	Sisa Belanja Lainnya	47.538.710.726,28	0,00	-47.538.710.726,28	0
6.1.1.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	47.538.710.726,28	0,00	-47.538.710.726,28	0
6.1.1.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	47.538.710.726,28	0,00	-47.538.710.726,28	0
6.1.1.99	Koreksi SILPA	0,00	-69.364.315,00	-69.364.315,00	0
6.1.1.99.01	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	-69.364.315,00	-69.364.315,00	0
6.1.1.99.01.0001	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	-69.364.315,00	-69.364.315,00	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	0,00	100
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100
6.2.1.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	100
6.2.2.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	100
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	100
6.2.2.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	100
	PEMBIAYAAN NETTO	417.159.044.325,28	417.089.680.010,28	-69.364.315,00	99,983
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	493.720.575.841,28	493.720.575.841,28	0

BUPATI KLATEN,

cap ttd

SRI MULYANI